laporan keberlanjutan 2023

syariah btpn



LOYAL MEMBERDAYAKAN

Mendukung Keberlanjutan

tepat



Komitmen BTPN Syariah senantiasa loyal memberdayakan mendukung keberlanjutan merupakan cerminan niat baik Bank memberi dampak positif di bidang ekonomi, lingkungan, dan sosial secara harmonis dan berkesinambungan.

Dari aspek ekonomi, Bank melanjutkan pembangunan ekosistem digital syariah yang ditopang empat akses meliputi akses keuangan, pengetahuan, suplai barang, dan pasar. Bank memanfaatkan teknologi digital guna melayani masyarakat inklusi lebih baik, memberikan literasi digital sesuai kebutuhan, kapasitas, serta kultur mereka, sehingga dapat diterima dengan baik oleh nasabah. Dalam situasi penuh tantangan sepanjang tahun 2023, kinerja keuangan Bank tetap terjaga dan menjadi fondasi bagi kinerja tahun selanjutnya.

Pada aspek sosial, Bank memberikan layanan perbankan inklusif dan memberdayakan 100% nasabah perempuan prasejahtera produktif melalui akses pembiayaan yang disertai pendampingan sejak awal pembiayaan dan terus berkembang secara intensif sejalan dengan perkembangan nasabah, mendukung nasabah mewujudkan mimpi untuk hidup yang lebih berarti. Mereka dilayani oleh #bankirpemberdaya, 95% diantaranya adalah perempuan,



LOYAL
MEMBERDAYAKAN
Mendukung Keberlanjutan

dan 50% diantaranya merupakan lulusan SMA terlatih dan mendapatkan kesempatan yang setara.

Sementara pada aspek lingkungan, Bank telah mengadopsi sejumlah teknologi ramah lingkungan guna berkontribusi dalam upaya pengurangan emisi gas rumah kaca. Selain itu, akses pembiayaan Bank kepada segmen ultra mikro juga merupakan komitmen Bank memastikan tidak ada pembiayan untuk proyek yang bersifat ekstraktif dan berdampak negatif bagi lingkungan.

Dengan tata kelola yang baik, model bisnis kami yang menghimpun dana dari nasabah pendanaan untuk disalurkan sepenuhnya bagi pemberdayaan masyarakat inklusi *Insya Allah* menjadi wujud istiqamah bagi Bank dengan memberi dampak positif bagi jutaan masyarakat Indonesia. Bersama para pemangku kepentingan lainnya, kami akan senantiasa loyal memberdayakan mendukung keberlanjutan.



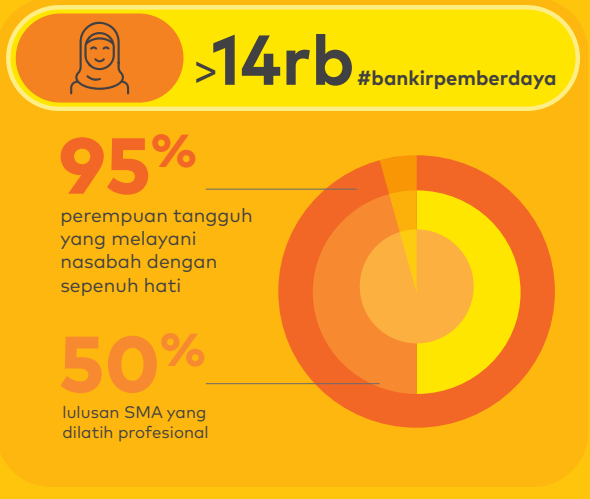
loyal memberdayakan mendukung keberlanjutan dari sisi sosial

Ikhtiar kami untuk loyal memberdayakan masyarakat inklusi telah memberi dampak berkelanjutan pada nasabah serta para **#bankirpemberdaya**. Melalui program Bestee (Berdaya Bersama Sahabat Tepat Indonesia) yang penuh semangat pemberdayaan, kami melibatkan ribuan mahasiswa yang antusias untuk terlibat langsung, mendampingi para pelaku usaha ultra mikro.

Memiliki dampak sosial yang dapat mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan



*Data Hasil Penelitian Lembaga Demografi Universitas Indonesia (LDUI) 2022-2023





SOSIAL

bestee

program pemberdayaan yang dilakukan oleh mahasiswa untuk mendampingi nasabah BTPN Syariah secara *one-on-one* dan terukur dampaknya. Program ini memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk terlibat langsung memberikan nilai tambah kepada nasabah segmen ultra mikro.

1.821 Fasiliator

257 Universitas

49 rb Nasabah

program apresiasi nasabah

umroh gratis 1 pesawat

320 Nasabah

program bersemi

700 rb Nasabah

pendampingan modul daya

>5 jt Nasabah



loyal memberdayakan untuk keberlanjutan dari sisi ekonomi

Komitmen loyal memberdayakan masyarakat inklusi segmen ultra mikro secara berkelanjutan, memberikan akses pembiayaan, menciptakan kesempatan tumbuh dan hidup yang lebih berarti, mewujudkan impian mereka.

total aset:

Rp **21,4 t**

laba bersih:

Rp **1,1 t**

Memiliki dampak sosial yang dapat mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan



*data hasil penelitian LDUI 2022 - 2023



EKONOMI

pembiayaan masyarakat inklusi:

Rp 11,4 t

nasabah aktif:

4,2 jt

komunitas masyarakat inklusi:

>257 rb komunitas

area:

2.600 kecamatan



loyal memberdayakan untuk keberlanjutan dari sisi lingkungan

Semangat loyal memberdayakan untuk keberlanjutan dengan menjaga lingkungan hidup, memperhatikan dampak perubahan iklim, serta mendukung pembangunan berkelanjutan.

Memiliki dampak sosial yang dapat mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan



*data hasil penelitian LDUI 2022 - 2023

persentase kepemilikan rumah layak huni untuk nasabah BTPN Syariah lebih tinggi*

0,6%

dibandingkan dengan rata-rata nasional

nasabah BTPN Syariah memiliki akses terhadap air minum yang layak lebih tinggi*

1,7%

dibandingkan dengan Non Nasabah



LINGKUNGAN

emisi CO2 dari kertas yang dipergunakan sebesar:

1.286 (kg CO2-eq)

emisi CO2 yang terbentuk pada tahun 2023 atas pemakaian BBM dan perjalanan dinas sebesar:

170.591 (kg CO2-eq)

BTPN Syariah memiliki estimasi stok karbon sebanyak

2.690 t/ha

dihasilkan dari *multi year project* reforestasi di Kalimantan.



loyal memberdayakan untuk keberlanjutan dari sisi Tata Kelola

Loyal memberdayakan untuk keberlanjutan membutuhkan dukungan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik sebagai dasar pengelolaan perusahaan yang terhormat sesuai dengan perundang-undangan dan etika usaha yang berlaku.

Memiliki dampak sosial yang dapat mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

rating:

AAA (idn)

dengan prospek stabil mendapatkan afirmasi dari PT Fitch Rating Indonesia pada 2023.

capacity building:

>10 rb karyawan

mendapatkan pelatihan terkait Keuangan Berkelanjutan.



TATA KELOLA

awards:

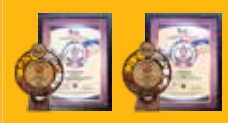
Sustainability Index

- Sustainable Responsible Investment (SRI - KEHATI)
- ESG Quality 45 IDX KEHATI
- ESQ Sector Leaders IDK KEHATI



The 14th Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD) Corporate Governance Conference and Award

- Top 50 Issuers with the Biggest Market Capitalization (Big Cap)
- Best Financial Sector



Nusantara CSR Awards 2023

- Category/TPB #3 Healthy and prosperous life for the inclusive family healthy life and welfare program
- Category/TPB #5 Gender equality for the Program to Achieve Gender Equality Through Women's Empowerment in Remote Areas of the Country



Bank Indonesia (BI) Award 2023 - BI

- Best Supporting Bank for Inclusive Financing
- Best BI FMI System (BI-RTGS and BI-SSSS) participant



Sustainability Report Competition oleh LACP Vision Award 2023

- Gold Award
- Top 80 Reports Asia-Pacific Region
- Top 20 Indonesian Report
- Technical Achievement Award



Ikhtisar Kinerja
KEBERLANJUTAN

Ekonomi [OJK B.1]

Rp 11,4 t
pembiayaan

99,6%
pembiayaan kegiatan usaha berkelanjutan

Rp 12,1 t
dana pihak ketiga

Rp 5,3 t
pendapatan

Rp 1,1 t
laba bersih

Rp 21,4 t
total aset

51,6%
CAR (*capital adequacy ratio*)

2,9%
NPF (*non-performing financing*)

13,2%
ROE (*return on equity*)

Lingkungan [OJK B.2]

169,95 kWh/m2
intensitas energi listrik (kategori cukup efisien)

6,3 ton
sampah telah berhasil dipilah



Sosial [OJK B.3]

75%
karyawan setara *business manager* ke atas adalah perempuan

22%
anggota Komisaris dan Direksi adalah perempuan

> 10 rb
nasabah sukses dan nasabah inspiratif yang telah didampingi

> 5 jt
nasabah mendapatkan pelatihan kesehatan, lingkungan, sosial dan kewirausahaan

30 rb
dari Mitra Tepat mendapatkan program pemberdayaan

> 49 rb
nasabah mendapatkan program pendampingan kewirausahaan

> 10 rb
pegawai mendapat *capacity building* keuangan berkelanjutan

1.500
duafa menerima program berbagi dari BTPN Syariah di 2023

> 400%
peningkatan jumlah kecamatan yang didampingi dalam program Bestee secara nasional

> 350%
peningkatan jumlah nasabah yang mengunduh aplikasi Bestee

> 9 rb
jumlah *followers* di instagram Kita Bestee

Daftar ISI



ikhtisar kinerja keberlanjutan

kinerja ekonomi 12
kinerja lingkungan 12
kinerja sosial 13

laporan manajemen

laporan komisaris utama 19
laporan direktur utama 23
sambutan dewan pengawas syariah 29
surat pernyataan dewan komisaris dan direksi tentang tanggung jawab atas laporan keberlanjutan 2023 PT Bank BTPN Syariah Tbk 32

kerangka strategi keberlanjutan

tujuan dan strategi keuangan berkelanjutan 36
loyal memberdayakan dalam ekosistem berkelanjutan 37
inisiatif program keuangan berkelanjutan tahun 2023 38



sekilas BTPN Syariah

sekilas BTPN Syariah 43
misi, visi, dan nilai-nilai perusahaan 46
jejak langkah 48
profil perusahaan 50
produk dan layanan 54
wilayah operasional 56
skala usaha 56
rantai pasok dan mitra kerja 57
perubahan perusahaan yang signifikan 57
inisiatif eksternal dan keanggotaan asosiasi 58



loyal memberdayakan bagi sesama

komitmen aspek sosial 63
Program Daya 63
Program Bestee 69
Bestee *platform* 71
Kampus Merdeka Fair 77
testimoni masyarakat 79

loyal memberdayakan untuk negeri

tinjuan kondisi global dan domestik 87
kinerja BTPN Syariah 88
portofolio pembiayaan berwawasan sosial dan lingkungan 90
distribusi perolehan nilai ekonomi 92



loyal memberdayakan masyarakat inklusi

komitmen dan kebijakan produk dan layanan 97
melangkah tepat, memberdayakan umat 99
digitalisasi layanan bagi masyarakat inklusi 100
perlindungan nasabah dan penanganan keluhan nasabah 101
hadirnya nasabah inspiratif 103
hasil penelitian 104



loyal memberdayakan dalam berkarya

membangun budaya keberlanjutan #bankirpemberdaya 108
mengelola hubungan industrial 108
lingkungan kerja yang layak dan aman 109
pengembangan kompetensi karyawan 113
pelatihan untuk masa persiapan pensiun 115
pencapaian 2023 dan rencana 2024 118



loyal berkelanjutan untuk lingkungan

komitmen terhadap dampak perubahan iklim 124
energi 124
air dan material ramah lingkungan 125
limbah 126
pendampingan dan pemantauan kegiatan restorasi hutan 128
green building 128



menerapkan tata kelola yang baik untuk pemberdayaan yang berkelanjutan

komitmen atas prinsip-prinsip dasar dan pedoman tata kelola di BTPN Syariah 133
sebagai bank umum syariah 134
sebagai perusahaan publik 134
sinergi perbankan 136
kode etik dan integritas 137
hierarki ketentuan bank 138

tentang laporan keberlanjutan

ruang lingkup *(boundary)* dan periode pelaporan 178
standar pelaporan dan assurance 178
penetapan laporan dan topik materialitas 178
kontak 181
indeks POJK no.51/POJK.03/2017 182
indeks standar GRI 184
lembar umpan balik 190





02

Laporan

MANAJEMEN

Kemal Azis Stamboel

Komisaris Utama/Independen





Laporan KOMISARIS UTAMA

BTPN Syariah menunjukkan komitmen kuat untuk senantiasa mendampingi masyarakat inklusi tumbuh dan berkembang. Bersama para pemangku kepentingan lainnya, Bank terus loyal memberdayakan mendukung keberlanjutan, membawa dampak positif bagi berjuta rakyat Indonesia.

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Para Pemangku Kepentingan yang terhormat,

Pandemi Covid-19, ketegangan geopolitik yang berimbas pada ketersediaan energi dan ketahanan pangan, serta dampak nyata perubahan iklim yang sudah terasa, mendorong dunia bergerak mencari keseimbangan. Aspirasi atas keberlanjutan (*sustainability*) semakin menguat. Manusia mulai melihat kembali relasi dengan alam, memeriksa kembali hubungan antar manusia, demi cita-cita keseimbangan yang harmonis, sehingga bumi menjadi tempat yang nyaman bagi semua. Seluruh negara anggota PBB pun pernah berikrar, bersama-sama memenuhi 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang tercantum dalam Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030. Kemitraan global ini menandai pentingnya negara-negara bergerak bersama untuk mengakhiri kemiskinan, meningkatkan kesehatan dan pendidikan, mengurangi kesenjangan, memicu pertumbuhan ekonomi sambil mengatasi perubahan iklim, serta melestarikan lautan dan hutan.

Aspirasi menuju pembangunan berkelanjutan menghadirkan berbagai peluang. Banyak bisnis baru di bidang keberlanjutan bermunculan di banyak negara. Potensi sumber daya terbarukan mulai digarap lebih serius. Model bisnis yang bermisi sosial, seperti yang dijalankan oleh BTPN Syariah, sudah lebih mudah dijumpai saat ini meski tantangan melayani segmen ultra mikro luar biasa besar.

Sejak awal berdiri, Bank telah memilih untuk melayani masyarakat inklusi di kota-kota tier-3 dan tier-4 maupun wilayah pedesaan. Pilihan sadar ini terus dijalankan dengan komitmen tinggi dan kesungguhan hati. Bank telah berkomitmen membuka kesempatan bagi masyarakat inklusi mendapatkan akses pembiayaan serta akses pengetahuan melalui pendampingan yang intensif kepada perempuan pelaku ultra mikro. Selain itu Bank juga memberikan kesempatan pagi para perempuan muda lulusan SMA dan sederajat menjadi #bankirpemberdaya di lapangan sebagai *Community Officer* (CO). Melalui pilihan segmen dan keberpihakan itu, Bank berkomitmen turut membangun Negeri dalam koridor nilai-nilai syariah yang rahmatan lil alamin. Melalui produk, layanan, dan seluruh aktivitas para #bankirpemberdaya, Bank bersama-sama dengan para pemangku kepentingan lainnya berupaya mencapai 17 TPB, terutama tujuan mengatasi kemiskinan, meniadakan kelaparan, membangun kehidupan sehat dan sejahtera, pendidikan yang berkualitas, kesetaraan gender, serta kemitraan untuk mencapai tujuan bersama.

Kami memahami, model bisnis dengan misi sosial seperti yang dijalankan Bank tentu membutuhkan dukungan kinerja keuangan sehat dan kolaborasi banyak pihak. Keberlanjutan model bisnis ini juga sesungguhnya rentan terdampak oleh berbagai kondisi perekonomian yang serba tidak pasti, termasuk yang terjadi sepanjang tahun 2023.



Ketika status pandemi nasional resmi dicabut Pemerintah pada 21 Juni 2023, pemulihan ekonomi tak lantas berjalan merata sesuai harapan. Dewan Komisaris memberi perhatian secara khusus pada lambatnya pemulihan ekonomi khususnya pada segmen ultra mikro ditambah dengan berbagai ketidakpastian di sektor keuangan. Karena itu, seluruh masukan Dewan Komisaris selama tahun 2023 difokuskan pada semangat loyal memberdayakan untuk keberlanjutan, agar Bank tetap mendampingi masyarakat inklusi, semakin memberikan pelayanan yang terbaik bagi mereka serta berkomitmen menjaga kinerja keuangan yang sehat, dengan terus berupaya memberikan dampak positif yang semakin luas kepada masyarakat inklusi Indonesia. Dewan Komisaris tak lupa selalu mengingatkan setiap #bankirpemberdaya agar terus semangat melayani nasabah inklusi serta berkolaborasi dengan para pemangku kepentingan untuk bersama-sama mewujudkan niat baik lebih cepat.

pencapaian kinerja direksi 2023

Kemampuan Bank menjaga model bisnis berkelanjutan yang memperhatikan aspek ekonomi, sosial, lingkungan, dan tata kelola yang baik di tengah tantangan sepanjang tahun 2023 mencerminkan keberhasilan strategi keberlanjutan yang dimiliki BTPN Syariah. Nilai-nilai keberlanjutan yang terintegrasi ke dalam misi, visi dan nilai-nilai Bank, telah menjadi landasan kuat bagi seluruh #bankirpemberdaya mengimplementasikan aspek keberlanjutan dalam produk, layanan, dan kegiatan operasional harian.

Secara keseluruhan, Dewan Komisaris menilai Direksi dan Manajemen mampu melaksanakan berbagai program keuangan berkelanjutan sesuai Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (2020-2024) untuk Indikator tahun 2023 ini dengan baik dan memberikan dampak positif bagi kinerja keuangan yang terjaga serta bagi perekonomian nasabah inklusi, sosial, lingkungan, serta implementasi tata kelola yang baik.

Kami mengapresiasi upaya Direksi mengaktifkan kembali kebiasaan nasabah untuk hadir di pertemuan rutin sentra sebagai wadah utama dalam memberdayakan dan juga membangun rasa solidaritas antar nasabah. Melalui pertemuan rutin setiap dua minggu sekali tersebut, nasabah tidak hanya mendapatkan akses pembiayaan saja tetapi juga akses pendampingan yang diberikan melalui petugas Bank atau *Community Officer* (CO). Melalui pertemuan-pertemuan ini diharapkan dapat membangun empat perilaku unggul nasabah inklusi yakni Berani Berusaha, Disiplin, Kerja Keras, dan Saling Bantu (BDKS) sehingga membuat mereka mampu beradaptasi dengan tantangan dan meningkatkan kesejahteraan. Selain melalui para CO, literasi keuangan pun berjalan melalui para Mitra Tepat yang sekaligus menjadi perpanjangan tangan Bank dalam melayani transaksi keuangan. Para Mitra Tepat ini menjadi sosok yang membawa layanan perbankan, serta ini didukung oleh aplikasi Warung Tepat. Di mana melalui aplikasi tersebut, nasabah dapat melakukan pelayanan setor dan tarik tunai, membuka rekening hingga melayani transaksi, seperti membeli pulsa dan membayar tagihan, termasuk layanan *e-commerce* untuk barang-barang kebutuhan sehari-hari

Dari sisi kapasitas dan ketangguhan para CO, Bank memupuk pribadi unggul dimulai dari wisma-wisma sebagai tempat mereka tinggal dan belajar. Para perempuan lulusan SMA dan sederajat yang memilih langsung bekerja sebagai CO itu, melalui tugas dan tanggung jawab di lapangan, dapat bertumbuh menjadi pribadi-pribadi unggul sebagai #bankirpemberdaya yang turut berkontribusi dalam memberdayakan masyarakat inklusi di pelosok Indonesia saat ini. Untuk itu, kapasitas para CO sebagai ujung tombak Bank di lapangan diperkuat melalui sejumlah pelatihan, pendampingan, dan penghargaan. Langkah ini juga kami apresiasi sebagai upaya tepat Bank menjaga loyalitas karyawan.

Penghargaan juga kami berikan atas langkah pemberdayaan Bank yang semakin meluas melalui Bestee Tepat sehingga lebih banyak generasi muda yang bisa langsung terjun mendampingi nasabah inklusi. Keterlibatan langsung ini akan memberikan pengalaman, wawasan, semangat, bahkan ide-ide baru untuk percepatan pencapaian 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang diagendakan dunia.

Sebagai Dewan komisaris BTPN Syariah, kami sangat mengapresiasi atas pencapaian Direksi, Manajemen dan para #bankirpemberdaya yang mampu mempertahankan loyalitas terhadap pilihan segmen dan keberpihakan kepada masyarakat inklusi dan perempuan melalui kegigihan luar biasa selama tahun 2023. Kegigihan Bank dan dukungan para pemangku kepentingan itu juga memberi dampak bagi aspek sosial dan lingkungan.

Jumlah anak-anak nasabah yang bersekolah meningkat lebih banyak dibandingkan tahun sebelumnya. Begitu juga jumlah hunian nasabah yang layak dan sanitasi sehat yang meningkat. Kebutuhan gizi mereka juga relatif terpenuhi dengan baik. Bagi masyarakat luas, Bank menjalankan program bantuan untuk kaum Duafa yang menjangkau total 1.500 penerima manfaat.

Dari aspek ketenagakerjaan, kami menilai strategi Direksi mampu menjaga komitmen Bank yang menjunjung kesetaraan gender di tempat kerja, tercermin dari dominasi pekerja perempuan sebesar 95% dimana 75% jabatan *business manager* (BM) ke atas ditempati perempuan. Bank juga terus mengupayakan sejumlah fasilitas dan pendekatan yang lebih relevan dengan kebutuhan generasi Z guna memaksimalkan potensi terbaik mereka.

Kami pun mengapresiasi upaya Direksi meningkatkan kinerja lingkungan, melalui internalisasi budaya hemat energi dan ramah lingkungan yang sudah diterapkan di kantor utama dan kantor cabang, hingga wisma-wisma. Bank juga turut berkontribusi pada upaya mengurasi emisi karbon dari pembakaran kayu untuk memasak. Jumlah rumah yang beralih dari kayu bakar menjadi kompor meningkat 8%.

Atas semua capaian ini, kami menyampaikan apresiasi tinggi bagi Direksi yang telah menyelesaikan target dalam Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan 2023 dengan sangat baik sekaligus membangun kepercayaan seluruh pemangku kepentingan BTPN Syariah.

Kami juga mengapresiasi seluruh pemangku kepentingan yang terus loyal mendukung gerak langkah BTPN Syariah. Semoga kerjasama dan kinerja yang baik terus dapat dipertahankan hingga di tahun-tahun yang akan datang.

Kami percaya bahwa sebuah niat mulia untuk fokus loyal memberdayakan masyarakat inklusi akan selalu memberikan berkah dan berjalan dalam lindungan Tuhan YME.

Sekali lagi kami ucapkan Terima Kasih.

Wabillahitaufik Walhidayah Wassalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



Kemal Azis Stamboel
Komisaris Utama/Independen

Hadi Wibowo
Direktur Utama





Laporan DIREKTUR UTAMA

Loyalitas BTPN Syariah dalam memberdayakan masyarakat inklusi merupakan wujud kontribusi aktif untuk menjalankan bisnis yang berkelanjutan sejalan dengan pilar LST (Lingkungan, Sosial dan Tata Kelola)

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Para Pemangku Kepentingan yang terhormat,

Dalam perjalanan BTPN Syariah mengimplementasikan nilai-nilai keberlanjutan, prinsip "*Do Good Do Well*" selalu menjadi pijakan bagi setiap aktivitas usaha. Kami percaya, keberhasilan finansial harus sejalan dengan kontribusi sosial dan lingkungan yang berarti. Model bisnis BTPN Syariah yang fokus dalam mendampingi masyarakat inklusi ditujukan untuk memperbaiki kualitas hidup mereka, meningkatkan daya saing nasabah inklusi untuk mewujudkan hidup lebih berarti. Sehingga dengan sendirinya, nilai-nilai keberlanjutan yang relevan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) telah terintegrasi ke dalam model bisnis BTPN Syariah.

Konsistensi Bank dalam mendampingi masyarakat inklusi lebih dari satu dekade telah mendorong kinerja Bank yang tumbuh berkelanjutan, termasuk di tengah kondisi yang cukup menantang. Selama 2023, meski diwarnai dengan ketidakpastian perekonomian global yang berdampak pada upaya pemulihan pasca pandemi Covid-19. Di Indonesia, pemulihan ekonomi berjalan lambat di kota-kota tier-3 dan tier-4 serta wilayah pedesaan sehingga berdampak langsung bagi segmen pra sejahtera produktif yang menjadi nasabah Bank. Namun di sisi lain, tantangan-tantangan tersebut menebalkan keteguhan dan kesungguhan para #bankirpemberdaya melayani nasabah inklusi. Bermodalkan niat baik, Bank secara konsisten menyeimbangkan kinerja ekonomi, lingkungan, sosial, dan tata kelola, agar dampaknya langsung dirasakan seluruh pemangku kepentingan. Untuk itu, strategi keberlanjutan Bank difokuskan pada upaya memperkuat akses pendukung ekosistem berkelanjutan dan pemberdayaan sosial yang mengarah pada pencapaian TPB.

loyal memberdayakan mendukung keberlanjutan [OJK D.1.a, OJK D.1.c]

Sejak awak berdiri, BTPN Syariah telah mengambil komitmen untuk menjalani bisnis sesuai prinsip keberlanjutan. Ketulusan hati serta kegigihan seluruh #bankirpemberdaya untuk melayani dan mendampingi masyarakat inklusi bukan hanya membawa misi bisnis dan sosial, tapi lebih merupakan panggilan jiwa untuk menciptakan perubahan hidup yang lebih berarti bagi seluruh masyarakat inklusi. Karena itu, dalam kondisi penuh tantangan sekalipun, Bank akan selalu **loyal memberdayakan mendukung keberlanjutan,** tercermin dari kinerja ekonomi, sosial, lingkungan, dan tata kelola yang terjaga. Internalisasi budaya keberlanjutan dilakukan kepada seluruh #bankirpemberdaya melalui aktivitas usaha sehari-hari. Inisiatif dan program-program terkait nilai-nilai keberlanjutan ditujukan untuk mewujudkan niat baik sebagai bagian dari perubahan positif masyarakat inklusi di Indonesia, sekaligus memperkuat posisi kami sebagai bank yang memegang loyalitas dan dukungan jangka panjang bagi nasabah. [OJK C.1]



Program pemberdayaan Bank yang kami namai Daya telah berjalan secara terukur dan berkelanjutan. Melalui pendampingan dan program Daya, nasabah dapat mengakses pengetahuan untuk meningkatkan kapasitasnya, sehingga nasabah mampu menjalankan, mengembangkan usaha, dan menciptakan peluang baru, serta membangun kekuatan keluarga di bidang kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, dan bidang lain yang dibutuhkan. Setiap nasabah berhak atas pendampingan tersebut sejak awal hingga selesainya siklus pembiayaan, yang pada akhirnya mendorong kinerja Bank secara berkelanjutan. Melalui para *Community Officer* (CO), Bank melayani dan mendampingi nasabah inklusi sepenuh hati.

mengelola tantangan 2023

Kemajuan teknologi telah menjadi bagian dari upaya Bank meningkatkan produktivitas dan efisiensi untuk melayani nasabah lebih baik. Namun demikian, interaksi langsung antar manusia tetap menjadi bagian strategi penting Bank menjaga kinerja keberlanjutan, terutama sepanjang tahun 2023 yang penuh tantangan.

Melalui para CO yang hadir pada pertemuan-pertemuan rutin dua minggu sekali di sentra, Bank dapat mengetahui kebutuhan nasabah pembiayaan sehingga mampu merespons dengan produk dan layanan yang tepat. Cara ini merupakan salah satu pendekatan kami menerapkan prinsip keuangan berkelanjutan yang selaras dengan TPB. Kami memahami betul, implementasi keuangan berkelanjutan bukanlah tentang mematuhi regulasi, tetapi tentang menciptakan dampak yang berkelanjutan untuk generasi saat ini dan yang akan datang.

Dalam menegakkan prinsip-prinsip keuangan berkelanjutan, kami menerapkan pendekatan investasi yang bertanggung jawab, menetapkan strategi bisnis yang berkelanjutan, serta mengelola risiko sosial dan lingkungan dengan hati-hati. Selain itu, tata kelola perusahaan yang baik, transparan, dan bertanggung jawab menjadi inti dari operasi kami dalam mengelola tantangan bisnis. Kami juga memahami pentingnya inklusivitas dalam produk dan jasa kami. Untuk itu, kami telah mengembangkan produk dan jasa yang tidak hanya mudah diakses oleh nasabah pengguna dan terjaga keamanannya, tetapi juga memberikan penambahan pengetahuan produk dan pendampingan pemanfaatannya. Kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak juga menjadi salah satu prinsip utama dalam mencapai tujuan keberlanjutan dan mengelola dampak. Serangkaian inisiatif telah dijalankan, antara lain akses keuangan yang lebih luas, integrasi risiko sosial dan lingkungan dalam keputusan bisnis, peningkatan literasi keuangan di seluruh Indonesia, serta kegiatan sosial lingkungan lainnya yang tertuang dalam dokumen Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) dan dilaporkan hasilnya kepada para pemangku kepentingan. Pelaksanaan inisiatif dan pemantauan pencapaian target secara berkala dilaksanakan oleh Gugus Tugas Keberlanjutan yang melibatkan jajaran Direksi. Kami berupaya melakukan berbagai pengukuran dampak atas kegiatan bisnis berkelanjutan untuk melihat dampak yang dihasilkan serta mengetahui ruang perbaikan yang diperlukan.

kinerja keberlanjutan [OJK D.1.b]

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan ketimpangan ekonomi Indonesia per Maret 2023 tercatat sebagai rekor terburuk dalam lima tahun terakhir. Hal ini sejalan dengan data BPS mengenai pemulihan kelompok ekonomi menengah ke atas yang berjalan lebih cepat menuju kondisi sebelum pandemi, dibandingkan dengan kelompok ultra mikro. Kondisi yang berdampak langsung pada nasabah Bank itu otomatis berimbas pada kinerja keberlanjutan Bank. Meski begitu, Bank berkomitmen untuk tetap loyal memberdayakan nasabah inklusi dan menjaga kinerja sebagai Bank yang sehat.

Kesetiaan Bank terhadap segmen pra sejahtera produktif pada akhirnya membangun semangat nasabah pembiayaan, memperkuat kepercayaan nasabah pendanaan, serta menginspirasi langkah penuh semangat para #bankirpemberdaya. Secara umum, Bank berhasil mencatatkan kinerja keberlanjutan yang terjaga di tengah situasi penuh tantangan, baik dari aspek ekonomi, sosial, lingkungan, dan tata kelola.

kinerja aspek ekonomi

Pada aspek ekonomi, Bank berhasil menyalurkan pembiayaan kepada segmen pra inklusi keuangan produktif umumnya perempuan per posisi Desember 2023 sebesar Rp11,4 triliun dan mampu mencatatkan laba bersih setelah pajak sebesar Rp1,1 triliun. Bank juga berhasil mencatatkan kinerja yang sehat dengan rasio-rasio yang terjaga seperti Tingkat Pengembalian Aset (ROA) 6,3%; Tingkat Pengembalian Ekuitas (ROE) sebesar

13,2%; serta rasio kecukupan modal (CAR) pada 51,6%. Kinerja yang terjaga itu dicapai Bank melalui sejumlah strategi perbaikan kualitas pembiayaan dan pendampingan yang ditujukan untuk membangkitkan kembali karakter unggul Berani Berusaha, Disiplin, Kerja Keras dan Saling Bantu (BDKS).

Penyaluran pembiayaan yang disertai dengan prinsip kehatian-hatian, pendampingan, dan komunikasi yang intens dengan nasabah, berhasil menjaga rasio Pembiayaan Bermasalah (NPF) sebesar 2,94%, di bawah batas aman maksimum 5% yang ditetapkan OJK. Bagi nasabah pendanaan, fokus Bank menjaga kualitas pembiayaan merupakan salah satu upaya menjaga kestabilan imbal balik yang sejalan dengan manfaat kemanusiaan. Tingkat kepercayaan nasabah pendanaan pun meningkat, tercermin dari jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK) mencapai Rp12,1 triliun, naik dari tahun sebelumnya Rp12 triliun. Total aset Bank turut tumbuh menjadi Rp21,4 triliun atau meningkat sebesar 1,3% (yoy).

Capaian ini tidak hanya menunjukkan kinerja terjaga, namun juga wujud komitmen Bank menciptakan nilai ekonomi yang berdampak positif bagi pemangku kepentingan dan masyarakat secara luas.

kinerja aspek sosial

Dari sisi aspek sosial, Keyakinan Bank untuk *do good do well* (berkinerja baik sekaligus memiliki dampak sosial yang nyata) terus menunjukkan dampak positif bagi kehidupan masyarakat inklusi. Literasi keuangan mereka meningkat, disertai akses ke layanan perbankan yang semakin luas bagi kelompok pra dan cukup sejahtera. Berbagai program peningkatan kualitas hidup dan ekonomi jutaan nasabah pembiayaan yang aktif selama tahun 2023, secara langsung berkontribusi pada upaya negara memperkecil jarak kesenjangan sosial.

Salah satu program pemberdayaan yang berkembang cepat ialah program Bestee. Melalui program berbasis aplikasi digital ini, Bank mengajak siapapun untuk terlibat dalam pemberdayaan masyarakat inklusi dengan mudah. Hingga 31 Desember 2023, Bank telah bekerja sama dengan Kemendikbudristek, lembaga mentor dan 257 perguruan tinggi di Indonesia. Jumlah perguruan tinggi naik secara signifikan dari 42 perguruan tinggi di tahun sebelumnya, begitu juga dengan jumlah mahasiswa dan dosen yang terlibat sebagai fasilitator. Jumlah fasilitator meningkat dari 108 orang menjadi 1.821 orang pada tahun 2023, mendampingi 49.000 nasabah di 827 wilayah di 24 provinsi. Program reguler pelatihan bagi nasabah pembiayaan, program pelatihan Mitra Tepat dan program komunitas pelatihan tercapai di atas 100% dari target RAKB.

Terdapat berbagai program Insentif, pendampingan dan *reward* bagi nasabah pembiayaan sepanjang tahun 2023. Program insentif Bersemi (Berkah Silaturahmi) bagi 700 ribu nasabah dan NasabahKu SemangatKu (NSKu) telah menjangkau 447.350 nasabah. Program Tumbuh Bersama NasabahKu (TBNKu) telah berhasil mendampingi 2.658 nasabah. Bahkan di tahun ini, Bank memberikan program apresiasi kepada 320 nasabah terpilih untuk menjalankan ibadah umroh. Nasabah yang terpilih ini adalah para nasabah inspiratif yang telah berhasil mempraktikan perilaku BDKS: Berani Berusaha, Disiplin, Kerja Keras, Saling Bantu. Semua program insentif ataupun apresiasi yang diberikan sebagai wujud komitmen Bank untuk terus loyal memberdayakan bagi masyarakat inklusi dan berkomitmen untuk bisa memberikan layanan terbaik dan berkelanjutan.

Untuk memonitor perkembangan peningkatan kesejahteraan dan kinerja usaha para masyarakat inklusi, Bank selalu menerapkan pendekatan evaluasi dampak sosial ekonomi yang ketat. Berdasarkan hasil survei *Poverty Probability Index* (PPI), Nasabah inklusi yang telah menjalani 5 tahun kebersamaan dengan Bank mendapatkan dampak positif yang nyata, tercermin dari pendidikan, kualitas rumah, dan perbaikan ekonomi.

Selama tahun 2023 jumlah keluarga yang memiliki hunian yang layak telah meningkat menjadi 94,6% dan nasabah yang memiliki toilet layak meningkat menjadi 85,3%. Jumlah anak yang bersekolah juga terus meningkat menjadi 92,5%. Tentu saja BTPN Syariah bukan menjadi satu-satunya faktor yang menyebabkan peningkatan kesejahteraan nasabah.



Namun setidaknya, pendampingan yang diberikan oleh Bank merupakan kunci berjalannya model bisnis pembiayaan Bank untuk berkontribusi langsung pada perbaikan kehidupan masyarakat inklusi. Relasi antara Bank dengan para perempuan pra sejahtera produktif telah mewujud menjadi relasi kuat antar manusia, tak sebatas antara lembaga jasa keuangan dengan nasabahnya.

Relasi antar manusia yang "memanusiakan" tersebut juga tercermin dalam internal organisasi Bank. Kami memahami, hubungan industrial berkualitas dan penerapan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) yang baik adalah bagian dari tanggung jawab Bank menjaga karyawan dari risiko kerja, serta mempertahankan hubungan harmonis antara Bank, karyawan dan para pemangku kepentingan. Kami juga menjaga hak asasi manusia, menerapkan anti diskriminasi, tidak mempekerjakan anak di bawah umur, dan memastikan implementasi kesetaraan gender. Hingga saat ini, Bank memiliki lebih dari 14.000 #bankirpemberdaya yang tersebar di 26 provinsi, dengan 95% diantaranya ialah perempuan, dan 50% dari mereka merupakan lulusan SMA. Selain pelaksanaan pelatihan standar, 97,7% karyawan kami juga telah mendapat pelatihan terkait Keuangan Berkelanjutan. Hubungan yang harmonis antara Bank, karyawan, dan para pemangku kepentingan pada akhirnya akan memampukan kami memberdayakan masyarakat inklusi demi keberlanjutan.

Sejumlah capaian tersebut membuktikan bahwa BTPN Syariah tidak hanya berkembang sebagai institusi keuangan dengan kinerja yang terjaga, tetapi juga sebagai entitas yang memiliki dampak sosial yang signifikan.

kinerja aspek lingkungan

Aspek lingkungan juga tetap menjadi perhatian Bank. Kontribusi kami pada pelestarian lingkungan dilakukan melalui sejumlah inisiatif ramah lingkungan, misalnya digitalisasi untuk penghematan kertas, ketersediaan air tanpa gelas plastik, pemanfaatan *green building*, hingga lampu pintar yang otomatis padam jika ruangan kosong. Program penerapan budaya dan operasi yang ramah lingkungan di BTPN Syariah tercapai 90% dari target.

Kami juga mengumpulkan data penggunaan air, listrik, BBM, kertas, serta pengelolaan limbah di cakupan area operasional yang lebih luas dibandingkan tahun sebelumnya. Pendataan tersebut diharapkan mampu meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya. Secara keseluruhan, intensitas penggunaan sumber daya mengalami penurunan, sesuai target yang ditetapkan Bank.

Sepanjang tahun 2023, BTPN Syariah mencatat intensitas energi listrik 169,95 kWh/m2 per tahun. Angka ini masih memenuhi kategori 'cukup efisien' menurut Nilai standar IKE berdasarkan SNI-6197-2011 tentang Intensitas Konsumsi Energi Gedung Indonesia di sektor gedung perkantoran. Emisi CO2 yang terbentuk pada tahun 2023 atas pemakaian BBM dan perjalanan dinas sebesar 170.591 (kg CO2-eq). Emisi CO2 dari kertas yang dipergunakan sebesar 1.286 (kg CO2-eq). BTPN Syariah memiliki estimasi stok karbon sebanyak 2.690 t/ha yang dihasilkan dari *multi year project* reforestasi penanaman sebanyak 2.009 tanaman Kahoi dan Beluma di Kalimantan Timur.

Dari sisi nasabah pembiayaan, program-program yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup juga mencatatkan pencapaian pengurangan emisi karbon rumah tangga. Pemakaian kayu bakar untuk memasak sudah berkurang seiring dengan peningkatan perekonomian mereka, jumlah keluarga yang beralih dari penggunaan kayu bakar meningkat 8% pada tahun 2023.

Berbagai upaya tersebut menunjukkan tanggung jawab Bank untuk sama-sama menjaga kelestarian lingkungan, mengurangi efek pemanasan global dan perubahan iklim demi masa depan planet kita.

kinerja aspek tata kelola

BTPN Syariah memperkuat aspek tata kelola perusahaan sebagai bagian penting dari komitmen kami terhadap keberlanjutan. Kami telah menerapkan praktik tata kelola yang baik dan transparan, yang mencakup peningkatan akuntabilitas, integritas, dan efektivitas pengambilan keputusan. Ini tercermin dalam penegakan kebijakan internal yang ketat, pemantauan risiko yang semakin baik, dan keterlibatan yang lebih aktif dari pemangku kepentingan.

Dalam melakukan kegiatan operasional, BTPN Syariah tentu tidak terlepas dari risiko-risiko saat penerapan keuangan berkelanjutan. Kami memahami, bahwa fokus BTPN Syariah untuk memberikan pembiayaan kepada masyarakat inklusi ini memiliki risiko tinggi. Untuk memitigasi risiko ini, kami menerapkan cara unik melalui sistem komunitas yang kami bangun bersama para nasabah pembiayaan. Salah satu pola mitigasi tersebut adalah secara rutin melakukan Pertemuan Rutin Sentra (PRS) dengan pendampingan oleh *Community Officer* (CO) kami kepada nasabah. Hingga saat ini, Bank telah melayani lebih dari 257 ribu komunitas di 2.600 lokasi di Indonesia dengan mitigasi risiko yang sangat baik. Berbagai upaya tersebut telah memberikan BTPN Syariah mendapatkan afirmasi dari PT Fitch Ratings Indonesia dengan rating AAA (Idn) Outlook Stabil [OJK E.5]

Langkah-langkah ini menegaskan bahwa BTPN Syariah beroperasi dengan standar etika dan kepatuhan tertinggi, yang mendukung pencapaian tujuan strategis dan keberlanjutan jangka panjang kami.

komitmen loyal memberdayakan mendukung keberlanjutan masyarakat inklusi

Untuk 2024, kami akan senantiasa loyal memberdayakan nasabah pra sejahtera produktif pada masyarakat inklusi. Kami juga akan terus membangun ekosistem berkelanjutan dengan memperluas akses (*access to financial, access to knowladge, access to supply dan access to market*) melalui berbagai kemudahan sesuai dengan kebutuhan serta karakter mereka.

Kami percaya bahwa hanya melalui kerja sama, inovasi, dan komitmen yang berkelanjutan dari semua pihak, termasuk pemangku kepentingan, bahwa *InsyaAllah* kami dapat mencapai visi kami di masa yang akan datang.

apresiasi

Mewakili jajaran Direksi, saya ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada semua pihak yang telah berkontribusi pada perjalanan kami di tahun 2023. Kepada nasabah kami, terima kasih atas kepercayaan dan loyalitas tidak tergoyahkan. Kepercayaan dan loyalitas nasabah adalah kekuatan yang mendorong kami untuk terus berinovasi dan memberikan layanan terbaik, serta terus loyal kepada segmen inklusi. Kepada para #bankirpemberdaya, apresiasi tinggi saya ucapkan atas komitmen, ketekunan dan loyalitas dalam menghadapi tantangan, berkarya serta kontribusi nyata untuk dalam mewujudkan keberlanjutan.

Kami juga ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pemegang Saham, Pemerintah, Regulator, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan seluruh pemangku kepentingan atas dukungan dan sinergi yang positif untuk mewujudkan keberlanjutan dalam melayani masyarakat inklusi.

Di akhir, kami mengucapkan syukur kepada Allah SWT atas segala karunia dan bimbingan-Nya. Berkat rahmat-Nya, kami dapat terus bergerak maju, istiqomah untuk loyal memberdayakan masyarakat inklusi, dan membantu mengubah kehidupan jutaan masyarakat inklusi di Indonesia. Semoga niat baik dan upaya kami dapat mewujudkan hidup yang lebih berarti bagi jutaan masyarakat Indonesia.

Terima kasih

Wabillahitaufik Walhidayah Wassalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



Hadi Wibowo
Direktur Utama

H. Ikhwan Abidin, MA
Ketua Dewan Pengawas Syariah





Sambutan

DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Semangat **loyal memberdayakan untuk keberlanjutan** BTPN Syariah telah dijalankan dalam koridor syariah, menebar rahmat dan keberkahan Allah SWT bagi sesama.

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam semoga tetap dicurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya, para sahabatnya, dan pengikutnya yang setia.

Alhamdulillah, bersama-sama kita telah melewati tantangan tahun 2023 dengan baik. Pemulihan ekonomi yang masih berjalan lambat pada segmen ultra mikro kembali menguji model bisnis Bank yang selalu mendampingi langkah para nasabah pra sejahtera produktif. Namun Bank secara konsisten terus membuka kesempatan bagi masyarakat inklusi untuk bertumbuh melalui akses pembiayaan dan pendampingan, sebagai salah satu implementasi nyata nilai-nilai Islam yang penuh rahmat. Pembiayaan ultra mikro untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat inklusi merupakan bentuk nyata dukungan BTPN Syariah dalam *green economy*, yang memiliki ruang lingkup pembangunan ekonomi, pembangunan sosial dan perlindungan lingkungan. Karena itu, untuk terus memberi dampak bagi jutaan masyarakat inklusi Indonesia, Bank selalu berupaya meningkatkan kinerja ekonomi, sosial, dan lingkungan, yang berjalan dalam tata kelola keberlanjutan sesuai koridor syariah.

Islam telah mengatur bahwa harta harus diputar (diniagakan) untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan manusia sehingga tidak bertumpuk pada segelintir orang saja. Model bisnis Bank memungkinkan semua orang berkontribusi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat inklusi. Melalui produk pendanaan Bank, nasabah dapat menyalurkan dana kepada para nasabah pra sejahtera produktif yang sedang berjuang mewujudkan impian atas kesejahteraan hidup. Terkait hal ini, BTPN Syariah telah menerapkan kemitraan sebagai salah satu koridor prinsip syariah, dengan menempatkan nasabah pendanaan, nasabah pembiayaan (pengguna dana), dan Bank sejajar sebagai mitra usaha yang saling bersinergi untuk memperoleh keuntungan. Upaya kesetaraan ini, salah satunya tercermin dari pemberdayaan Bank kepada nasabah pra sejahtera produktif sehingga kapasitas mereka mengelola usaha dapat meningkat, dan karakter mereka terbangun melalui perilaku unggul Berani Berusaha, Disiplin, Kerja keras, dan Saling Bantu (BDKS). Terkait hal ini, Bank sekaligus merealisasikan fungsi intermediasi dengan baik sehingga para pelaku usaha ultra mikro yang sebelumnya tidak pernah mendapatkan akses dukungan perbankan kini mendapatkan pembiayaan untuk mengembangkan usaha.

Dalam pemberdayaan nasabah pra sejahtera produktif, Bank kini juga melibatkan 1.821 fasilitator (mahasiswa dan dosen) dalam program Bestee. Melalui program tersebut, mereka dapat terjun langsung memberi kontribusi berarti bagi masyarakat inklusi, menguatkan pendampingan yang secara intensif dijalankan para #bankirpemberdaya di lapangan atau disebut juga *Community Officer* (CO). Memahami tantangan medan yang tak mudah bagi CO, Bank menyediakan fasilitas wisma yang layak serta motor sekaligus uang bensin untuk memudahkan mobilitas. Para CO juga dibekali teknologi mumpuni agar dapat melayani dan mendampingi nasabah inklusi dengan efektif dan efisien. Komitmen Bank memenuhi aspek HAM dalam ketenagakerjaan juga tercermin dari hubungan kerja yang setara dan harmonis di kantor-kantor BTPN Syariah. Kami memandang,



pekerjaan melayani masyarakat inklusi yang penuh tantangan ini sesungguhnya membutuhkan jiwa-jiwa yang terpanggil untuk berbuat lebih kepada mereka yang membutuhkan. Kami menilai komitmen Bank menyediakan fasilitas kerja dan mengupayakan relasi industri yang sehat telah mendukung seluruh #bankirpemberdaya bekerja penuh rasa syukur, sebagaimana bekerja dalam Islam adalah bagian dari ibadah dan wajib dilakukan. Produktivitas itu lah kemudian mendorong Bank konsisten mencatatkan kinerja ekonomi yang sehat dan berkelanjutan sehingga kemaslahatannya dirasakan seluruh pemangku kepentingan.

Nilai ekonomi yang langsung didistribusikan dinikmati oleh karyawan melalui gaji dan berbagai tunjangan, negara dalam bentuk pajak, para pemegang saham dalam bentuk dividen, nasabah pendanaan dalam bentuk bagi hasil kompetitif, nasabah pembiayaan dalam bentuk berbagai insentif termasuk ibadah umroh bagi 320 nasabah terpilih di tahun 2023, hingga masyarakat luas dalam bentuk kegiatan tanggung jawab sosial Bank. Kelak, distribusi nilai ekonomi yang semakin merata dalam skala luas akan memperkecil kesenjangan ekonomi dan menghadirkan kemaslahatan bagi seluruh umat.

Kami juga bersyukur, Bank menjalankan semua kegiatan usaha dengan tetap berupaya menjaga bumi sebagai ciptaan Allah SWT. Meskipun model bisnis Bank tidak mengeksploitasi sumber daya alam secara langsung, namun Bank tetap memikul tanggungjawab sebagai warga dunia untuk bersama-sama mengurangi emisi gas rumah kaca. Upaya ini ditujukan untuk mencegah dampak perubahan iklim semakin besar dan mengancam kelangsungan hidup generasi mendatang. Kami mengapresiasi internalisasi budaya keberlanjutan pada karyawan yang secara konsisten terus diperkuat, baik melalui aturan, infrastruktur, pelatihan, dan himbauan.

Secara keseluruhan, Dewan Pengawas Syariah menilai bahwa BTPN Syariah yang selalu loyal memberdayakan telah menjalankan aspek-aspek keberlanjutan secara optimal di tahun 2023. Apresiasi kami sampaikan atas berbagai program keberlanjutan yang sudah dijalankan oleh BTPN Syariah dan sinergi yang terjalin dengan sangat baik antara Dewan Komisaris, Direksi beserta jajaran manajemen, para #bankirpemberdaya, seluruh nasabah, serta para pemangku kepentingan lainnya.

Insya Allah, seluruh #bankirpemberdaya akan dimampukan dan diberi kekuatan pada tahun 2024 untuk konsisten meningkatkan kinerja ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam tata kelola berkelanjutan. Semoga Allah SWT terus memberkahi usaha kita dan menguatkan langkah BTPN Syariah tetap istiqamah dalam setiap kegiatannya, loyal memberdayakan untuk keberlanjutan, dan memberi kemaslahatan bagi umat.

Wabillahitaufik Walhidayah Wassalammu'alaikum Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



H. Ikhwan Abidin, MA
Ketua Dewan Pengawas Syariah





Surat Pernyataan Dewan Komisaris dan Direksi

TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEBERLANJUTAN 2023 PT BANK BTPN SYARIAH Tbk

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Keberlanjutan PT Bank BTPN Syariah Tbk tahun 2023 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Keberlanjutan PT Bank BTPN Syariah Tbk. [GRI 2-14]

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, Februari 2024

dewan komisaris

Kemal Azis Stamboel
komisaris utama/independen

Mulya Effendi Siregar
komisaris independen

Dewie Pelitawati
komisaris independen

Ongki Wanadjati Dana
komisaris

Jakarta, Februari 2024

direksi



Hadi Wibowo
direktur utama



Arief Ismail
direktur kepatuhan



Fachmy Achmad
direktur



Dwiyono B. Winantio
direktur



Dewi Nuzulianti
direktur





03

Kerangka Strategi

KEBERLANJUTAN

[OJK A1][GRI FS1, FS2]



BTPN Syariah secara konsisten selalu menjaga komitmen untuk loyal memberdayakan masyarakat inklusi sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) demi mewujudkan hidup lebih berarti

BTPN Syariah berkomitmen mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dengan mewujudkan ekosistem syariah berkelanjutan dan senantiasa mendampingi masyarakat inklusi. Komitmen tersebut diimplementasikan menggunakan konsep dan strategi keuangan berkelanjutan yang telah sejalan dengan misi dan visi BTPN Syariah.

tujuan dan strategi keuangan berkelanjutan [GRI 2-22]

Sejalan dengan tujuan keberlanjutan dimana BTPN Syariah meyakini bahwa apa yang dilakukan tidak hanya sampai dengan saat ini melainkan juga akan diwariskan kepada generasi penerus. Dengan menerapkan keberlanjutan maka manusia dapat hidup harmoni dengan sesama dan hidup selaras dengan alam.

Dalam mendukung cita-cita keberlanjutan tersebut, seluruh negara di dunia termasuk Indonesia menerapkan konsep Pembangunan Berkelanjutan dengan menerapkan 17 buah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Kegiatan Pembangunan dan bisnis berkelanjutan membutuhkan dukungan keuangan tidak hanya dari Pemerintah, namun juga dari lembaga jasa keuangan.

Kebijakan perbankan termasuk BTPN Syariah menuju keberlanjutan akan mempercepat pencapaian pembangunan berkelanjutan. Dukungan tersebut diperkuat dengan berbagai peraturan pemerintah pendukung Environmental, Social, and Governance (ESG), salah satunya adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 51/POJK.03.2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik.

Berpedoman kepada POJK 51 2017 bahwa tujuan dari penerapan keuangan berkelanjutan adalah keuangan berkelanjutan adalah sebagai berikut:

- Menyediakan sumber pendanaan yang dibutuhkan untuk mencapai TPB dan pendanaan terkait perubahan iklim dalam jumlah yang memadai;
- Meningkatkan daya tahan dan daya saing Lembaga Jasa Keuangan (LJK), Emiten, dan Perusahaan Publik melalui pengelolaan risiko sosial dan lingkungan hidup yang lebih baik dengan cara mengembangkan produk dan/atau jasa keuangan yang menerapkan prinsip Keuangan Berkelanjutan sehingga mampu berkontribusi positif pada stabilitas sistem keuangan;
- Mengurangi kesenjangan sosial, mengurangi, dan mencegah kerusakan lingkungan hidup, menjaga keanekaragaman hayati, dan mendorong efisiensi pemanfaatan energi dan sumber daya alam; dan
- Mengembangkan produk dan/atau jasa keuangan yang menerapkan prinsip keuangan berkelanjutan.

Sedangkan tujuan pelaksanaan keuangan berkelanjutan di BTPN Syariah yang selaras dengan bidang usaha dirumuskan sebagai berikut:

1. **Portofolio**
   Menyediakan produk dan paket jasa keuangan yang inklusif, kompak, sederhana namun aman untuk mendukung pengentasan kemiskinan.
2. **Aksesibilitas**
   Menyediakan produk layanan jasa keuangan yang mudah diakses, tersedia setiap saat, dan didukung penerapan teknologi informasi terkini.
3. **Proses Bisnis**
   Menyelenggarakan layanan keuangan yang mengintegrasikan risiko sosial dan tata kelola dalam produk, jasa dan dalam pengambilan keputusan bisnis serta menjalankan operasi perbankan yang semakin ramah lingkungan.
4. **Literasi Keuangan**
   Menyelenggarakan metode pembelajaran literasi keuangan yang spesifik, mudah dipahami, berdaya guna sebagai wujud dukungan terciptanya inklusi keuangan yang merata di seluruh wilayah Indonesia.
5. **Pembelajaran dan Pertumbuhan**
   Mengembangkan kapasitas dan kapabilitas Bank, baik internal maupun melalui kemitraan, untuk melaksanakan dan meningkatkan kualitas keuangan berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan para nasabah, arah pengembangan usaha, dan tujuan keberlanjutan khususnya di bidang sosial kemasyarakatan.



loyal memberdayakan dalam ekosistem berkelanjutan

Sepanjang tahun 2023, dengan tetap memperhatikan 8 (delapan) prinsip keuangan berkelanjutan, dan Misi Visi Bank untuk terus mendampingi masyarakat inklusif dengan mengedepankan rasa sosial kemanusiaan untuk memberikan kesempatan bagi masyarakat indonesia mewujudkan niat baik mereka lebih cepat, membangun hidup yang lebih berarti melalui pengelolaan dampak dalam pilar ESG demi ekosistem berkelanjutan.

BTPN Syariah terus loyal memberdayakan melalui penerapan keuangan berkelanjutan di tahun 2023 berdasarkan pada prinsip-prinsip keuangan berkelanjutan. Delapan (8) prinsip Keuangan Berkelanjutan tersebut yaitu:

1. **Prinsip Investasi Bertanggung Jawab**
   Investasi bertanggung jawab (*responsible investment*) adalah pendekatan investasi yang mempertimbangkan faktor ekonomi, sosial, lingkungan hidup, dan tata kelola dalam keputusan investasi. Dengan demikian Bank dapat mengelola risiko secara lebih baik dan menghasilkan keuntungan jangka panjang yang berkelanjutan.
2. **Prinsip Strategi dan Praktik Bisnis Berkelanjutan**
   Bank harus menetapkan dan menerapkan strategi dan praktik bisnis berkelanjutan pada setiap pengambilan keputusan. Strategi dan praktik bisnis yang dimaksud meliputi misi, visi, struktur organisasi, rencana strategis, standar prosedur operasional, program kerja dan penetapan faktor risiko dalam penghimpunan, dan penyaluran dana.
3. **Prinsip Pengelolaan Risiko Sosial dan Lingkungan Hidup**
   Bank harus memiliki prinsip kehati-hatian dalam mengukur risiko sosial dan lingkungan hidup dari aktivitas penghimpunan dan penyaluran dana. Aktivitas tersebut termasuk identifikasi, pengukuran, mitigasi, pengawasan, dan pemantauan.
4. **Prinsip Tata Kelola**
   Penegakan tata kelola melalui manajemen dan operasi bisnis yang mencakup, antara lain, transparansi, akuntabel, bertanggung jawab, independen, profesional, setara, dan wajar.
5. **Prinsip Komunikasi yang Informatif**
   Bank menyiapkan dan menyediakan laporan yang informatif mencakup strategi, tata kelola, kinerja dan prospek perusahaan. Laporan harus mudah dipahami, dapat dipertanggungjawabkan dan disampaikan melalui media komunikasi yang efektif, dan dapat dijangkau oleh seluruh pemangku kepentingan.
6. **Prinsip Inklusif**
   Bank harus menjamin ketersediaan dan keterjangkauan produk dan/atau jasa sehingga dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat termasuk yang belum memiliki akses terhadap produk dan/atau jasa perbankan.
7. **Prinsip Pengembangan Sektor Unggulan Prioritas**
   Bank harus mempertimbangkan sektor-sektor unggulan prioritas yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
8. **Prinsip Koordinasi dan Kolaborasi**
   Dalam rangka menyelaraskan strategi dan kebijakan, peluang bisnis, serta inovasi produk dengan kepentingan nasional, Bank berpartisipasi aktif dalam forum, kegiatan, kerja sama yang terkait dengan Keuangan Berkelanjutan, baik dalam tingkat lokal, regional hingga nasional.

Strategi BTPN Syariah dibangun untuk mengelola dampak dan meningkatkan loyalitas BTPN Syariah dan para pemangku kepentingan. BTPN Syariah terus berupaya meningkatkan:

1. **Loyal memberdayakan untuk NEGERI**
   Kinerja ekonomi berkelanjutan dan mendukung pemerintah.
2. **Loyal memberdayakan bagi SESAMA**
   Dukungan bagi kemanusiaan.
3. **Loyal memberdayakan MASYARAKAT INKLUSI**
   Bantuan permodalan, digitalisasi sesuai kebutuhan, dan pendampingan bagi nasabah pra dan cukup sejahtera produktif.
4. **Loyal memberdayakan dalam BERKARYA**
   Praktik ketenagakerjaan yang baik dan lingkungan kerja yang aman serta nyaman.
5. **Loyal memberdayakan untuk LINGKUNGAN**
   Dukungan untuk kelestarian alam dan lingkungan.
6. **TATA KELOLA yang baik untuk menjaga loyalitas pemangku kepentingan**
   Tata kelola perusahaan berkelanjutan yang baik dan benar.

Sebagai bagian dari dukungan perusahaan kepada tujuan dan strategi untuk keberlanjutan untuk jangka pendek satu tahun dan jangka panjang 5 (lima) tahun, Direksi telah menetapkan program inisiatif yang telah dikaji dan disetujui oleh Dewan Komisaris dimana hasil realisasinya dilaporkan secara berkala kepada regulator



inisiatif program keuangan berkelanjutan tahun 2023

Inisiatif program keuangan berkelanjutan yang tertuang dalam Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) disusun oleh BTPN Syariah sejalan dengan strategi besar Bank. Strategi di level korporasi diwarnai dengan semangat "Kami berbeda, Kami #bankirpemberdaya" yang selalu menyala dalam setiap gerak langkah BTPN Syariah.

Bebagai program dalam RAKB yang tercantum dalam rencana jangka pendek dan rencana jangka panjang adalah inisiatif program yang berprinsip syariah yang mendukung semangat loyal memberdayakan masyarakat inklusi dan semangat melewati tantangan dari berbagai isu sosial dan lingkungan yang mungkin saja terjadi. Berbagai inisiatif program keuangan berkelanjutan 2023 terdiri dari:

- Pembiayaan produktif terhadap masyarakat inklusi (khususnya perempuan);
- Eksplorasi alternatif pembiayaan kepada masyarakat inklusi lainnya seperti pembiayaan kepada Mitra Tepat, nasabah maupun nasabah dari pihak ketiga yang berkerjasama dengan Bank;
- Program Pemberdayaan Pendampingan Individual merupakan pendampingan kewirausahaan melalui aktivitas Pendampingan Nasabah Inspiratif dan Program Bestee. Program pendampingan ini dilakukan secara intensif *one on one*;
- Program pelatihan Mitra Tepat *empowerment*;
- Program Pemberdayaan Kelompok merupakan program Pemberdayaan yang diberikan secara berkelompok (saat pertemuan rutin / PRS) atau waktu waktu tertentu yang disesuaikan dengan kebutuhan kelompok nasabah tertentu;
- Peningkatan *Capacity Building* internal BTPN Syariah tentang Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola Berkelanjutan (LST);
- Analisis serta penyesuaian organisasi, kebijakan, prosedur dan manajemen risiko yang terintegrasi dengan LST;
- Penerapan budaya dan operasi yang ramah lingkungan di BTPN Syariah;
- Penyusunan Laporan Keberlanjutan untuk tahun buku 2023.

Seluruh inisiatif program RAKB 2023 terealisir rata-rata 100% dari target yang ditetapkan. Detail target dan realisasi dilaporkan dalam berbagai bab pada Laporan Keberlanjutan ini.

Inisiatif program tersebut diatas selaras dengan kegiatan usaha yang mengarah pada TPB. Teridentifikasi 12 TPB dari 17 TPB yang dilaksanakan sepanjang tahun 2023 melalui kegiatan bisnis sehari-hari BTPN Syariah [GRI 2-22]

	Penjelasan TPB	Pencapaian BTPN Syariah
	**Tanpa Kemiskinan**	
	Mengakhiri kemiskinan dalam bentuk apa pun di seluruh penjuru dunia	• 100% pembiayaan masyarakat inklusi • 4,2 juta nasabah aktif dengan pendampingan intensif dari #bankirpemberdaya • Hasil pengukuran eksternal menyatakan bahwa dalam 3 tahun nasabah BTPN Syariah mengalami penurunan kemiskinan sebanyak 11,1%
	**Tanpa Kelaparan**	
	Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan nutrisi yang lebih baik dan mendukung pertanian berkelanjutan	• Hasil pengukuran eksternal menyatakan bahwa konsumsi makanan layak dan bernutrisi pada nasabah BTPN Syariah lebih baik daripada non nasabah • 95,17% Nasabah Pembiayaan mengkonsumsi daging dalam 7 hari terakhir, 2% lebih tinggi dari non nasabah. • 88,19% Nasabah Pembiayaan mengkonsumsi pisang dalam 7 hari terakhir, 3% lebih tinggi dari non nasabah.
	**Kesehatan dan Kesejahteraan**	
	Menjamin kehidupan yang sehat dan mempromosikan kesejahteraan untuk seluruh masyarakat di segala usia	• 99% karyawan telah divaksinasi • Persentase pengeluaran nasabah untuk bahan bakar memasak lebih tinggi (3,7%) dibandingkan dengan non Nasabah Pembiayaan (1,9%).

	Penjelasan TPB	Pencapaian BTPN Syariah
	**Pendidikan Berkualitas** Menjamin kualitas pendidikan inklusif dan adil, dan mempromosikan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua orang	• Konsisten memberikan edukasi dan pendampingan melalui Program Daya ditujukan untuk memberikan *access to knowledge* kepada Nasabah Pembiayaan dan masyarakat • Memberikan akses pengetahuan kepada Nasabah Pembiayaan melalui *platform* digital Bestee, yang dibagi menjadi rogram pendampingan universitas dan program pendampingan Bestee *Army*, agar kualitas pemberdayaan dan *customer engagement* meningkat. • Persentase Nasabah Pembiayaan yang mengalami peningkatan pada literasi teknologi yaitu 35% lebih tinggi dibandingkan dengan non nasabah
	**Kesetaraan Gender** Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum ibu dan anak perempuan	• 95% #bankirpemberdaya dan 100% Nasabah pembiayaan adalah perempuan. • Hasil pengukuran eksternal menyatakan bahwa Nasabah Pembiayaan Perempuan di BTPN Syariah memiliki skor otonomi lebih tinggi (2,6 dari 3) dibandingkan non nasabah (2,35 dari 3).
	**Air Bersih dan Sanitasi Layak** Memastikan ketersediaan dan manajemen air bersih yang berkelanjutan dan sanitasi bagi semua	• Hasil pengukuran eksternal menyatakan bahwa Nasabah Pembiayaan BTPN Syariah memiliki akses terhadap air minum yang layak lebih tinggi 1,7% dibandingkan dengan non nasabah
	**Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi** Mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, membuka kesempatan kerja seluas-luasnya, produktif serta menciptakan pekerjaan yang layak untuk semua	• Memberikan kesempatan bekerja bagi lulusan SMA (50% dari total #bankirpemberdaya) • Hasil pengukuran eksternal menunjukan bahwa Nasabah Pembiayaan mengalami peningkatan pendapatan dalam kurun waktu 3 tahun menjadi nasabah BTPN Syariah.
	**Industri, Inovasi dan Infrastruktur** Membangun infrastruktur tangguh, mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan mendorong inovasi	Mendorong teknologi tepat guna perbankan termasuk peningkatan teknologi Bestee *Platform* demi loyal melayani masyarakat inklusi
	**Berkurangnya Kesenjangan** Mengurangi kesenjangan di dalam sebuah negara maupun di antara negara-negara dunia	• Loyal melayani masyarakat inklusi pada lebih dari 257 komunitas di 24 provinsi di Indonesia. • Memiliki 30.000 Mitra Tepat yang tersebar di pelosok wilayah Indonesia
	**Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan** Membangun kota dan pemukiman inklusif, aman, tahan lama dan berkelanjutan	• Hasil pengukuran eksternal menyatakan bahwa 61,21% Nasabah Pembiayaan BTPN Syariah memiliki rumah layak huni, sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata nasional (60,66%).
	**Penanganan Perubahan Iklim** Bertindak cepat untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya	Otomasi proses operasional dan *green building*
	**Kemitraan untuk Mencapai Tujuan** Memperkuat implementasi dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan	• Kemitraan dengan Dagangan melalui BTPN Syariah Ventura sebagai pendukung *access to supply* bagi masyarakat di kota kecil dan pedesaan • Berkolaborasi dengan >33 ribu nasabah, 1.821 fasilitator melalui program Kampus Merdeka/Kemendikbud-Ristek, 7 lembaga komunitas dan 257 perguruan tinggi dalam program Bestee dengan semangat loyal memberdayakan masyarakat inklusi.


Zildjian



04

Sekilas

BTPN SYARIAH


الأول
الوكيل
الكريم
أصول



Sekilas BTPN SYARIAH

BTPN Syariah secara konsisten dan loyal mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, dengan fokus melayani masyarakat inklusi, khususnya perempuan.

Awalnya BTPN Syariah didirikan dengan nama PT Bank Purba Danarta, berdasarkan Akta Pendirian Nomor 10 tanggal 7 Maret 1991, kemudian diubah dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar Nomor 39 tanggal 25 Mei 1992, dan Akta Perubahan Nomor 25 tanggal 11 Juli 1992. Ketiganya dibuat di hadapan Haji Abu Jusuf, S.H., notaris di Jakarta dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia, sebagaimana telah mengalami beberapa perubahan dan untuk selanjutnya disebut sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Menkumham) dalam Surat Keputusan Nomor C2.5839. HT.01.01-TH.92 tanggal 21 Juli 1992, yang telah didaftarkan dalam register umum yang berada di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 30 Juli 1992 di bawah Nomor 206A/1992/II, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 81 tanggal 9 Oktober 1992, tambahan Nomor 5020 dengan izin usaha untuk melakukan kegiatan usaha sebagai bank umum yang diperoleh berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1060/KMK.017/1992 tanggal 14 Oktober 1992.

Selanjutnya, di tahun 2009 PT Bank Purba Danarta kembali melakukan perubahan nama menjadi PT Bank Sahabat Purba Danarta, lalu di tahun 2013 kembali berganti nama menjadi PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah. Perubahan nama tersebut berdasarkan Akta Perubahan Terhadap Anggaran Dasar Nomor 25 tanggal 27 Agustus 2013 yang dibuat di hadapan Hadijah, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan dari Menkumham dalam Surat Keputusan Nomor AHU-50529.AH.01.02. Tahun 2013 tanggal 1 Oktober 2013 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 94 tahun 2013, tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 124084 tanggal 22 November 2013.



BTPN Syariah juga mengubah domisili yang semula berkedudukan di Semarang menjadi Jakarta Selatan, sebagaimana didasarkan pada Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Nomor 15 tanggal 31 Oktober 2013 yang dibuat di hadapan Indah Indriani, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta dan telah terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai keputusan dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Nomor AHU-60408.AH.01.02. Tahun 2013 tanggal 21 November 2013 dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Nomor AHU. AH.01.10-47895 tanggal 12 November 2013.

Pada tanggal 20 Januari 2014, Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk (sekarang bernama PT BANK BTPN Tbk disingkat BTPN) telah menyetujui pemisahan Unit Usaha Syariah (selanjutnya disebut UUS BTPN), yang dituangkan dalam Akta Pemisahan Unit Usaha Syariah BTPN Dengan Cara Pengalihan Hak dan Kewajiban Kepada Perseroan Nomor 8 tanggal 4 Juli 2014, yang dibuat di hadapan, Hadijah, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta Pusat. Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia, BTPN kemudian memilih untuk melakukan pemisahan UUS BTPN dengan cara mengalihkan seluruh hak dan kewajiban UUS BTPN kepada badan usaha syariah yang telah ada.

Setelah pemisahan (*spin off*) atas UUS BTPN diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa BTPN pada tanggal 20 Januari 2014 sebagaimana tersebut di atas, BTPN kemudian melakukan akuisisi atas 70% (tujuh puluh persen) saham Perseroan, setelah memperoleh persetujuan Bank Indonesia berdasarkan Surat Bank Indonesia Nomor 15/10/DPB1/PB1-5/Rahasia tertanggal 19 Juli 2013 dengan syarat dilakukan perubahan atas kegiatan usaha dari PT Bank Sahabat Purba Danarta (sekarang BTPN Syariah) yang semula merupakan Bank Umum Konvensional diubah menjadi Bank Umum Syariah.

Selanjutnya, PT Bank Sahabat Purba Danarta, telah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan konversi kegiatan usaha dari sebelumnya kegiatan usaha Bank Umum Konvensional, menjadi kegiatan usaha Bank Umum Syariah berdasarkan Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-67/PB.131/2014 tanggal 23 Mei 2014 perihal Keputusan Pemberian Izin Usaha Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Syariah yang dikeluarkan oleh Direktur Penelitian, Pengembangan, Pengaturan, dan Perizinan Perbankan Syariah. Bank BTPN kemudian mendapatkan persetujuan rencana pemisahan (*spin off*) UUS BTPN, berdasarkan Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-17/PB.1/2014 tertanggal 23 Juni 2014 perihal Permohonan Persetujuan Pemisahan (*Spin Off*) UUS BTPN, yang dikeluarkan oleh Deputi Komisioner Pengawas Perbankan I Otoritas Jasa Keuangan.



BTPN Syariah secara resmi memperdagangkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 8 Mei 2018 dengan kode saham BTPS.

Pada tanggal 16 April 2020, secara resmi Bank mengubah namanya menjadi PT Bank BTPN Syariah Tbk sebagaimana didasarkan pada Akta Nomor 26, yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapat persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Nomor AHU0034666.AH.01.02.TAHUN 2020 tanggal 8 Mei 2020, dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Nomor AHUAH.01.03-0214020 tanggal 8 Mei 2020, dan telah mendapatkan persetujuan Perubahan Nama Bank ini berdasarkan Surat dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) nomor S-66/PB.101/2020 tanggal 4 Juni 2020 perihal Permohonan Penetapan Penggunaan Izin Usaha karena Perubahan Nama PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk menjadi PT Bank BTPN Syariah Tbk dan Salinan Keputusan Deputi Komisioner Pengawas Perbankan I OJK Nomor KEP-99/PB.1/2020 tanggal 4 Juni 2020.

BTPN Syariah memiliki model bisnis yang fokus 100% memberdayakan segmen inklusi yang disebut *unbankable* sejak 2010. Bagi BTPN Syariah hal ini menjadi peluang sekaligus panggilan untuk dapat bermanfaat bagi sesama.

Keyakinan untuk "*Do Good, Do Well*" (berkinerja baik sekaligus memiliki dampak sosial yang nyata) inilah yang membuat seluruh insan di BTPN Syariah memiliki satu identitas yang sama, yaitu #bankirpemberdaya.



Misi Visi dan NILAI-NILAI PERUSAHAAN [OJK C.1] [GRI 2-22]

misi

Menjadi Bank Syariah terbaik untuk keuangan inklusif, mengubah hidup berjuta rakyat Indonesia

visi

Bersama kita ciptakan kesempatan tumbuh dan hidup yang lebih berarti

nilai-nilai

PRISMA
PRofesional,
Integritas,
Saling menghargai,
Kerja sa**MA**

Direksi dan Dewan Komisaris telah mengkaji dan memastikan keselarasan Misi dan Visi BTPN Syariah tahun 2023 sebagaimana tertuang dalam Rencana Bisnis Bank (RBB) dan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) yang telah diajukan Direksi dan disetujui Dewan Komisaris pada rapat Direksi bersama Dewan Komisaris tanggal 22 November 2023 dan yang telah disampaikan kepada OJK.

Pengungkapan keselarasan Misi dan Visi adalah sebagaimana tertuang pada Laporan Pelaksanaan Tata Kelola sehubungan Laporan Pelaksanaan Tugas Direksi dan Dewan Komisaris pada Laporan Keberlanjutan 2023 ini.



sosialisasi misi, visi, nilai perusahaan dan identitas bersama

Berbagai upaya aktif telah dilakukan oleh Direksi untuk memastikan bahwa Misi, Visi dan Nilai Perusahaan, serta Identitas Bersama terus ditegakkan dan diterapkan selama tahun 2023, antara lain melalui:

1. *Induction* program untuk seluruh karyawan baru sampai level pejabat eksekutif.
2. Penerapan nilai perusahaan dan identitas bersama dalam setiap kegiatan di BTPN Syariah

identitas Bersama

Identitas bersama telah dipilih untuk menyatukan semangat seluruh karyawan dalam menjalankan Misi dan Visi Perusahaan.

#bankirpemberdaya adalah identitas bersama yang mengingatkan seluruh karyawan BTPN Syariah terhadap profesi bankir yang berbeda. Bankir yang memilih untuk menggalang dana dari kelompok sejahtera dan disalurkan untuk pemberdayaan keluarga prasejahtera. Berbeda, demi memenuhi kerinduan jiwa untuk bermanfaat bagi sesama.

Sesuai dengan Misi dan Visi Perusahaan dalam rangka memenuhi panggilan jiwa, menjadi **#bankirpemberdaya** berarti berkomitmen penuh untuk memberdayakan keluarga prasejahtera produktif di Indonesia. **#bankirpemberdaya** bahu-membahu menjalankan fungsi dan tugasnya masing-masing untuk menjalankan amanat demi mewujudkan niat baik lebih cepat.



Jejak LANGKAH

2008

PT BANK BTPN Tbk (dahulu bernama PT Bank Pensiunan Nasional Tbk) membentuk Unit Usaha Syariah

2010

Piloting Project Tunas Usaha Rakyat yang fokus melayani nasabah dari komunitas inklusi produktif, dimulai dengan tiga komunitas di daerah Banten dan Pandeglang

2011

Dimulai perluasan pelayanan terhadap nasabah inklusi produktif ke seluruh wilayah Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatra, dan Nusa Tenggara Timur

2014

14 Juli

PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah menjadi Bank Syariah ke 12 di Indonesia, yang merupakan hasil penggabungan dari PT Bank Sahabat Purba Danarta yang telah memperoleh izin konversi kegiatan usaha menjadi bank umum syariah dan Unit Usaha Syariah BTPN yang telah memperoleh izin *spin off*

2017

16 November

Perubahan status dari Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka dan mengubah nama dari sebelumnya PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah menjadi PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk

2018

8 Mei

PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk resmi menjadi perusahaan publik dengan kode saham BTPS di Bursa Efek Indonesia



2019

14 Juli

Genap lima tahun PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk menjadi Bank Umum Syariah dan menjadi satu-satunya lembaga keuangan yang berpusat untuk melayani keluarga inklusif produktif

2020

2 Juni

PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk mengubah nama menjadi PT Bank BTPN Syariah Tbk, menyesuaikan dengan Entitas Induk

7 Juli

PT Bank BTPN Syariah Tbk naik peringkat dari Bank Kelompok BUKU 2 menjadi Bank Kelompok BUKU 3 secara organic

18 November

PT Fitch Ratings Indonesia menaikkan Peringkat Jangka Panjang Nasional dari AA+ (idn) Outlook Stabil menjadi AAA (idn) Outlook Stabil

2021

23 Oktober

Pendirian Entitas Anak, PT BTPN Syariah Ventura

30 Oktober

PT Bank BTPN Syariah Tbk menjadi Kelompok Bank berdasarkan Modal Inti 2 (KBMI 2) berdasarkan redefinisi pengelompokkan bank merujuk kepada POJK Nomor 12/POJK.03/2023 tentang Bank Umum

2 November

PT Fitch Ratings Indonesia memberikan afirmasi Peringkat Jangka Panjang Nasional di AAA (idn) Outlook Stabil

2022

30 Mei

PT BTPN Syariah Ventura, sebagai Entitas Anak, resmi beroperasi

2 Juni

Pemutakhiran layanan e-channel Tepat Mobile Banking dan Internet Banking bagi nasabah pendanaan

30 September

PT Fitch Ratings Indonesia memberikan afirmasi Peringkat Jangka Panjang Nasional tetap di AAA (idn) Outlook Stabil

2023

14 April

PT Fitch Ratings Indonesia memberikan afirmasi Peringkat Jangka Panjang Nasional tetap di AAA (idn) Outlook Stabil

26 Juni

Mendapatkan sertifikasi ISO27001 Sistem Manajemen Keamanan Informasi

8 Agustus

1.821 Mahasiswa dari 257 Universitas berhasil direkrut dari program MBKM untuk magang di BTPN Syariah.

26 Oktober

Treasury System telah resmi digunakan sebagai upaya untuk melakukan otomasi proses transaksi Treasury

1 Desember

Pemutakhiran layanan e-channel Tepat Mobile Banking: pembukaan aplikasi tabungan secara *online* melalui bagi nasabah pendanaan



Profil PERUSAHAAN [GRI 2-1]

nama perusahaan
PT Bank BTPN Syariah Tbk
Perubahan nama Bank efektif pada tanggal 4 Juni 2020 berdasarkan Salinan Keputusan Deputi Komisioner Pengawas Perbankan I Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-99/PB.1/2020 tanggal 4 Juni 2020 tentang Penetapan Penggunaan Izin Usaha Atas Nama PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk Menjadi Izin Usaha Atas Nama PT Bank BTPN Syariah Tbk.

alamat kantor pusat & sekretaris perusahaan
[OJK C.2] [GRI 2-3]
Menara BTPN Lantai 12
CBD Mega Kuningan
Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5-5.6,
Jakarta Selatan 12950

Telepon: +62-21 300 26 400
Faksimili: +62-21 252 0356 (*general*)
Email: corsec@btpnsyariah.com

pemegang saham [OJK C.3.c]
(posisi 31 Desember 2023)
PT BANK BTPN Tbk (70,00%)
Publik (29,99%)
Saham Treasuri (0,01%)

Tanggal Efektif Beroperasi sebagai Bank Umum Syariah
14 Juli 2014

modal dasar
Rp2.750.000.000.000 (Dua Triliun Tujuh Ratus Lima Puluh Miliar Rupiah)

modal ditempatkan dan disetor penuh
Rp770.370.000.000 (Tujuh Ratus Tujuh Puluh Miliar Tiga Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah)

bidang usaha
[OJK C.4] [GRI 2-6]
Bidang perbankan berdasarkan prinsip syariah

ruang lingkup pasar
[GRI 2-6]
Pembiayaan masyarakat inklusi di seluruh wilayah Indonesia

wilayah operasional dan jaringan layanan
[OJK C.3.d] [GRI 2-6]
Memiliki 15 Kantor Cabang dan 41 Kantor Fungsional Operasional yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, terdapat lebih dari 7 Juta nasabah (4,2 Juta aktif), dan mencakup 257 ribu komunitas yang tersebar di 24 provinsi di Indonesia dan 2.600 kecamatan.

situs web dan email korporasi lainnya
www.btpnsyariah.com
corsec@btpnsyariah.com
corporatecommunications@btpnsyariah.com
investorrelation@btpnsyariah.com

Laporan Keberlanjutan dan informasi lainnya mengenai BTPN Syariah telah tercantum dalam Situs Web Perseroan

media sosial
Instagram: @btpnsyariah
https://www.instagram.com/btpnsyariah/

Instagram: @saya.bankirpemberdaya
https://www.instagram.com/saya.bankirpemberdaya/

Facebook: BTPN Syariah/@btpnsyariah.id
https://facebook.com/btpnsyariah.id

YouTube: BTPN Syariah
https://www.youtube.com/BTPNSyariah

LinkedIn: BTPN Syariah
https://www.linkedin.com/company/btpnsyariah

Tiktok: @btpnsyariah

badan hukum
Perseroan Terbatas (PT)



dasar hukum pendirian

- **Akta Pendirian** PT Bank Purba Danarta Nomor 10 tanggal 7 Maret 1991, yang kemudian diperbaiki dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar Nomor 39 tanggal 25 Mei 1992, dan Akta Perubahan Nomor 25 tanggal 11 Juli 1992 yang dibuat di hadapan Notaris H. Abu Jusuf, S.H.
- Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Purba Danarta Nomor 5 tanggal 27 Agustus 2007 yang dibuat di hadapan Notaris Winarti Lukman Widjaja, S.H., mengenai **penyesuaian dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas** dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 18 Januari 2008 nomor AHU-02507. AH.01.02.Tahun 2008, yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Maret 2008 nomor 22, Tambahan nomor 3032.

perubahan nama

- Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Purba Danarta No. 01 tanggal 01 April 2009 yang dibuat di hadapan Notaris Winarti Lukman Widjaja, S.H., mengenai **perubahan nama PT Bank Purba Danarta menjadi PT Bank Sahabat Purba Danarta** dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 22 Juli 2009 nomor AHU-34303.AH.01.02.Tahun 2009.
- Akta Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Sahabat Purba Danarta disebut juga Bank Sahabat Nomor 25 tanggal 27 Agustus 2013 junc to Akta Notaris Nomor 30 tanggal 25 September 2013 yang dibuat di hadapan Notaris Hadijah S.H., M.Kn., **mengenai perubahan nama PT Bank Sahabat Purba Danarta (BSPD) menjadi PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah (BTPN Syariah)** dan telah mendapat persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-50529. AH.01.02. tahun 2013 tanggal 1 Oktober 2013 dan diumumkan dalam Berita Negara Nomor 94, tambahan No.124084 tanggal 22 November 2013.
- Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk Nomor 26 tanggal 16 April 2020, yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., **mengenai perubahan nama PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk menjadi PT Bank BTPN Syariah Tbk** dan telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan No. AHU-0034666.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 8 Mei 2020 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0214020 tanggal 8 Mei 2020.

perubahan anggaran dasar

- Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Nomor 15 tanggal 31 Oktober 2013 yang dibuat di hadapan Notaris Indah Indriani, S.H., M.Kn., **mengenai perubahan domisili Perseroan yang semula berkedudukan di Semarang menjadi Jakarta Selatan** dan telah terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai keputusan dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Nomor AHU-60408.AH.01.02. Tahun 2013 tanggal 21 November 2013 dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Nomor AHU. AH.01.10-47895 tanggal 12 November 2013.
- Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 27 tanggal 30 Januari 2014 yang dibuat di hadapan Notaris Hadijah, S.H., M.Kn., mengenai **pemisahan Unit Usaha Syariah PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk ("UUS BTPN") dari PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk ("BTPN**") dan telah menerima Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Nomor AHU-AH.01.10-04338 tanggal 12 Februari 2014.
- Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham, Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Nomor 57 tanggal 16 November 2017 yang dibuat di hadapan Notaris Jose Dima Satria, S.H.,



M.Kn., mengenai **perubahan status menjadi perusahaan terbuka** dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal 16 November 2017 nomor AHU-0024076.AH.01.02.Tahun2017 dan pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya tanggal 16 November 2017 nomor AHU-AH.01.03-0191730.

- Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham, Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk Nomor 8 tanggal 5 April 2018 yang dibuat di hadapan Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., tentang **perubahan Anggaran Dasar BTPN Syariah** dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tanggal 10 April 2018 nomor AHU-0007953. AH.01.02. Tahun 2018;
- Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham, Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk Nomor 178 tanggal 31 Mei 2018 yang dibuat di hadapan Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., **tentang perubahan Anggaran Dasar (modal) BTPN Syariah** dan telah memperoleh pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai tanggal 21 Juni 2018 nomor AHU-AH.01.03-0215425.
- Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Tahunan PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk Nomor 26 tanggal 16 April 2020, yang dibuat di hadapan Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., tentang **perubahan Anggaran Dasar Perseroan** dan telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan No.AHU-0034666. AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 8 Mei 2020 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No.AHUAH.01.03-0214020 tanggal 8 Mei 2020.
- Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Tahunan PT Bank BTPN Syariah Tbk Nomor 35 tanggal 21 April 2021, yang dibuat di hadapan Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., tentang **Perubahan Anggaran Dasar Perseroan** dan telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0309443 tanggal 17 Mei 2021.

perubahan susunan direksi, dewan komisaris dan dewan pengawas syariah

- Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk Nomor 02 tanggal 2 September 2019 yang dibuat di hadapan Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., tentang **Susunan Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah** dan telah memperoleh pemberitahuan atas perubahan Data Perseroan tanggal 17 September 2019 nomor AHU-AH.01.03-0332927.
- Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank BTPN Syariah Tbk Nomor 36 tanggal 21 April 2021 yang dibuat oleh Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., tentang **Susunan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah** dan memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Bank BTPN Syariah Tbk No.AHU-AH.01.03-0260167 tanggal 23 April 2021.
- Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank BTPN Syariah Tbk Nomor 42 tanggal 21 April 2022 yang dibuat oleh Ashoya Ratam, SH, MKn, tentang **Susunan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah** dan memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Bank BTPN Syariah Tbk No. AHU-AH.01.09-0010849 tanggal 1 Mei 2022.
- Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank BTPN Syariah Tbk Nomor 25 tanggal 13 Oktober 2022 yang dibuat oleh Ashoya Ratam, SH, MKn, tentang **Susunan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah** dan memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Bank BTPN Syariah Tbk No. AHU-AH.01.09-0067440 tanggal 20 Oktober 2022.
- Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank BTPN Syariah Tbk Nomor 27 tanggal 12 April 2023 yang dibuat oleh Ashoya Ratam, SH, MKn, tentang Susunan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah dan memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Bank BTPN Syariah Tbk No. AHU-AH.01.09.0112366 tanggal 19 April 2023; dan



- Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank BTPN Syariah Tbk Nomor 46 tanggal 27 April 2023 yang dibuat oleh Ashoya Ratam, SH, MKn, tentang Susunan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah dan memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Bank BTPN Syariah Tbk No. AHU-AH.01.09.0112846 tanggal 27 April 2023.

entitas anak usaha
PT BTPN Syariah Ventura

bursa efek
PT Bursa Efek Indonesia
- 25 April 2018 Pendaftaran *Go Public* BTPN Syariah dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan Pengawas Pasar Modal
- 3 Mei 2018 BTPN Syariah resmi terdaftar di Bursa Efek Indonesia
- 8 Mei 2018 Pencatatan dan Perdagangan Saham Perdana BTPN Syariah

kode saham
BTPS

ISIN Code
ID1000142805

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) PT Bank BTPN Syariah Tbk
01.551.806.1-511-000

Nomor Induk Berusaha (NIB) PT Bank BTPN Syariah Tbk
9120209291387

auditor independen
Siddharta Widjaja & Rekan

(*an Indonesian partnership and member firm of the KPMG network of independent member firm affiliated with* KPMG International Cooperative)

Wisma GKBI Lantai 32, Jl. Jend. Sudirman No. 28,
Jakarta 10210, Indonesia
Telepon: +62-21 574 2333
Faksimili: +62-21 574 1777

biro administrasi efek
PT Datindo Entrycom
Jl. Hayam Wuruk No. 28
Jakarta 10120
Telepon: +62-21 350 8077 (*Hunting*)
Faksimili: +62-21 350 8078

perusahaan pemeringkat efek
PT Fitch Ratings Indonesia
DBS Bank Tower, Lt. 24, Suite 2403
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 3-5
Jakarta 12940
Telepon: +62-21 2988 6800
Faksimili: +62-21 2988 6822

rating perusahaan
Peringkat Nasional Jangka Panjang:
Afirmasi dengan rating AAA (Idn), *Outlook* stabil oleh PT Fitch Ratings Indonesia pada 14 April 2023

daftar indeks kinerja saham di bursa efek indonesia BTPN Syariah
- IHSG
- Indeks IDX80
- Indeks LQ45
- Indeks IDX30
- Indeks Quality 30
- Indeks Growth 30
- Indeks ISSI
- Indeks JII70
- IDX SMC Liquid
- IDX SMC Composite
- Indeks MNC36
- Indeks INFOBANK15
- Indeks Bisnis-27
- Indeks KOMPAS100
- Indeks Pefindo25
- Indeks ESGS KEHATI
- Indeks ESGQ KEHATI

Produk dan LAYANAN [OJK C.4][GRI 2-6]

penghimpunan dana berbasis syariah



Tepat Tabungan Syariah

Produk tabungan dengan akad wadiah yad dhamanah yang diberikan kepada nasabah Tepat Pembiayaan Syariah maupun non nasabah pembiayaan. Produk yang mendukung keuangan inklusif, dimana nasabah dapat memiliki kemudahan bertransaksi pembayaran tagihan, pembelian pulsa, transfer dana, serta bertransaksi setor tunai dan Tarik tunai di Mitra Tepat BTPN Syariah. Saat ini, layanan tersebut dilengkapi dengan fitur layanan pembayaran produk kebutuhan sehari-hari nasabah BTPN Syariah sehingga diharapkan makin memudahkan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga dan lingkungannya.



Tepat Tabungan

Dapat dibuka dengan tanpa setoran minimal, dengan akad wadiah yad dhamanah. Nasabah memperoleh kemudahan untuk bertransaksi di seluruh cabang Bank, bebas biaya administrasi bulanan.



Tepat Tabungan Platinum

Tabungan untuk nasabah perorangan (Tepat Tabungan Platinum) dan perusahaan (Tepat Tabungan Platinum Bisnis) yang dikelola berdasarkan perjanjian bagi hasil (akad mudharabah mutlaqah) ini memberikan keleluasaan dalam melakukan penarikan tunai tanpa batas dan bebas biaya administrasi bulanan (syarat dan ketentuan berlaku) untuk imbal hasil optimal.



Tepat Tabungan Rencana

Sarana menabung terencana, agar ringan wujudkan beragam impian, dengan berbagai pilihan setoran bulanan dan jangka waktu (akad mudharabah mutlaqah)



Rekening Tabungan Jamaah Haji

Produk tabungan bagi nasabah yang berencana untuk melaksanakan ibadah haji ke Tanah Suci. Berdasarkan prinsip syariah dengan akad wadiah yad dhamanah, produk yang aman dan terjamin ini mempunyai sistem terkoneksi *online* dengan SISKOHAT Kementerian Agama RI.



Tepat Deposito

Deposito berdasarkan perjanjian bagi hasil (akad mudharabah mutlaqah) antara BTPN Syariah (mudharib) dengan nasabah sebagai pemilik dana (shahibul maal) dengan jangka waktu mulai dari 1 s/d 28 hari dan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, dan 24 bulan, dalam mata uang Rupiah.



Tepat Giro

Produk penempatan dana menggunakan akad wadiah yad dhamanah, memberikan fleksibilitas bagi nasabah untuk bertransaksi menggunakan Cek atau Bilyet Gi

pembiayaan berbasis syariah



Tepat Pembiayaan Syariah – Kelompok

Pembiayaan yang ditujukan khusus kepada perempuan prasejahtera produktif, dilakukan berdasarkan perjanjian jual beli (akad wakalah wal murabahah). Tepat Pembiayaan Syariah (sebelumnya disebut PMD) memiliki fokus pada pembangunan karakter dan kebiasaan kebiasaan baik nasabah, yaitu Berani Berusaha, Disiplin, Kerja Keras, dan Saling bantu (BDKS).



Tepat Pembiayaan Modal Kerja Syariah Kepada Perusahaan Pembiayaan

Melalui produk ini, Bank menyalurkan pembiayaan kepada perusahaan pembiayaan syariah untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan nasabah end user dari perusahaan pembiayaan syariah yang saat ini belum dapat dipenuhi oleh Bank. Bank bersinergi dengan PT BANK BTPN Tbk selaku entitas induk untuk memperkuat penerapan prinsip kehati-hatian dalam proses penyaluran pembiayaan kepada nasabah.



Tepat Pembiayaan Produktif Syariah kepada Perusahaan Institusi yang Mendukung Segmen Ultra Mikro

Pembiayaan modal kerja dan investasi yang ditujukan kepada Perusahaan atau Institusi yang Mendukung Segmen Ultra Mikro, melalui perjanjian jual beli (akad murabahah) untuk meningkatkan aset Bank dan membangun ekosistem bisnis dengan partner-partner strategis guna memperluas jangkauan pelayanan dan meningkatkan manfaat pembiayaan sehingga dapat memenuhi kebutuhan nasabah yang saat ini belum dapat dipenuhi oleh BTPN Syariah.



Tepat Fasilitas Pembiayaan Modal Kerja Kepada Mitra Tepat

Dengan produk Tepat Fasilitas Pembiayaan Modal Kerja kepada Mitra Tepat, Mitra Tepat sebagai agen mendapatkan kemudahan dalam menggunakan pembiayaan berputar dari Bank sesuai dengan produk yang dibutuhkan. Fasilitas pembiayaan dapat digunakan nasabah untuk menutup kebutuhan likuiditas modal berputar dalam melayani nasabah yang bertransaksi ke Agen ataupun modal berputar persediaan. Fasilitas ini diberikan dengan menggunakan beberapa opsi akad, yang antara lain:
1.Akad Qardh untuk kebutuhan likuiditas
2.Akad Murabahah untuk pembelian barang persediaan



Tepat Pembiayaan Syariah Individu

Tepat Pembiayaan Syariah Individu adalah pembiayaan dengan tujuan modal kerja, investasi dan konsumtif yang diberikan kepada nasabah komunitas dan nasabah non komunitas.



Penyaluran Pembiayaan Melalui Skema Kerjasama dengan Partner Bank (Channeling)

Pembiayaan yang akan disalurkan melalui kerjasama dengan *Partner* berupa penyediaan limit pembiayaan modal kerja. *Partner* akan berperan untuk memanfaatkan limit pembiayaan tersebut dengan cara menyalurkan kepada *member/user* (selanjutnya disebut Nasabah *(end user)* BTPN Syariah) sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan antara BTPN Syariah dan *Partner*



Wilayah OPERSIONAL [OJK C.3.D][GRI 2-6]

Lokasi wilayah operasional dengan dukungan 15 kantor cabang dan 41 kantor fungsional BTPN Syariah tergambar di bawah ini:

Melayani:



1. Sumatra
2. Kalimantan & Sulawesi
3. Jawa
4. NTT

Selain itu terdapat lebih puluhan ribu Mitra Tepat yang tersebar di 24 provinsi di Indonesia yang melayani nasabah pembiayaan BTPN Syariah. Selama tahun 2023, terdapat perubahan atas jumlah kantor fungsional (KFO) dari semula 47 KFO menjadi 41 KFO.

Skala USAHA [OJK C.3.A][GRI 2-7]

Keterangan	Satuan	Periode		
		2023	2022	2021
Jumlah Karyawan	orang	14.310	12.781	12.218
Total Pendapatan	Rp Juta	5.259.749	5.029.350	4.279.210
Dana Pihak Ketiga	Rp Juta	12.142.817	12.048.529	10.973.460
Total Liabilitas	Rp Juta	12.661.362	12.757.021	11.449.156
Ekuitas	Rp Juta	8.777.133	8.407.995	7.094.700
Total Aset	**Rp Juta**	**21.435.366**	**21.161.976**	**18.543.856**



Rantai Pasok dan MITRA KERJA [GRI 2-6]

BTPN Syariah dalam memberikan langkah nyata memerlukan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan termasuk dukungan berbagai mitra kerja. Mitra kerja pendukung teknologi, vendor barang kebutuhan kerja, lembaga penyedia jasa pendidikan, pelatihan, jasa hukum, notaris, penyedia alih daya, dan sebagainya bersama-sama membentuk ekosistem digital syariah.

Dalam memilih mitra kerja, BTPN Syariah mengedepankan sifat adil dan transparan. Mitra kerja yang terpilih masuk ke dalam Daftar Rekanan dengan persyaratan umum kesesuaian kompetensi, kepatuhan terhadap aturan ketenagakerjaan termasuk kesediaan para mitra kerja sewaktu-waktu untuk diperiksa langsung. Daftar Rekanan kerja BTPN Syariah juga selalu dilakukan peninjauan dan evaluasi secara berkala. Di masa pandemi BTPN Syariah juga menambahkan persyaratan terkait penerapan protokol kesehatan bagi para mitra kerja.

BTPN Syariah berkomitmen mengutamakan mitra kerja lokal yang secara geografis lebih dekat dengan lokasi operasional perusahaan. Namun apabila barang dan jasa yang dibutuhkan tidak tersedia pada pemasok/mitra kerja lokal, maka akan dicarikan pemenuhannya melalui mitra kerja dari lokasi lain/internasional.

Area	2023		2022		2021	
	Jumlah Pemasok	Nilai Pengadaan (dalam jutaan rupiah)	Jumlah Pemasok	Nilai Pengadaan (dalam jutaan rupiah)	Jumlah Pemasok	Nilai Pengadaan (dalam jutaan rupiah)
Sumatra	43	6.539	52	4.417	52	7.481
Jawa	344	659.774	346	746.309	335	49.630
Kalimantan	7	868	13	462	12	184
Sulawesi	8	426	7	311	6	141
Bali dan Nustra	17	43.487	14	26.520	17	16.047
Total	**419**	**711.095**	**432**	**778.019**	**422**	**523.482**

Perubahan Perusahaan YANG SIGINIFIKAN [OJK C.6][GRI 2-6]

Terdapat perubahan pada susunan Pengurus Perseroan sebagai berikut:

- Perubahan pada susunan anggota Dewan Komisaris sehubungan dengan pengunduran diri Yenny Lim sebagai Komisaris dan pengangkatan Mulya Effendi Siregar sebagai Komisaris Independen. Perubahan tersebut berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan BTPN Syariah yang dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank BTPN Syariah Tbk Nomor 46 tanggal 27 April 2023 yang dibuat oleh Ashoya Ratam, SH, MKn.
- Perubahan pada susunan anggota Direksi sehubungan dengan pengunduran diri Gatot Adhi Prasetyo sebagai Direktur dan pengangkatan Dewi Nuzulianti sebagai Direktur. Perubahan tersebut berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan BTPN Syariah yang dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank BTPN Syariah Tbk Nomor 27 tanggal 12 April 2023 yang dibuat oleh Ashoya Ratam, SH, MKn.

Susunan dan komposisi Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah di BTPN Syariah telah memperhatikan keberagaman keahlian, pengalaman dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk memperkuat organisasi mencapai tujuan dan target perusahaan dalam koridor keuangan berkelanjutan. Lebih detail, perubahan susunan pengurus ini, tertuang dalam Laporan Tahunan BTPN Syariah tahun 2023 pada bagian Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan



Inisiatif Eksternal dan KEANGGOTAAN ASOSIASI [OJK C.5] [GRI 2-28]

Dalam memperkuat ekosistem digital syariah, BTPN Syariah aktif mengadopsi beberapa prakarsa eksternal sebagai respons terhadap perkembangan terkini, dan juga mendukung pencapaian beragam tujuan konsep pembangunan berkelanjutan skala global sebagaimana tertuang dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs).

Atas tujuan tersebut, BTPN Syariah aktif terlibat menjalin kerja sama dengan berbagai lembaga maupun asosiasi global terkait baik sebagai anggota maupun sebagai mitra kerja sama antara lain, sebagaimana tertuang pada tabel berikut:

No	Nama Asosiasi/ Inisiatif	Tujuan	Partisipasi Working *Group*/Komite	Kontribusi Dana
1	PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)	Bersifat Mandatory Membantu mendistribusikan hak-hak pemegang efek bersifat ekuitas dalam bentuk uang dan/atau efek dan membantu pelaksanaan aksi Korporasi dengan menyediakan Daftar Pemegang Efek Bersifat Ekuitas dan KTUR Pemegang Efek	Anggota	Rp11.000.000
2	Asosiasi Emiten Indonesia (AEI)	Merupakan wadah organisasi bagi BTPN Syariah selaku Perusahaan Publik	Anggota	Rp12.000.000
3	Indonesia Corporate Secretary Association (ICSA)	Merupakan wadah organisasi bagi *corporate secretary* BTPN Syariah	Anggota	Rp5.000.000
4	Perhimpunan Bank Swasta Nasional (Perbanas)	Bersifat Mandatory Merupakan wadah asosiasi bagi BTPN Syariah selaku Bank Swasta Nasional	Anggota	Rp36.000.000
5	Asosiasi Bank Syariah Indonesia (ASBISINDO)	Bersifat Mandatory Merupakan wadah asosiasi bagi BTPN Syariah selaku Bank Umum Syariah di Indonesia	Anggota	Rp150.000.000
6	Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan (FKDKP)	Merupakan wadah konsultasi dan komunikasi antar Direktur Kepatuhan Perbankan Indonesia	Anggota	Rp5.000.000

No	Nama Asosiasi/ Inisiatif	Tujuan	Partisipasi Working *Group*/Komite	Kontribusi Dana
7	Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI)	Merupakan wadah dalam mewujudkan aspirasi umat Islam terkait perekonomian dari sisi Syariah	Anggota	Rp36.000.000
8	Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI)	Merupakan lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang profesional, adil, terpercaya, dan pilihan utama nasabah dan bank dalam menyelesaikan sengketa perbankan.	Anggota	Rp17.500.000
9	Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan (FK-IJK)	Merupakan sarana forum komunikasi koordinasi antara Industri Jasa Keuangan dengan Regulator.	Anggota	Rp18.000.000 (untuk daerah Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan dan Sumatra Utara)
10	Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI)	Merupakan organisasi yang merepresentasikan seluruh pelaku sistem pembayaran dan menjadi mitra Bank Indonesia dalam mewujudkan tujuan Bank Indonesia dalam melaksanakan tugas mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran.	Anggota	Rp35.000.000

Sebagai sebuah lembaga jasa keuangan, BTPN Syariah berkomitmen dalam pemenuhan penerapan keuangan berkelanjutan sejalan dengan POJK Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik. [GRI 2-27]

Implementasi penerapan yang telah dilaksanakan di Bank adalah dengan telah tersedianya RAKB yang sesuai dengan prinsip-prinsip keuangan berkelanjutan, dibuat oleh Direksi dan disetujui oleh Komisaris dan dilaporkan kepada Regulator, di mana Bank telah menuangkan realisasi penerapan setiap tahunnya dalam Laporan Keberlanjutan yang disampaikan kepada seluruh pemangku kepentingan secara tepat waktu. [GRI 2-23]





05

Loyal Memberdayakan BAGI SESAMA

[GRI 413-1, FS13, FS14]





Senantiasa mendampingi dan melayani nasabah inklusi merupakan wujud loyalitas Bank terhadap nilai keberlanjutan. Loyalitas inilah yang diharapkan mampu memberikan dampak positif sosial yang nyata.

komitmen aspek sosial [OJK F.23][GRI 2-23, 2-24, 2-25]

Tetap setia dengan niat baik untuk terus bermanfaat bagi sesama, Bank meyakini dengan membantu mengurangi berbagai permasalahan sosial yang terjadi pada masyarakat inklusi akan memiliki imbas positif juga bagi nilai keberlanjutan usaha itu sendiri. Bagi BTPN Syariah, menjalankan kegiatan sosial merupakan bagian tak terpisahkan dari kegiatan bisnis yang pelaksanaannya terus dievaluasi untuk perbaikan tiada henti.

Memegang teguh filosofi "*Do Good, Do Well*" yang dijalankan oleh Bank sejak awal berdiri, bersama seluruh pemangku kepentingan yang memiliki niat baik untuk melindungi, menjaga, dan menggerakkan perekonomian masyarakat inklusi. Melalui Program Daya dan Bestee Tepat Bank terus mendampingi sesama di berbagai pelosok negeri.

Program Daya [OJK F.25]

Program Daya BTPN Syariah *Unique Value Proposition*, Program Daya sebagai bagian dari aktivitas sosial Perusahaan yang dapat mendukung usaha Bank dalam memperkuat literasi dan inklusi keuangan bagi masyarakat inklusi melalui kegiatan pelatihan dan pemberdayaan pada bidang kesehatan, kewirausahaan, dan lingkungan.

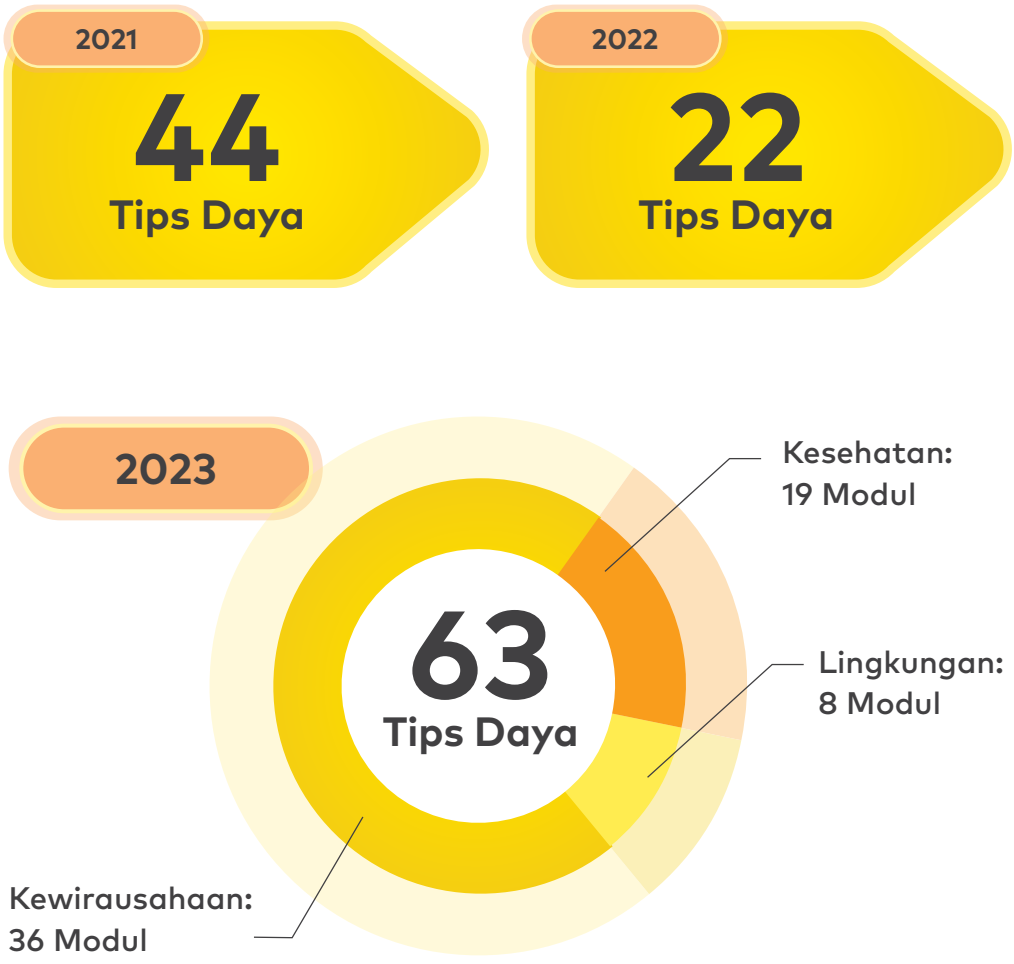
Program Daya untuk mendapatkan kemudahan *Access to Knowledge* (A2K) dibagi menjadi berbagai bagian, yaitu:

1. *Mini Meeting*
   Mini Meeting merupakan inisiasi program inklusi keuangan. Dalam pertemuan ini, *Community Officer* (CO) memperkenalkan berbagai produk dan layanan Bank kepada calon nasabah.
2. Pelatihan Dasar Keanggotaan
   Pelatihan rutin 1 jam selama 5 hari bagi masyarakat inklusi yang telah menjadi nasabah baru. Dalam pertemuan ini, CO kembali memberikan pemahaman mengenai kondisi, persyaratan, hak, dan kewajiban mereka sebagai nasabah pembiayaan Bank sekaligus memberikan pengetahuan tambahan bagaimana mengelola keuangan. CO terus mendampingi dan memberikan motivasi serta semangat kepada para nasabah masyarakat inklusi untuk terus meraih mimpi dengan perilaku Berani Berusaha, Disiplin, Kerja Keras, dan Saling Bantu.
3. Pertemuan Rutin Sentra
   Pertemuan setiap 2 minggu di lokasi sentra komunitas nasabah. Pertemuan ini berisi berbagai kegiatan pendampingan dan pemberdayaan antara lain di bidang kesehatan, lingkungan, dan kewirausahaan serta inisiatif pendukung bisnis. Diharapkan dengan pertemuan rutin sentra, dapat meningkatkan keahlian dan kapabilitas nasabah sesuai kebutuhan mereka. Seratus buah modul dan permainan disiapkan bagi nasabah masyarakat inklusi agar dapat tumbuh dan berkembang.



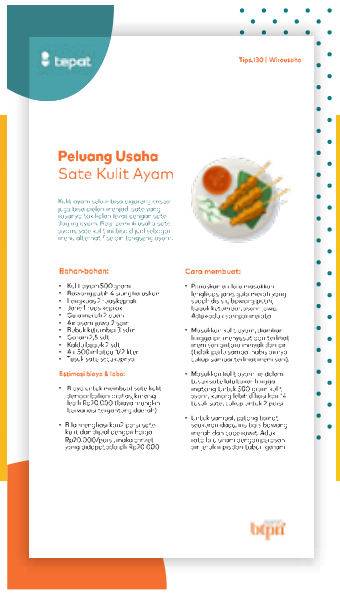
Petunjuk praktis (Tips) dirancang dan dikemas melalui 3 (tiga) jenis Tips Daya yaitu kewirausahaan, kesehatan, dan lingkungan dengan total tips 2023 sebanyak 63 buah meningkat jumlah Tips dari tahun 2022 sebanyak 24 buah.

Perkembangan materi pelatihan berupa tips sejak 2021 sampai dengan 2023 sebagaimana ditampilkan dalam data berikut ini:



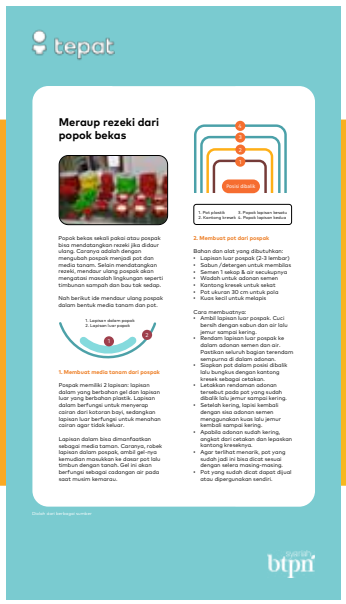


Tips Kewirausahaan



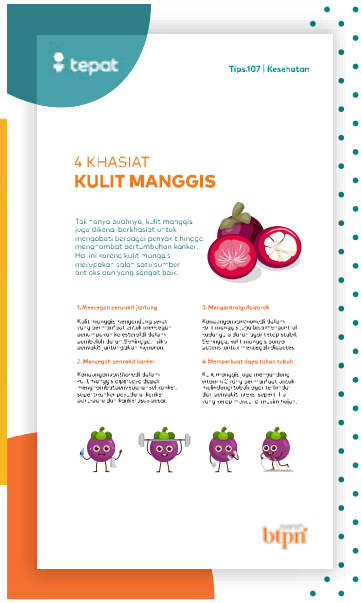


Tips Lingkungan





Tips Kesehatan





Kegiatan pemberdayaan yang sudah melekat dalam kegiatan bisnis dan pelayanan Bank menjadi makin dibutuhkan oleh masyarakat inklusi yang termasuk dalam segmen inklusif lebih dari sebelumnya. Pemberdayaan yang lebih luas dan menjangkau masyarakat di pelosok negeri menjadi bentuk dukungan Bank dalam pencapaian target indeks inklusi keuangan di Indonesia. [GRI 413-1, FS13, FS14]

4. Pemberdayaan Kelompok
   Merupakan program Pemberdayaan yang diberikan secara kelompok maupun kepada kelompok nasabah tertentu dengan kategori TBNI (Tumbuh Bersama Nasabah Inspiratif) dan TBNS (Tumbuh Bersama Nasabah Sukses). Kegiatan ini dilakukan secara rutin maupun tidak rutin (disesuaikan dengan kebutuhan).

   Program Pemberdayaan Kelompok terdiri dari :
   a. Pemberian Modul/Tips Kewirausahaan, Kesehatan dan Lingkungan secara rutin pada saat pertemuan sentra nasabah
   b. Modul BDKS (Berani Berusaha, Disiplin, Kerja Keras , dan Saling Bantu) diberikan pada saat Pertemuan Rutin Sentra (PRS) adalah modul pemberdayaan untuk nasabah dengan tujuan meningkatkan kehadiran nasabah. Kehadiran nasabah di Pertemuan Rutin Sentra pasca Pandemik Covid-19 diharapkan dapat meningkatkan kualitas nasabah BTPN Syariah



.

   c. Permainan Kartu Daya diberikan pada saat Pertemuan Rutin Sentra tertentu yang sudah melakukan pembayaran angsuran melalui Mitra Tepat . Permainan merupakan aktivitas pemberdayaan yang bersifat interaktif dengan menggunakan *games card* sebagai media untuk menyampaikan materi pelatihan.

Pada tahun 2023, terdapat 2.048 center yang memainkan permainan Kartu Daya.

1. Tata Letak/5R (24 kartu)



2. Inovasi (25 kartu)



3. Pemasaran Dasar (4 kartu)





Sentra HONJE 2
MMS CIRANJANG-CIANJUR
JABAR 2 - DH 1



Sentra Al ikhlas
MMS PUJER-BONDOWOSO
JATIM 1 - DH 3



Sentra DUSUN TUO 04A
MMS MARO SEBO ULU-JAMBI
SUM 5 - DH 4

d. Program Pemberdayaan kelompok tertentu yaitu program pendampingan kepada nasabah sukses dengan memberikan pelatihan webinar. Total nasabah sukses yang telah mengikuti pelatihan sebanyak 2.481 nasabah sepanjang tahun 2023.



Nasabah sukses mengikuti webinar kewirausahaan.

Materi yang diberikan selama program pendampingan nasabah sukses di tahun 2023 adalah:

Periode	Materi yang diberikan
Mei	Mindset Wirausaha & Peluang Usaha
	Identitas Usaha
	Kemasan yang Menjual
	Pencatatan Keuangan
Juni	Pemasaran
	Pengenalan Teknologi
	Pelayanan Prima
	Diversifikasi & Inovasi usaha
Agustus	Mindset Wirausaha & Peluang Usaha
	Branding Usaha
	Kemasan yang Menjual
	Pencatatan Keuangan
September	Pemasaran
	Pengenalan Teknologi
	Pelayanan Prima
	Pengembangan & Inovasi Usaha

Periode	Materi yang diberikan
Oktober	Penggunaan Video untuk Pengembangan Usaha
	Keuntungan Menjadi Mitra Tepat (MT)
November	Mengenal Strategi Pemasaran Terkini via Social Commerce
	Cara Promosi Menarik untuk Mitra Tepat (MT)

e. Program Pemberdayaan Pendampingan Individual
Merupakan pendampingan kewirausahaan melalui aktivitas Pendampingan Nasabah Inspiratif dan Program Bestee. Program pendampingan ini dilakukan secara intensif *one on one*.
Program Pemberdayaan Pendampingan Individual terdiri dari :
- Pendampingan Nasabah Inspiratif
  Program pendampingan kewirausahaan secara intensif one on one yang dilakukan oleh SBM (*Senior Business Manager*) kepada Nasabah Inspiratif. Total Nasabah Inspiratif yang telah didampingi selama tahun 2023 sebanyak 550.
- Program Pendampingan Bestee
  Merupakan program pendampingan kewirausahaan intensif yang dilakukan oleh mahasiswa kepada nasabah.

5. Pemberdayaan Kolaboratif melalui Solusi Digital
Merupakan pendampingan secara *online* bagi nasabah terpilih. *Platform* ini memiliki 3 tipe format yaitu video, tulisan/artikel dan bentuk infografis yang dapat dipelajari sendiri oleh setiap nasabah. Sampai tahun 2023, *platform* pemberdayaan yang disebut Bestee *Platform* telah memiliki total 368 modul. Jumlah modul ini meningkat cukup banyak dibandingkan total 68 modul pada tahun sebelumnya. 300 buah modul yang dibuat pada tahun 2023 merupakan modul yang ditentukan sesuai kebutuhan nasabah melalui assessment yang telah dilakukan terlebih dahulu.

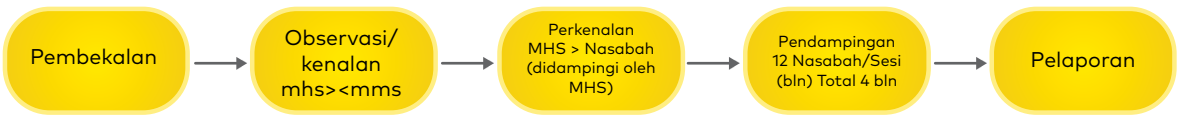
Tantangan utama dalam pelaksanaan program ini Bestee adalah untuk dapat terus meningkatkan jumlah nasabah yang menerima program pendampingan dan kontributor yang berpartisipasi dalam program ini. Langkah antisipasi yang dijalankan adalah memperkenalkan lebih luas program pendampingan Bestee baik ke internal BTPN Syariah maupun eksternal melalui media sosial maupun kelas-kelas sosialisasi.

Program Bestee merupakan program unggulan BTPN Syariah yang melibatkan multi pihak (*Penta helix collaboration*) yaitu Bank, Nasabah, Pemerintah, Komunitas dan Akademisi. Kolaborasi multi pihak tersebut menjadi salah satu upaya pelaksanaan TPB yaitu TPB no.17. Kolaborasi ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas dampak yang dihasilkan demi niat baik BTPN Syariah untuk terus setia mendampingi masyarakat inklusif.

Program Bestee [OJK F.25]

Bestee adalah program kemitraan antara pihak kampus dengan BTPN Syariah yang mengajak para mahasiswa untuk memberi pendampingan langsung kepada ibu ibu pelaku UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) dalam peningkatan kapasitas pengetahuan dan keterampilan secara terukur dan berkelanjutan.

Mekanisme Pendampingan



Pendampingan dilakukan 2 periode dalam 1 tahun dengan waktu pendampingan selama 4 bulan (4 sesi) per semester.
1. Periode 1: Februari – Juni
2. Periode 2: September – Desember

Penentuan waktu mulai dan berakhirnya periode pendampingan mengikuti jadwal Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek).



Program Bestee sampai tahun ini telah bekerja sama dengan Kampus Merdeka/Kemendikbud-Ristek, 6 lembaga mentor, dan 257 perguruan tinggi di Indonesia pada tahun 2023. Jumlah perguruan tinggi yang berkolaborasi dalam program Bestee naik secara signifikan dari sejumlah 41 perguruan tinggi di tahun 2022. Program Bestee telah mampu melibatkan 1.821 fasilitator, termasuk mahasiswa dan dosen, meningkat jumlahnya dari tahun 2022 sebanyak 108 fasilitator. Fasilitator tersebut tahun ini menjadi pendamping bagi >30.000 nasabah pembiayaan BTPN Syariah pada 474 daerah yang tersebar di 24 provinsi Indonesia.

BTPN Syariah loyal memberdayakan nasabah melalui program pendampingan Bestee dapat dirinci sebagai berikut:

1. Tahun 2022 dilaksanakan tahap piloting pada bulan Juli-Desember kepada 1.703 nasabah dengan nama program Sahabat Daya
2. Tahun 2023 program Sahabat Daya bertransisi menjadi program Bestee (Bersama Berdaya Sahabat Tepat Indonesia) dan melakukan tahap *scale up* 1 periode Maret -Juni dengan jumlah pemberdayaan sebanyak >16.000 nasabah
3. Program Bestee pada tahapan *scale up* 2 dengan periode program September - Desember 2023 telah memberdayakan sebanyak >33.000.

Secara total, jumlah nasabah pembiayaan yang telah didampingi dalam Program Bestee sepanjang tahun 2023 adalah sejumlah 49.000, dengan persebaran area nasabah sebagai berikut:



No	Provinsi	Jumlah nasabah didampingi
1	Jawa Timur	>9400
2	Sumatra Utara	>8800
3	Jawa Barat	>6300
4	Jawa Tengah	>6300
5	Sumatra Barat	>3000

No	Provinsi	Jumlah nasabah didampingi
6	Jambi	>2200
7	Aceh	>1900
8	Bali	>1550
9	Lampung	>1500
10	Nusa Tenggara Barat	>1050

Tujuan program pendampingan ini memberikan literasi terkait kewirausahaan guna pengembangan wawasan nasabah sehingga berdampak pada pengembangan usaha nasabah. Dalam aktivitasnya nasabah diberikan materi dan praktek yang tepat sesuai kebutuhan nasabah sehingga mampu mengatasi berbagi kendala dan tantangan dalam mengembangkan usahanya. Selain itu pendampingan ini diharapkan dapat memberikan dampak positif pada nasabah sehingga usaha nasabah lebih mengalami perubahan dan berkelanjutan.

Berbagai modul dan pendampingan yang diberikan sampai dengan Desember 2023 sebagai berikut:

Materi	Grand Total
Identitas Usaha - Merek	>10rb
Cara Membuat Pembukuan Sederhana untuk Bisnis Pemula	>3rb
Identitas Usaha - Logo	>2,5rb
Promosi 1 - Personal Selling - Promosi Lewat (WA)	>1,8rb
Identitas Usaha - Tagline & Informasi Produk	>1,6rb
Cara Membuat Media Promosi dengan Canva	>1,6rb
Promosi 1 - Tradisional Marketing	>1,5rb
Pentingnya Identitas Usaha Agar Semakin Berkembang	>1,5rb
Identitas Usaha - Daftar Harga	>1,2rb
Mencatat Barang yang Laku	>0,9rb
Budaya 5R	>0,9rb
Memasang Daftar Harga	>0,7rb
Lainnya	>11rb
Grand Total	**>38rb**

Dari data yang diambil sampai dengan 31 Desember 2023 terlihat trend beberapa jenis usaha mengalami perubahan positif. Detail data sebagai berikut:

Dari data yang diambil sampai dengan Desember 2023 terlihat trend beberapa jenis usaha mengalami perubahan positif. 3 jenis usaha terbesar yang mengalami perubahan positif adalah usaha kuliner (43% nasabah), perdagangan eceran (17%), dan warung sembako/kelontong (16%).

Dampak positif yang dihasilkan memberikan energi baru bagi Bank untuk terus tumbuh dan berkembang dan bermanfaat bagi berjuta umat.

Bestee *Platform* [GRI 203-1]

Merupakan *platform* digital pemberdayaan yang bertujuan untuk memberikan akses pengetahuan usaha kepada nasabah guna terjalinnya customer engagement dan peningkatan literasi pengetahuan usaha dengan akses digital. Dari waktu ke waktu, Bestee *platform* terus dilakukan pengembangan dan perbaikan agar dapat dimanfaatkan oleh para pemangku kepentingan dalam mendampingi nasabah (masyarakat inklusif) secara berkelanjutan.

Bestee *platform* dibangun dengan teknologi terkini berbasis web dan *mobile apps* yang saling terintegrasi. Aplikasi berbasis web digunakan oleh Fasilitator, Mentor dan Admin, sedangkan aplikasi berbasis mobile apps digunakan oleh Fasilitator (Kita Bestee) dan Nasabah (Bestee Ku).

Platform digital pemberdayaan yang disebut Bestee bertujuan untuk memberikan akses pengetahuan kepada nasabah dan dari sisi Bank tentunya penyediaan akses ini diharapkan akan mampu meningkatkan kualitas pemberdayaan serta *customer engagement*. Dari tahun ke tahun *platform* ini terus dilakukan pengembangan dan perbaikan yang ditujukan untuk dapat terus dimanfaatkan oleh para pemangku kepentingan dalam mendampingi masyarakat inklusif.

Bestee *Platform*, terdiri dari empat macam *platform* yang saling terintegrasi, diantaranya *platform* Bestee Ku untuk nasabah, Bestee Kita untuk fasilitator, Mentor untuk admin.

Berikut merupakan aplikasi Bestee *platform* yang digunakan oleh para pemangku kepentingan dalam pendampingan program Bestee:

Platform Nasabah (Bestee Ku)

Aplikasi yang digunakan oleh nasabah pembiayaan sebagai media pembelajaran berupa modul (materi) pembelajaran digital sesuai dengan jenis usaha nasabah.



Menu Modul Rekomendasi dan *Help Center* merupakan menu baru yang hadir di tahun 2023.

***Platform* Kontributor (Kita Bestee)**

Aplikasi yang digunakan oleh para pemangku kepentingan (kontributor/ mahasiswa/ volunteer/ fasilitator) sebagai sarana untuk menyampaikan konten (materi) dan monitoring dalam kegiatan/ aktivitas pendampingan Nasabah Pembiayaan.

1. *Register*



Fitur yang digunakan untuk mendaftar dan membuat akun Bestee oleh Fasilitator agar bisa mengakses seluruh fitur dan menu didalamnya dalam melakukan aktivitas pendampingan.



2. *Dashboard Performance*

Halaman tampilan awal dari aplikasi Kita Bestee yang berisi rangkuman performa Fasilitator seperti pengingat jadwal penting, banyaknya konten (materi) yang diajarkan kepada nasabah hingga informasi papan peringkat dari semua Fasilitator yang mengikuti program Bestee.

3. Aktivitasku



Menu penting yang mewajibkan para Fasilitator untuk membuat rencana kegiatan (aktivitas) yang akan dilakukan.



4. *Mentoring*

Menu yang memfasilitasi antara Mentor dengan *Mentee* (Fasilitator) untuk saling membuat rencana aktivitas *Mentoring*.

5.Forum

Menu yang memfasilitasi Mentor dengan para *Mentee* (Fasilitator) untuk bisa *share Insight* bahan diskusi berupa artikel, jurnal, fo to atau dokumen penunjang bahan *mentoring* lainnya. Menu ini juga bisa digunakan layaknya sebagai forum percakapan diskusi.





6. Papan *Score*

Menu yang menunjukkan tingkat keunggulan performa hasil keaktifan para Fasilitator yang diperoleh berdasarkan Nilai KPI yang diberikan Mentor.

Menu Foto *Geotagging*, Papan Pengumuman, Modul Rekomendasi, *Assessment* Modul, *Dashboard* Digital Rekrutmen, Gamifikasi, *Flagging Fraud*, dan *Survey* Pendampingan merupakan menu baru sepanjang tahun 2023.



Bestee Admin Web

Platform yang digunakan oleh Mentor sebagai media komunikasi, koordinasi dan monitoring seluruh kegiatan yang menunjang interaksi *mentoring* antara Mentor dengan *Mentee* (Fasilitator). Bestee Web Mentor di dalamnya terdapat fitur-fitur yang dibangun guna memfasilitasi proses *mentoring* seperti Pembuatan Jadwal *Mentoring*, Laporan *Mentoring*, Penilaian KPI dan Penilaian Kompetensi, Forum Grup Diskusi, Personal Chat dan *Dashboard Performance* Mentor.



Bestee Mentor Web

Platform yang digunakan oleh admin sebagai pusat integrasi dalam mengelola informasi program, aktivitas, jalur komunikasi dan pusat penanganan kendala pendampingan di Bestee. Fitur unggulan pada Web Admin ini digunakan untuk meninjau performa dan aktivitas kontributor melalui laporan pendampingan yang dinilai oleh mentor.

Secara garis besar pengembangan *platform* sepanjang tahun 2023 berupa penambahan fitur *survey* pendamping, laporan SMO dan SMC, fitur pembuatan laporan di Web Mentor, dan Menu Modul Rekomendasi dan *Help Center*.

Pemanfaatan Bestee *Platform* [GRI 203-2]

Bestee *platform* digunakan untuk Program Pendampingan Bestee berupa pendampingan intensif yang dilakukan oleh fasilitator kepada nasabah. Sepanjang tahun 2023, program pendampingan ini terbagi menjadi 3 tiga kelompok besar yaitu:

1. **Program Pendampingan Universitas**. Program Pendampingan yang dilakukan oleh mahasiswa kepada Nasabah Pembiayaan secara intensif atau *one on one*. Program ini dilakukan oleh mahasiswa sebagai sarana magang (*internship*) dengan pilihan posisi yang beragam.
2. **Program Pendampingan Bestee *Army***. Program Pendampingan yang dilakukan oleh Alumni Bestee (Bestee *Army*) dengan variasi bentuk program dan jumlah Nasabah Pembiayaan yang lebih fleksibel. Program pendampingan oleh Bestee *Army* terdapat 3 (tiga) program pada tahun 2023, yaitu:
   a. **Bestee Ceria**: merupakan program Pemberdayaan yang dilakukan di kumpulan Nasabah Pembiayaan BTPN Syariah dengan memberikan materi seperti kesehatan, kewirausahaan, kecantikan, maupun lingkungan.

Bestee Ceria telah dilaksanakan sepanjang tahun 2023:
1) di MMS Lowok Waru, Malang
2) di MMS Cimaung, Bandung
3) di MMS Bendosari, Solo
4) di MMS Kedungkandang, Malang
5) di MMS Cimaung, Bandung
6) di MMS Depok, Yogyakarta



Senam perut buncit, MMS Cimaung



Glowing Perawatan Kulit, MMS Lowokwaru



Senam perut buncit, MMS Kedung Kandang



Menu Makan Sehat, MMS Bendosari

Bestee *Army* yang terlibat sebagai volunteer/fasilitator adalah alumni dari program Bestee *piloting* 1 dan 2 di tahun sebelumnya.

b. **Bestee Pendampingan Individu :** merupakan program Pemberdayaan yang dilakukan dengan memberikan pendampingan *offline* secara individual selama 1 bulan per nasabah. Pada tahun 2023 materi yang dibawakan dan diimplementasikan adalah Daftar Harga, Identitas Usaha dan *Personal Selling*, Mahasiswa yang melakukan program pendampingan individual berlokasi di Medan dan Semarang.



Aktivitas

- Mendampingi nasabah dalam pengajaran materi kewirausahaan secara offline
- Mendampingi 1 nasabah
- Lokasi volunteering disesuaikan dengan domisili volunteer

Report

- Bestee *army* sudah selesai melakukan pendampingan individual.
- Materi yang dibawakan : Daftar Harga, Identitas Usaha & Personal Selling (Promosi Lewat whatsapps)
- Pelaksanaan : Medan dan Semarang

c. **Bestee Ambassador:** merupakan program Pemberdayaan yang dilakukan oleh para alumni Bestee atau Mahasiswa yang telah selesai mendampingi nasabah. dimana para Alumni disebut sebagai Bestee *Army* yang menjelaskan dan mengajak nasabah yang belum mengikuti program Bestee agar mau mengikuti program tersebut. Tahun 2023 ini dilaksanakan 4 sentra area Bandung.



Aktivitas

- Menjelaskan mengenai program Bestee danmangajak nasabah untuk mengikuti program
- Aktivitas dilakukan di kumpulan nasabah (PRS/Pertemuan Rutin Sentra)
- Lokasi volunteering disesuaikan dengan domisili volunteer

Report

- Bestee *army* sudah selesai melakukan bestee Ambassador.
- Dilakukan di area Bandung, di 4 sentra

d. **Bestee Internasional:** merupakan program kolaborasi antara pihak BTPN Syariah dengan *International Intership* dimana pihak BTPN Syariah melalui divisi Daya memberikan kesempatan kepada para mahasiswa/I dari berbagai Perguruan Tinggi di Australia yang ingin mengetahui lebih jauh terkait program pemberdayaan kepada nasabah di BTPN Syariah. Para mahasiswa magang berkesempatan untuk melakukan pendampingan langsung kepada nasabah BTPN Syariah dengan didampingi oleh mahasiswa lokal sebagai penerjemah antara nasabah dengan mahasiswa asing sekaligus juga sebagai *partner* selama kegiatan magang berlangsung.

Selama tahun 2023, program Bestee International sudah berjalan sebanyak 3 kali (3 *batch*). Berikut adalah detail jumlah peserta magang setiap *batch*-nya:



Batch 1

6 Mahasiswa
(3 mahasiswa Australia dan 3 mahasiswa indonesia)
4 Fasilator
2 *Social Media Officer*
6 Nasabah didampingi

Bulan: Januari 2023
Lokasi: Ciomas, Bogor

Batch 2

2 Mahasiswa
(1 mahasiswa Australia dan 1 mahasiswa Indonesia)
Fasilator + SMO *(Social Media Officer)*
7 Nasabah yang memperoleh pendampingan

Bulan: Juni-Agustus 2023
Lokasi: Tangerang, Serpong Barat

Batch 3

3 Mahasiswa (2 mahasiswa Australia dan 1 mahasiswa Indonesia)
Social Media Officer

Mempromosikan Program
Bestee di lingkup tier-3 -4 dan International

Bulan: November-Desember 2023

Berbagai kegiatan dilaksanakan sepanjang 3 batch pelaksanaan program Bestee Internasional tersebut di atas. Pada batch 1 dan batch 2 dilakukan pendampingan langsung mahasiswa kepada nasabah BTPN Syariah. Batch 3 mahasiswa membuat berbagai konten dari pelaksanaan pendampingan 2 batch sebelumnya untuk mempromosikan program Bestee melalui semua media promosi yang ada. Diharapkan dengan sosialisasi program Bestee yang baik akan menghasilkan lebih banyak lagi dampak positif bagi nasabah dan program Bestee di tahun berikutnya. BTPN Syariah terus mengharapkan lebih banyak lagi keterlibatan para pemangku kepentingan pada program Bestee dimasa yang akan datang dengan semangat loyal memberdayakan masyarakat inklusi di Indonesia.

Kampus Merdeka Fair (KMF)

BTPN Syariah untuk kesekian kalinya telah berkolaborasi dengan pihak Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dalam rangka memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada para mahasiswa untuk dapat belajar dan melatih diri agar lebih siap ketika akan memasuki dunia kerja yang sesungguhnya.

Kegiatan KMF khususnya pada tahun 2023 ditujukan untuk mengenalkan pendidikan vokasi ke masyarakat dengan menghadirkan ruang kolaborasi kreatif, selain itu juga untuk membangun semangat berkolaborasi yang berkelanjutan terkait kebijakan MBKM di masa yang akan datang.

Kampus Merdeka Fair dilaksanakan tanggal 11-12 Desember 2023 di Graha Bhakti Budaya, Kompleks Taman Ismail Marzuki, Cikini, Menteng, Jakarta Pusat. Selain BTPN Syariah, berbagai mitra yang terundang oleh pihak MBKM antara lain:

1. Perbankan: Bank Mandiri, BRI, BTPN Syariah
2. Perusahaan Negara: Telkomsel, Pertamina, PLN, INKA dll
3. Perusahaan Swasta: Blibli, Astra International, SCM, Kompas Gramedia dll.



Pasar Daya

BTPN Syariah memiliki impian besar membentuk ekosistem berkelanjutan. BTPN Syariah konsisten memberikan *access to finance* dan *access to knowledge* bagi masyarakat inklusi termasuk juga membangun *access to market* bagi mereka.

Salah satu program *access to market* saat ini adalah menjual produk nasabah yang telah didampingi melalui *market place* dan *social media* seperti Instagram *Live*, Shopee dan Bazar *Online*. Kegiatan pendampingan ini memiliki berbagai aktivitas, yaitu:

1. Menjual produk dengan melakukan siaran langsung (*live*) di Instagram atau Shopee.
2. Menjual produk secara konsinyasi, ongkos kirim produk dari nasabah ke Kantor Pusat BTPN Syariah ditanggung BTPN Syariah
3. Mengkomunikasikan program Pasar Daya ke karyawan BTPN Syariah dan pihak eksternal (Bestee *Army*, bestee, Universitas, Kementrian, dll)

Produk yang dijual dalam program Pasar Daya sangat bervariasi, terdapat berbagai jenis makanan (makanan kering, madu, kopi dan lain lain) dan non makanan (kain batik, tenun, peralatan rumah tangga, pakaian, tas, sepatu, hijab dan lain lain).

Diharapkan dengan adanya Program Pasar Daya ini dapat menumbuhkan minat sekaligus kreatifitas nasabah pembiayaan BTPN Syariah untuk memperluas akses/ channel pemasaran mereka melalui media online agar produk-produk yang dijual lebih dikenal dan diminati oleh masyarakat luas. Selain itu, Program Pasar Daya juga ditujukan untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada para nasabah pembiayaan BTPN Syariah agar produk mereka dapat berkompetisi di pasaran.





Testimoni Masyarakat

Testimoni masyarakat khususnya pendukung program Bestee dipandang penting oleh BTPN Syariah sebagai bahan evaluasi program untuk perbaikan pemberdayaan dimasa yang akan datang. Mentor dan Mahasiswa memiliki peran penting dalam loyal memberdayakan nasabah melalui program Bestee.

Mentor

Mentor berperan melakukan *mentoring*, *teaching* dan *Counseling* kepada *mentee* / mahasiswa secara konsisten dan terstruktur. Setiap *mentee* memiliki 1 mentor yang akan menjadi teman diskusi selama masa program Bestee. Jadwal *mentoring* minimal 1x/pekan, wajib dibuat melalui *platform*. Setiap *mentoring* dilaksanakan wajib didokumentasikan dan dilaporkan melalui *platform*.



Pengalaman yang saya dapat *Masya Allah* menambah value bagi saya terutama empati, Inklusi dan literasi bidang keuangan, wirausaha dan UMKM luar biasa menyenangkan. Dimanapun saya berada, pendampingan juga sangat mudah dilakukan karena semua sudah berbasis digital di *platform* Bestee. Pendampingan melalui Program Bestee mampu meningkatkan inklusi wirausaha bagi para Nasabah dan dapat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh nasabah

Restu
Dosen FEB Unisma

Selama program pendampingan berlangsung, setiap mentor ditugaskan untuk mendampingi sekitar 10-15 orang *mentee*. Jadwal *mentoring* wajib diajukan oleh mentor setiap minggunya sesuai dengan kesepakatan antara mentor dengan *menteenya*.

Pembahasan yang dilakukan pada saat *mentoring* meliputi: temuan mahasiswa di lapangan, kendala usaha nasabah, modul yang sesuai dengan profil dan kendala usaha nasabah, kendala saat pendampingan dengan nasabah sampai dengan cara membuat pelaporan baik di *Platform* Bestee maupun di *website* MBKM dll.



Ada kebanggaan tersendiri ketika mendapatkan kepercayaan menjadi bagian dari Mentor Program Bestee BTPN Syariah, karena Kami tidak hanya berkesempatan dalam mengamalkan keilmuan yang Kami miliki, namun sekaligus ikut serta dalam meningkatkan kapasitas generasi muda dalam perannya menjadi Fasilitator Pendamping UMKM. Program Bestee telah membuktikan menjadi program yang memiliki dampak positif langsung kepada banyak pihak, baik dari akademisi, organisasi, pemerintahan, hingga masyarakat. Semoga kedepanya akan semakin banyak pemimpin muda gemilang yang berasal dari alumni Program Bestee BTPN Syariah

Adib F. Hidayat
Mentor



Secara umum, tugas utama mentor adalah melakukan brain storming dan juga memberikan arahan kepada mahasiswa terkait kendala-kendala yang mereka hadapi selama melakukan pendampingan.

Mentor bukan satu-satunya pihak yang diharapkan untuk memberikan solusi kepada mahasiswa, melainkan peer group dan support system lainnya lah yang dapat membantu para mahasiswa untuk mendapatkan solusi terbaik dari permasalahan yang dihadapi oleh mahasiswa. Mentor hanya mengarahkan dan memberikan inisight dari hasil diskusi para menteenya.



Pengalaman ini telah memberikan saya peluang untuk terlibat secara langsung dalam pengembangan dan pemberdayaan pelaku usaha ultra mikro nasabah BTPN Syariah. Kita terlibat dengan antusias dan semangat positif, saling bertukar ide, dan berkomitmen untuk mencapai tujuan bersama. Terima kasih kepada tim Daya yang telah memberikan kesempatan ini untuk turut loyal memberdayakan para UMKM. Saya yakin bahwa dengan kerja sama dan dedikasi kita, kita dapat terus memberikan dampak positif bagi perkembangan UMKM Indonesia.

Roby Ardianto
Mentor

Peran penting lainnya bagi para mentor selain menjadi seorang pembimbing, mentor juga berperan menjadi pihak yang melakukan penilaian sekaligus berfungsi sebagai pengawas terhadap para *menteenya*. Jika di tengah proses pendampingan ditemukan pelanggaran maka tugas mentor untuk mengingatkan dan menindaklanjuti temuan tersebut kepada pihak internal.

Mahasiswa

Mahasiswa berperan sebagai fasilitator yang memiliki integritas dan sanggup melakukan kunjungan ke rumah nasabah sebagai bentuk pendampingan intensif selama 4 sesi/nasabah/pekan.

Sebelum pendampingan, mahasiswa diberikan pembekalan semua materi pendampingan terlebih dahulu hingga mengerti dan siap mendampingi. Selama pendampingan, mahasiswa setiap selesai 1x sesi pendampingan nasabah akan membuat laporan kepada mentor berupa foto, video dan deskripsi hasil pertemuan serta mendapatkan brief untuk pendampingan sesi berikutnya oleh mentor. Evaluasi menyeluruh akan dilakukan oleh BTPN Syariah setelah selesai masa pendampingan. Mahasiswa akan mendapat apresiasi, sertifikat dan masuk ke dalam grup alumni program Bestee.

Terdapat setidaknya 4 posisi yang ditawarkan kepada para mahasiswa yang ingin bergabung di dalam program Bestee. Antara lain:
1. Fasilitator
2. Social Media Officer
3. Social Media Coordinator
4. *Community Empowerment Officer*.

Fasilitator.
Tugas utama seorang fasilitator adalah melakukan pendampingan kepada nasabah BTPN Syariah dalam rangka meningkatkan kapasitas pengetahuan dan keterampilan terkait kewirausahaan selama kurang lebih 1 bulan di setiap sesinya.

***Social Media Officer* (SMO):**
Tugas utama *Social Media Officer* adalah melakukan kegiatan dokumentasi yang dilakukan oleh para Fasilitator agar kegiatan pendampingan dapat terdokumentasikan serta dapat dipublikasikan dengan baik. Selain itu, SMO juga berperan untuk memberikan rekomendasi modul kepada fasilitator terkait access to market (A2M).

***Social Media Coordinator* (SMC):**
Social Media Coordinator bertugas untuk membuat *content plan*, mengevaluasi hasil dokumentasi para SMO, serta mengaktivasi dan mengelola *social media* Bestee melalui *platform-platform* sosial media.

***Community Empowerment Officer* (CEO):**
Melakukan kurasi data pendampingan nasabah oleh fasilitator, melakukan monitoring data before-after nasabah, melakukan evaluasi terhadap aktivitas pelaporan yang dilakukan oleh fasilitator dll.



Program Bestee ini sangat bermanfaat bagi Mahasiswa. Kami mendapatkan banyak insight selama proses pendampingan nasabah yang bisa dijadikan pengalaman dan bekal berharga ketika sudah lulus kuliah. Insya Allah, pendampingan ini juga bisa menjadi ladang pahala bagi para mahasiswa karena bukan hanya sekedar magang biasa, tetapi juga memberikan dampak yang nyata bagi peningkatan skill dan penghasilan usaha nasabah

Intan Permata Sari
Fasilitator

Bagi para mahasiswa yang berminat untuk bergabung di dalam program Bestee, memiliki setidaknya 3 persyaratan utama, antara lain:
1. Berstatus mahasiswa/i aktif
2. Minimal semester 5
3. Memiliki minat terhadap pemberdayaan

Sedangkan keberhasilan mahasiswa/i dalam pelaksanaan program Bestee ini diukur melalui penetapan *Key Performance Indicator* yang telah ditetapkan yaitu :
1. Mengajarkan penggunaan Bestee *Platform* kepada nasabah (literasi teknologi)
2. mendampingi nasabah dengan mengajarkan materi pendampingan dari Bestee *Platform* sesuai profil nasabah (*access to knowledge*)
3. Menerapkan materi yang dipelajari dalam usaha nasabah sehingga terjadi perbaikan yang dibuktikandengan hasilnya (before - after pendampingan)
4. Membuat laporan rutin setiap pendampingan dengan tepat waktu kepada mentor yang akan dilaporkan ke MBKM/Kemendikbud dan kepada BTPN Syariah melalui Bestee *Platform*.

Dimana program ini merupakan kegiatan emas bagi para mahasiswa, dapat di konversi 20 sks dan mendapatkan pengalaman nyata di dunia kerja. Didampingi dan dibimbing oleh mentor yang sangat luar biasa untuk turut loyal memberdayakan ibu-ibu pra sejahtera pelaku UMKM. Kita harus mengetahui apa saja yang menjadi kendala, hambatan, dan juga masalah yang di hadapi para ibu-ibu pelaku UMKM, kemudian menemukan solusi dan mempraktikkannya untuk pengembangan usahanya. Dengan adanya program Bestee, semua pihak bisa mendapatkan manfaat dari pendampingan yang sangat luar biasa ini.

Rohmat Khasan Bisri
Fasilitator





Menjadi fasilitator pendamping dalam kegiataan bestee ini sangat amat seru sekali loh. Aku jadi dapat mengeksplor diri sehingga dapat mengasah soft skill dan hard skill yang aku miliki. Selain itu aku mendapatkan pembelajaran yang begitu berharga untuk berperan mendampingi serta memberikan dampak nyata dalam meningkatkan kapasitaas pengetahuan dan keterampilan ibu-ibu UMKM. Hal tersebut menginspirasi aku bahwasannya perempuan juga bisa berperan loh dalam menggerakan roda perekonomian keluarga

Salsabila H. Fatimah
Fasilitator

Mentor dan mahasiswa yang bergabung dalam program Bestee telah mengimplementasikan berbagai ilmu pengetahuan yang mereka dapatkan dari perguruan tinggi dengan semangat loyal memberdayakan untuk keberlanjutan. Mereka merasakan peran berarti untuk turut serta membangun negeri.





06

Loyal Memberdayakan

UNTUK NEGERI





Komitmen untuk senantiasa tetap loyal memberdayakan khusus perempuan para masyarakat inklusi, membawa BTPN Syariah berupaya setia memberikan pendampingan dan pembiayaan yang berkelanjutan, dimana diberi dengan produk di layanan yang paling tepat serta memperkuat kapasitas masyarakat sesuai dengan kebutuhan mereka.

tinjauan kondisi global dan domestik

[GRI 2-22]

Bank Indonesia dalam publikasinya menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi global diprakirakan melemah disertai dengan divergensi pertumbuhan antarnegara yang semakin lebar. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2023 sebesar 3% dan melambat menjadi 2,4% pada 2024.

Ekonomi Amerika Serikat (AS) pada 2023 masih tumbuh kuat terutama ditopang oleh konsumsi rumah tangga dan sektor jasa yang berorientasi domestik, sedangkan Tiongkok melambat dipengaruhi oleh pelemahan konsumsi dan penurunan kinerja sektor properti. Meningkatnya ketegangan geopolitik mendorong harga energi dan pangan meningkat sehingga mengakibatkan tetap tingginya inflasi global.

Ketidakpastian ekonomi dan keuangan global semakin tinggi karena terjadi bersamaan dengan meningkatnya ketegangan geopolitik, dan karenanya memerlukan penguatan respons kebijakan untuk memitigasi dampak negatif rambatan global terhadap ketahanan ekonomi domestik di negara-negara *Emerging Market Economies* (EMEs), termasuk Indonesia. Perekonomian global melambat dengan ketidakpastian yang semakin meningkat tinggi.

Kondisi ekonomi global tersebut juga berdampak kepada ekonomi *domestic* Indonesia. Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 18-19 Oktober 2023 memutuskan untuk menaikkan BI 7-*Day Reverse Repo Rate* (BI7DRR) sebesar 25 bps menjadi 6,00%, suku bunga *Deposit Facility* sebesar 25 bps menjadi 5,25%, dan suku bunga *Lending Facility* sebesar 25 bps menjadi 6,75%. Kenaikan ini untuk memperkuat kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah dari dampak meningkat tingginya ketidakpastian global serta sebagai langkah *pre-emptive* dan *forward looking* untuk memitigasi dampaknya terhadap inflasi barang impor (*imported inflation*), sehingga inflasi tetap terkendali dalam sasaran 3,0±1% pada 2023 dan 2,5±1% pada 2024.

Walaupun kondisi global masih menghadapi perlambatan pertumbuhan ekonomi akibat dari *downside risks* pandemi yang belum usai sepenuhnya khususnya bagi masyarakat inklusif, konflik geopolitik yang tengah terjadi dan berbagai dampak *climate change*, pertumbuhan ekonomi Indonesia

Tekanan inflasi di Indonesia pada Desember 2023 tercatat sebesar 2,61% yoy masih berada dalam koridor inflasi Bank Indonesia, menurun dari sebelumnya pada Desember 2022 sebesar 5,51%yoy.

Neraca transaksi berjalan pada triwulan ketiga tahun 2023 mencatatkan surplus sebesar USD 3.3 miliar. Cadangan devisa Indonesia pada Desember 2023 sebesar USD 146,4 miliar, meningkat dibandingkan Desember 2022 sebesar USD137,2 miliar.

Data demografis menunjukkan bahwa jumlah penduduk di Indonesia pada 2022 berjumlah sebanyak 278,7 juta jiwa pada 2023, meningkat diibandingkan tahun 2022 sebesar 275,8 juta jiwa. Di mana jumlah penduduk miskin di Indonesia tercatat sebanyak 25,9 juta jiwa pada Maret 2023. Sedangkan tingkat pengangguran di Indonesia pada 2023 menurun menjadi sebesar 5,32% dari sebelumnya sebesar 5,5% pada tahun 2022.



Indikator Ekonomi Makro Indonesia

	Satuan	2023	2022	2021
• Produk Domestik Bruto	(% perubahan tahunan)	5,0	5,01	5,03
• Inflasi	(% perubahan tahunan)	2,61	5,5	1,9
• Utang Pemerintah	(% dari PDB)	38	39,9	41,0
• Nilai Tukar	(IDR/USD)	15.397	15.568	14.269
• Neraca Transaksi Berjalan	(% dari PDB)	0,2	1	0,3
• Suku Bunga Acuan	(%)	6	5,5	3,5
• Penduduk	(dalam juta)	278,7	275,8	273,9
• Kemiskinan	(% dari populasi)	9,36	9,5	9,7
• Pengangguran	(% dari tenaga kerja)	5,32	5,5	6,5
• Cadangan Devisa	(dalam miliar USD)	146,4	137,2	144,9

Note : Untuk PDB, Utang Pemerintah pada 2023 adalah angka forecast, dan untuk Kemiskinan 2023 adalah posisi Maret 2023.

Sejumlah ekonomi nasional menggambarkan terjadinya fenomena "pemulihan bentuk K" pasca pandemi Covid-19. Kelompok ekonomi menengah ke atas berhasil mendorong pertumbuhan ekonomi, sementara kelompok ekonomi menengah ke bawah (masyarakat inklusif) masih merasakan tantangan untuk kembali pulih seperti sebelum pandemi. Hal itu sejalan dengan data Biro Pusat Statistik yang menunjukkan indeks produktivitas industri Usaha Mikro Kecil masih di bawah kondisi sebelum pandemi. Sementara produktivitas industri Usaha Menengah Besar sudah menunjukan pemulihan yang berarti.

Hal ini tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi BTPN Syariah untuk tetap loyal memberdayakan para perempuan produktif dari masyarakat inklusif dalam mewujudkan keberlanjutan di Indonesia. Bagi BTPN Syariah, pencapaian tidak hanya dinilai dari kinerja finansial tapi juga tercermin dari dampak positif yang dihasilkan Bank dalam memberi manfaat bagi lebih banyak orang.

Perbankan Syariah

Berdasarkan data Statistik Perbankan Syariah – Desember 2023 yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Jumlah Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah sama seperti tahun sebelumnya yaitu total 33 buah. Sedangkan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia berjumlah 173 buah atau meningkat dari Desember tahun sebelumnya yang berjumlah 167 buah. Jumlah kantor cabang BPRS juga mengalami penambahan dari 668 kantor pada Desember 2022 menjadi 694 kantor pada November 2023.

BTPN Syariah secara berkala mengukur kinerja secara internal dan membandingkan kinerja bank dengan *peers (benchmarking)*. Hasil *benchmarking* dapat menjadi bahan evaluasi berkala, memberikan informasi komparatif, dan memahami kelebihan kekurangan perusahaan yang dapat digunakan untuk perbaikan dan pengembangan BTPN Syariah kedepannya.

Kinerja BTPN Syariah [OJK F.2][GRI 2-22]

Kondisi perbankan syariah pada Desember 2023 memiliki kinerja yang kurang lebih sama dengan perbankan konvensional. ROA perbankan syariah sebesar 1,88% berada di bawah bank konvensional sebesar 2,74%, sedangkan BTPN Syariah memiliki ROA sebesar 6,3% masih berada jauh di atas rata-rata bank syariah maupun konvensional. BTPN Syariah mampu menjaga BOPO pada angka 78,4% berada di bawah rata-rata bank syariah (78,31%) dan konvensional (78,92%). BTPN Syariah memiliki kecukupan modal kuat tercermin dari CAR BTPN Syariah sebesar 49,8% atau di atas rata-rata bank syariah (25,41%) dan konvensional (27,65%).

BTPN Syariah tetap menjaga loyalitas untuk melayani keluarga pra inklusi keuangan produktif yang tersebar



di berbagai daerah di Indonesia, dengan beragam inovasi dalam pelayanannya. Dengan aset Rp21.430 milyar rupiah Bank melayani 7 juta nasabah dengan 4,2 juta nasabah aktif, beroperasi di 257 ribu komunitas pada 2,600 pedesaan di Indonesia memperkuat eksistensi Bank pada segmen masyarakat inklusi keuangan produktif untuk terus berkontribusi bagi pengentasan kemiskinan, pengurangan kesenjangan sosial, serta tetap menjaga keberlanjutan bagi generasi di masa mendatang.

Bagi BTPN Syariah yang loyal memberdayakan masyarakat inklusi (segmen terbawah dari piramida ekonomi), kondisi pandemi COVID-19 di 2023 masih memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap operasional bisnis, kinerja perusahaan serta kondisi nasabah, terutama nasabah pembiayaan. Terlihat dari NPF BTPN Syariah 2023 yang meningkat dari tahun sebelumnya. Akan tetapi, berkat kerja keras, ketangguhan, dan dukungan penuh seluruh #bankirpemberdaya, nasabah pembiayaan, nasabah pendanaan, mitra pemasok, Pemerintah/Regulator, Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan lainnya, BTPN Syariah mampu menutup 2023 dengan kinerja bisnis yang tetap terjaga.

Terhadap nasabah pembiayaan, BTPN Syariah terus membantu nasabah pembiayaan yang terdampak situasi pandemi, perlu untuk tetap melakukan pencairan kepada nasabah namun dengan mengedepankan asas kehati-hatian dan penilaian yang mendalam. Bank juga memberikan pelatihan pengelolaan keuangan, tips kewirausahaan (*access to knowledge*) serta membantu membuka akses pasar (*access to market*) kepada nasabah pembiayaan.

Loyalitas dan dukungan dari nasabah yang menempatkan dananya untuk membantu pembiayaan masyarakat inklusi, akan selalu dijaga sebagai bagian dari ekosistem berkelanjutan. Loyalitas nasabah dana menjadi pendorong BTPN Syariah untuk terus dapat memberdayakan keluarga pra inklusi produktif di pelosok negeri.

Dalam pengembangan ekosistem digital yang mendukung keberlanjutan, BTPN Syariah juga mengimplementasikan pengembangan aplikasi Aplikasi Warung Tepat bagi Mitra Tepat yang pada tahun 2023 telah berjumlah sekitar 30 ribu agen. Pengembangan model keagenan ini bertujuan agar Mitra Tepat dapat melayani nasabah pembiayaan dalam menabung (setor dan tarik tunai), mendukung proses pembayaran angsuran nasabah pembiayaan (*access to finance*) sekaligus dapat mempermudah masyarakat sekitar dalam membeli barang kebutuhan sehari-hari (*access to supply*) secara *cashless*.

BTPN Syariah meyakini bahwa kualitas layanan yang diberikan kepada para nasabah juga bergantung pada kualitas barang dan jasa dari para mitra pemasok. Oleh karenanya BTPN Syariah melakukan evaluasi berkala terhadap seluruh mitra pemasok, baik untuk pemasok barang, produk teknologi informasi maupun pemasok jasa, seperti jasa system operasi. Terhadap mitra pemasok, BTPN Syariah memprioritaskan untuk bekerja sama dengan para mitra pemasok di daerah sebagai bentuk komitmen untuk turut mendukung pembangunan perekonomian daerah. BTPN Syariah memiliki daftar rekanan vendor dan pemasok barang maupun jasa, baik yang memiliki rekam jejak memuaskan maupun kurang memuaskan. Daftar tersebut diperoleh dari proses evaluasi terhadap aspek kemampuan keuangan, ketenagakerjaan, maupun aspek kualitas barang dan jasa yang diberikan selama periode tertentu.

Terhadap Pemerintah dan Regulator, BTPN Syariah menjaga pelaksanaan berbagai regulasi yang berdampak sosial dan lingkungan di tahun 2023 ini. BTPN Syariah melakukan pembayaran dividen tunai kepada Pemegang Saham pada tahun 2023 untuk kinerja tahun buku 2022 kepada para pemegang saham dan terus berkomitmen melakukan pengkinian informasi secara berkala, baik melalui siaran pers maupun pada pelaksanaan Paparan Publik yang bertujuan mengedepankan transparansi seputar kondisi BTPN Syariah kepada publik. Lembaga Rating PT *Fitch Ratings* Indonesia memberikan afirmasi atas Peringkat Nasional Jangka Panjang BTPN Syariah tetap di AAA (idn) *Outlook* Stabil. Peringkat ini diberikan kepada perusahaan dengan ekspektasi risiko gagal bayar yang paling rendah dibandingkan dengan semua emiten atau obligasi lain di negara atau serikat moneter yang sama.

Pada akhir tahun 2023 pembiayaan yang disalurkan BTPN Syariah sebesar Rp11,4 triliun, atau turun 1,2%



dibandingkan tahun lalu, hal ini bisa terjadi berkat dukungan semua stakeholder, komitmen tim yang tetap gigih serta nasabah yang tangguh.-Bank secara bertanggung jawab juga telah membukukan pencadangan sebesar Rp1.214 miliar. Pembentukan cadangan yang lebih tinggi adalah akibat kondisi nasabah yang menantang serta sebagai antisipasi Bank terhadap POJK Relaksasi terkait pandemi Covid-19.

Dana pihak ketiga pada 2023 menjadi Rp12,1 triliun, tumbuh 0,8% dibandingkan tahun lalu yang mencapai Rp12,0 triliun. Pendanaan yang tangguh dan didukung dengan modal yang kuat membuat likuiditas BTPN Syariah sangat memadai. Tahun 2023, BTPN Syariah mampu membukukan laba bersih yang tangguh yaitu Rp1,1 triliun, turun sebesar 39,4% dari tahun sebelumnya yaitu Rp1,8 triliun.

Berikut adalah ringkasan perubahan posisi neraca dan tabel rugi laba BTPN Syariah yang menggambarkan kinerja BTPN Syariah di 2023.

Ringkasan kinerja ekonomi BTPN Syariah 2023

	2023	2022	2021
Ringkasan Neraca (Rp juta)			
Total Aset	21.435.366	21.161.976	18.534.856
Aktiva Produktif	20.304.224	19.422.089	17.075.443
Pembiayaan yang diberikan	11.387.861	11.527.463	10.443.469
Jumlah Liabilitas	2.737.413	2.910.720	2.543.053
Simpanan Nasabah dan Dana Syirkah Temporer	12.142.817	12.048.529	10.973.460
Jumlah Ekuitas	8.777.133	8.407.995	7.094.900
Ringkasan Laba Rugi (Rp juta)			
Pendapatan Margin Bersih	5.259.749	5.029.350	4.279.210
Pendapatan Operasional Lainnya	60.949	65.646	22.332
Beban Operasional	(2.043.512)	(1.869.492)	(1.693.292)
Biaya CKPN	(1.898.117)	(945.052)	(728.220)
Pendapatan Operasional Bersih	1.379.069	2.280.452	1.880.030
Laba Bersih Tahun Berjalan	1.080.588	1.779.580	1.465.005

Portofolio pembiayaan berwawasan sosial dan lingkungan [GRI 2-23, GRI 2-24, GRI 2-25, FS6, FS16]

Ketidakmerataan pembangunan ekonomi khususnya di pedesaan dengan kondisi masyarakat pada tingkat inklusi merupakan salah satu isu dalam pembangunan berkelanjutan. Ketidakmerataan ini menjadi salah satu tantangan terbesar bagi perbankan syariah untuk melayani masyarakat inklusi.

BTPN Syariah sejak awal berdiri secara konsisten memusatkan penyaluran pembiayaan pada segmen inklusi yang merupakan wanita dari segmen inklusi, yang sebelumnya tidak memiliki akses keuangan kepada jasa pembiayaan perbankan baik perbankan konvensional maupun syariah. Portofolio pembiayaan BTPN Syariah tertuju pada segmen ini, yang lebih sarat dengan pendekatan pada mitigasi aspek sosial, di mana pendekatan yang dilaksanakan membuat para nasabah pembiayaan mampu meningkatkan kemampuan ekonominya, sehingga kemudian kehidupan sosialnya pun ikut berkembang. Tidak hanya memenuhi kebutuhan nasabah terhadap akses keuangan semata, BTPN Syariah juga memberikan dukungan non-keuangan lainnya yang diimplementasikan melalui empat pilar utama.

Empat pilar utama yang menjadi fasilitas dari produk Tepat Pembiayaan BTPN Syariah, yaitu paket keuangan, program daya, sistem keanggotaan, dan pendampingan di BTPN Syariah. Empat pilar utama ini saling berhubungan dalam membangun 4 perilaku unggul nasabah, yaitu: Berani Berusaha, Disiplin, Kerja Keras, dan Saling Bantu.

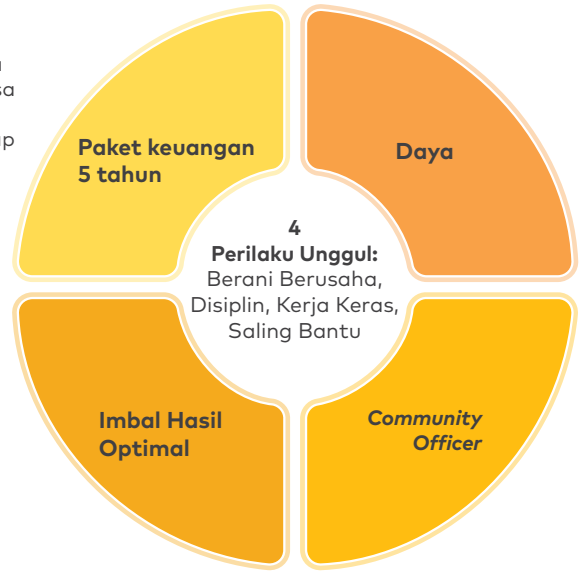


Paket Keuangan 5 Tahun

Solusi Keuangan dalam satu paket:
- Modal Usaha
- Gratis Asuransi Jiwa
- Tabungan (gratis biaya bulanan) Manfaat Masa Depan:
- Modal usaha naik setiap naik siklus
- Setelah tahun ke-3: pembiayaan perbaikan perumahan & pendidikan

Daya

Program Pelatihan
Pelatihan untuk peningkatan kapasitas dalam bidang kesehatan, pengetahuan, kewirausahaan, dan lingkungan



Community Officer
- #bankirpemberdaya yang terlatih menjadi teladan perilaku:
  - Jujur
  - Sopan
  - Disiplin
- Menjadi fasilitator untuk Program Daya

Sistem Keanggotaan
- Grup diseleksi oleh nasabah
- Pertemuan rutin
- Tabungan Wajib
- Tanggung Renteng

Empat pilar utama tepat pembiayaan syariah adalah:

1. Program Pembiayaan
   Paket Keuangan Bantuan modal usaha yang diberikan kepada nasabah untuk menjawab kebutuhan membangun mengembangkan usaha produktif. Bantuan ini kemudian dikembalikan dalam bentuk angsuran 2 (dua) mingguan dan nasabah juga memperoleh tambahan manfaat lainnya, yaitu asuransi jiwa untuk nasabah dan suami, tabungan dengan tanpa saldo minimum dan biaya administrasi, serta pembebasan angsuran setiap Hari Raya Idul Fitri. Setelah 3 (tiga) siklus dapat dilalui dengan baik, nasabah akan mendapatkan kesempatan untuk memperoleh pembiayaan perbaikan rumah dan pendidikan anak.
2. Program Daya
   Program Daya Nasabah di mana program ini dapat terus meningkatkan kemampuan dan pengetahuan melalui program keberlanjutan dalam bidang kesehatan, pengetahuan kewirausahaan, dan lingkungan.
3. Sistem Keanggotaan
   Sistem Keanggotaan Nasabah di mana nasabah membentuk kelompok/grup dan membentuk sentra. Pertemuan rutin dilakukan di dalam sentra untuk memberikan layanan perbankan. Jika ada nasabah yang mengalami kesulitan maka anggota kelompok/grup dalam sentra akan saling membantu.
4. *Community Officers*
   Community Officer yang terlatih secara rutin melayani dan memberikan pendampingan kepada nasabah pembiayaan dengan cara bertemu di sentra-sentra nasabah.

Keempat pilar tersebut merupakan pilar utama untuk menumbuhkan 4 (empat) perilaku unggul yang harus dimiliki oleh nasabah inklusi, yaitu Berani Berusaha, Disiplin, Kerja Keras, dan Saling Bantu. Implementasi 4 (empat) pilar utama Tepat Pembiayaan Syariah tersebut dilaksanakan dengan konsisten disertai pelaksanaan pengawasan yang ketat. *Para Community Officer* wajib mengisi serangkaian formulir yang menjadi input data dalam tablet bagi BTPN Syariah dalam mengelola risiko portofolio pembiayaan dari seluruh sentra.

Pada tahap yang lebih tinggi, *Business Coach* dibantu *Quality Assurance* wajib melakukan evaluasi atas ketaatan seluruh jajaran dalam menerapkan keempat pilar tersebut. Kemudian, secara acak, Internal Audit akan melakukan pemeriksaan berkala terhadap ketaatan seluruh jajaran dalam menerapkannya. Dengan demikian penerapan empat pilar tersebut sekaligus merupakan prosedur pengenalan dan mitigasi risiko sosial yang bisa mempengaruhi kualitas pembiayaan. [FS2, FS9]



Adapun pembiayaan bagi pengembangan usaha para nasabah pembiayaan dilakukan dengan menggunakan akad *wakalah wal murabahah* yang memberi kesempatan bagi nasabah pembiayaan yang sama sekali belum memiliki usaha untuk mendapatkan pembiayaan yang dapat digunakan untuk pembelian barang modal usaha baru, maupun barang pendukung usaha bagi mereka yang baru membangun usaha.

Pembelian barang diwakilkan kepada nasabah pembiayaan dengan perjanjian wakalah, yang menjelaskan rincian barang yang akan dibeli beserta dengan harganya. Kemudian, nasabah pembiayaan wajib membayar pembiayaan pembelian barang berikut margin yang ditetapkan dengan cara mengangsur sesuai jangka waktu yang telah diperjanjikan.

Produk dan layanan yang menjadi prioritas dalam RAKB indikator tahun 2023 untuk nasabah pembiayaan yaitu eksplorasi alternatif pembiayaan kepada masyarakat inklusi berupa pemberian pembiayaan untuk tujuan modal kerja secara syariah bagi individu, pembiayaan kepada Mitra Tepat dan pembiayaan melalui kerja sama dengan Kementerian PUPR untuk menyalurkan subsidi untuk nasabah BTPN Syariah dengan tujuan perbaikan/renovasi rumah (Program BP2BT). Ketiga produk ini mendukung pemberdayaan yang telah dilakukan oleh BTPN Syariah untuk masyarakat.

Kebutuhan nasabah akan pembiayaan terutama untuk bangkit kembali dari dampak akibat pandemi menjadi peluang tersendiri bagi BTPN Syariah untuk membantu secara nyata. Kinerja bisnis pembiayaan kepada keluarga inklusi produktif di 2023 ini masih dapat menunjukkan kinerja yang tetap terjaga.

Berikut adalah kinerja pembiayaan menurut area geografis utama:

Ringkasan Pembiayaan-Bersih (Rp Juta)	2023	2022	2021
Jawa	6.462.888	7.286.758	6.729.329
Bali dan Nusa Tenggara	454.684	420.917	363.392
Sumatera	2.832.317	2.647.194	2.304.562
Kalimantan dan Sulawesi	588.593	538.989	455.020

Dari pencapaian pembiayaan sebesar Rp 11.388 miliar, sebesar 99.6% merupakan pembiayaan bagi UMKM

Pembiayaan bisa tumbuh karena upaya yang dijalin secara intensif oleh para #bankirpemberdaya yakni *Community Officer* di lapangan. Hal ini menumbuhkan kepercayaan yang positif pada diri masyarakat inklusi untuk menghadapi tantangan di 2023. Hasilnya, nasabah pembiayaan menjadi adaptif, kreatif, positif, dan pantang menyerah dalam menghidupkan kembali maupun menjalankan usahanya. Mereka menjadi gigih dan tangguh sehingga roda usahanya bisa kembali dan terus berjalan. Bank juga terus meningkatkan kualitas pembiayaan melalui diversifikasi strategi dan aktivitas di lapangan. Jangkauan pencarian nasabah baru terus diperluas disertai dengan seleksi calon nasabah pembiayaan yang semakin diperketat.

Distribusi Perolehan Nilai Ekonomi [GRI 201-1]

Total nilai ekonomi yang didistribusikan oleh BTPN Syariah pada 2023 kepada para pemangku kepentingan adalah sebesar Rp3 triliun, turun 7,8% dari nilai sebesar Rp3,2 triliun di tahun sebelumnya. Di tahun ini juga BTPN Syariah berhasil merealisasikan komitmen kepada pemegang saham dengan membagikan *dividen* dengan total nilai sebesar Rp681 miliar

BTPN Syariah memberikan 2 (dua) jenis kontribusi untuk negara yakni kontribusi finansial langsung maupun tidak langsung dan kontribusi non-finansial.



Kontribusi finansial langsung berbentuk pembayaran pajak pendapatan maupun retribusi lainnya. Nilai kontribusi finansial mencapai Rp421 miliar, turun 17,6% dibanding tahun sebelumnya yaitu Rp510 miliar. Sedangkan, kontribusi finansial tidak langsung berwujud realisasi fungsi intermediasi yang dijalankan, sehingga para nasabah pelaku usaha dari kelompok masyarakat inklusi yang sebelumnya tidak mendapatkan akses dukungan perbankan, kini dan seterusnya mendapatkan dukungan keuangan untuk mengembangkan usahanya. Berkembangnya usaha pelaku bisnis inklusi pada segmen inklusif tersebut pada akhirnya akan meningkatkan pembayaran pajak kepada negara. Selain pajak, meningkatnya skala usaha masyarakat inklusi akan dapat mengurangi tingkat kemiskinan dan kesenjangan pendapatan di masyarakat.

Sementara itu, kontribusi non-finansial yang dihadirkan dapat ditemukan detail penjelasannya pada Bab Loyal memberdayakan bagi Sesama, Loyal memberdayakan Masyarakat Inklusi, Loyal memberdayakan dalam Berkarya, Loyal berkelanjutan untuk Lingkungan dan menerapkan tata kelola yang baik untuk pemberdayaan yang berkelanjutan pada laporan keberlanjutan 2023 ini.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, BTPN Syariah tidak menerima bantuan finansial dari Pemerintah dalam merealisasikan seluruh kegiatan operasional, baik berupa pembebasan pajak, subsidi, hibah untuk penelitian dan pengembangan produk, dan lain sebagainya. Dalam rangka mendukung pengembangan usaha, BTPN Syariah menahan Jumlah Nilai Ekonomi sebesar Rp1,9 triliun sebagaimana dijabarkan pada tabel berikut ini.

Uraian	2023	2022	2021
Nilai Ekonomi Langsung yang Diterima			
Pendapatan Pengelolaan dana oleh BTPN Syariah sebagai Mudharib	5.304.149	5.051.508	4.408.251
Pendapatan (beban) operasional lainnya - bersih	502.800	387.808	287.923
Jumlah nilai ekonomi langsung diterima	4.801.349	4.663.820	4.120.328
Nilai Ekonomi Langsung yang Didistribusikan			
Biaya Operasional Umum	681.107	676.351	546.113
Gaji dan Tunjangan Karyawan	1.362.405	1.193.141	1.147.179
Hak pihak ketiga atas bagi hasil dana Syirkah temporer	486.433	344.440	394.632
Pembayaran kepada Pemerintah (PPh dan PPn)	420.516	510.301	434.535
Jumlah nilai ekonomi langsung didistribusikan	2.950.461	3.199.859	2.776.612
Jumlah Nilai Ekonomi Ditahan	1.850.888	1.463.841	1.343.716

Dukungan pada Tujuan Pembangunan Keberlanjutan (TPB)

Pola keberlanjutan perbankan syariah adalah mengedepankan maslahah yaitu fokus pada kesejahteraan umat manusia. Prinsip itulah yang membawa BTPN Syariah berkomitmen terus mendampingi masyarakat inklusi dengan pendekatan inklusif dan bersama dengan para pemangku kepentingan tetap setia hadir melayani sepenuh hati hingga ke berbagai pelosok negeri.

Pembiayaan BTPN Syariah 100% adalah pembiayaan kepada masyarakat inklusi maka termasuk ke dalam kategori kegiatan usaha berkelanjutan dengan prinsip inklusif, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Pembiayaan jenis ini adalah pembiayaan yang mendukung TPB yaitu Tujuan 1 (Tanpa kemiskinan), Tujuan 8 (Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi) dan Tujuan 10 (Berkurangnya kesenjangan).


L 4108 OA
05 16



07

Loyal Memberdayakan

MASYARAKAT INKLUSI


L 4108 OA
05·26
HONDA



Menyediakan produk dan layanan yang berkualitas dan setara, perlindungan nasabah, penanganan keluhan yang baik, dan menghadirkan dukungan teknologi untuk kebaikan berjuta masyarakat yang telah kami lakukan di 2023, menjadi hal yang dapat disyukuri bersama.

Melalui produk pendanaan Bank, nasabah dapat menyalurkan dana kepada para nasabah pra sejahtera produktif yang sedang berjuang mewujudkan impian atas kesejahteraan hidup. Dengan semangat loyal memberdayakan, Bank berikhtiar menawarkan solusi dan layanan keuangan yang optimal bagi masyarakat inklusi untuk tumbuh menjadi inspirasi yang berkelanjutan

komitmen dan kebijakan produk dan layanan [OJK F.17] [GRI 2-23, GRI 2-24, GRI 2-25, FS15)

Berperilaku bisnis yang bertanggung jawab, menerapkan prinsip kehati-hatian, menghormati hak asasi manusia merupakan komitmen yang sejalan dengan niat baik dan tulus yang kami miliki. Dengan semangat loyal memberdayakan nasabah pada masyarakat inklusi, kami memiliki kebijakan dan prosedur yang memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

a. Mengedepankan kesesuaian produk dan layanan dengan kebutuhan dan kemampuan nasabah dan sesuai dengan Misi dan Visi BTPN Syariah.
b. Atas setiap produk dan layanan yang ditawarkan kepada para nasabah, membuatkan ringkasan informasi mengenai produk dan layanan yang disampaikan pada nasabah melalui website resmi BTPN Syariah, pada saat awal penawaran dan/ atau pada saat terjadi kesepakatan dengan nasabah yang tercermin pada saat proses penandatanganan perjanjian dengan nasabah. Ringkasan informasi produk dan layanan telah mengacu pada ketentuan OJK dan mengikuti prinsip syariah yang berlaku. Apabila terjadi perubahan syarat dan ketentuan atau fitur suatu produk akan diberitahukan kepada nasabah. Melalui *Know Your Customer* (KYC), BTPN Syariah dapat mengetahui profil nasabah dan menggali kebutuhannya, sehingga dapat menawarkan solusi yang sesuai. Bank menekankan etika berkomunikasi dengan nasabah dan senantiasa menjaga kerahasiaan privasi nasabah sesuai dengan kode etik Bank. Pada periode pelaporan tidak terdapat insiden ketidakpatuhan terkait kerahasiaan privasi nasabah dan komunikasi pemasaran. [GRI 417-3]
c. BTPN Syariah melakukan kaji ulang secara berkala terhadap produk dan layanan yang kini tersedia agar sesuai dengan kebutuhan nasabah, selaras dengan perkembangan mobile banking, maupun aplikasi teknologi terkini. Pengkajian ulang tersebut menyangkut berbagai aspek yang relevan dan melibatkan seluruh departemen dan direktorat terkait. BTPN Syariah memiliki Divisi Business Development yang akan terus mengelola dan mengembangkan produk dan layanan perbankan untuk memenuhi kebutuhan nasabah dan masyarakat inklusi masa kini.
d. Agar nasabah memahami mengenai produk pembiayaan syariah yang ditawarkan, para calon nasabah wajib mengikuti pelatihan dasar keanggotaan berdurasi 1 (satu) jam selama 5 (lima) hari yang dibawakan oleh *Community Officer* (CO) BTPN Syariah. Hanya nasabah yang dinyatakan disiplin hadir dan lulus dalam pelantikan yang akan diproses lebih lanjut sebagai nasabah.
e. Pencairan kepada nasabah pembiayaan selalu dilakukan dalam pertemuan rutin yang disepakati dan disaksikan semua anggota sentra. Nasabah pembiayaan juga diberikan kartu angsuran dan tabungan yang akan dikinikan setiap kali bertransaksi. Dengan demikian nasabah mengetahui jumlah kewajiban dan saldo tabungannya.
f. Suatu produk, jasa keuangan dan solusi perbankan dapat ditawarkan kepada nasabah apabila memenuhi kondisi- kondisi antara lain sebagai berikut:

- Produk dan layanan telah disetujui sesuai dengan prinsip syariah dan kewenangan lain yang berlaku termasuk telah mendapat persetujuan regulator. Hingga saat ini, tidak terdapat produk, jasa keuangan dan solusi perbankan yang ditangguhkan atau ditarik kembali setelah diluncurkan. [GRI 417-1, GRI 417-2]
- Produk dan layanan telah dievaluasi keamanannya dengan didukung standar prosedur yang mengatur proses atas produk dan layanan tersebut, dan prosedur tersebut telah disetujui sesuai dengan ketentuan yang berlaku, telah tersedia infrastrukturnya baik prosedur, sistem, sosialisasi, maupun sumber daya manusianya. [OJK F.27]

Seluruh kegiatan tersebut kami lakukan sebagai bentuk komitmen kami dalam menjaga kebijakan produk dan jasa secara adil dan aman bagi masyarakat inklusi sebagai salah satu bentuk loyal memberdayakan dalam ekosistem berkelanjutan.

Service Level Agreement (SLA) merupakan suatu ukutan dalam kebijakan pengendalian kualitas layanan Bank yang harus dipenuhi seluruh jajaran dalam memberikan layanan kepada para nasabah. Seluruh target dalam SLA wajib dicapai oleh jajaran pelaksana dengan rincian SLA pada masing-masing fungsi dan jabatan berbeda-beda, tergantung tugas dan tanggung jawabnya. Pencapaian SLA menjadi salah satu butir penilaian kinerja seluruh jajaran. BTPN Syariah melaksanakan seluruh kebijakan peluncuran produk dan jasa tersebut untuk menunjukkan komitmennya dalam memenuhi seluruh aturan perundangan terkait yang berlaku. Sehingga dalam tahun pelaporan BTPN Syariah tidak pernah tercatat adanya insiden pelanggaran terhadap peraturan dan perundangan yang disampaikan Regulator, baik terkait pengembangan produk maupun terkait aspek sosial dan lingkungan.

BTPN Syariah memiliki Kebijakan Pembiayaan yang dapat diakses dengan mudah oleh pihak yang membutuhkan di internal BTPN Syariah. Kebijakan ini dilakukan pengkinian sesuai ketentuan internal bank dan disetujui oleh Direksi dan Dewan Komisaris, dan dilakukan melalui proses kajian sesuai ketentuan, yang dalam hal ini dilengkapi dengan opini Dewan Pengawas Syariah untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip syariah. Pada kebijakan pembiayaan, BTPN Syariah mensyaratkan dilakukannya mitigasi risiko sosial terhadap lingkungan tempat tinggal calon nasabah, maupun mitigasi risiko sosial dan lingkungan dalam pembukaan sentra-sentra baru di lingkungan masyarakat inklusi. [GRI FS2]

Beberapa ketentuan yang diaplikasikan dalam melakukan mitigasi risiko tersebut mencakup:

a. Adanya komitmen bahwa usaha yang dilakukan tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah dan tidak melanggar undang- undang/ peraturan yang berlaku termasuk di dalamnya peraturan sosial dan lingkungan yang dapat diterapkan.
b. Adanya silaturahmi dengan tokoh masyarakat setempat/camat/lurah/kepala RW setempat dalam rangka memberikan informasi tentang keberadaan BTPN Syariah yang bertujuan membantu ibu-ibu di lingkungan setempat di mana lokasi sentra berada.
c. Adanya rekomendasi dari sesama anggota sentra bagi calon nasabah pembiayaan untuk bergabung bersama dalam satu sentra ataupun membentuk sentra baru.
d. Adanya komitmen seluruh anggota sentra untuk mengikuti tahapan pelatihan dasar keanggotaan dan mengikuti seluruh jadwal pertemuan rutin sentra di mana di dalamnya terdapat sharing pengetahuan yang relevan.
e. Adanya komitmen bersama antar sesama anggota pada satu sentra untuk saling dukung dan saling bantu dalam melaksanakan kegiatan usaha/mengembangkan usaha.
f. BTPN Syariah memberikan asuransi pembiayaan kepada nasabah dan asuransi untuk pasangan nasabah jika terjadi kondisi meninggal dunia, dengan demikian pembiayaan Bank tidak akan membebani keluarga.

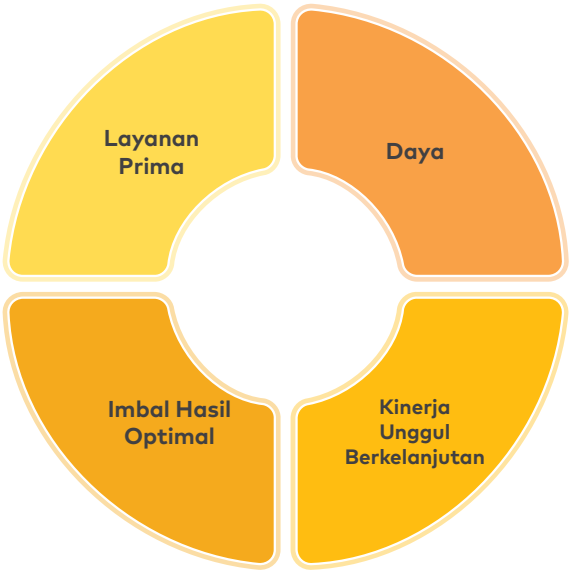
Community Officer konsisten loyal mendampingi nasabah para perempuan produktif melalui 4 (empat) perilaku unggul yakni Berani Berusaha, Disiplin, Kerja Keras dan Saling Bantu (biasa kami sebut BDKS) untuk meningkatkan semangat juang dan memperbaiki kehidupan menjadi lebih berarti. Pendampingan yang mumpuni merupakan kunci sukses BTPN Syariah bersama nasabah pembiayaan segmen inklusi yang memiliki risiko tinggi.

Melangkah tepat, memberdayakan umat

Menghimpun dana dari yang mampu dan menyalurkannya kepada masyarakat inklusi yang membutuhkan dengan berdasarkan prinsip syariah merupakan inti bisnis BTPN Syariah.

Nasabah pendanaan pun diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk berkontribusi memberdayakan berjuta keluara prasejahtera produktif di Indonesia agar kehidupan mereka menjadi lebih berarti. #Deminiatbaik ini bisa terwujud lebih cepat, Bank pun menyediakan jenis-jenis produk pendanaan dengan bagi hasil yang kompetitif melalui pelayanan berorientasi kenyamanan dan kepuasan nasabah. Hal ini dibuktikan melalui kinerja #bankirpemberdaya yang kompeten, reputasi Bank yang baik, kinerja keuangan yang sehat dan transparansi Bank dalam pengelolaan dananya.

Dengan berdasarkan pada *Unique Value Proposition* (UVP) Pendanaan yaitu program Daya, Kinerja Unggul Berkelanjutan, Imbal hasil yang optimal dan layanan prima, #bankirpemberdaya mampu melayani nasabah dengan lebih baik lagi. Secara khusus dilakukan pengembangan keberlanjutan terhadap konsep *Unique Value Proposition* bagi #bankirpemberdaya agar dapat melihat prinsip Bersama Melangkah Tepat Memberdayakan Umat yang berlandaskan syariah dapat diterapkan dalam implementasi bisnis BTPN Syariah. Dari aspirasi nasabah pendanaan yang diperoleh pada hasil *survey* di tahun 2022-2023, diketahui bawah nasabah melihat secara positif komitmen BTPN Syariah untuk setia melayani masyarakat inklusi sehingga akan merasa terlibat dalam pemberdayaan yang dilakukan BTPN Syariah



Unique Value Proposition (UVP) Pendanaan

Nasabah pendanaan percaya bahwa BTPN Syariah adalah bank yang benar-benar menjalankan prinsip syariah untuk melakukan pemberdayaan sehingga mereka meyakini bahwa pendanaan yang cukup sangat diperlukan oleh masyarakat inklusi untuk tumbuh dan berkembang dalam pendampingan #bankirpemberdaya BTPN Syariah. Nasabah pendanaan juga percaya bahwa dana yang mereka titipkan kepada BTPN Syariah dikelola secara amanah untuk kegiatan berdampak lingkungan sosial positif yang tinggi dapat menambah ladang amal mereka dan menjadi kepuasan batin tersendiri.

Sepanjang tahun 2023, ditengah kondisi fluktuasinya tingkat imbal hasil diantara industri perbankan, BTPN Syariah berupaya mengoptimalisasikan bisnis pendanaan dengan melakukan sinergi antara #bankirpemberdaya dan nasabah agar tetap konsisten untuk memberikan pemberdayaan kepada masyarakat inklusi.

Alhamdulillah, penghimpunan dana BTPN Syariah dapat memberi manfaat berkelanjutan bagi berjuta umat.

Digitalisasi layanan bagi masyarakat inklusi [OJK F.26]

Kami menyediakan produk, layanan dan solusi perbankan berbasis syariah dengan mempertimbangkan kondisi, latar belakang, dan keadaan geografis masyarakat inklusif. Melalui cara berpikir tersebut, kami berusaha melakukan mitigasi dan memberikan solusi atas permasalahan sosial lingkungan yang terjadi.

Kami melihat saat ini dengan adanya kemajuan teknologi di mana masyarakat inklusi senantiasa untuk mengenal dan beradaptasi dengan kondisi tersebut, ekosistem digital syariah harus diwujudkan untuk mendorong perekonomian di segmen inklusi.

Upaya dan inisiatif untuk solusi digital yang tepat dan adaptif dilakukan secara bertahap lewat pengembangan aplikasi dengan otomasi efisien dan efektif, mudah digunakan sesuai kebutuhan nasabah, mitra, dan #bankirpemberdaya berlandaskan satu misi, yakni teknologi untuk kebaikan. Upaya ini dapat mempermudah akses bagi mereka masyarakat marginal di daerah-daerah tertinggal atau pelosok-pelosok wilayah Indonesia yang selama ini tidak terjangkau oleh layanan perbankan. [GRI FS13, FS14]

Dengan digitalisasi berbasis syariah pendukung ekosistem masyarakat inklusi, diharapkan loyalitas nasabah baik nasabah pendanaan maupun nasabah pembiayaan terhadap Bank meningkat dan pengelolaan dana pihak ketiga dari nasabah pendanaan oleh Bank yang kemudian disalurkan untuk pembiayaan modal usaha nasabah pembiayaan, dapat berjalan lebih efisien.

TEPAT Mobile Banking dan Internet Banking

Penyediaan fasilitas pembayaran yang mudah dan efisien melalui *Mobile Banking* dan *Internet Banking* diharapkan *access to financial services* yang diberikan kepada nasabah dapat lebih optimal. Pengembangan internet banking beserta kelengkapan fiturnya menjadi bagian dari pemanfaatan teknologi untuk kebaikan bagi nasabah pendanaan baik individu maupun perusahaan, sehingga manfaat yang dirasa adil merata.

Pengembangan *Mobile Banking* dan *Internet Banking* tahun 2023 ini yaitu pembukaan rekening melalui Aplikasi Tepat Mobile dan *Internet Banking* baik untuk nasabah lama maupun nasabah baru dengan tambahan fitur eKYC. Inovasi teknologi tersebut akan meningkatkan keamanan nasabah dalam mengelola keuangannya di BTPN Syariah. Ke depannya, akan terus dilakukan pengembangan fitur QRIS yang saat ini sedang dalam proses persetujuan dari regulator. QRIS akan memudahkan nasabah bertransaksi dan menghemat waktu nasabah karena tidak perlu datang secara fisik ke lokasi kantor cabang ataupun ke ATM terdekat.

untuk Mitra Tepat

Untuk loyal memberdayakan masyarakat inklusi yang tersebar di seluruh pelosok wilayah Indonesia, BTPN Syariah mengembangkan Mitra Tepat sebagai bentuk jaringan bank nircabang. Mitra Tepat dapat menyediakan layanan dan produk-produk perbankan yang sesuai dengan kebutuhan perempuan produktif dalam masyarakat inklusi. Akses pada literasi keuangan pun semakin mudah dengan adanya Mitra Tepat yang tulus membantu nasabah pembiayaan untuk kenyamanan bertransaksi yang lebih cepat dan efisien.

Pada akhir tahun 2023, BTPN Syariah telah memiliki 30.000 Mitra Tepat yang tersebar di seluruh Indonesia. Para Mitra Tepat dilengkapi dengan teknologi Aplikasi untuk Mitra Tepat untuk proses pendaftaran dengan kapabilitas pengenalan wajah (*face recognition*).

Pengembangan teknologi Aplikasi untuk Mitra Tepat tersebut mengukuhkan semangat loyal memberdayakan dan mendukung pembiayaan berkelanjutan, di mana Mitra Tepat dapat melayani nasabah dalam bertransaksi (setor dan tarik tunai) sekaligus mempermudah proses pembayaran angsuran nasabah pembiayaan dengan efisiensi waktu dan tempat.

Sejak tahun 2022, Bank bekerja sama dengan institusi strategis yang didukung oleh BTPN Syariah Ventura dalam menyediakan layanan pembayaran produk. Aplikasi Warung Tepat digunakan Mitra Tepat untuk mempermudah masyarakat sekitar dalam membeli barang-barang kebutuhan secara *cashless*. Seluruh layanan dapat diakses melalui aplikasi yang digunakan oleh seluruh Mitra Tepat di 298 kabupaten/kota.

Saat ini BTPN Syariah berkoordinasi dengan pasangan usaha telah mengembangkan pay later murabahah di dalam aplikasi Warung Tepat yang dapat digunakan oleh calon nasabah sebagai alternatif metode pembayaran atas barang yang diperjualbelikan melalui *platform* partner Bank yang bekerja sama dengan BTPN Syariah. Sampai dengan akhir tahun 2023, Mitra Tepat telah mempergunakan aplikasi Warung Tepat mencakup *bill payment* BPJS, PLN, Pulsa dan paket data.



Dengan layanan digital dan teknologi, diharapkan Bank dapat konsisten loyal memberdayakan nasabah melalui layanan perbankan dengan fitur yang customer centric dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat inklusi.

Terra (Tepat Prospera)

Seluruh #bankirpemberdaya yang ada di lapangan termasuk *Community Officer* (CO) telah dilengkapi alat tablet berbasis Android dengan Aplikasi Terra di dalamnya untuk loyal memberdayakan masyarakat inklusi umumnya dan nasabah pembiayaan khususnya.

Dikembangkan berbasis *agile mindset*, Aplikasi Terra mempermudah proses pengajuan hingga persetujuan pembiayaan nasabah serta aktivitas operasional terkait dengan kegiatan sehari-hari tim di lapangan, menjadikan aktivitas #bankirpemberdaya yang ada di lapangan transparan dan efisien di mana waktu proses lebih akurat dan cepat dibandingkan secara manual. Selain efisiensi waktu, terdapat juga efisiensi penggunaan kertas pada saat CO mempergunakan aplikasi ini.

Layanan berbasis teknologi kebaikan tersebut pada akhirnya dapat meningkatkan kepuasan, kenyamanan serta kemudahan nasabah dalam mengakses layanan perbankan di BTPN Syariah.



- **Aplikasi Terra**
  Aplikasi harian CO dengan konsep *simple and secured*

- **Aplikasi Untuk Mitra Tepat**
  Aplikasi handal untuk membantu agen / Mitra Tepat

- **Aplikasi Warung Tepat**
  Aplikasi yang menawarkan *access to supply/ goods*

Inovasi produk dan layanan yang dibuat sederhana, mudah digunakan, dan aman, serta melakukan pendampingan penggunaan secara berkelanjutan, menjadi kunci sukses keberhasilan peningkatan literasi digital dan kesejahteraan masyarakat inklusi di Indonesia.

Di masa yang akan datang, kami terus melanjutkan pengembangan dan inovasi produk dan layanan digital syariah dengan cara kerja *agile* untuk terus meningkatkan layanan, kenyamanan, dan keamanan ekosistem yang berbasis pada semangat loyal memberdayakan.

Perlindungan nasabah dan penanganan keluhan nasabah [GRI 2-25]

Salah satu Komitmen BTPN Syariah untuk memberikan perlindungan dan menangani keluhan pelanggan, dilaksanakan dengan membuka saluran pengaduan dan memberikan solusi secepatnya dengan semangat loyal memberdayakan masyarakat inklusi.

BTPN Syariah mengatur Prinsip Umum Perlindungan Konsumen meliputi transparansi, perlakuan adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data/informasi konsumen, dan penanganan pengaduan serta penyelesaian sengketa konsumen secara sederhana, tepat, dan sesuai ketentuan. Pedoman yang digunakan meliputi :

- Surat Edaran OJK No. 17/SEOJK.07/2018 perihal Pedoman Pelaksanaan Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan,
- POJK No. 18/POJK.07/2018 perihal Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan,
- POJK No. 6 /POJK.07/2022 perihal Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan,
- Surat Edaran Bank Indonesia PADG No. 23/17/ PADG/2021 perihal Tata Cara Pelaksanaan Perlindungan Konsumen Bank Indonesia,
- Peraturan Bank Indonesia No 22/20/PBI/2020 perihal Perlindungan Konsumen Bank Indonesia,
- Surat Keputusan Direksi Nomor. SK.005/DIR/ OPTS/IX/2022 perihal Tugas dan Tanggung Jawab Fungsi Pelindungan Konsumen & Masyarakat

BTPN Syariah telah membentuk Unit Penyelesaian Pengaduan Konsumen (UPPK), yang berada dalam fungsi Operasi di Direktorat yang membidangi Keuangan dan Operasi. Unit ini dibentuk untuk menangani dan menyelesaikan pengaduan yang diajukan konsumen. Unit ini menangani keluhan nasabah dengan berpedoman pada Kebijakan dan Prosedur tentang penanganan, penyelesaian, dan pelaporan pengaduan konsumen. [OJK F.24]

BTPN Syariah telah membangun mekanisme layanan pengaduan konsumen. Pengaduan dapat disampaikan melalui saluran kontak pada Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, dan Kantor Fungsional Operasional (KFO) di seluruh Indonesia dan *Contact Center* BTPN Syariah dengan nomor telepon 1-500-300 dan nomor telepon *Toll Free* 0-800-1500-300. Setiap pengaduan yang disampaikan oleh konsumen tidak dipungut biaya apa pun.

a. Pengaduan disampaikan langsung melalui saluran kontak, dicatat dan diselesaikan oleh petugas dan pejabat di bagian tersebut.
b. Pengaduan yang masuk ke saluran kontak dan membutuhkan investigasi lebih lanjut, setelah dicatat oleh penanggung jawab saluran kontak, kemudian disampaikan kepada unit kerja UPPK. Selanjutnya UPPK menindaklanjuti penyelesaian pengaduan konsumen yang diterima sesuai dengan Kebijakan dan Prosedur BTPN Syariah yang berlaku.
c. UPPK melakukan monitoring untuk memastikan penanganan pengaduan konsumen telah diselesaikan, baik pengaduan konsumen yang diterima melalui penanggung jawab saluran kontak maupun melalui aplikasi *traceable* OJK di APPK (Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen).
d. Berdasarkan Peraturan OJK No. 31/ POJK.07/2020 perihal Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan, apabila terdapat kasus nasabah tidak puas dengan penyelesaian dari pihak Bank, nasabah diberi kesempatan untuk melakukan mediasi ke BI atau ke LAPS (Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa) yang sudah terdaftar.
e. Secara reguler, UPPK akan menyampaikan konsolidasi laporan pengaduan konsumen kepada Regulator sesuai ketentuan yang berlaku. [GRI 417-2, GRI 417-3, GRI 418-1]

Tahun 2023, BTPN Syariah telah menerima 9.406 kontak masuk, terdiri dari 34,1% Permintaan, 60,3% Pertanyaan, dan 5.6% Keluhan. Seluruh (100%) pengaduan konsumen dapat diselesaikan sesuai ketentuan regulasi, dalam jangka waktu kurang dari 20 hari kerja (rata-rata selesai dalam waktu 5 hari kerja). Tidak terdapat insiden ketidakpatuhan terhadap peraturan terkait informasi dan label produk dan komunikasi pemasaran. Oleh karena itu, selama tahun 2023 tidak ada produk dan layanan kami yang ditarik dari pasar. [OJK F.29][GRI 417-2, GRI 417-3]

Laporan Pengaduan Masyarakat tahun 2021 sampai dengan 2023

Periode	Penyelesaian	Kontak Masuk	Permintaan	Pertanyaan	Keluhan
2021	100%	6.976	26,40%	67,30%	6,30%
2022	100%	12.625	53.50%	42,20%	4,30%
2023	100%	9.406	60.30%	34.10%	5.60%

Laporan Pengaduan Masyarakat berdasarkan mekanisme pengaduan

Mekanisme Laporan	2023		2022		2021	
	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase
WBS	0	0	0	0	0	0
Email	10	2%	9	2%	0	0
Telepon (hotline)	279	53%	323	60%	341	78%



Laporan Pengaduan Masyarakat berdasarkan mekanisme pengaduan

Mekanisme Laporan	2023		2022		2021	
	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase
Cabang	219	42%	202	37%	92	21%
Media Sosial	6	1%	2	0	6	1%
APPK/Regulator	9	1%	5	1%	1	0
Kantor Pusat	2	0	1	0	0	0
Jumlah	**525**	**100%**	**535**	**100%**	**440**	**100%**

Jumlah Pengaduan Berdasarkan Topik Aduan Tahun 2023

Topik Aduan	Selesai	
	Total	%
Mitra Tepat	35	7%
Mobile Banking	229	44%
Pembiayaan	157	30%
Tabungan	21	4%
ATM	69	13%
Deposito	1	0
Internet Banking	13	2%
Jumlah	**525**	**100%**

Dalam mendukung bisnis yang loyal memberdayakan masyarakat inklusi, BTPN Syariah melakukan perbaikan yang menyeluruh dalam melakukan penanganan pengaduan konsumen dengan secara terus-menerus menyempurnakan infrastruktur dan proses penyelesaian pengaduan konsumen. Hal ini juga dilakukan untuk meningkatkan loyalitas dan kepuasan nasabah, masyarakat inklusi di Indonesia.

Kami meyakini nasabah tidak hanya menjadikan BTPN Syariah sebagai lembaga keuangan bagi mereka semata, tetapi lebih daripada itu, menjadikan kami sebagai mitra yang selalu mendampingi mereka berbuat baik, mengembangkan usaha dan mewujudkan mimpi dan cita-cita untuk meraih masa depan yang berarti.

Agar keinginan untuk loyal memberdayakan masayarakat inklusi dapat dilakukan secara optimum, BTPN Syariah secara berkala menilai dampak produk/jasa dan kegiatannya terhadap kesejahteraan nasabah pembiayaan, perkembangan kesejahteraan masyarakat lokal dan mempersiapkan program pengembangannya melalui kegiatan Daya. [OJK F.28][GRI 413-1]

hadirnya nasabah inspiratif

Tak pernah terbayangkan bagi Nancy, seorang ibu tunggal dengan 2 anak ini, mampu melewati masa sulitnya. Usaha tenun yang dimulainya sejak 7 tahun lalu, kini mulai berkembang. Bahkan Nancy kini mulai merambah usaha kue.

Nancy tinggal bersama sang ayah yang berumur 98 tahun serta anak keduanya yang berusia 4 tahun di sebuah desa, di Nusa Tenggara TImur. Sementara anak pertamanya, tinggal di Jakarta. Nancy adalah seorang Nasabah BTPN Syariah. Selain pinjaman modal usaha, ia mendapat pendampingan lewat program Daya BTPN Syariah serta bimbingan dari Program Bestee BTPN Syariah, yang melibatkan para mahasiswa sebagai fasilitator pendamping.

Awalnya, kehidupan yang dijalani perempuan berusia 45 tahun ini, tidaklah mudah. Sejak ditinggal suaminya pergi, Nancy harus berjuang keras menghidupi keluarganya. Dengan modal yang sangat minim, Nancy pun buka warung kecil di teras rumahnya. Nancy juga belajar menenun dari sang kakak, demi menambah pundi-pundi. Sayang, saat itu usaha tenunnya tak berjalan mulus dan ia pun kehabisan modal.

Lewat saudaranya, Nancy mengenal BTPN Syariah. Atas saran #communityofficer BTPN Syariah, ia lalu membentuk kelompok usaha yang terdiri dari 10 orang dan mendapat pinjaman awal sebesar 2 juta rupiah. Meski sempat mengalami kesulitan, Nancy tak patah semangat. Ia gigih berjuang dan berhasil memulihkan usahanya.

Ketika usahanya kembali lancar, Nancy kembali mengajukan pinjaman tambahan kepada BTPN Syariah sebesar 3 juta rupiah, untuk meningkatkan kapasitas produksinya. Dan tentu saja, langkahnya tak sia-sia. Usaha tenun Nancy kian berkembang. Bahkan, Nancy pernah mendapatkan keuntungan sebesar 2 juta rupiah dalam 2 hari. Selain usaha kain tenun dan warung sembako, Nancy kini mulai mengembangkan usaha pembuatan kue.

Bagi Nancy, BTPN Syariah memiliki banyak keistimewaan. Tidak hanya memberikan pinjaman, BTPN Syariah juga membantu nasabahnya dalam mengembangkan usaha. Lewat pendampingan, Nancy belajar banyak hal. Mulai dari pembukuan, promosi, manajemen persediaan, hingga pengetahuan umum lain. Di saat sulit, #communityofficer BTPN Syariah juga turut membantu memberikan masukan, dukungan dan semangat, agar Nancy kembali bangkit.

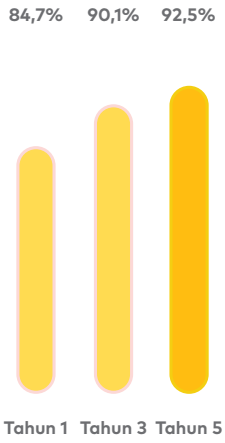
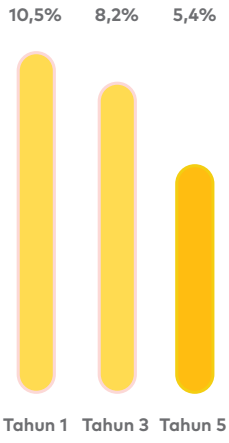
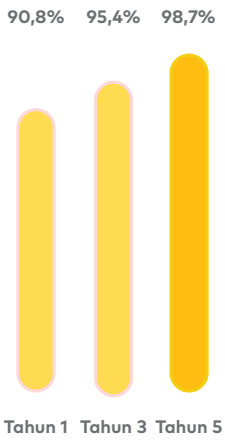
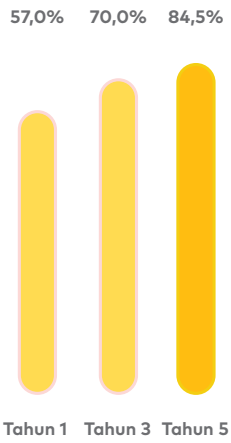
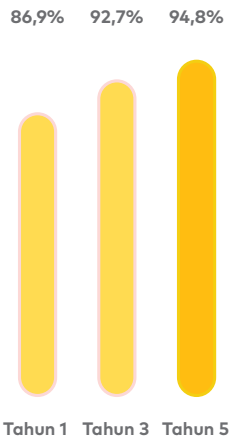
Keistimewaan lainnya, adalah BTPN Syariah terlibat aktif dalam promosi produk dan bahkan mengajak tamu-tamunya untuk membeli produk-produk Nancy. Karena itulah, Nancy sangat berterima kasih kepada BTPN Syariah yang telah mendukungnya selama ini.

Ia berharap, BTPN Syariah tak berhenti melayani dan membantu masyarakat dengan sepenuh hati, seperti dirinya. BTPNS Number One !!!.

Hasil penelitian [GRI 413-1, FS2]

Hasil Pengukuran dampak sosial yang berkelanjutan, merupakan upaya BTPN Syariah mengetahui dampak loyal memberdayakan masyarakat inklusi. Hasil pengukuran inilah yang dipergunakan oleh kami untuk mengukur keberhasilan pendampingan, menilai risiko lingkungan dan sosial nasabah, perbaikan layanan nasabah dan merencanakan berbagai kegiatan pendampingan yang dapat membantu masyarakat inklusi memperbaiki kehidupannya.

Saat ini, Bank melakukan pengukuran kesejahteraan menggunakan *scorecard* pengukuran PPI (*Poverty Probability Index*). PPI bertujuan untuk mengukur kesejahteraan nasabah dan dilakukan oleh Bank secara berkala sehingga Bank dapat senantiasa melihat perubahan kesejahteraan nasabah. Berdasarkan laporan PPI, selama 5 tahun bergabung menjadi nasabah BTPN Syariah, nasabah BTPN Syariah memiliki kondisi sebagai berikut:

Q1. Apakah semua anggota rumah tangga yang berumur 6 sampai 18 tahun masih bersekolah?	Q2. Tipe lantai paling luas ?	Q3. Jenis toilet yang dimiliki rumah tangga tersebut?
	tanah atau luas bambu	Tidak ada toilet atau memiliki jamban cemplung/cubluk
		
Q4. Apa bahan bakar utama memasak?	Q5. Apakah rumah tangga mempunyai kulkas / lemari es?	Q6. Apakah rumah tangga tersebut mempunyai sepeda motor atau perahu bermotor?
Gas/LPG, listrik minyak tanah, atau lainnya		Ya
		

Dari hasil kartu dampak skor terlihat bahwa sejalan dengan bertambahnya waktu masyarakat inklusi menjadi nasabah BTPN Syariah, kesejahteraan dari aspek ekonomi dan juga kualitas kehidupannya terus meningkat. Meskipun peningkatan tersebut tidak hanya disebabkan oleh pembiayaan yang diberikan oleh BTPN Syariah.



08

Loyal Memberdayakan

DALAM BERKARYA

[GRI 2-23, GRI 2-24, GRI 2-25]





Loyal memberdayakan mendukung keberlanjutan masyarakat inklusi dan terus melayani sepenuh hati menjadi kunci bagi BTPN Syariah. Terus meningkatkan kompetensi yang mumpuni, dan peningkatan kinerja yang berkesinambungan serta berorientasi pada nasabah, akan mewujudkan sosok #bankirpemberdaya yang andal dan tumbuh tepat bermanfaat."

BTPN Syariah terus secara konsisten mengembangkan strategi, Layanan, dan infrastruktur fungsi sumber daya manusia Perusahaan agar para #bankirpemberdaya mampu meningkatkan kinerja, kompetensi, dan loyalitasnya terhadap Perusahaan. Agar mampu melayani dengan sepenuh hati, BTPN Syariah mengedepankan hubungan industrial berkualitas, memegang prinsip keberlanjutan dan menjaga semangat kebersamaan dalam berkarya antara Bank dan para #bankirpemberdaya.

membangun budaya keberlanjutan #bankirpemberdaya [OJK F.1]

Berbagai inisiatif dilaksanakan oleh BTPN Syariah untuk membangun proses dan budaya keberlanjutan pada Bank yang mendukung terciptanya *agile mindset* dan *new way of working* dalam penerapan keuangan berkelanjutan. Bank menunjukkan komitmennya untuk mengalokasikan dan mengoptimalkan dana pendidikan dan pelatihan secara tepat berkelanjutan. Pengetahuan dan keahlian para #bankirpemberdaya menjadi komponen yang kritikal agar mampu menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya.

Fungsi Human Capital BTPN Syariah mengambil peranan besar dalam merespons tantangan transisi bisnis ke arah digital dan generasi baru yang masuk ke dunia kerja yang secara tidak langsung merubah budaya organisasi. Menjawab tantangan tersebut, BTPN Syariah mengimplementasikan digitalisasi dalam sistem rekrutmen dan seleksi karyawan, *Learning Management System* (LMS), serta pengembangan karier dan *leadership* talenta- talenta kunci (*key talents*) organisasi. Talenta yang memahami dunia digital dan mampu melayani dengan sepenuh hati sangat vital untuk pengembangan ekosistem berkelanjutan yang menjadi impian besar bagi BTPN Syariah.

Bank juga tetap memenuhi *pipelines*, Tim *Recruitement* telah secara aktif melakukan seleksi karyawan secara selektif sehingga tetap memberikan kesempatan kerja kepada angkatan kerja Indonesia. Bank melakukan rekrutmen berbasis *local talents* khususnya untuk jabatan *Community Officer*. [GRI 413-1]

mengelola hubungan industrial

Kajian, evaluasi, dan perbaikan layanan serta kebijakan terus dilakukan oleh tim *Human Capital* melalui program HC *Service and Policy Improvement*. Hal ini semata-mata agar Bank dapat terus memberikan layanan yang lebih baik, sehingga produktivitas bisnis dan *engagement* dan loyalitas karyawan dapat terus ditingkatkan.

Bank senantiasa menampung dan memperhatikan aspirasi karyawan dalam mengkaji dan menerapkan segenap kebijakan dalam aspek pengelolaan sumber daya manusia. BTPN Syariah memastikan bahwa hak-hak dan kebebasan berpendapat karyawan telah tercakup dalam Peraturan Perusahaan yang telah disahkan oleh Kementerian Tenaga Kerja. Dari awal berdiri Peraturan Perusahaan ini sudah diterapkan di BTPN Syariah kepada seluruh (100%) karyawan BTPN Syariah, dengan pemutakhiran secara reguler. Komunikasi dalam melaksanakan kegiatan operasional terjalin dengan baik dan lancar antara karyawan dan management, begitu pula hubungan yang baik antara management dengan komisaris dan DPS. [GRI 407-1]

Mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam penerapan kebijakan yang dapat memberi pengaruh besar kepada karyawan maka Direksi telah memiliki kebijakan sosialisasi dan penyampaian komunikasi yang terukur dan terarah secara berjenajng yang sebelum implementasi perubahan baru diterapkan secara resmi, Tentunya kebijakan ini ditempah untuk memastikan terjalinnya hubungan industrial yang harmonis antara perusahaan dan karyawan. [GRI 402-1]



lingkungan kerja yang layak dan aman

[OJK F.21]

Dalam membangun loyalitas karyawan, BTPN Syariah meyakini bahwa menyediakan tempat kerja yang layak serta lingkungan kerja yang layak dan aman akan mendorong terciptanya iklim kerja yang positif yang pada akhirnya juga akan meningkatkan produktivitas pekerja.

Untuk memberikan kepastian bagi karyawan bahwa kantor tempat bekerja menjadi rumah kedua yang terjamin kualitas keamanannya maka BTPN Syariah telah memiliki Kode Etik serta Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja, mengedepankan hubungan kerja serta alur komunikasi yang dilandasi sikap saling menghormati dan BTPN Syariah tidak mentolerir setiap kegiatan yang mengandung kekerasan dan/ atau pelecehan dalam segala bentuk.

Berbagai kebijakan Manajemen dalam menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, dan kondusif, dan mampu meningkatkan loyalitas karyawan yaitu:

1. Perlakuan adil kepada seluruh karyawan dan perlindungan hak asasi [OJK F.18]
   Untuk mendukung ketentuan kepegawaian yang adil dan terciptanya kondisi dan lingkungan kerja yang aman, Direksi memastikan perlindungan hak asasi dan pelaksanaan hubungan industrial yang sehat dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

   Dalam melakukan rekrutmen karyawan baru maupun mengelola karyawan yang telah bekerja di perusahaan, kami mengedepankan persamaan kesempatan agar dapat terus tumbuh dan berkembang optimal tanpa memandang suku, ras, usia, latar belakang etnis, agama, dan jenis kelamin, terlebih lagi mengingat mayoritas karyawan BTPN Syariah (95%) adalah perempuan.

   Perlakuan yang adil bagi seluruh karyawan menjadi komitmen BTPN Syariah dengan memberikan kesempatan yang sama kepada semua karyawan dalam berkarier dan mengembangkan diri dalam berkarya serta menjalankan sistem penilaian kinerja yang adil sehingga tercipta loyalitas karyawan dalam berkarya.

2. Anti diskriminasi,pelecehan dan tenaga kerja anak [OJK F.19][GRI 406-1, GRI 408-1]
   BTPN Syariah tidak mentolelir (*zero tolerance*) segala tindakan diskriminasi dan pelecehan yang didasari oleh perbedaan suku bangsa, agama, warna kulit, jenis kelamin, usia, jabatan maupun kapabilitas dalam bentuk apapun.

   BTPN Syariah melarang segala perbuatan, tindakan, atau ucapan yang mengarah pada pelecehan yang dapat mengakibatkan ketidaknyamanan seseorang di tempat kerja dan yang dianggap melanggar norma atau kebiasaan yang berlaku, baik norma agama maupun norma kesusilaan.

   Kebijakan penerimaan karyawan baru di BTPN Syariah membatasi minimal usia pelamar 18 tahun atau setara lulusan SMA, dan memastikan tidak ada pekerja anak di lingkungan BTPN Syariah.

   Segala bentuk diskriminasi, ancaman dan tindakan kekerasan di tempat kerja akan diproses sesuai peraturan yang berlaku.

3. Keamanan di tempat kerja
   BTPN Syariah memperhatikan, memelihara keselamatan dan kesehatan kerja karyawan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perusahaan melalui penerapan prosedur K3.

   Segala upaya perlindungan kerja ditujukan agar karyawan terhindar dari risiko di lingkungan kerja dan penyakit akibat kerja sehingga tercipta lingkungan kerja yang aman dan kondusif. [GRI 403-1]

   BTPN Syariah sepanjang 2023 memberikan pelatihan K3 bagi karyawan yang bertujuan untuk memberikan pemahaman dan kemampuan tentang keselamatan dan kesehatan kerja. [GRI 403-5]



Nama Pelatihan	Materi	Penyelenggara	Tempat dan Waktu Pelaksanaan
Simulasi Tanggap Darurat Kebakaran dan Bencana Alam	Simulasi Tanggap Darurat Kebakaran dan Bencana Alam	Internal	Kantor Cabang, Mar – Okt 2023
Simulasi Tanggap Darurat Tsunami & Gempa Bumi	Simulasi Tanggap Darurat Tsunami & Gempa Bumi	Internal	Kantor Cabang, Aug – Sep 2023
Training K3 Damkar Tingkat D Sertifikasi Kemnaker RI	Training K3 Damkar Tingkat D Sertifikasi Kemnaker RI	Candi Academy	Tangerang, 18 – 20 Sep 2023

4. Penggunaan fasilitas dan aset Perusahaan
   Bank menyediakan peralatan dan fasilitas kerja yang memadai bagi karyawan dalam mendukung pekerjaan di Bank. Anggota Direksi/Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Syariah/ Karyawan sesuai dengan fungsinya masing-masing harus mengupayakan perlindungan atas aset Bank dan memastikan penggunaannya secara efisien, dan karena itu aset Bank hanya dapat digunakan untuk kepentingan usaha Bank.

5. Aktivitas di luar Perusahaan
   Karyawan tidak diperkenankan menjadi anggota atau perkumpulan/klub/ organisasi yang tidak diakui oleh Pemerintah dan/atau menganut nilai-nilai yang tidak sesuai dengan nilai-nilai perusahaan. Karyawan dalam kapasitasnya sebagai individu dapat berpartisipasi sebagai anggota suatu organisasi/asosiasi di luar perusahaan, dan sebagai warga negara, karyawan juga memiliki kebebasan dalam berpolitik namun tidak diperkenankan menjadi pengurus aktif partai politik.

6. Penggunaan media sosial
   Jejaring media sosial memungkinkan karyawan berbagi hal positif tentang pengetahuan, wawasan, informasi dan segala sesuatu ke masyarakat umum. Untuk meminimalisasi risiko pada Bank dan karyawan, terdapat pedoman internal untuk memberikan parameter dan kejelasan bagi karyawan tentang perilaku di media sosial apa yang dapat dan tidak dapat diterima. Karyawan wajib memastikan selalu mengikuti kebijakan, prosedur, dan standar perusahaan, serta wajib melindungi aset dan informasi rahasia Bank.

Kami menerapkan berbagai standar HAM internasional berkaitan dengan kesetaraan berdasarkan Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) pada 1979, Deklarasi Universal tentang HAM pada 1948, Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya pada 1966, serta Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik pada 1966. Begitu pun sesuai dengan yang tertuang pada rumusan pembangunan berkelanjutan skala global dalam TPB, butir ke-8, "Pertumbuhan ekonomi dan pekerjaan yang layak mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, membuka kesempatan kerja seluas-luasnya, produktif serta menciptakan pekerjaan yang layak untuk semua". [GRI 2-27, GRI 406-1]

Untuk itu, kami dengan konsisten mengimplementasi penerapan asas kesetaraan di berbagai tingkat jabatan di BTPN Syariah [GRI 406-1]. Komposisi SDM BTPN Syariah yang menunjukkan keberagaman terlihat dalam data berikut ini:

Komposisi Karyawan Berdasarkan Status Kontrak Kerja dan Jenis Kelamin
[OJK C.3.b][GRI 2-7, 2-8, 405-1]

Status	2023		2022		2021	
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
Permanen	598	3.014	592	3.304	582	3.689
Non Permanen	75	10.623	79	8.806	56	7.891
Jumlah keseluruhan	**14.310**		**12.781**		**12.218**	

Komposisi Karyawan Berdasarkan Wilayah Operasional dan Jenis Kelamin
[OJK C.3.b][GRI 2-7, 405-1]

Wilayah Operasional	2023		2022		2021	
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
Pulau Jawa	202	8.112	205	6.759	205	6.789
Pulau Sumatera	36	3.546	39	3.150	37	2.944
Pulau Kalimantan	4	485	8	432	10	394
Jabodetabek	418	355	406	828	375	549
Indonesia Timur	13	1.139	13	941	11	904
Sub Jumlah	673	13.637	671	12.110	638	11.580
Jumlah keseluruhan	**14.310**		**12.781**		**12.218**	

Mengingat nasabah pembiayaan kami merupakan masyarakat inklusi yang tersebar hampir di seluruh pelosok Indonesia, kami memberdayakan tenaga kerja lokal atau setempat guna membantu kegiatan operasional dalam mewujudkan inklusi keuangan sebagai salah satu bentuk langkah tepat membangun ekosistem berkelanjutan. [GRI 413-1]

Kami percaya, dengan pemahaman budaya, kearifan lokal juga bahasa setempat yang mereka kuasai akan banyak membantu dalam berinteraksi dengan segmen inklusi yang sejatinya *unbanked segment*, sehingga para CO dapat menyerap dan memahami program yang kami jalankan karena telah terbangun *trust* antara calon nasabah pembiayaan dan CO setempat. Dengan demikian, dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan dari aktivitas keuangan di lapangan *Insya Allah* dapat terkelola dengan optimal.

Komposisi Karyawan Berdasarkan Kelompok Usia dan Jenis Kelamin [OJK C.3.b][GRI 2-7, 405-1]

Kelompok Usia	2023		2022		2021	
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
< 25 Tahun	30	7.038	30	5.411	29	5.421
25 - 29 Tahun	96	4.359	95	4.504	86	4.214
30 - 34 Tahun	132	1.576	143	1.613	153	1.487
35 - 39 Tahun	179	473	170	412	170	307
40 - 44 Tahun	122	102	126	90	109	73
45 - 49 Tahun	67	46	65	37	55	42
50 - 54 Tahun	35	34	29	33	26	29
55 - 59 Tahun	8	7	10	9	8	6
> 59 Tahun	4	3	3	1	2	1
Sub Jumlah	673	13.637	671	12.110	638	11.580
Jumlah	**14.310**		**12.781**		**12.218**	

Komposisi Karyawan Berdasarkan Level Jabatan dan Jenis Kelamin [OJK C.3.b] [GRI 2-7, 405-1]

Jenjang Jabatan	2023		2022		2021	
	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan
Dewan Komisaris	3	1	2	2	2	2
Dewan Pengawas Syariah	2	-	2	-	2	-
Komite Independen	-	2	-	2	-	2



Jenjang Jabatan	2023		2022		2021	
	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan
Direksi	4	1	5	-	5	-
Karyawan Senior (Termasuk Pejabat Eksekutif)	124	60	115	60	115	54
Supervisor	369	1.453	347	1.353	324	1.235
Staff	171	12.120	196	10.692	190	10.287
Sub Jumlah	673	13.637	671	12.110	638	11.580
Jumlah	**14.310**		**12.781**		**12.218**	

Komposisi Karyawan Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin [OJK C.3.b] [GRI 2-7,405-1]

Tingkat Pendidikan	2023		2022		2021	
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
Pasca Sarjana	48	37	47	35	42	28
Sarjana	486	5.413	482	5.207	456	5.130
Diploma	78	979	81	964	80	962
Setara SMA	61	7.208	61	5.904	60	5460
Sub Jumlah	673	13.637	671	12.110	638	11.580
Jumlah	**14.310**		**12.781**		**12.218**	

Proses rekrutmen dan seleksi yang tepat dan cermat diyakini dapat menghasilkan #bankirpemberdaya dengan talenta dan potensi yang berkualitas tinggi yang dapat loyal memberdayakan para perempuan produktif masyarakat inklusi menuju keberlanjutan. Itu sebabnya BTPN Syariah senantiasa melakukan peningkatan efektivitas rekrutmen melalui perbaikan kebijakan, peningkatan kualitas sumber-sumber tenaga kerja, dan perbaikan proses seleksi yang lebih tepat dan cepat

Sepanjang tahun 2023, Bank melakukan inisiatif yang berkaitan dengan rekrutmen ***digital talents*** melalui:

1. Melanjutkan program pengembangan ***digital talents*** tenaga programmer dalam bentuk program ***Sharia Intensive Full-stack Engineer Development* (SHIFTED)** sebagai talenta dalam pengembangan ekosistem digital. Program SHIFTED tahun 2023 pengembangan dilakukan dengan pelatihan in-class, OJT dan *mentoring*. Mereka dididik dengan intens baik technical maupun ***leadership*** skillnya untuk menjadi ***Tech Lead*** di masa depan.
2. Memulai program ***Management Trainee SHINE* (*Sharia Digital Ecosystem Apprentice*)**, dengan merekrut lulusan terbaik Perguruan Tinggi untuk dikembangkan menjadi young *leaders* yang memiliki kapabilitas mendalam mengenai model bisnis BTPN Syariah yang unik. **SHINE** program ini telah dimulai di Q1 2023. Saat ini sedang menjalani ***On-The-Job Training*** dengan rotasi project penugasan di Direktorat ***Financing, Funding*** dan ***Operations***. Diharapkan dari **talenta muda SHINE** ini, BTPN Syariah akan memproduksi pemimpin masa depan yang benar-benar memahami secara mendalam keunikan bisnis di segmen ultra mikro.

pengembangan kompetensi karyawan [OJK F.22][GRI 404-2]

Upaya peningkatan kompetensi *Human Capital* dalam ekosistem berkelanjutan dilakukan dengan melanjutkan pelaksanaan jalur karir Tumbuh Tepat Penuh Manfaat untuk memberikan tahapan pelatihan dan pengembangan yang terstruktur bagi CO. Program pelatihan untuk karyawan lainnya pun disusun dan dilaksanakan dengan kurikulum yang terstruktur. Semua itu berjalan dengan diiringi budaya kerja yang mendukung terciptanya *agile mindset* dan *new way of working*.

kebijakan dan pelaksanaan pengembangan kompetensi 2023

Tidak ada perbedaan perlakuan atas kesediaan kesempatan mengikuti program pelatihan bagi seluruh karyawan, dengan tujuan kompetensi dan keahlian yang dimiliki semakin terasah demi keberlanjutan hidup mereka yang lebih baik. Adanya inovasi di berbagai program pengembangan yang dikelola secara *online* dan *offline* dan berbagai penugasan di bidang pekerjaan yang mereka geluti, memberi peluang bagi karyawan untuk menggali potensinya masing-masing.

Bank juga memastikan adanya pelatihan dan pengembangan sebagai pendukung karyawan dalam memasuki tanggung jawab baru atau prajabatan. Untuk itu, Divisi Human Capital bertugas dan bertanggung jawab untuk menyediakan kebijakan, prosedur, dan tata cara proses kerja pendukung pelatihan kepada karyawan agar pelatihan dapat terpenuhi sesuai persyaratan perundangan.

Dari tahun 2018, BTPN Syariah telah mengadopsi metode *Agile Software Development*. Adopsi mindset dan praktik agile di Bank dijalankan oleh People Talent Squad (PTS) dengan menjalankan sharing session dengan pembicara dari internal maupun dari praktisi Agile eksternal dan dialog- dialog yang kegiatannya beragam disesuaikan dengan tujuannya. *Community of Practices* (CoP) merupakan kelompok-kelompok pembelajaran dibentuk sesuai area teknikal yang dibutuhkan untuk dikembangkan bersama. Pengukuran efektivitas penerapan *agile* dilakukan melalui *Agile Health Check* yang dilaksanakan di Q1 2023. Hasil dari pemeriksaan ini dijadikan rekomendasi untuk perbaikan selanjutnya. Salah satu output dari *Agile Health Check* ini diimplementasikan dalam bentuk sesi-sesi dialog dengan manajemen.

Di bawah naungan PRISMA Club, dilaksanakan siraman rohani Islami yang salah satu aktivitasnya dilaksanakan di hari Jumat (Jumat Barokah) serta aktivitas lainnya (Sesi 1 Jam bersama Ustadz) yang diselenggarakan secara rutin. Sepanjang tahun 2023 ini PRISMA Club telah menyelenggarakan 11 tausiah dan kajian yang melibatkan karyawan untuk meningkatkan kualitas ibadah mereka. Dengan landasan agama yang kuat, diharapkan dapat mencetak para calon pemimpin masa depan yang memiliki karakter yang sesuai prinsip syariah.

Sepanjang tahun 2023, BTPN Syariah melalui Divisi HC telah menyelenggarakan 856 sesi pelatihan yang diikuti oleh 58.138 peserta dengan total jam pelaksanaan pelatihan sebanyak 608.509 jam dengan rata-rata 10,6 jam per peserta. Kegiatan pengembangan kompetensi tahun 2023 ini, kami optimalkan untuk mendukung bisnis loyal memberdayakan secara tepat berkelanjutan.

Rata-rata Jam Pelatihan Berdasarkan Kategori Karyawan dan Jenis Kelamin [GRI 404.1]

Level Jabatan	Jam Pelatihan Setahun		Rata-rata Jam Pelatihan	
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
Komisaris	43	29	6,14	9,67
Komite		20		10
Direktur	214	23	6,48	3,83
Pejabat Eksekutif	1.336	911	6,02	4,10
Karyawan Senior	5795	2.996	8,04	6,89
Supervisor	13.194	45.835	5,84	6,65
Staff	9.617	528.577	5,25	11,62
Jumlah	**608.590**		**10,64**	



Rata-rata jam pelatihan menurut jenis kelamin [GRI 404-1]

Level Jabatan	Rata-rata jam 2023		Rata-rata Jam 2022		Rata-rata Jam 2021	
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
Komisaris	6,14	9,67	6,70	3,33	2,43	2,54
Komite		10	3,00	8,50	-	12
Direktur	6,48	3,83	3,19	-	3,78	-
Pejabat Eksekutif	6,02	4,10	6,03	6,15	5,20	4,95
Karyawan Senior	8,04	6,89	6,28	5,43	5,05	3,84
Supervisor	5,84	6,65	5,89	5,19	5,30	4,25
Staff	5,25	11,62	6,05	5,42	6,56	6,07
Rata – Rata Jam	**5,95**	**10,90**	**6,00**	**5,40**	**3,67**	**6,25**

pelatihan terkait isu sosial dan lingkungan [OJK E.2][GRI FS4]

Sejalan dengan ditetapkannya POJK 51/POJK.03/2017 Tentang Penerapan Keuangan Keberlanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan Emiten dan Perusahaan Publik, BTPN Syariah menjadikan keuangan berkelanjutan sebagai salah satu fokus program pembelajaran bagi karyawan.

1. Syariah memberikan kesempatan kepada karyawan dari berbagai level untuk pengembangan kompetensi terkait keuangan berkelanjutan. Termasuk, pengembangan kompetensi kepada Gugus Tugas Keberlanjutan yang terdiri dari berbagai level karyawan dan lintas Direktorat.
2. Direksi dan Dewan Komisaris di BTPN Syariah turut serta dalam pengembangan kompetensi

Pelatihan mandatory mengenai sustainability awareness merupakan pelatihan inti, sebagai penguat kesadaran karyawan sebagai #bankirpemberdaya dilaksanakan dari bulan Januari hingga Desember 2023 dengan jumlah peserta 5.934 peserta. *Platform Learning Management System* (LMS) bertahap diimplementasikan mencakup seluruh modul kompetensi dan keterampilan yang dibutuhkan oleh 9.772 CO dalam meniti kariernya. Modul pelatihan ini akan mendorong self-learning dan dimonitor oleh atasan mereka. Sistem ini juga memungkinkan atasan untuk memberikan penugasan langsung untuk memastikan penguasaan keterampilan. [OJK F.22][GRI 404-2]

Tetap setia menyelenggarakan pelatihan untuk memperkenalkan dan mengintegrasikan praktik LST (Lingkungan, Sosial dan Tata Kelola) dalam setiap aktivitas, produk, dan jasa keuangan BTPN Syariah oleh seluruh karyawan sepanjang tahun 2023.

Pelatihan	Tanggal	Fasilitator	Bentuk	Peserta
Personal Branding and Business Etiquette Communication	Feb – Mei 2023	Talk Inc	Training	90
Dynamic Presentation	Feb – Nov 2023	T & DON	Training	277
Growth Mindset	4 Mar 2023	Samel P. Amarta	Training	25
Pengelolaan Aset Informasi	11 May 2023	Vedapraxis	Training	28
Professional Communication & Negotiation Skills Workshop	Jun 2023	Ace Learnings	Training	39
Professional Facilitating Skills Workshop	Jul 2023	Ace Learnings	Training	84
Leadership for First Line Managers	Sep – Nov 2023	Augmenta	Training	50

pelatihan untuk masa persiapan pensiun

Pelatihan pra pensiun diberikan kepada karyawan yang memasuki masa persiapan pensiun. Peralihan dari masa bekerja menjadi masa pensiun dipersiapkan dengan memberikan pemahaman yang relevan. Hal ini diharapkan dapat membuat karyawan dalam masa pensiunnya dapat merencanakan keuangan dengan baik, menyesuaikan gaya hidup, menitik beratkan kesehatan, manajemen asset, hal ini diberikan dengan harapan para karyawan yang memasuki masa pensiun dapat meninkmati masa pension dengan lebih nyaman dan bermakna.

Pada tahun 2023 ini telah dilaksanakan pelatihan pra pensiun pada Februari dan Juli 2023 dengan peserta sebanyak 19 orang karyawan. Detail sebagai berikut:

Tanggal	Judul Pelatihan	Lokasi	Jumlah Peserta	Penyelenggara
22 – 24 Feb 2023	Training Masa Persiapan Pensiun	Yogyakarta	4	GML
27-29 Jul 2023	Kiat Menghadapi Masa Pensiun & Berwirausaha	Yogyakarta	15	GML

penghargaan atas kinerja dan kesejahteraan karyawan

BTPN Syariah menilai kinerja karyawan di setiap jenjang jabatan secara berkala, dengan berdasarkan *Key Performance Indicator* (KPI) yang ditetapkan secara tim maupun individu yang ditentukan setiap awal tahun. Hasil penilaian kinerja tersebut juga digunakan sebagai bahan perencanaan strategis pengembangan karier karyawan bersangkutan, selain untuk mengelola kinerja individu, unit dan perusahaan. Setiap tahun, seluruh karyawan (100%) mendapatkan kajian kinerja sesuai kriteria KPI masing-masing. [GRI 404-3]

Pengelolaan kinerja karyawan dalam bentuk KPI tim maupun individu juga tetap dilaksanakan dengan berbagai penyesuaian. Hasil kinerja karyawan juga tetap diapresiasi dalam bentuk penilaian dan peninjauan hasil kinerja karyawan di setiap jenjang jabatan secara konsisten setiap tahunnya. Dengan apresiasi yang diberikan, diharapkan dapat menambah dorongan dan motivasi mereka dalam menjalankan amanah, terus menjadi pribadi yang berkembang dan setia melayani segment masyarakat inklusif dengan hati.

Dalam memberikan penghargaan kepada karyawan, Bank menerapkan ketentuan Struktur dan Skala Upah. BTPN Syariah memegang teguh komitmen untuk menerapkan gaji pokok yang tidak lebih rendah dari ketentuan UMR bagi karyawan baru di level terendah. Besaran gaji pokok ini senantiasa ditinjau dan disesuaikan secara berkala antara lain mempertimbangkan tingkat inflasi, kemampuan perusahaan, hasil benchmark salary *survey* serta kinerja karyawan. BTPN Syariah menetapkan kebijakan pemberian imbal jasa pekerjaan berdasarkan kisaran/*grade* SGL (*Salary Grade Level*) yang menggambarkan keseimbangan jenjang posisi, tugas, dan tanggung jawab setiap individu, lengkap dengan paket tunjangan lain dalam bentuk Tunjangan Hari Raya (THR), asuransi kesehatan, uang pensiun, jaminan layanan kesehatan, dan hak cuti yang diberikan sesuai dengan peraturan yang berlaku, di luar benefit khusus. [GRI 401-2]

Adapun besaran paket remunerasi setiap karyawan semata-mata didasarkan pada jenjang jabatan, kompetensi, dan hasil penilaian kinerja. Tidak ada perbedaan remunerasi bagi pria dan wanita untuk seluruh jabatan.



Perbandingan gaji dasar karyawan baru di level terendah dengan UMR [OJK F.20][GRI 202-1]

Area	2023			2022			2021		
	Gaji Dasar	UMR	Perbandingan	Gaji Dasar	UMR	Perbandingan	Gaji Dasar	UMR	Perbandingan
Jakarta	4,902,000	4,902,000	1 : 1	4.642.000	4.642.000	1:1	4,585,000	4,490,500	1.02 : 1
Bandung	4,048,500	4,048,500	1 : 1	3.775.000	3.775.000	1:1	3,815,000	3,742,500	1.02 : 1
Semarang	3,420,000	3,060,500	1.12 : 1	3.080.000	2.835.500	1.09:1	3,135,000	2,810,500	1.12 : 1
Surabaya	4,525,500	4,525,500	1 : 1	4.411.000	4.411.000	1:1	4,500,000	4,411,000	1.12 : 1
Medan	3,624,500	3,624,500	1 : 1	3.371.000	3.371.000	1:1	3,330,000	3,330,000	1 : 1
Makassar	3,523,500	3,523,500	1 : 1	3.295.000	3.295.000	1:1	3,355,000	3,255,500	1.03 : 1
Kupang	2,715,000	2,188,000	1.24 : 1	2.510.000	1.975.000	1.27:1	2,410,000	1,950,000	1.24 : 1
Banjarmasin	3,500,000	3,236,500	1.08 : 1	3.228.500	3.228.500	1:1	3,228,500	3,228,500	1 : 1
Pontianak	2,800,000	2,751,000	1.02 : 1	2.710.000	2.580.000	1.05:1	2,515,000	2,515,000	1 : 1
Samarinda	3,329,500	3,329,500	1 : 1	3.138.000	3.138.000	1:1	3,112,500	3,112,500	1 : 1

Selain itu, ketentuan waktu kerja dan istirahat yang diatur dalam Peraturan Perusahaan Bab IV – Waktu Kerja, pasal 13 dan pasal 14 menjadi landasan Bank tidak mempraktikkan kerja paksa di lingkungan BTPN Syariah. Adapun bagi karyawan yang bekerja melebihi batas aturan jam kerja, Bank memberikan kompensasi untuk jam kerja lembur sesuai dengan ketentuan ketenagakerjaan yang berlaku. [OJK F.19][GRI 409-1]

BTPN Syariah secara khusus menerapkan kebijakan hak cuti dengan total selama 90 (sembilan puluh) hari kepada karyawan perempuan yang melahirkan, disertai jaminan untuk menerima kembali bekerja setelah masa cuti selesai. Selama masa cuti, hak-hak karyawan meliputi gaji dan berbagai bentuk manfaat tetap dipenuhi. [GRI 401-2]

pengembangan karier berbasis talenta

BTPN Syariah berupaya terus menemani karyawan dalam berkarya, membentuk *talent pool* sebagai wadah bagi para karyawan unggul dengan performa gemilang dan keahlian yang mumpuni, agar kedepannya peluang untuk menjadi kader-kader pemimpin organisasi di masa depan. *Talent pool* dibentuk berdasarkan penyeleksian ketat seperti program pelatihan khusus dan rotasi penempatan di berbagai divisi untuk memberi mereka kesempatan mengembangkan wawasan sekaligus mempersiapkan jiwa kepemimpinan mereka.

Bank menyediakan program pelatihan prajabatan bagi karyawan yang mendapatkan promosi jabatan. Uraian ringkas berbagai program pelatihan prajabatan yang diselenggarakan BTPN Syariah adalah sebagai berikut [GRI 404-2]

1. Pelatihan untuk Pejabat Eksekutif
   - ***Advanced Personal Branding & Public Speaking:*** Pelatihan yang dirancang untuk menemukan karakteristik diri dan menampilkan image dalam menyalurkan pendapat untuk menyampaikan ide, gagasan, maupun opini secara asertif dalam menampilkan diri sebagai perwakilan organisasi.

   - ***Advance and Intensive Public Speaking Training:*** Pelatihan yang memberikan pemahaman mengenai komunikasi yang jelas, sistematis, dan komunikatif.

2. Pelatihan untuk pengembangan *Leadership*
   - ***Leaders With Purpose (LEAP):*** Pelatihan ini ditujukan untuk menjaga regenerasi kepemimpinan yang berkesinambungan di BTPN Syariah dengan mempersiapkan *Future Leaders* menghadapi berbagai tantangan bisnis dan organisasi ke depan. Pada tahun 2023, program LEAP telah berjalan untuk 2 (dua) angkatan.

   - ***Leadership refreshment program:*** Pelatihan ini ditujukan untuk para kepala divisi dan beberapa kepala departemen yang sudah memiliki pengalaman yang panjang memimpin tim, dengan tujuan untuk memberikan pemahaman kembali kepemimpinan mereka dikaitkan dengan kondisi dan tantangan yang akan dihadapi ke depan.

   - ***Leadership Series:*** Pelatihan yang ditujukan untuk *leaders* untuk mempertajam kemampuan dan kesiapan mereka dalam memimpin perubahan, memimpin tim dan berkomunikasi dengan *stakeholders* serta mengelola harapannya.

- ***Leadership Development Program*:** Pelatihan yang ditujukan untuk *leaders* untuk mempersiapkan mereka dalam memimpin perubahan, memimpin tim dan berkomunikasi dengan *stakeholders* serta *mengelola* pencapaian.

- ***Business Manager Leadership Excellence:*** Program ini bertujuan agar *Business Manager* mampu membangun kapasitas dan kemampuan untuk mengembangkan tim di bawahnya, berkolaborasi dengan dampak untuk memberdayakan pemangku kepentingan, menjalankan dengan disiplin untuk kelangsungan bisnis.

- ***Tepat Leadership:*** Pelatihan yang bertujuan untuk me-refresh kembali pengetahuan teknis dari para *leaders* di lapangan, sehingga dapat para *leader* dapat menekankan kembali prosedur yang tepat kepada timnya

- ***Leadership for First Line Managers:*** Pelatihan yang ditujukan untuk *leaders* yang berada dalam tingkatan pemimpin di awal, untuk mempersiapan mereka dalam memimpin perubahan, memimpin tim dan berkomunikasi dengan *stakeholders* serta mengelola harapannya

- ***Becoming a Trusted Leader for BM*:** Pelatihan yang bertujuan untuk me-*refresh* kembali para Business Manager, sehingga dapat para leader dapat mengoptimalkan potensi dan kapasitas timnya.

- ***Growth Mindset:*** Pelatihan yang diberikan untuk mengembangkan kualitas melalui upaya. Meskipun orang mungkin berbeda dalam segala hal, dalam bakat, minat, atau temperamen, namun dalam pelatihan ini setiap orang dapat berubah dan tumbuh melalui perubahan pola pikir.

- ***Landmark Forum:*** Pelatihan yang berfokus kepada metode *transformative learning* sehingga bertujuan meningkatkan kualitas hidup pesertanya dan mampu berpikir serta bertindak jauh ke depan dalam kehidupan personal, pekerjaan dan profesi, jejaring sosialisasi dan area lainnya

3. Pelatihan untuk Staff
   - ***Training* Tangguh Bersama #bankirpemberdaya:** Pelatihan yang bertujuan untuk membangkitkan motivasi diri agar tetap produktif loyal memberdayakan masyarakat.

   - ***Effective Interviewing:*** Pelatihan yang membekali peserta dengan salah satu metode yang selalu menyertai proses rekrutmen/seleksi yang biasa digunakan. Keterampilan dalam melakukan wawancara sangat diperlukan oleh para pelaku yang terlibat langsung dalam proses rekrutmen/seleksi. Melalui program ini peserta akan dibekali dengan keterampilan melakukan wawancara secara baik dan benar serta efektif, sehingga hasil yang diperoleh pun optimal.

4. Pelatihan *Community Officer* (CO)
   - ***Cool Class:*** Pembelajaran teknikal tatap muka dengan strategi ceramah, simulasi, dan *role play* yang dilakukan oleh CO yang baru bergabung setelah menyelesaikan pembelajaran dengan aplikasi Cool difasilitasi oleh fasilitator atau business manager.

   - **Nostalgia Tepat:** Pelatihan yang bertujuan untuk me-*refresh* kembali pengetahuan teknis dari para *leaders* di lapangan, sehingga dapat para *leader* dapat menekankan kembali prosedur yang tepat kepada timnya

5. **Konseling dan Seminar Sosialisasi Adaptasi Kebiasaan Baru:**
   Sosialisasi yang dilakukan untuk karyawan guna menggaungkan pentingnya pentingnya menjaga kesehatan dan juga *safety riding* serta tanggap bencana.

6. ***Employee Assistance Program*** (EAP):
   Merupakan bantuan profesional berbasis dunia kerja yang dirancang untuk membantu perusahaan dan karyawan berkaitan dengan masalah-masalah produktivitas kerja dan masalah-masalah pribadi lainnya yang berdampak terhadap kinerja dan hubungan interpersonal, baik di lingkungan kerja maupun kehidupan pribadi.

7. ***Leadership & Inclusive Training*** (LIT)
   Untuk menanamkan nilai-nilai inklusivitas dan mengenal dunia disabilitas dengan lebih baik, BTPN Syariah mulai tahun 2021 telah bekerja sama dengan Yayasan Helping Hands (YHH), suatu lembaga non-profit yang memiliki misi mempromosikan nilai-nilai inklusivitas melalui program-program pengembangan karakter yang mempertemukan dunia disabilitas dan non-disabilitas.

   Sampai tahun 2023, telah ada 45 Sukarelawan dari karyawan BTPN Syariah yang bergabung dalam program *Leadership & Inclusive Training* (LIT) YHH, dengan menjadi mentor bagi adik-



adik SLB kelas XII. Interaksi regular antara mentor dan *Mentee* ini bertujuan untuk pengembangan diri *Mentee* agar mendapatkan wawasan yang luas dan gambaran yang lebih baik mengenai dunia kerja dan pengalaman meniti karier dari para mentor dan bahwa mereka memiliki kesempatan yang sama jika bekerja keras mengembangkan potensi dirinya.

Bagi para mentor, interaksi ini memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai dunia disabilitas sekaligus meningkatkan kemampuan kepemimpinan dalam pengembangan diri *Mentee*, kepekaan sosial, dan empati.

Pada tahun 2023 kerjasama dengan YHH juga ditingkatkan dengan uji coba program magang kerja bagi penyandang disabilitas yang sebelumnya menjadi *mentee* dalam program LIT. Terdapat 3 *mentee* disabilitas yang sekarang sudah duduk di perguruan tinggi untuk mengenal dunia kerja di BTPN Syariah. Program ini memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai dunia disabilitas dan meningkatkan empati bagi lebih banyak karyawan BTPN Syariah. Selanjutnya program magang untuk peyandang disabilitas akan ditingkatkan pesertanya di tahun 2024.

pencapaian 2023 dan rencana 2024

Segenap inisiatif dan aktivitas yang dilaksanakan sepanjang tahun 2023 tersebut telah memberikan hasil-hasil sebagai berikut:

employee engagement

Manajemen BTPN Syariah memandang model bisnis unik yang dijalankan merupakan bentuk dari '*people business*'. Hal ini karena BTPN Syariah memiliki 12.000an karyawan lapangan yang melayani 4 jutaan nasabah pembiayaan. Sehingga penting sekali untuk mendengarkan masukan dan aspirasi karyawan. Dari tahun 2022, BTPN Syariah secara rutin melakukan *Employee Engagement Survey* ("EES") dengan bekerja sama dengan pihak konsultan yang memiliki *expertise* dan reputasi kelas global dalam bidang ini.

EES ini menghasilkan skor *Engagement* dan *Enablement* yang mengukur sejauh mana karyawan memiliki komitmen dan loyalitas serta sejauh mana karyawan merasa bahwa perusahaan telah menyiapkan dan mendukung agar mereka bisa bekerja dan berkembang dengan optimal. Hasil *survey* EES di awal tahun 2023 menghasilkan skor *Engagement* 78% dan skor *Enablement* 81%, dengan tingkat partisipasi sebesar 83% karyawan mengisi *survey* ini, maka hasil ini menunjukkan tingkat *engagement* dan *enablement* yang tinggi. Meskipun sedikit menurun dibandingkan hasil tahun sebelumnya, namun hal ini bisa dimengerti karena *survey* tahun 2022 adalah EES yang pertama. Hasil ini masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan hasil EES di *high performing companies* dunia. Hasil yang positif ini menunjukkan sebagian besar karyawan merasakan bahwa BTPN Syariah telah memberikan perhatian yang baik dan mendukung mereka untuk terus tumbuh.

Tentunya ada area-area yang mendapatkan masukan karyawan untuk lebih ditingkatkan, hal ini menjadi masukan yang berharga bagi Manajemen. Program-program tindak lanjut hasil *survey* telah disusun dan dijalankan di sepanjang tahun 2023. Program pelatihan ditingkatkan secara terstruktur untuk menjangkau lebih banyak karyawan, kajian dan perbaikan di area *pay & benefit* juga dijalankan untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan, dan lebih banyak dialog tatap muka baik langsung maupun via daring yang dilakukan di setiap Divisi, agar saluran komunikasi lebih terbuka, perhatian dan dukungan kepada karyawan semakin terjaga dengan baik.

BTPN Syariah berkomitmen untuk secara konsisten melaksanakan EES setiap tahun dan menindaklanjuti segera hasil dan masukan-masukan berharga yang disuarakan oleh karyawan.

Sebanyak 50% karyawan di BTPN Syariah dari lulusan SMA maupun SMK, serta 7% lulusan diploma dimana pengalaman kerja di BTPN Syariah pada umumnya merupakan pengalaman kerja pertama setelah lulus dari bangku pendidikan. Dengan berbagai latar belakang dan kondisi karyawan yang memiliki harapan dan ekspektasi berbeda akan dunia kerja dan di saat bersamaan masih terus beradaptasi menyesuaikan dengan lingkungan yang baru maka tidak dapat dipungkiri kondisi tersebut menyebabkan tingkat *turnover* yang terjadi saat ini. BTPN Syariah secara aktif memitigasi proses percepatan dan penyempurnaan proses perekrutan untuk memastikan kelancaran proses bisnis dan tingkat operasional tetap terjaga pada rentang yang aman dan secara bersamaan memastikan kebutuhan karyawan di lapangan dan proses penyesuaian karyawan baru terpenuhi secara lengkap. [GRI 2-7]

Turnover Karyawan [GRI 2-7, GRI 401-1]

2023	2022	2021
55,4%	44,8%	37,5%

Turnover Karyawan Berdasarkan Kelompok Usia dan Jenis Kelamin [GRI 2-7, GRI 401-1]

Kelompok Usia	2023		2022		2021	
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
< 25 Tahun	8	4.855	10	3.354	5	2.801
25 - 29 Tahun	21	2.338	23	1.894	7	1.369
30 - 34 Tahun	17	262	14	192	22	209
35 - 39 Tahun	11	33	16	34	10	33
40 - 44 Tahun	13	6	9	4	10	3
45 - 49 Tahun	5	4	2	7	1	0
50 - 54 Tahun	1	2	1	1	3	2
55 - 59 Tahun	4	3	4	3	2	0
>59 Tahun	1	0	1	0	0	0
Sub jumlah	81	7.503	80	5.489	60	4.417
Jumlah	**7.584**		**5.569**		**4.477**	

Turnover Karyawan Berdasarkan Wilayah Operasional dan Jenis Kelamin [GRI 2-7, GRI 401-1]

Wilayah Operasional	2022		2021		2020	
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
Indonesia Timur	3	658	2	541	2	389
Jabodetabek	36	34	36	285	29	123
Jawa	36	4.976	35	3.274	27	2.746
Kalimantan	2	257	2	208	1	169
Sumatera	4	1.578	5	1.181	1	990
Jumlah	**81**	**7.503**	**80**	**5.489**	**60**	**4.417**

Alasan Pengunduran Diri [GRI 2-7, GRI 401-1]

Kelompok Usia	2023		2022		2021	
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
Permintaan Sendiri	57	3.046	47	2.594	45	2.596
Hukuman Disiplin dan PHK Mangkir	15	4.371	20	2.754	5	1.639
Pensiun	2	1	6	4	3	1
Berakhirnya Kontrak Kerja	4	67	2	124	-	163
Lain-lain *	3	18	5	13	7	18
Jumlah	**81**	**7.503**	**80**	**5.489**	**60**	**4.417**

*** gagal masa percobaan**



BTPN Syariah berupaya menurunkan tingkat turnover CO dengan cara:
1. Mengimplementasikan *Onboarding* BIJAK dengan lebih efektif
2. Menerapkan Insentif *Stay Rate* bagi Wisma
3. Mempercepat pemenuhan CO melalui peningkatan produktivitas *resourcing* dan kualitas *sourcing* melalui program KAGUM
4. Memperkuat peran manajer lini dalam mengelola anggota tim dengan serangkaian latihan kepemimpinan

BTPN Syariah juga berupaya mempertahankan dan mengembangkan talenta terbaik Perusahaan:
1. Mengimplementasikan program pengembangan kemampuan Leadership untuk talenta-talenta perusahaan melalui program LEAP (*Leaders with Purpose*)
2. Mengimplementasikan program Bunda Pintar sebagai upaya memperhatikan Kebutuhan karyawan yang mayoritas wanita di usia produktif, dan memperkuat proposition bagi karyawan perempuan di perusahaan.

BTPN Syariah terus berupaya meningkatkan *engagement* karyawan:
1. Mengembangkan *Employee Engagement Playbook* untuk merancang program-program engagement di masing-masing Divisi.
2. Menjalankan program pelatihan di seluruh lini.
3. Memperpendek jalur komunikasi antara atasan dan bawahan melalui berbagai kanal komunikasi, online ataupun offline.

produktivitas karyawan

Tingkat produktivitas karyawan berdasarkan indikator rasio *Earning per Employee* dapat dipertahankan/ meningkat sesuai data:

	2023	2022	2021
Laba	1.081	1.780	1.465
Jumlah Karyawan	14.310	12.781	12.218
EPE	7,55%	13,90%	11,99%

Indikator tersebut membuktikan bahwa setiap aktivitas dan anggaran biaya yang telah direalisasikan untuk mendukung pengembangan kompetensi karyawan telah memberikan kontribusi positif bagi kinerja Perusahaan.



rencana 2024

Mengantisipasi tantangan masa depan, pengembangan Tim Human Capital berencana menjalankan beberapa program dan strategi 2024 dengan memfokuskan pengelolaan Gen Z. Hal ini difokuskan mengingat sebagian besar karyawan BTPN Syariah adalah karyawan dari Gen-Z ini. Budaya, kompetensi dan pengelolaan yang unik dari generasi ini menjadi tantangan sekaligus peluang bagi BTPN Syariah.

Strategi pengembangan lebih lanjut di tahun 2024 akan dilakukan dengan berbagai program:

1. **BM Excellaration Program**
   Program pengembangan *new breed of Business Manager* (BM) dengan mendesain dan menjalankan program perekrutan, dan akademi pengembangan yang terakselerasi
2. ***Sharia My Way***
   Penanaman kembali nilai syariah kepada karyawan untuk peningkatan soft kompetensi mereka.
3. **Kakak Curhat**
   Pengembangan kapabilitas dari karyawan *Community Officer* (CO) Senior dan BM untuk melakukan *counseling* dan pengelolaan kesehatan mental karyawan lapangan
4. **Panggung CO**
   Menyelenggarakan event *engagement* dari CO untuk CO yang bertujuan untuk memberikan panggung penghargaan dan pemberdayaan untuk karyawan CO Gen-Z sesuai dengan minat dan aspirasi mereka.
5. ***Talent Management* dan *Leadership Development***
   Menjalankan program pengembangan talenta pemimpin secara terstruktur di setiap layer organisasi dari proses identifikasi, penyelenggaraan program pelatihan sampai dengan monitoring dan evaluasi pengembangan karir mereka.
6. ***People Score***
   Membangun alat ukur untuk meningkatkan kemampuan para Kepala Divisi dalam menjaga dan mengembangkan Timnya dan sekaligus meningkatkan *engagement* mereka.

Seluruh program dan strategi ini menjadi prioritas BTPN Syariah dalam upaya meningkatkan kepuasan dan loyalitas karyawan yang bermuara pada peningkatan dan kemudahan layanan kepada nasabah, masyarakat inklusif.





09

Loyal Berkelanjutan

UNTUK LINGKUNGAN



Loyalitas BTPN Syariah untuk menjaga lingkungan hidup demi tujuan keberlanjutan dan mengurangi dampak Gas Rumah Kaca (GRK) dilakukan melalui berbagai upaya pelestarian alam dan adaptasi dengan lingkungan baik di dalam maupun diluar Bank

komitmen terhadap dampak perubahan iklim [OJK F.16][GRI 2-23, 2-24, 2-25, 307-1]

BTPN Syariah tetap setia mengelola dampak lingkungan terkait penggunaan air, efisiensi energi, penghematan kertas, pengelolaan limbah dan upaya pengurangan emisi yang pada akhirnya dapat mencegah pencemaran lingkungan , menghasilkan efisiensi sumber daya alam dan berperan serta melakukan upaya penurunan emisi GRK.

Bank tidak menemukan adanya laporan mengenai ketidakpatuhan terhadap undang-undang ataupun peraturan tentang lingkungan hidup dari kegiatan usaha Bank dari aktivitas #bankirpemberdaya ketika loyal mendampingi dan memberdayakan masyarakat inklusi di sepanjang tahun 2023.

energi [OJK F.5, OJK F.7, OJK F.12][GRI 302-1]

BTPN Syariah menyadari bahwa pengelolaan energi yang digunakan dalam operasional Bank akan memberikan dampak bagi lingkungan dalam hal efisiensi sumber daya alam, penurunan emisi GRK dan bahkan menghasilkan efisiensi biaya operasional kantor.

Bentuk upaya yang dilakukan pada tahun 2023 ini adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan *Public Expose*, Pertemuan dengan Analis dan meeting secara *hybrid;*
2. Pelaksanaan keterbukaan informasi serta *press release* dalam bentuk digital dan disampaikan melalui *electronic mails;*
3. Pengurangan penggunaan moda transportasi;
4. Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diselenggarakan secara elektronik, yang tidak saja mendukung pengurangan kertas melalui peniadaan materi cetakan, namun tidak kalah penting berupa pengurangan perjalanan moda transportasi dan pengurangan karbon oleh Pemegang Saham dengan pelaksanaan secara daring dan penyediaan kuasa kehadiran dan *voting* secara elektronik.
5. memanfaatkan teknologi berbasis *cloud (private cloud data centre)* agar dapat melakukan efisiensi infrastruktur teknologi informasi dan mendorong energi efisiensi.
6. memanfaatkan lampu LED dan lampu dengan sensor gerak *(motion triggered lamp)* dalam pengelolaan aktivasi pencahayaan di dalam ruangan;
7. menggunakan kaca dua lapis pada jendela yang memungkinkan sinar matahari masuk ke ruang kerja secara optimal. Penggunaan kaca jendela ini juga dapat mengurangi intensitas penggunaan lampu pada siang hari;
8. mempergunakan pendingin ruangan ramah lingkungan dan memiliki kebijakan pembatasan penggunaan pendingin ruangan disesuaikan dengan kebutuhan.
9. Menerapkan model bisnis pelayanan berbasis sentra komunitas, sehingga setiap anggota sentra tidak perlu menggunakan kendaraan secara rutin untuk bertemu #bankirpemberdaya namun seorang #bankirpemberdaya rutin mendatangi sentra komunitas yang rata-rata beranggotakan 15 orang nasabah;
10. Kantor Cabang dan Kantor Fungsional Operasional BTPN Syariah juga menampilkan desain ramah lingkungan dengan memanfaatkan tanaman hidup untuk memaksimalkan ruang hijau dan menurunkan temperatur udara. Desain tersebut juga membantu mengurangi penggunaan energi dan menampilkan lingkungan yang asri.
11. Mulai tahun 2023, Bank mempergunakan mobil Listrik sebagai pendukung operasional Direksi.

Program digitalisasi dan otomasi proses yang berdampak langsung pada pengurangan penggunaan kertas sebagai hasil implementasi, menyempurnakan *baseline* pengelolaan lingkungan dan sosialisasi penerapan operasi ramah lingkungan merupakan realisasi target dalam RAKB.



Capaian kinerja lingkungan hidup. [OJK F.6, OJK F.11]

	Satuan	2023*	2022	2021
Energi Listrik				
Pemakaian Listrik	Kwh	4.122.674	2.303.425	1.593.834
Luasan Area	M2	24.258	18.767	18.993
Intensitas Konsumsi Energi	Kwh/M2	169,95	122,74	83,92
Penurunan Penggunaan Listrik	%	Belum bisa dihitung	12	14
Energi BBM				
Penggunaan BBM rata-rata/bulan/unit KDO	Liter	125,5	174,7	147,2
Perjalanan dengan pesawat domestik	jumlah	2.978	1.819	256
Perjalanan dengan pesawat internasional	jumlah	0	0	0
Perjalanan dengan kereta api	jumlah	365	176	21

Keterangan *: data seluruh kantor di BTPN Syariah

Terdapat revisi data penggunaan listrik pada kantor pusat tahun 2022 dan 2021. Pengungkapan Data Listrik tahun 2023 merupakan hasil perhitungan tidak hanya kantor pusat namun sudah meliputi seluruh kantor cabang dan kantor fungsional, berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya data yang digunakan adalah Data Listrik kantor pusat BTPN Syariah saja. Hal ini merupakan upaya BTPN Syariah untuk mengelola penggunaan listrik lebih serius dan dalam jangkauan yang lebih luas.

Inventarisasi GRK merupakan langkah pertama dalam mengelola emisi. Dengan memahami profil dari jejak karbon yang ada, akan memudahkan penentuan strategi pengurangannya.

Sepanjang tahun 2023, BTPN Syariah mencatat intensitas energi listrik 169,95 kWh/m2 per tahun. Angka ini masih memenuhi kategori 'cukup efisien' menurut Nilai standar IKE berdasarkan SNI-6197-2011 tentang Intensitas Konsumsi Energi Gedung Indonesia di sektor gedung perkantoran.

Emisi CO2 yang terbentuk pada tahun 2023 atas pemakaian BBM dan perjalanan dinas sebesar 170.591 (kg CO2-eq). Perhitungan emisi menggunakan standar Defra Greenhouse Gas Conversion Factors 2019.

air dan material ramah lingkungan [OJK F.8][GRI 303-3, GRI 303-5]

Untuk menghemat penggunaan air yang seluruhnya disuplai dari PDAM, BTPN Syariah tetap setia merawat dan memastikan perbaikan instalasi air termasuk mempergunakan kran sensorik di kantor pusat dan kantor cabang. Atas berbagai upaya tersebut, maka pemakaian air di kantor pusat BTPN Syariah tergambar sebagai berikut:

	satuan	2023	2022
Air PDAM	M3	1.006,00	na
Air Minum Galon	M3	25, 15	25,32
Total Pemakaian Air	M3	1.031,16	na

Sejak tahun 2023, BTPN Syariah berupaya mempergunakan berbagai material ramah lingkungan dalam kegiatan operasionalnya dengan data sebagai berikut:

Uraian	Satuan	2023
Pemakaian Lampu LED	Pcs	1.669



limbah [GRI 306-1, GRI 306-2]

BTPN Syariah memiliki limbah dalam pelaksanaan operasional perbankan antara lain adalah kertas. Sebagai upaya mengurangi limbah kertas maka BTPN Syariah memiliki kebijakan dan program kerja yang membentuk budaya terkait penggunaan dan pengelolaannya, antara lain:

1. Dengan melakukan digitalisasi proses, maka proses harian *Community Officer* sudah dapat dimasukkan dalam Aplikasi Terra. Aplikasi ini mencakup proses pengajuan pembiayaan, pencairan, pembayaran angsuran serta aktivitas lain yang sebelumnya banyak menggunakan kertas. Dengan digitalisasi maka proses kerja dapat lebih transparan, akurat, dan cepat.
2. Penggunaan media komunikasi antara lain *e-mail* dan *Microsoft Teams* telah dilakukan sehingga dalam presentasi tidak diperlukan mencetak materi dan untuk melakukan *follow up* tidak perlu dicetak karena sudah tercatat.
3. Dokumen dalam kajian akan dikirimkan via *e-mail* terlebih dahulu sebelum dicetak untuk memperoleh persetujuan.
4. Dalam harus mencetak hasil kerja, maka semua PC dan laptop kantor pusat sudah diatur otomatis untuk mencetak bolak-balik. Selain itu penggunaan kertas dimaksimalkan untuk kedua sisi kertas.
5. Dokumen-dokumen kekaryawanan berupa Kartu e-Letter BPJS Kesehatan, *e-Letter* BPJS Ketenagakerjaan, SK Mutasi, SK Promosi, informasi kepegawaian, SOP, Juknis dokumen, dan surat- surat terkait ketenagakerjaan dapat diakses langsung oleh karyawan secara daring melalui sistem *Human Capital*.
6. Penyampaian dokumen dan komunikasi antar Divisi dan Direktorat telah dioptimalisasikan menggunakan *e-mail*.
7. Melakukan penyimpanan dokumen dalam bentuk *softcopy*, *electronic filing (Cofilib/ Corporate Filing and Library)*.
8. Otomasi dalam pelaksanaan layanan transaksi MMS bagi nasabah secara menyeluruh baik bagi transaksi reguler pada saat Pertemuan Rutin Sentra, penagihan/*collection*, dan perbaikan proses transaksi lainnya.
9. Automasi dalam pelaksanaan pengelolaan dan monitoring uang tunai (*cash management*) MMS serta instruksi pembukuannya ke KFO/ KC maupun otomasi/perbaikan dan simplifikasi proses lainnya di Kantor Pusat (*Head Office*).
10. Sosialisasi atas ketentuan operasional secara *online*, koordinasi kerja, dan *meeting online*
11. Penyampaian Laporan kepada Otoritas telah melalui *platform e-reporting* (antara lain SIPENA OJK Pengawas Perbankan Syariah, IDX Net, OJK Net) sehingga tidak lagi menyampaikan laporan secara hardcopy, yang bertujuan untuk menekan penggunaan kertas serta menghemat tempat penyimpanan dokumen.
12. Komitmen kepada Pemegang Saham dalam mendukung penghematan kertas saat penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2022 di mana Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan diberikan dalam bentuk USB, Tata Tertib Rapat, Informasi Tambahan, dan dokumen Keterbukaan Informasi tersedia di Situs Web Bank.

Kertas merupakah hasil olahan dari pohon, Bank menyadari melalui upaya yang dilakukan dalam mengelola kertas yang digunakan akan menyelamatkan pohon. Pohon merupakan sumber kehidupan yang mampu menyerap karbon dioksida (polusi udara) dan menghasilkan oksigen, mendinginkan suhu permukaan bumi, melindungi dan menjaga kesuburan tanah, dan sebagai habitat hewan. Sekecil apapun peran kita menjaga pohon akan berkontribusi terhadap penurunan emisi CO2 dan turut serta menghambat efek Gas Rumah Kaca (GRK).

Pada tahun 2023 kami bisa menggunakan kertas untuk operasionalisasi kantor sebesar 5.270 kg atau setara dengan emisi CO2 sebesar 6.429 kgCO2-eq (menggunakan perhitungan faktor emisi berdasarkan USEPA Victoria 2013)

Sejak tahun 2023 terdapat perubahan cara penghitungan penggunaan kertas yang memperhitungkan keseluruhan penggunaan

kertas BTPN Syariah, sebelumnya hanya memperhitungkan penggunaan kertas untuk nasabah pembiayaan. Hal ini merupakan upaya BTPN Syariah untuk mengelola penggunaan kertas lebih serius dan dalam jangkauan penggunaan yang lebih luas.

Timbulnya limbah kertas [GRI 306-3]

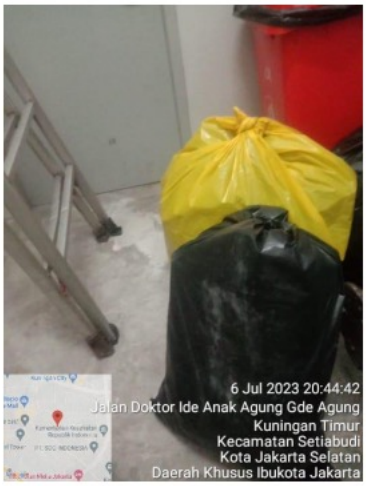
	satuan	2023	2022	2021
Biaya pengadaan kertas	Juta Rp	6.587	1,478	1,805
Kertas yang digunakan	kg	5.270	1.182	1.444
Pengurangan kertas	kg	Belum dapat dihitung	262	578
Emisi CO2 dari kertas	$kgCO_2$-eq	6.429	1.443	1.762
Potensi penurunan emisi CO2	$kgCO_2$-eq	Belum dapat dihitung	320	705

*terdapat perbedaan antara perhitungan kertas di 2023 terhadap tahun-tahun sebelumnya

Pada tahun 2023, pengelolaan sampah ditingkatkan dalam upaya mengelola limbah kantor melalui program Waste Management. Program ini melakukan pemilahan sampah organik dan anorganik secara rutin di kantor pusat BTPNS dengan data sampah sebagai berikut:

Jenis Sampah	satuan	2023
Sampah Organik	Ton	4,20
Sampah Anorganik	Ton	2,08











Pendampingan dan pemantauan kegiatan restorasi hutan

Pendampingan dan pemantauan kegiatan restorasi hutan Hutan berjasa dalam menjaga keseimbangan iklim, mengurangi dampak polusi, menyerap CO2 dan mengurangi pemanasan global. Menyadari peran penting hutan pada keberlanjutan kehidupan manusia, Bank telah menjalankan reforestasi di Kampung Minta, Penyinggahan, Kutai Barat.

Kegiatan reforestasi tersebut diawali pada Agustus 2020 dengan melibatkan warga loka, melakukan penananam 1.000 beluma (Syzigium sp) dan 1.009 kahoi (Shorea blangeran) di area seluas 3 ha. Forestasi yang dilakukan setelah terjadi bencana kebakaran di Hutan Kahoi itu bertujuan untuk membantu pemulihan ekosistem lahan basah dan rawa gambut di wilayah tersebut.Melalui kegiatan ini, Bank juga berharap dapat berkontribusi dalam upaya mengurangi efek pemanasan global dan perubahan iklim.

Melalui pelibatan itu, tingkat kesadaran dan rasa kepemilikan terhadap hutan semakin meningkat. Salah satunya tercermin dari tidak ada kegiatan pembalakan dan kebakaran hutan terutama di sekitar kawasan Kampung Minta.

Sejak 2020 hingga saat ini kegiatan forestasi Bank telah menghasilkan stok karbon sebanyak 2.690t/ha, seperti yang disampaikan oleh WWF pada tahun 2022.

Green Building

Dalam penerapan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, BTPN Syariah telah mengusung lingkungan kantor yang ramah lingkungan yang dibuktikan melalui kehadiran gedung kantor pusat BTPN Syariah yang bukan saja mencerminkan kemajuan bisnis namun terlebih lagi sebagai cerminan komitmen perusahaan terhadap kelestarian lingkungan dengan menempati gedung yang telah dianugerahi sertifikasi Gold Standard Certificate for Green Building oleh Green Building Counsil Indonesia.

Salah satu fitur unik dari Gedung Kantor Pusat BTPN Syariah adalah konsep rancangan langit-langit terbuka. Inovasi ini bukan hanya estetika namun berhasil meningkatkan volume oksigen dalam gedung hingga 50%, sebuah langkah maju dalam menciptakan lingkungan kerja yang lebih sehat dan produktif. Gedung ini juga dirancang untuk memaksimalkan pemanfaatan cahaya alami, mengeliminasi kebutuhan akan *window blinders* dan mengurangi penggunaan partisi yang menghalangi cahaya.



Di era yang memerlukan kehati-hatian tinggi terhadap kebersihan, teknologi ultraviolet *germicidal irradiation* diimplementasikan sebagai metode desinfeksi. Ini bukan hanya mensterilkan udara dari mikroorganisme, tetapi juga mendukung upaya kesehatan publik. Selanjutnya, penggunaan *epoxy floor coating* membantu mencegah pertumbuhan bakteri dan kuman.

Gedung Kantor Pusat BTPN Syariah juga mengutamakan efisiensi energi melalui pemanfaatan sistem pendingin ruangan ramah lingkungan. Penggunaan pendingin diatur secara hati-hati, memastikan kenyamanan tanpa pemborosan energi. Ini mencerminkan komitmen BTPN Syariah terhadap keberlanjutan dan tanggung jawab lingkungan.

Tidak berhenti di gedung utama, Kantor Cabang dan Kantor Fungsional Operasional BTPN Syariah juga mengadopsi prinsip-prinsip ramah lingkungan. Penggunaan tanaman hidup tidak hanya meningkatkan estetika tetapi juga memainkan peran penting dalam menurunkan temperatur udara dan meningkatkan kualitas udara. Ini mengurangi kebutuhan energi untuk pendinginan dan menciptakan lingkungan yang lebih asri dan menyegarkan.

Gedung Kantor Pusat BTPN Syariah Jakarta merupakan bentuk arsitektur modern dan prinsip keberlanjutan dapat berjalan seiring, menciptakan ruang kerja yang tidak hanya fungsional tetapi juga ramah lingkungan dan sehat. Ini adalah langkah maju yang signifikan dalam visi pembangunan berkelanjutan di Indonesia.





10

Menerapkan Tata Kelola

YANG BAIK UNTUK PEMBERDAYAAN YANG BERKELANJUTAN


DK 5327 ABC
DK 6172 ADB



BTPN Syariah melakukan upaya pengelolaan Bank yang semakin transparan, *accountable,* dapat dipertanggung-jawabkan serta mengedepankan profesionalisme dengan mengusung kewajaran dan kepatuhan syariah secara lengkap dan menyeluruh. Upaya-upaya ini lebih lanjut diharapkan dapat menjadi dasar bagi Bank secara istiqomah menjalankan aspirasinya "**loyal memberdayakan mendukung keberlanjutan**

Menerapkan tata kelola yang baik untuk pemberdayaan yang berkelanjutan

Melanjutkan komitmen untuk mendukung program Pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan atas percepatan pengembangan ekonomi syariah, BTPN Syariah secara berkelanjutan mengintegrasikan aspek Lingkungan, Sosial dan Tata Kelola (LST) dalam proses pengembangan produk dan layanannya sehingga selaras dengan tujuan Keuangan Berkelanjutan yang meliputi:

1. Upaya untuk mendorong peluang penciptaan nilai melalui inovasi produk dan antisipasi yang lebih baik terhadap tren-tren mendatang;
2. Penerapan manajemen risiko yang lebih baik dan pengalokasian modal yang lebih optimal berdasarkan kesadaran tentang isu-isu LST seperti hambatan-hambatan dari modal alam dan sosial; dan
3. Menjadi katalis perubahan organisasi.

Secara konsisten, BTPN Syariah menjalankan inisiatif keberlanjutan yang tertuang dalam RAKB sebagai upaya Bank dalam mengelola risiko sosial dan lingkungan, mengurangi kesenjangan sosial serta mengurangi dan mencegah kerusakan lingkungan hidup dengan tetap berpedoman pada prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

Kami memahami bahwa penerapan Tata Kelola yang baik dapat meningkatkan daya tahan dan daya saing bagi Bank. Berangkat dari pemikiran tersebut, BTPN Syariah melakukan upaya pengelolaan Bank yang semakin transparan, *accountable,* dapat dipertanggung-jawabkan serta mengedepankan profesionalisme dengan mengusung kewajaran dan kepatuhan syariah secara lengkap dan menyeluruh. Upaya-upaya ini lebih lanjut diharapkan dapat menjadi dasar bagi Bank secara istiqomah menjalankan aspirasinya "**loyal memberdayakan mendukung keberlanjutan"**.

Komitmen atas prinsip-prinsip dasar dan pedoman tata kelola di BTPN Syariah

[GRI 102-16, 102-17]

Sejalan dengan tujuan mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang bersifat inklusif dan ditopang oleh sistem perekonomian nasional yang *resilient* untuk waktu sekarang dan mendatang, BTPN Syariah mengedepankan keselarasan antara aspek ekonomi, sosial dan lingkungan hidup dalam penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

Secara berkesinambungan, BTPN Syariah melakukan penyempurnaan terhadap penerapan GCG secara menyeluruh dalam upayanya memperketat fungsi pengawasan dan mewujudkan komitmen untuk terus meningkatkan kualitas penerapan GCG yang baik bagi seluruh pemangku kepentingan. Secara spesifik, Bank meyakini bahwa upaya untuk terus mengembangkan sistem lembaga keuangan yang ramah lingkungan hidup sesuai amanat dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang sebagian telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang adalah sebuah Amanah yang harus dijalankan dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan seluruh pemangku kepentingan.

Pelaksanaan penerapan GCG di BTPN Syariah secara konsisten dan berkelanjutan berlandaskan pada 6 (enam) asas-asas dasar yaitu Transparansi, Akuntabilitas, Pertanggungjawaban, Profesional, Kewajaran, dan Kepatuhan Syariah. Sebagai perusahaan publik, penerapan pedoman GCG di BTPN Syariah mencakup 5 (lima) aspek, 8 (delapan) prinsip GCG yang baik dan 25 (dua puluh lima) penerapan aspek dan prinsip GCG yang baik.



Sebagai Bank Umum Syariah.

Sebagai Bank Umum Syariah, BTPN Syariah tunduk kepada pelaksanaan penerapan prinsip-prinsip dasar GCG yang baik yaitu Transparansi, Akuntabilitas, Pertanggungjawaban, Profesional, Kewajaran, dan Kepatuhan Syariah.

Pengejawantahan dari asas-asas tersebut adalah sebagai berikut:

Transparansi	Dalam menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis, Bank harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Bank harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh Pemegang Saham, Nasabah dan Pemangku Kepentingan lainnya
Akuntabilitas	Bank harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu Bank harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan Bank dengan tetap memperhitungkan kepentingan Pemegang Saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan
Pertanggungjawaban	Bank harus mematuhi seluruh Prinsip-Prinsip Syariah dan peraturan perundangan yang berlaku, serta melaksanakan tanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Pemegang Saham, masyarakat, lingkungan dan pemangku kepentingan lainnya yang relevan sehingga dari waktu ke waktu pelaksanaan Prinsip-Prinsip Syariah terlaksana dan terpelihara dengan optimal dalam kesinambungan usaha jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai entitas yang baik dan taat hukum syariah dan hukum positif yang berlaku;
Profesional	Untuk memastikan penerapan prinsip-prinsip GCG yang baik, Bank dikelola secara independen sehingga masing-masing organ Bank tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain serta memiliki kompetensi, mampu bertindak objektif, bebas dari pengaruh mana pun serta memiliki komitmen tinggi untuk mengembangkan Bank
Kewajaran	Dalam melaksanakan kegiatannya, Bank senantiasa memperhatikan kepentingan Pemegang Saham dan pemangku kepentingan lainnya dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* berdasarkan asas keadilan dan kesetaraan
Kepatuhan Syariah	Bank adalah lembaga bank yang menjalankan fungsi intermediasi keuangan dikelola dan dioperasikan berdasarkan Prinsip-Prinsip Syariah sebagai jiwa dan spirit dari pendirian Bank. Karenanya, kepatuhan terhadap Prinsip-Prinsip Syariah di dalam seluruh kegiatan dan produk penyaluran dan penghimpunan dana dan produk-produk jasa perbankan lainnya adalah suatu keniscayaan dan mandatory, termasuk di dalam aspek ini adalah standar kepatutan etika dan akhlak seluruh pengurus dan Karyawan Ban

Sebagai Perusahaan Publik

Sebagai Perusahaan Publik, penerapan pedoman GCG di BTPN Syariah mencakup di dalamnya 5 (lima) aspek, 8 (delapan) prinsip GCG yang baik serta 25 (dua puluh lima) penerapan aspek dan prinsip GCG yang baik yaitu:

ASPEK Penerapan GCG yang baik bagi Perusahaan Terbuka, termasuk di dalamnya:	1. Aspek Hubungan Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham dalam menjamin Hak-Hak Pemegang Saham; 2. Aspek Fungsi dan Peran Dewan Komisaris serta Dewan Pengawas Syariah; 3. Aspek Fungsi dan Peran Direksi; 4. Aspek Partisipasi Pemangku Kepentingan; 5. Aspek Keterbukaan Informasi
PRINSIP Penerapan Pedoman GCG yang baik bagi Perusahaan Terbuka, termasuk di dalamnya:	1. Meningkatkan Nilai Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS); 2. Meningkatkan Kualitas Komunikasi Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham atau Investor; 3. Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Dewan Komisaris; 4. Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris; 5. Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Direksi; 6. Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi; 7. Meningkatkan Aspek Tata Kelola Perusahaan melalui Partisipasi Pemangku Kepentingan; 8. Meningkatkan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi

PENERAPAN ASPEK dan PRINSIP GCG yang baik, termasuk di dalamnya:	1. Perusahaan Terbuka memiliki cara atau prosedur teknis pengumpulan suara (*voting*) baik secara terbuka maupun tertutup yang mengedepankan independensi, dan kepentingan pemegang saham; 2. Seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka hadir dalam RUPS Tahunan; 3. Ringkasan risalah RUPS tersedia dalam Situs Web Perusahaan Terbuka paling sedikit selama 1 (satu) tahun; 4. Perusahaan Terbuka memiliki suatu kebijakan komunikasi dengan pemegang saham atau investor; 5. Perusahaan Terbuka mengungkapkan kebijakan komunikasi Perusahaan Terbuka dengan pemegang saham atau investor dalam Situs Web; 6. Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka; 7. Penentuan komposisi anggota Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan; 8. Dewan Komisaris mempunyai kebijakan penilaian sendiri (*self-assessment*) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris; 9. Kebijakan penilaian sendiri (self-assessment) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris, diungkapkan melalui Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka; 10. Dewan Komisaris mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan; 11. Dewan Komisaris atau Komite yang menjalankan fungsi Nominasi dan Remunerasi menyusun kebijakan suksesi dalam proses Nominasi anggota Direksi; 12. Penentuan jumlah anggota Direksi mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka serta efektivitas dalam pengambilan keputusan; 13. Penentuan komposisi anggota Direksi memperhatikan, keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan; 14. Anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan memiliki keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi; 15. Direksi mempunyai kebijakan Penilaian sendiri (*self-assessment*) untuk menilai kinerja Direksi; 16. Kebijakan penilaian sendiri *(self-assessment*) untuk menilai kinerja Direksi diungkapkan melalui Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka; 17. Direksi mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan; 18. Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan untuk mencegah terjadinya insider trading; 19. Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan anti korupsi dan anti-fraud; 20. Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang seleksi dan peningkatan kemampuan pemasok atau vendor. 21. Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan untuk pemenuhan hak-hak kreditur. 22. Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan sistem whistle-blowing; 23. Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan karyawan; 24. Perusahaan Terbuka memanfaatkan penggunaan teknologi informasi secara lebih luas selain Situs Web sebagai media keterbukaan informasi; 25. Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka mengungkapkan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka paling sedikit 5% (lima persen), selain pengungkapan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka melalui pemegang saham utama dan pengendali.

Tata Kelola yang Berkelanjutan dalam lingkup Grup Keuangan [GRI 2-12]

Pelaksanaan penerapan prinsip-prinsip GCG di BTPN Syariah menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam lingkup tata kelola Grup Keuangan bersama dengan PT BANK BTPN Tbk (BTPN) selaku Entitas Induk yang berada dalam satu kepemilikan grup SMBC melalui fungsi-fungsi Manajemen Risiko Terintegrasi, Kepatuhan Terintegrasi dan Internal Audit Terintegrasi. Didukung oleh fungsi-fungsi lainnya yang ada di Bank berdasarkan struktur organisasi, fungsi-fungsi tersebut membantu Organ Bank dalam mewujudkan penerapan prinsip-prinsip GCG yang baik di masing-masing Entitas.

Bersama-sama dengan BTPN sebagai Entitas Induk, BTPN Syariah mengakselerasi peningkatan efisiensi melalui optimalisasi Sinergi Perbankan dibidang sumber daya, expertise dan jaringan, yang mana kerjasama ini memberikan nilai tambah baik bagi bank umum syariah maupun bank umum konvensional.

Sejalan dengan komitmen pemantauan atas Sinergi Perbankan oleh BTPN Syariah dan BTPN, pengawasan ditingkat Dewan Komisaris direalisasikan melalui fungsi Komite Tata Kelola Perusahaan yang beranggotakan anggota Dewan Komisaris Independen dari BTPN selaku



Entitas Koordinator serta perwakilan Komisaris Independen dan anggota Dewan Pengawas Syariah BTPN Syariah sebagai undangan tetap rapat Komite.

Komite Tata Kelola Perusahaan bertugas melakukan pemantauan untuk memastikan dilaksanakannya pengendalian internal dan terintegrasi dalam *group* keuangan SMBC secara prudent dan transparan, memenuhi prinsip-prinsip tata kelola sebagai Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan sebagai Perusahaan Publik.

Sinergi Perbankan

Berpedoman pada POJK Nomor 17 tahun 2023 tentang Tata Kelola bagi Bank Umum dan POJK Nomor 16/POJK.03/2022 tentang Bank Umum Syariah sehubungan Sinergi Perbankan dalam rangka meningkatkan efisiensi industri perbankan nasional dan pengembangan ekonomi syariah secara berkelanjutan, BTPN Syariah bersinergi dengan BTPN selaku Entitas Induk, yang merupakan Bank Umum Konvensional dalam berbagai kerjasama strategis untuk meningkatkan efisiensi dan pengembangan BTPN Syariah yang dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama (PKS).

Melengkapi perjanjian kerjasama, BTPN Syariah terus melakukan penyempurnaan untuk meningkatkan kualitas infrastruktur pendukung sinergi perbankan yaitu terhadap ketentuan dan prosedur internal di BTPN Syariah yang diselaraskan dengan kaidah dan prinsip syariah dan penerapan prinsip-prinsip GCG, baik sebagai bank umum syariah maupun sebagai perusahaan terbuka. Upaya ini tercermin dengan telah dituangkannya komitmen Sinergi Perbankan dalam Kebijakan Tata Kelola, Kebijakan Kepatuhan dan Kebijakan Manajemen Risiko milik BTPN dan BTPN Syariah.

Penerapan Sinergi Perbankan dengan BTPN

Dalam menunjang pelaksanaan kegiatan yang memberikan nilai tambah, BTPN Syariah bekerjasama dengan BTPN dalam kerjasama strategis untuk meningkatkan efisiensi dan pengembangan usaha di BTPN Syariah. Pada tahun 2023, kerjasama strategis tersebut dituangkan dalam 10 (sepuluh) PKS untuk bidang *Human Capital*, Infrastuktur Teknologi Informasi, Layanan Syariah Bank, *Cash Management*, Pembiayaan Segmen Multifinance dan Pembiayaan Produktif kepdada Institusi yang mendukung pengembangan segmen ultra mikro, Pelaksanaan Pekerjaan Tertentu, *Vendor Management*, Penerapan Kebijakan Anti Fraud/ APU PPT dan PPPSPM serta PKS Kesepakatan Bersama sebagai PKS Payung yang mengatur sinergi perbankan antara BTPN Syariah dan BTPN.

Untuk memonitor pelaksanaannya, BTPN Syariah memiliki Satuan Kerja terkait Pemantauan Sinergi Perbankan yang berada di bawah koordinasi Unit Corporate Secretariat sebagai Koordinator. BTPN Syariah bersama BTPN juga telah melakukan koordinasi antar entitas melalui penyelenggaraan Rapat Koordinasi Pemantuan Sinergi Perbankan dan Rapat Koordinasi Tata Kelola (*Governance Coordination Meeting*) yang dilakukan secara semesteran.

Penerapan Sinergi Perbankan dengan BTPN Syariah Ventura

Komitmen BTPN Syariah dalam mengembangkan perbankan syariah diwujudkan dengan telah terealisasinya inisiatif strategis penanaman modal oleh BTPN Syariah dan BTPN pada perusahaan modal ventura syariah yaitu PT BTPN Syariah Ventura, sebagai perusahaan anak yang merupakan lembaga jasa keuangan non bank yang telah efektif menjalankan kegiatan operasional sejak tanggal 30 Mei 2022.

BTPN Syariah Ventura hadir untuk mengakselarasi pemenuhan kebutuhan nasabah yang terus berubah dan memastikan terjadinya peningkatan kesejahteraan terhadap nasabah pra dan cukup sejahtera, serta kesempatan melayani lebih banyak lagi nasabah secara berkelanjutan dengan memanfaatkan teknologi untuk kebaikan untuk mewujudkan aspirasi: *Sharia Digital Ecosystem for Unbanked*.

Guna mendukung perkembangan usaha di BTPN Syariah Ventura, maka BTPN Syariah dan BTPN selaku para pemegang saham telah melaksanakan penambahan modal dasar dan penambahan modal ditempatkan dan disetor yang telah dirampungkan tahun 2022 lalu. Laporan lengkap terkait penyertaan modal pada Entitas Anak terdapat pada Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan untuk tahun buku 2022. Entitas Anak telah pula melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan perdana yang dilaksanakan pada tanggal 12 April 2023.

Melengkapi penguatan dari sisi permodalan, guna mendukung pengembangan BTPNS Ventura dalam pengelolaan perusahaan, maka telah ditandatangani pelaksanaan sinergi antara BTPN Syariah dan BTPN Syariah Ventura melalui Perjanjian Kerjasama yang meliputi 11 (sebelas) bidang yaitu Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi, Kepatuhan, Legal dan Litigasi,

Corporate Secretary, Internal Audit, *Finance dan Treasury, Risk Management, Corporate Communication*, DAYA dan Operasional.

Kode Etik dan Integritas [GRI 2-23, GRI 2-24]

Untuk dapat mencapai keberhasilan yang berkelanjutan dalam penerapan GCG di Bank, diyakini perlunya integritas yang tinggi dari seluruh jajaran organisasi perusahaan. Oleh karenanya diperlukan pedoman perilaku yang merupakan pengejawantahan dari asas-asas umum GCG dan menjadi acuan bagi setiap organ Bank dan Karyawan dalam menjalankan kegiatan usahanya sehari-hari, sehingga akhirnya menjadi bagian dari budaya perusahaan.

Kode Etik di BTPN Syariah berfungsi sebagai pedoman dan panduan sikap dan perilaku bagi Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Direksi, Pihak Independen dan seluruh Karyawan dalam menjalankan tugas, kewenangan, kewajiban, dan tanggung jawabnya dalam mengambil keputusan agar secara konsisten sesuai dengan Misi, Visi, dan Nilai-Nilai Perusahaan BTPN Syariah, dan peraturan perundangan yang berlaku.

Kode Etik merupakan standar perilaku yang wajar, patut, dan dapat dipercaya untuk semua insan Bank dalam melaksanakan kegiatan usaha termasuk berinteraksi dengan pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Pedoman dan Panduan sikap yang tercantum di dalam Kode Etik meliputi antara lain:

1. Misi, Visi, Nilai-Nilai Perusahaan, Tujuan Kode Etik, dan Ruang Lingkup Kode Etik;
2. Kepatuhan dan Manajemen Risiko;
3. Benturan Kepentingan;
4. Menciptakan Lingkungan Kerja yang Kondusif (yang meliputi Perlakuan Adil kepada Seluruh Karyawan, Anti Diskriminasi dan Pelecehan, Keamanan di Tempat Kerja, Penggunaan Fasilitas Perusahaan, Aktivitas di luar Perusahaan, Penggunaan Media Sosial, Budaya Komunikasi LInk dan *HELP*);
5. Pengelolaan dan Pengamanan Informasi;
6. Hubungan dengan Nasabah dan Pemangku Kepentingan (yang meliputi Hubungan dengan Nasabah, Hubungan dengan Rekanan, Hubungan dengan Regulator, Penyuapan dan Korupsi, Pemberian dan Penerimaan Hadiah, Anti Pencucian Uang);
7. Penegakan Kode Etik (yang meliputi Peran dan Tanggung Jawab, Pelanggaran Terhadap Kode Etik).

Upaya Penegakan Kode Etik

BTPN Syariah berkomitmen pada penerapan Kode Etik di seluruh jenjang organisasi sebagai salah satu langkah pengejawantahan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, yang sekaligus membangun perilaku karyawan sesuai standar etika yang berlaku di masyarakat.

Pembangunan perilaku ini ditindaklanjuti oleh setiap karyawan dalam bentuk sikap, perbuatan serta komitmen dalam menciptakan budaya perusahaan di BTPN Syariah sejalan dengan norma-norma etika.

Penerimaan karyawan atas program penyegaran sosialisasi Kode Etik setiap tahunnya dimulai sejak proses pembacaan Kode Etik yang disampaikan secara digital maupun dalam bentuk pembagian buku cetakan, dilanjutkan dengan penandatanganan lembar penerimaan serta konfirmasi tanggapan oleh seluruh karyawan melalui saluran atas sosialisasi elektronik.

Dalam membangun budaya kepatuhan sejak dini, Bank mewajibkan setiap karyawan baru mendapatkan pembekalan Kode Etik pada saat Induction Program dan setelahnya diikuti dengan program penyegaran setiap tahunnya.
Pedoman Kode Etik di BTPN Syariah disajikan dalam 2 (dua) Bahasa, yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris serta telah tersedia dalam situs web BTPN Syariah.

Dalam penerapan norma-norma dalam masyarakat kedalam aktivitas bisnis dan penciptaan ekosistem berkelanjutan, setiap rencana bisnis bank beserta inisiatif yang disusun mengedepankan prinsip yang menjunjung tinggi nilai integritas dan kepatuhan.

Dalam penerapan di seluruh jenjang organisasi, seluruh anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, para pihak independen dari komite di bawah Dewan Komisaris tunduk kepada Kode Etik tanpa terkecuali. Pedoman juga mengatur hubungan antara seluruh jajaran BTPN Syariah dengan nasabah, rekanan atau mitra usaha, Regulator, Pemegang Saham dan anak perusahaan.



Peran dan tanggung jawab Karyawan adalah:

1. Mempelajari, memahami, menaati dan melaksanakan Kode Etik.
2. Menjalankan prinsip LInK dalam kegiatan sehari-hari dalam kaitannya dengan hubungan antara atasan dan bawahan.
3. Melaporkan kepada atasan atau melalui saluran whistleblowing apabila mencurigai terjadinya pelanggaran maupun percobaan pelanggaran Kode Etik.

Peran dan tanggung jawab Atasan adalah:

1. Memberikan penjelasan dan meminta anggota tim kerjanya untuk membaca dan memahami Kode Etik.
2. Memastikan setiap Karyawan dalam unit kerjanya menjalankan Kode Etik.
3. Melakukan sosialisasi Kode Etik kepada Karyawan dalam unit kerjanya.
4. Berperan aktif dalam membina karyawan dan menyelesaikan pelanggaran Kode Etik.
5. Melaporkan dan melakukan eskalasi suatu kecurigaan, indikasi, dan/atau kejadian pelanggaran kepada pihak yang berwenang.
6. Menindaklanjuti setiap pelaporan pelanggaran Kode Etik sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.

BTPN Syariah berkomitmen pada penegakan Kode Etik sebagai salah satu upaya penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dengan secara berkala mensosialisasikan budaya kepatuhan perusahaan yang berkelanjutan yang menjunjung sikap, perbuatan, dan komitmen.

Setiap tindakan penyimpangan, penyalahgunaan, kelalaian, dan/atau pelanggaran Kode Etik dapat dikenakan sanksi, perdata maupun pidana, sesuai dengan kebijakan dan prosedur di BTPN Syariah serta hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang pada tingkat tertentu dapat mengakibatkan Pemutusan Hubungan Kerja dengan atau tanpa peringatan.

Melengkapi penandatanganan Kode Etik oleh seluruh karyawan, BTPN Syariah juga mewajibkan penerapan zero fraud di seluruh level organisasi dan mewajibkan seluruh karyawan memiliki komitmen penuh yang dibuktikan dengan penandatanganan Deklarasi Anti Fraud & Pakta Integritas.

Hierarki Ketentuan Bank

Hierarki Ketentuan di BTPN Syariah bertujuan untuk melakukan penataan struktur ketentuan di internal Bank secara baik dan memastikan konsistensi pelaksanaan. Hierarki ketentuan disusun merujuk kepada Ketentuan terkait GCG bagi Bank Umum Syariah.

Seluruh Ketentuan di BTPN Syariah dilakukan kajian secara berkala, sesuai jadwal atau lebih cepat jika terdapat proses perubahan atau ketentuan Regulator yang melandasinya.

Kebijakan dan peraturan perusahaan

Sebagai sebuah Perusahaan Terbatas, BTPN Syariah telah memiliki Kebijakan dan Peraturan Perusahaan.

Kebijakan adalah pedoman yang mengatur setiap aktivitas ataupun proses di bank yang mencerminkan pengelolaan secara umum risk appetite Bank atas aktivitas tersebut, beserta proses dan pengawasannya.
Peraturan Perusahaan mewujudkan adanya kepastian hukum, kejelasan hak dan kewajiban bagi pekerja dan pengusaha dalam pelaksanaan hubungan kerja di Bank.

Prosedur dan produk program

Untuk memastikan pengaturan proses rinci dari awal sampai akhir berjalan dengan baik, BTPN Syariah memiliki Prosedur dan Produk Program.

Prosedur menjelaskan tahapan dari suatu kegiatan yang wajib dilakukan, mencakup siapa, bagaimana, di mana, kapan dilakukan serta mekanisme pengawasannya, dengan menerapkan fungsi four eyes principles secara tegas, fungsi pengendalian internal yang memadai serta mengacu kepada kebijakan yang berlaku.

Produk Program ketentuan yang disusun sebagai sebuah bank umum syariah, yang mengatur suatu produk secara terstruktur dan sistematis, yang menjelaskan jenis dan nama produk, karakteristik produk, manfaat serta biaya yang dikeluarkan oleh Bank, berikut risiko-risiko bagi Bank yang melekat pada produk, analisis serta target yang ditetapkan.

Petunjuk teknis

Petunjuk Teknis dapat disusun dan sebagai bagian dari langkah-langkah pengerjaan suatu proses yang telah diatur dalam standar prosedur operasional di BTPN Syariah (dalam hal diperlukan).

Struktur Tata Kelola [GRI 2-9]

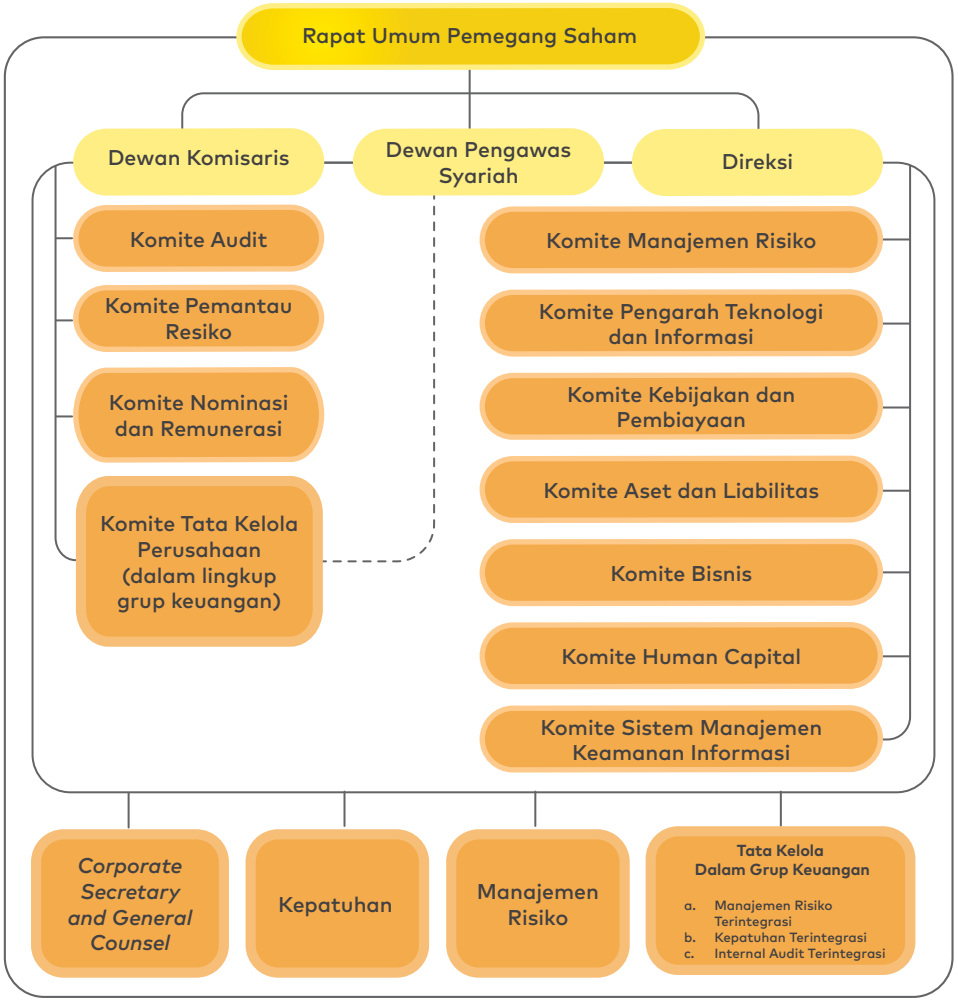
Struktur Tata Kelola di BTPN Syariah adalah berpedoman kepada ketentuan tata kelola bagi Bank Umum Syariah dan Perusahaan Publik, di antaranya meliputi pemenuhan atas ketentuan:

1. Undang-undang No.10 tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No.7 tahun 1992 tentang Perbankan;
2. Undang-undang No.40 tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas yang saat ini sebagian telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

penetapan peraturan pemerintahan pengganti undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi undang-undang.
3. Undang-undang No.21 tahun 2008 tanggal 16 Juli 2008 tentang Perbankan Syariah;
4. PBI No.11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (BUS dan UUS);
5. SEBI No.12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 perihal Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi BUS dan UUS;
6. POJK No.33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik;
7. POJK No.21/POJK.04/2015 tanggal 17 November 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Terbuka;
8. SEOJK No.32/SEOJK.04/2015 tanggal 17 November 2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka;
9. POJK No.16/POJK.03/2022 tanggal 30 Agustus 2022 tentang BUS; dan
10. POJK No.17 tahun 2023 tanggal 14 September 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.

Struktur tata kelola yang baik menjadi syarat mutlak bagi Bank dalam mengidentifikasi dan mengelola risiko-risiko serta memastikan setiap peluang dan rencana strategis dapat diwujudkan secara terukur, terawasi dan terwujud secara berkelanjutan, baik di waktu sekarang maupun di waktu mendatang.

Struktur tata kelola di BTPN Syariah terdiri atas Organ-Organ Utama dan Organ-Organ Pendukung sesuai dengan Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.



Organ Utama

- Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
- Dewan Komisaris
- Dewan Pengawas Syariah
- Direksi

Organ Pendukung

1. Komite setingkat Dewan Komisaris
   a. Komite Audit
   b. Komite Pemantau Risiko
   c. Komite Nominasi dan Remunerasi
   d. Komite Tata Kelola dalam *Group* Keuangan



2. Komite setingkat Direksi
   a. Komite Aset dan Liabilitas (ALCO);
   b. Komite Bisnis
   c. Komite Human Capital
   d. Komite Manajemen Risiko
   e. Komite Pengarah Teknologi Informasi
   f. Komite Kebijakan Pembiayaan
   g. Komite Sistem Manajemen Keamanan Informasi
3. Tersedianya Satuan Kerja dalam rangka pengembangan bisnis, operasional, penerapan manajemen risiko maupun pengendalian internal di BTPN Syariah. Satuan Kerja Internal BTPN Syariah antara lain Satuan Kerja Audit Intern (SKAI), Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR), Satuan Kerja Kepatuhan (SKK).
4. Terdapat Divisi-Divisi lainnya di BTPN Syariah yaitu *Corporate Secretary & General Counsel, Corporate Information Security, Corporate & Marketing Communication, Financing Business (membawahkan Financing Business Planning & Support, Mitra Tepat & Project Implementation, Financing Business Risk*, DAYA dan *Distribution* Wilayah 1-5), Tim *Funding & New Business* (membawahkan *Retail & Wholesale Funding, Funding & New Business Planning & Support dan Business Development*), *Finance, Treasury & Operation* (membawahkan *Financial Control & Analytic, Treasury* & *Financial Institution, Operation Development*, QA *Fundi*ng & *Operation*, *Transactiion Services* dan *Corporate Services*), Teknologi Informasi, dan Sumber Daya Manusia.
5. Gugus Tugas Keberlanjutan yang bertugas memastikan dilakukannya koordinasi dan pengawasan internal secara komprehensif atas implementasi dari rencana-rencana Bank sesuai dengan yang tertuang dalam RAKB.

Gugus Tugas Keberlanjutan [OJK E.1, GRI 2-11]

BTPN Syariah memberikan kontribusi nyata pada inisiatif yang mendukung perbaikan kualitas lingkungan dan berkomitmen untuk senantiasa loyal memberdayakan para nasabah pra dan cukup sejahtera yang dilayani untuk meningkatian kesejahteraan dan kualitas hidup mereka selaras dengan tujuan keberlanjutan.

Sejalan dengan Komitmen Direksi yang tertuang dalam RAKB (RAKB), pemenuhan atas Pembentukan Gugus Tugas di BTPN Syariah telah dilakukan secara resmi melalui Keputusan Sirkuler Direksi Nomor 013/CIR/DIR/XI/2020 tanggal 23 November 2020 perihal Persetujuan Direksi atas Pembentukan Gugus Tugas Keberlanjutan di PT Bank BTPN Syariah Tbk.

Gugus Tugas mendapatkan dukungan penuh dari Direksi, di mana 2 (dua) anggota Direksi turut terlibat di dalamnya sebagai Pembina yang memimpin Gugus Tugas Keberlanjutan dalam mewujudkan tujuan serta program-program dari RAKB untuk diimplementasikan secara penuh sesuai dengan kondisi dan kapabilitas di BTPN Syariah. [GRI 2-11]

Tugas dan Tanggung Jawab [GRI 2-13]

Berpedoman kepada POJK Nomor 51/POJK.03/2017 tanggal 18 Juli 2017 perihal Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik Direksi menetapkan tugas dan tanggung jawab dari Gugus Tugas Keberlanjutan di BTPN Syariah tahun 2023, antara lain meliputi:

- Membantu Direksi dalam penyusunan RAKB dan Laporan Keberlanjutan (LK) wajib disetujui oleh Dewan Komisaris;
- Melaksanakan rapat Gugus Tugas Keberlanjutan sesuai rencana tahunan;
- Berperan dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan di bidang sosial lingkungan dan Tata Kelola di Bank guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Bank sendiri, komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya;
- Melakukan pengawasan dan berkomitmen untuk Penerapan Keuangan Berkelanjutan dalam kegiatan usaha yang sesuai dengan kondisi Bank dengan menggunakan prinsip-prinsip yang diatur di dalam POJK Nomor 51/POJK.03/2017 tanggal 18 Juli 2017.

Keanggotaan Gugus Tugas Keberlanjutan

Susunan keanggotaan Gugus Tugas keberlanjutan di BTPN Syariah didukung penuh oleh berbagai Divisi dan Karyawan yang memiliki kepedulian yang tinggi dalam menjaga kelestarian lingkungan, sosial, dan tata kelola, yang terdiri dari Divisi Corporate & Marketing Communication, Divisi DAYA, Divisi Financial Planning & Analytics, Divisi Corporate Secretary & General Counsel, Divisi yang membawahi Operation, Divisi Human Capital, Divisi Risk Management, Divisi Business Planning, Assurance & Support, Divisi Business Development dan Divisi Compliance.

Beragam latar belakang dan keahlian masing-masing karyawan dalam susunan keanggotaan Gugus Tugas Keberlanjutan di BTPN Syariah yang memiliki misi dan visi serta passion yang dalam untuk mewujudkan keberlangsungan bisnis Bank dimaksudkan untuk dapat memberikan beragam masukan dan ide-ide dari berbagai sudut pandang yang bervariasi untuk mendukung diterapkannya strategi keberlanjutan.

BTPN Syariah melaksanakan peninjauan secara berkala atas dinamika keangggotaan pada Gugus Tugas Keberlanjutan dalam mengusung spirit keberlanjutan di BTPN Syariah. Selama tahun 2023, Direksi telah memberikan persetujuan perubahan susunan Gugus Tugas Keberlanjutan dengan memperhatikan struktur organisasi Bank terkini.

Di level pengawasan, Direksi dan Dewan Komisaris melaksanakan pembahasan atas efektivitas penerapan manajemen risiko pada topik LST melalui rapat korporasi sehubungan persetujuan RAKB dan Laporan Keberlanjutan setiap tahunnya. [GRI 2-12]

Rapat Gugus Tugas Keberlanjutan [GRI 2-16]

Selama tahun 2023, Gugus Tugas Keberlanjutan telah menindaklanjuti RAKB dan melakukan pemenuhan pengawasan atas komitmen Bank yang didiskusikan pada rapat. Sepanjang tahun 2023, Gugus Tugas Keberlanjutan telah melaksanakan 2 (dua) kali rapat koordinasi internal. Selain itu, Gugus Tugas juga melaksanakan rapat koordinasi dengan Entitas Induk dan SMBG Regional Singapura, sehubungan dengan inisiatif keberlanjutan dalam grup keuangan SMBC.

Pertemuan Koordinasi Gugus Tugas Keberlanjutan tahun 2023

No	Tanggal Rapat	Topik Bahasan
1	9 Mei 2023	Penguatan PIC Gugus Tugas Keberlanjutan; Penguatan keanggotaan Gugus Tugas Keberlanjutan
2	13 November 2023	Kick Off Penyusunan Laporan Keberlanjutan 2023

Pertemuan Koordinasi Gugus Tugas Keberlanjutan dengan Grup Keuangan SMBC tahun 2023

No	Tanggal Rapat	Topik Bahasan
1	2 Mei 2023	*Sustainability Meeting Update with* SMBC: Inisiatif Keberlanjutan untuk menuju Zero Emision 2023

Rapat Umum Pemegang Saham

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ Perseroan Terbatas yang tertinggi. Organ ini mempunyai hak dan kewenangan yang tidak dimiliki oleh Direksi dan Komisaris dalam batas yang ditentukan oleh UUPT dan Anggaran Dasar BTPN Syariah. RUPS adalah sarana bagi para pemegang saham untuk mengambil keputusan penting yang berkaitan kebijakan yang akan diambil Bank, dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundangan yang berlaku.

Setiap keputusan dalam RUPS didasarkan pada kepentingan Bank yang diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat serta dilakukan dengan itikad baik, mempertimbangan kepentingan Bank dan tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku, termasuk peraturan perundangan di bidang Pasar Modal dan Anggaran Dasar.

Sejalan dengan ketentuan, RUPS tidak dapat melakukan intervensi terhadap tugas, fungsi, serta wewenang Dewan Komisaris dan Direksi dengan tidak mengurangi wewenang RUPS untuk menjalankan haknya sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundangan yang berlaku. Sesuai ketentuan Anggaran Dasar, BTPN Syariah menjunjung tinggi hak dan tanggung jawab pemegang saham beserta kewajiban-kewajibannya yang melekat.

Pelaksanaan RUPS Tahun 2023

BTPN Syariah telah menyelenggarakan RUPS Tahunan sebanyak 1 (satu) kali di tahun 2023, yaitu pada tanggal 12 April 2023 yang pelaksanaannya telah memenuhi ketentuan tata cara dan prosedur pelaksanaan RUPS Tahunan dengan memperhatikan Anggaran Dasar dan ketentuan yang berlaku. Dalam rangka memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh pemegang saham untuk melaksanakan haknya, BTPN Syariah kembali menyelenggarakan RUPS secara elektronik (e-RUPS) serta menerapkan pemungutan suara secara elektronik (e-*voting*) dan pemberian kuasa secara elektronik (e-*proxy*) pada penyelenggaraan RUPS Tahunan.

RUPS Tahunan BTPN Syariah dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi secara langsung dan melalui video telekonferensi.

BTPN Syariah berkomitmen untuk secara konsisten memberikan perlakuan yang adil kepada seluruh pemegang saham, baik pemegang saham individu maupun pemegang saham korporasi yang hadir maupun diwakilkan pada RUPS Tahunan tahun 2023. Komitmen ini diwujudkan melalui ketersediaan kelengkapan dokumen pendukung RUPS yang dapat mudah dijangkau yang memampukan pemegang saham untuk melaksanakan haknya secara penuh antara lain:

- Tersedianya Fasilitas eASY.KSEI



- Tersedianya kuasa kepada Pihak Independen tanpa dipungut biaya
- Tersedianya waktu yang cukup bagi Pemegang Saham dalam memberikan kuasa
- Tersedianya dokumen pendukung materi rapat yang memadai, lengkap dan tepat waktu

Dewan Komisaris

Dewan Komisaris di BTPN Syariah merupakan organ Bank yang diangkat dan disahkan melalui RUPS dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi, dan wajib memenuhi persyaratan lulus Uji Kepatutan dan Kelayakan dari OJK. Masa jabatan Dewan Komisaris di BTPN Syariah adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali.

Dewan Komisaris merupakan organ perusahaan yang memiliki fungsi dan bertanggung jawab secara kolektif (setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris), yang secara independen bertugas melakukan fungsi pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar, serta memberikan nasihat kepada Direksi dalam mengelola Bank sesuai prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan.

Seluruh Anggota Dewan Komisaris BTPN Syariah telah memenuhi jumlah, komposisi, kriteria, dan independensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Komposisi Anggota Dewan Komisaris

[GRI 2-9][GRI 2-10]

Penetapan Komposisi Dewan Komisaris di BTPN Syariah dilakukan dengan mempertimbangkan kompleksitas dan kebutuhan bank, serta didasarkan pada pengetahuan perbankan, keahlian, pengalaman profesional, latar belakang untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas Dewan Komisaris tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, dan agama.

Berdasarkan keputusan RUPS Tahunan BTPN Syariah yang diselenggarakan pada tahun 2023, telah diangkat kembali 3 (tiga) orang anggota Dewan Komisaris yang telah habis masa jabatannya dengan masa jabatan sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2026, dengan tidak mengurangi perubahan yang dapat terjadi sebelum berakhirnya masa jabatan tersebut.

Dalam RUPS Tahunan yang sama telah diangkat seorang Komisaris Independen baru untuk memperkuat jajaran Dewan Komisaris dengan masa jabatan sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2026, dengan tidak mengurangi perubahan yang dapat terjadi sebelum berakhirnya masa jabatan tersebut.

Pada tahun 2023, terdapat perubahan Susunan Anggota Dewan Komisaris di BTPN Syariah sehubungan dengan pengunduran diri seorang anggota Dewan Komisaris yang telah habis masa jabatannya efektif tanggal 12 April 2023 dan pengangkatan seorang Komisaris Independen baru efektif tanggal 17 April 2023.

Susunan Anggota Dewan Komisaris sebelum RUPS Tahunan 2023 adalah sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Jenis Kelamin	Persetujuan Otoritas Jasa Keuangan	Tanggal Efektif Menjabat
1	Kemal Azis Stamboel	Komisaris Utama/ Independen	Pria	24 Februari 2014 (KEP-8/D-03/2014)	22 Mei 2014
2	Dewie Pelitawati	Komisaris Independen	Wanita	24 Februari 2014 (KEP-9/D-03/2014)	22 Mei 2014
3	Ongki Wanadjati Dana	Komisaris	Pria	25 Agustus 2022 (KEP-129/D-03/2022)	13 Oktober 2022
4	Yenny Lim	Komisaris	Wanita	17 Juli 2019 (KEP-122/D.03/2019)	2 September 2019

Susunan Anggota Dewan Komisaris setelah penutupan RUPS Tahunan 2023 dan posisi 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Jenis Kelamin	Persetujuan Otoritas Jasa Keuangan	Tanggal Efektif Menjabat
1	Kemal Azis Stamboel	Komisaris Utama/ Independen	Pria	24 Februari 2014 (KEP-8/D-03/2014)	22 Mei 2014
2	Mulya Effendi Siregar	Komisaris Independen	Pria	17 April 2023 (KEPR-19/D,03/2023)	17 April 2023
3	Dewie Pelitawati	Komisaris Independen	Wanita	24 Februari 2014 (KEP-9/D-03/2014)	22 Mei 2014
4	Ongki Wanadjati Dana	Komisaris	Pria	25 Agustus 2022 (KEP-129/D-03/2022)	13 Oktober 2022

Saat ini, Dewan Komisaris di BTPN Syariah berjumlah 4 (empat) orang di mana 3 (tiga) orang anggota Dewan Komisaris adalah merupakan Komisaris Independen. Terkait keragaman komposisi susunan Dewan Komisaris, terdapat 1 (satu) orang anggota Komisaris adalah perempuan. [GRI 405-1]
Seluruh anggota Dewan Komisaris di BTPN Syariah memiliki latar belakang dan pengalaman yang baik dalam bidang keuangan, perbankan dan hukum syariah, akuntansi, hukum, kepatuhan, manajemen risiko, sumber daya manusia, audit, dan manajemen.

Jabatan Lain Dewan Komisaris di Luar BTPN Syariah

Sampai dengan 31 Desember 2023, Dewan Komisaris di BTPN Syariah tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif pada lembaga perbankan, perusahaan atau lembaga lain melebihi batas maksimum yang diperkenankan sesuai ketentuan.

Pengungkapan Rangkap Jabatan Dewan Komisaris posisi 31 Desember 2023

No	Nama	Masa Periode Jabatan	Posisi dan Komitmen lain
1	Kemal Azis Stamboel	2023-2026	Anggota Dewan Pembina – WWF Indonesia Komisaris Utama - PT Digital Solusi Pratama Anggota Majelis Wali Amanat – Universitas Padjadjaran
2	Mulya Effendi Siregar	2023-2026	Staf Ahli Direksi – Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Strategic Advisor – Alami *Group* Komisaris Independen – PT Delameta Bilano
3	Dewie Pelitawati	2023-2026	Anggota Komite Audit – Universitas Padjadjaran
4	Ongki Wanadjati Dana	2023-2026	Anggota Dewan Komisaris – PT BANK BTPN Tbk Komisaris Independen – PT Nusantara Sejahtera Raya Tbk (Cinema XXI)

Independensi Dewan Komisaris

[GRI 2-15][GRI 2-27]

Dewan Komisaris di BTPN Syariah melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen.

Seluruh anggota Dewan Komisaris yang merupakan Komisaris Independen di BTPN Syariah telah memenuhi persyaratan independensi yang dibuktikan dengan tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan sesama anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan lain yang secara alamiah dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris [GRI 102-23]

Merujuk kepada Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris di BTPN Syariah, tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris antara lain:

1. Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip GCG dalam setiap usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi;
2. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan untuk kepentingan Bank atas kebijakan dan jalannya pengurusan oleh Direksi, memberikan nasihat kepada Direksi, dan bertanggung jawab atas pengawasan tersebut, sesuai dengan maksud dan tujuan Bank yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundangan, Anggaran Dasar, dan keputusan RUPS;
3. Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab dengan itikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian;
4. Dalam melakukan pengawasan, Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi serta kebijakan strategis Bank sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan, Anggaran Dasar, dan Keputusan RUPS. Untuk pelaksanaan tugas dan tanggung jawab ini, Dewan Komisaris dapat meminta data dan informasi yang dibutuhkan kepada Direksi;



5. Dalam melakukan pengawasan, Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali:
   a. Penyediaan dana kepada Pihak terkait sebagaimana sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) mengenai batas maksimum penyaluran dana dan penyaluran dana besar bagi Bank Umum Syariah atau dalam jumlah melebihi jumlah yang dari waktu ke waktu akan ditetapkan oleh Dewan Komisaris; dan
   b. Hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank atau peraturan perundangan yang berlaku.
6. Pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris merupakan bagian dari tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris sehingga tidak meniadakan tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan kepengurusan Bank;

7. Pengawasan Fungsi Audit Internal dan External: Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan terhadap tindak lanjut Direksi atas temuan audit atau pemeriksaan dan rekomendasi dari satuan kerja audit Intern Bank, auditor ekstern, hasil pengawasan OJK dan atau hasil pengawasan otoritas dan Lembaga lain;

8. Dewan Komisaris wajib memberitahukan kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak ditemukannya:
   a. Pelanggaran Ketentuan Perundangan dibidang keuangan, perbankan dan yang terkait dengan kegiatan usaha Bank dan;
   b. Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank;

9. Dewan Komisaris wajib mengusulkan calon anggota Dewan Pengawas Syariah ("DPS") kepada Direksi dengan memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi untuk kemudian dimintakan rekomendasi dari Majelis Ulama Indonesia dan persetujuan dari OJK. RUPS dapat mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk mengangkat anggota DPS;

10. Dalam pelaksanaan fungsi audit intern, Dewan Komisaris bertanggung jawab:
    a. Memastikan Direksi Menyusun dan memelihara sistem pengendalian intern yang memadai, efektif dan efisien;
    b. Mengkaji efektivitas dan efisiensi sistem pengendalian intern berdasarkan informasi yang diperoleh dari SKAI paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun dan;
    c. Menunjuk pengendali mutu (Quality Assurance) independen dari pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang terhadap kinerja SKAI dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit;

11. Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja;

12. Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja;

13. Dewan Komisaris melakukan dengan fungsi audit intern dari perusahaan induk agar fungsi audit intern dari perusahaan induk Menyusun ruang lingkup audit dan menjalankan kegiatan audit intern dengan cakupan yang memadai pada Bank;

14. Pelaksanaan manajemen risiko, Dewan Komisaris sekurang-kurangnya:
    a. Menyetujui kebijakan dan manajemen risiko Perseroan;
    b. Evaluasi tanggung jawab Direksi dalam menerapkan kebijakan manajemen risiko;
    c. Mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris;

15. Pengawasan aktif terhadap Fungsi Kepatuhan Perseroan (Sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan OJK yang berlaku pada Fungsi Kepatuhan), Dewan Komisaris akan:
    a. Mengevaluasi pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank sedikitnya 2 (dua) kali dalam setahun;
    b. Memberikan saran dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank.
    c. Berdasarkan evaluasi di atas, Dewan Komisaris akan memberikan nasihat kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Direktur yang membawahi Fungsi Kepatuhan untuk peningkatan kualitas Fungsi Kepatuhan;

16. Pelaksanaan manajemen risiko dalam penggunaan teknologi informasi, Dewan Komisaris akan melakukan pengawasan secara aktif sebagai berikut:
    a. Memberikan bimbingan, memantau dan mengevaluasi rencana strategis dan



kebijakan Bank sehubungan dengan penggunaan Teknologi Informasi;
b. Mengevaluasi tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan penggunaan Teknologi Informasi;

17. Persetujuan terhadap kebijakan utama Bank sesuai dengan hierarki kebijakan dan kebijakan khusus lain yang antara lain meliputi:
    a. Kebijakan Pembiayaan;
    b. Kebijakan dan prosedur pelaksanaan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme;
    c. Kebijakan Manajemen Risiko;
    d. Kebijakan Kepatuhan;
    e. Setiap Kebijakan lainnya yang mungkin dipersyaratkan oleh peraturan yang berlaku dari Bank Indonesia, OJK dan otoritas berwenang lainnya.

tugas dan tanggung jawab Komisaris Utama

Merujuk kepada Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris di BTPN Syariah, tugas dan tanggung jawab Komisaris Utama sebagai berikut:

1. Kedudukan masing-masing anggota Dewan Komisaris termasuk Komisaris Utama adalah setara;
2. Tugas Komisaris Utama adalah mengkoordinasikan kegiatan Dewan Komisaris dan memastikan agar setiap anggota Dewan Komisaris dapat menyampaikan pendapatnya dengan didasarkan kepada informasi yang cukup;
3. RUPS dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi; dan
4. Ketentuan lainnya mengacu kepada Anggaran Dasar.

realisasi tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris Tahun 2023

Selama tahun 2023, Dewan Komisaris didukung oleh Komite setingkat Dewan Komisaris di BTPN Syariah telah melakukan tanggung jawab pengawasan terhadap pengelolaan dan operasional bank dan memberikan rekomendasi dan nasihat kepada Direksi serta memastikan terlaksananya penerapan prinsip-prinsip GCG dan kepatuhan terhadap Prinsip-Prinsip Syariah.

Secara spesifik pemenuhan tugas pengawasan Dewan Komisaris di tahun 2023 meliputi aspek-aspek, antara lain:

1. **Penerapan Aksi Keuangan Berkelanjutan, antara lain**
    a. Dewan Komisaris mendukung penerapan keuangan berkelanjutan sejalan dengan POJK Nomor 51/POJK.03/2017 serta POJK 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata kelola bagi Bank Umum dalam rangka penerapan aksi keuangan yang berkelanjutan untuk memberikan kontribusi nyata dan positif kepada stabilitas sistem keuangan di Indonesia. Melalui pemberian persetujuan atas kebijakan Direksi, Dewan Komisaris sepakat mendukung Pemerintah dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang mampu menjaga stabilitas ekonomi serta bersifat inklusif yang mengedepankan keselarasan antara aspek ekonomi, sosial dan lingkungan hidup, sebagaimana tercantum dalam RAKB;
    b. Dewan Komisaris telah menelaah dan menyetujui RAKB Periode 2020-2024 kepada OJK;
    c. Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan atas penerapan inisiatif-inisiatif berkelanjutan dinilai dari aspek lingkungan, sosial, ekonomi dan tata kelola sebagaimana tertuang dalam Laporan Keberlanjutan tahun buku 2022 yang telah disampaikan kepada pemangku kepentingan di tahun 2023;
    d. Dewan Komisaris bersama Direksi telah mengkomunikasikan implementasi inisiatif-inisiatif atas RAKB tahun 2023 kepada Pemegang Saham pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan di tahun 2023;

2. **Keselarasan Misi dan Visi**
    Sejalan dengan Penerapan Prinsip-Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik, Dewan Komisaris telah melakukan penelaahan atas kesesuaian Misi dan Visi dengan rencana bisnis dan inisiatif Bank setiap tahunnya.

    Bahwa keselarasan Misi dan Visi Bank serta Nilai-Nilai Utama dipandang tetap relevan sebagaimana tercantum dalam Rencana Bisnis Bank 2023-2025, 2024-2026 dan RAKB 2020-2024 (Indikator 2024) dan telah mendapat persetujuan pada rapat Dewan Komisaris bersama Direksi pada tanggal 22 November 2023.
    - **Misi :** Bersama, kita ciptakan kesempatan tumbuh dan hidup yang lebih berarti.
    - **Visi :** Menjadi Bank Syariah terbaik, untuk keuangan inklusif, mengubah hidup berjuta rakyat Indonesia.
    - **Nilai-Nilai Utama**: PRISMA



3. **Dukungan kepada Pemerintah**, antara lain
   a. Sebagai pemenuhan POJK.17.POJK.03/2021 yang merupakan Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.03/2020 Tahun 2020 Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019, Dewan Komisaris memberikan persetujuan atas Kebijakan Direksi untuk mendukung Pemerintah dengan melanjutkan kebijakan penyediaan relaksasi pembiayaan kepada nasabah terdampak melalui partisipasi Bank pada Program Pemilihan Ekonomi Nasional tahun 2023, sebagaimana tertuang dalam Rencana Bisnis Bank;
   b. Sebagai pemenuhan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 71/PMK.08/2020 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penjaminan Pemerintah Melalui Badan Usaha Penjaminan Yang Ditunjuk Dalam Rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional T.E.U. Indonesia, Kementerian Keuangan dan PMK Nomor 28/PMK.08/2022 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.08/2020 Tentang Tata Cara Penjaminan Pemerintah Melalui Badan Usaha Penjaminan Yang Ditunjuk Dalam Rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional, Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan atas kebijakan Direksi dalam persetujuan partisipasi BTPN Syariah memberikan pembiayaan bagi UMKM selama tahun 2023, sebagaimana tertuang dalam Rencana Bisnis Bank;
   c. Dewan Komisaris memberikan persetujuan atas Kebijakan Direksi untuk melanjutkan pengembangan produk renovasi rumah bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di tahun 2023, sebagaimana tertuang dalam Rencana Bisnis Bank;
   d. Dewan Komisaris mendukung upaya Bank melalui Daya Digital *Platform*, suatu *platform* untuk meningkatkan *customers engagement* dan atas kebijakan Direksi untuk melanjutkan kerjasama dengan pihak perguruan tinggi dan Pemerintah dalam Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). Bank membuka kesempatan kepada mahasiswa/mahasiswi untuk turut berperan memberikan pemberdayaaan melalui pendampingan *one-on-one* kepada nasabah pembiayaan. Tujuan pendampingan ini dimaksudkan untuk menumbuhkan kemampuan nasabah dan keluarganya untuk memiliki kehidupan yang lebih baik lagi sehingga tercipta hubungan yang berkelanjutan antara nasabah dengan Bank;
   e. Dewan Komisaris mendukung arahan Pemerintah terkait protokol kesehatan dan keselamatan kerja di masa pandemi pada awal tahun 2023, dimana Direksi telah menerapkan kebijakan pengawasan yang menyeluruh terhadap seluruh karyawan atas mekanisme kerja yang mengutamakan keselamatan kerja di seluruh jenjang organisasi secara terkoordinasi melalui *Business Continuity Management* dibantu oleh *Safety and Security* Unit, sampai dengan penetapan status endemi dicanangkan di akhir Juni 2023;

4. **Kajian atas Kontrol Material Perusahaan**, antara lainv
   Dewan Komisaris telah melakukan kajian atas kontrol material perusahaan yang meliputi area operasional, keuangan, kepatuhan serta sistem manajemen risiko Bank, pengawasan atas pencapaian kinerja keuangan, integritas laporan keuangan, sistem pengendalian internal dan dilengkapi pencapaian non keuangan selama tahun 2023.

   Bahwa Kinerja Keuangan ditutup dengan hasil yang baik dan perkembangan usaha menunjukkan *trend* positif. Pencapaian hasil kerja ditandai dengan terealisasinya rencana bisnis pada sebagian besar pos-pos yang sesuai dengan target yang telah ditetapkan;

5. **Pemenuhan Komitmen kepada Pemegang Saham**, antara lain
   a. Dewan Komisaris telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Pemegang Saham pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 12 April 2023;
   b. Dewan Komisaris memberikan persetujuan untuk menindaklanjuti Keputusan RUPS Luar Biasa yang diselenggarakan pada tahun 2019 melalui pengalihan saham treasuri yang ketiga kepada Material Risk Takers dengan tanggal distribusi 25 Januari 2023;

c. Dewan Komisaris telah memastikan pengawasan atas pemenuhan tugas dan tanggung jawab Direksi dalam pengelolaan perusahaan, antara lain pemenuhan kewajiban kepada Regulator melalui Keterbukaan Informasi atas penyajian Laporan Tahunan, Laporan Keberlanjutan tahun buku 2022, Laporan Keuangan Interim, Laporan Keuangan Tahunan dan Konsolidasi melalui sistem pelaporan dan kepada publik melalui Surat Kabar skala nasional dan tersedia dalam Situs Web Bank sebagaimana diwajibkan bagi sebuah perusahaan publik di tahun 2023.
d. Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan atas tindak lanjut keputusan RUPS Tahunan terkait penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Sidharta Widjaja dan Rekan (*an Indonesian partnership and member firm of KPMG network of independent member affiliated with KPMG International Cooperative* sebagai Auditor Eksternal, dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit.
e. Bahwa Laporan Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam rangka Audit atas Informasi Keuangan Historis Tahunan pada 31 Desember 2023, telah disampaikan Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan Pengawas Perbankan Syariah dengan tembusan kepada Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan;

6. Penerapan Prinsip-Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik, antara lain

a. Dewan Komisaris telah melakukan pengawasan atas penerapan tata kelola perusahaan yang baik di BTPN Syariah. Seiring jejak langkah penerapan prinsip-prinsip GCG di BTPN Syariah lebih dari satu dekade, penerapan prinsip-prinsip GCG disertai peningkatan kualitas dengan mengadopsi ASEAN SCORECARDS terkini yang diterbitkan di tahun 2023 dan secara bertahap terus disempurnakan kualitasnya dari waktu ke waktu. Secara khusus faktor-faktor yang mendapat penyempurnaan dalam tiga tahun terakhir adalah semakin membaiknya fokus Bank kepada hak-hak pemegang saham, pengungkapan dan transparansi serta tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris. Selain itu Bank terus berupaya mempertahankan nilai yang baik atas perlakuan setara terhadap pemegang saham dan peran pemangku kepentingan secara optimal;
b. Rencana Bisnis, RAKB serta TIndak Lanjut Keputusan RUPS;
Dewan Komisaris melakukan penelaahan dan memberikan persetujuan usulan Direksi atas:
   - Laporan Tahunan untuk tahun buku 2022;
   - Laporan Keberlanjutan untuk tahun buku 2022;
   - Rencana Bisnis Bank (RBB) dan Revisi RBB Periode 2024-2026 serta komitmen pemantauan realisasi RBB dalam laporan berkala kepada OJK;
   - Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) 2020-2024 (Indikator 2024) serta komitmen dalam melakukan pemantauan atas realisasi Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan Bank bersama dengan Direksi setiap tahunnya;
   - Rencana Korporasi dan Revisi Rencana Korporasi 2022-2031;
   - Pengkinian atas Charter Dewan Komisaris Tahun 2023;
   - Perubahan Susunan Komite setingkat Dewan Komisaris Tahun 2023;
   - Rencana Kerja Tahunan Komite setingkat Dewan Komisaris, termasuk diantaranya Rencana Audit tahunan 2023 yang diajukan di akhir tahun 2022 dan Rencana Kerja tahun 2024 yang diajukan di akhir tahun 2023;
   - Menindaklanjuti keputusan yang diambil dalam RUPS Luar Biasa Tahun 2019 dalam rangka Pengalihan Sebagian Saham Treasury di awal tahun 2023 dalam rangka pemberian remunerasi yang bersifat variable kepada anggota Direksi atas Kinerja Perseroan
c. Dewan Komisaris melakukan kajian atas penguatan Infrastruktur Organ Bank dan memberikan persetujuan atas:
   - Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris tahun 2023;
   - Kinerja Komite setingkat Dewan Komisaris tahun 2023;
   - Proses Nominasi Calon Anggota Dewan Komisaris yang baru di tahun 2023;
   - Perubahan Komposisi Anggota Komite setingkat Dewan Komisaris di tahun 2023
d. Dalam upaya meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris, selama tahun 2023, Dewan Komisaris telah memberikan



persetujuan implementasi pelaksanaan tugas pengawasan, mekanisme pelaksanaan rapat korporasi Dewan Komisaris dan Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi serta rapat Komite setingkat Dewan Komisaris dengan berpedoman kepada ketentuan penerapan tata kelola yang baik dan pemenuhan pelaporan evaluasi oleh Dewan Komisaris secara tepat waktu;

7. **Pengawasan atas Entitas Anak**, antara lain
   Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kepatuhan Bank terhadap pemenuhan prinsip-prinsip GCG dan Prinsip Syariah pada Entitas Anak, penerapan Manajemen Risiko yang baik, pemantauan Kinerja Keuangan dan Non Keuangan, layanan syariah yang berkualitas, serta pengawasan atas anggota Direksi dan Management Bank yang melaksanakan tugas pengawasan pada Entitas Anak, PT BTPN Syariah Ventura di tahun 2023;

8. **Pemenuhan Komitmen atas Penerapan Sinergi Perbankan**, antara lain
   Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas pemenuhan tugas dan tanggung jawab dalam *Group* Keuangan dengan PT BANK BTPN Tbk, termasuk menerima informasi terkini melalui fungsi Komite Tata Kelola Perusahaan atas penerapan sinergi perbankan tahun 2023.
   Komite Tata Kelola Perusahaan bertugas melakukan pemantauan untuk memastikan dilaksanakannya pengendalian internal dan terintegrasi dalam *group* keuangan secara pruden dan transparan, memenuhi prinsip-prinsip tata kelola sebagai Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan sebagai Perusahaan Publik.

9. **Pemenuhan Prinsip-Prinsip Syariah**
   Dalam pelaksanaan tugas pengawasan, Dewan Komisaris secara berkala berkoordinasi dengan Dewan Pengawas Syariah untuk menyelaraskan pengawasan strategis sesuai Prinsip Syariah.

10. **Arahan dan Rekomendasi Dewan Komisaris**, antara lain
    a. Dewan Komisaris dibantu Komite setingkat Dewan Komisaris telah merumuskan, mengkaji, memberikan nasihat atas langkah-langkah pengendalian internal kontrol yang baik, pemantauan atas risiko-risiko Bank, memastikan ketersediaan sumber daya manusia yang bukan saja kuat secara fisik dan tangguh serta memastikan penerapan kebijakan nominasi dan remunerasi yang baik dan terukur di Bank, ketersediaan perangkat teknologi informasi yang mumpuni untuk mendukung pelaksanaan proses penyelesaian target Bank dalam menciptakan *ecosystem digital for the unbanked*.
    Komite setingkat Dewan Komisaris juga telah membantu Dewan Komisaris untuk memantau *Management* telah menindaklanjuti setiap temuan audit dan rekomendasi OJK dan auditor eksternal serta melakukan pengawasan atas penyelesaiannya;

    b. Dewan Komisaris bersama anggota Komite setingkat Dewan Komisaris memberikan arahan dan pengawasan terkait implementasi rencana bisnis dan penerapan tata kelola yang baik melalui kunjungan ke kantor cabang, kantor fungsional, wisma, sentra dan nasabah. Melengkapi pengawasan kunjungan, Dewan Komisaris menyampaikan Laporan Evaluasi Kunjungan disertai rekomendasi dan masukan kepada Direksi;
    c. Dalam memberikan layanan terbaik bagi nasabah pembiayaan dan pendanaan, Dewan Komisaris merekomendasikan Direksi terus melakukan penyempurnaan atas kebijakan dan prosedur internal Bank dalam menunjang kegiatan bisnis Bank, termasuk didalamnya kebijakan Layanan Internet Banking dan Mobile Banking bagi nasabah pendanaan yang perolehan perizinan diterima di tahun 2022 serta berbagai kebijakan program pengembangan bagi nasabah pembiayaan;
    d. Dewan Komisaris melakukan evaluasi terhadap fungsi kepatuhan Bank yang pemantauannya dilaksanakan secara berkala dan disampaikan kepada Direktur Utama dengan tembusan Direktur Kepatuhan.
    Selama tahun 2023 budaya Kepatuhan terimplementasi dengan baik, tercermin pada pemenuhan terhadap rasio tingkat kehati-hatian (*prudential ratio)* yang terpelihara dengan baik, tidak terdapat denda *significant* dari regulator, serta seluruh parameter profil risiko kepatuhan menunjukan nilai positif, dan Bank memahami pentingnya memberi perhatian pada aktivitas baru;
    e. Dari sisi penguatan human capital, Dewan Komisaris memberikan nasihat untuk memastikan Direksi melaksanakan pengembangan kualitas sumber daya manusia jangka panjang, mengasah talenta-talenta internal, dan dari sisi penyajian

transparansi, Dewan Komisaris telah memastikan Direksi tetap menjaga integritas atas penyajian laporan keuangan, sistem pengendalian internal dan manajemen risiko, pelaporan dan keterbukaan informasi, kepatuhan, tata kelola perusahaan, serta memberikan rekomendasi kepada Direksi terkait langkah-langkah kebijakan yang dipandang perlu ditempuh dengan tetap memperhatikan ketentuan perundangan yang berlaku.

Dewan Komisaris telah menerima kuasa dan kewenangan dari Pemegang Saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham dan telah menindaklanjuti Keputusan dimaksud di tahun 2023 antara lain:

1. Pelaksanaan Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Sidharta Widjaja dan Rekan (*an Indonesian partnership and member firm of KPMG network of independent member affiliated with KPMG International Cooperative*) sebagai Auditor Eksternal untuk memeriksa atau mengaudit buku dan catatan BTPN Syariah untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta penetapan besarnya honorarium dan syarat lainnya tentang menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik tersebut dengan telah memperhatikan rekomendasi Komite Audit BTPN Syariah;

2. Pelaksanaan penetapan Remunerasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas Syariah tahun 2023 melalui Rapat Komite Nominasi dan remunerasi, serta menentukan pembagiannya diantara para anggota Direksi dan para anggota Dewan Pengawas Syariah dengan ketentuan bahwa dalam menetapkan besarnya jumlah total serta pembagian Remunerasi bagi para anggota Direksi dan para anggota Dewan Pengawas Syariah tersebut Dewan Komisaris telah memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi Bank.

Proses Nominasi Dewan Komisaris [GRI 2-10]

Alur proses penunjukan dan pengangkatan anggota Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi di BTPN Syariah sebagai berikut



* Pengajuan FnPT ke OJK untuk Anggota Dewan Komisaris dapat dilaksanakan setelah RUPS;



Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

Prosedur pelaksanaan Penilaian Direksi di BTPN Syariah adalah sebagaimana tertuang dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi dengan mempertimbangkan Anggaran Dasar serta kebijakan internal Bank.

Penilaian Kinerja dilakukan dengan Penilaian sendiri *(self-assessment)* setiap tahunnya untuk menilai Kinerja Dewan Komisaris secara kolegial.

Kriteria Pelaksanaan Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

Kriteria Penilaian terhadap Kinerja individu masing-masing anggota Dewan Komisaris (*individual performance assessment*) di BTPN Syariah adalah mengacu kepada berbagai pertimbangan, antara lain:

1. Penerapan Good Corporate Governance (GCG) dalam setiap usaha Bank,
2. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
3. Implementasi terhadap strategi Bank secara keseluruhan;
4. Pengawasan terhadap strategi Bank secara keseluruhan;
5. Pengawasan terhadap kegiatan Manajemen Risiko di area masing-masing (aktivitas manajemen risiko) dan penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah di BTPN Syariah merupakan Organ Bank yang diangkat dan disahkan melalui RUPS dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Komite Nominasi dan Remunerasi, dan wajib memenuhi persyaratan lulus Uji Kepatutan dan Kelayakan dari OJK.

Kedudukan DPS adalah sejajar dengan Dewan Komisaris dan bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah.

DPS adalah badan Independen direkomendasikan oleh DSN MUI, yang bertugas mengawasi pelaksanaan fatwa DSN di Lembaga Keuangan Syariah.

Seluruh Anggota Dewan Pengawas Syariah di BTPN Syariah telah memenuhi jumlah, komposisi, kriteria, dan independensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Komposisi anggota Dewan Pengawas Syariah

Komposisi dan kriteria anggota DPS di BTPN Syariah adalah terdiri dari 2 (dua) orang, yakni 1 (satu) orang sebagai Ketua dan 1 (satu) orang sebagai Anggota. Ketua DPS bertanggung jawab mengkoordinasikan pelaksanaan tugas DPS dan memastikan anggota DPS memperoleh informasi yang diperlukan untuk dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Dalam melaksanakan tugas pengawasan, DPS memastikan telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.

Berdasarkan keputusan RUPS Tahunan BTPN Syariah yang diselenggarakan pada tahun 2023, telah diangkat kembali seluruh anggota DPS yang telah habis masa jabatan sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2026, dengan tidak mengurangi perubahan yang dapat terjadi sebelum berakhirnya masa jabatan tersebut.

Susunan anggota DPS di BTPN Syariah posisi 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

No	Nama Dewan Pengawas Syariah	Jabatan	Jenis Kelamin	Tanggal Persetujuan OJK	Tanggal Pengangkatan	Tanggal Efektif
1.	H. Ikhwan Abidin, MA	Ketua Dewan Pengawas Syariah	Pria	13 Juni 2017 (SR-25/PB.13/2017)	6 Maret 2017	13 Juni 2017
2.	H. Muhamad Faiz, MA	Anggota Dewan Pengawas Syariah	Pria	2 Mei 2017 (SR-23/PB.13/2017)	6 Maret 2017	2 Mei 2017

Jabatan Lain Dewan Pengawas Syariah di Luar BTPN Syariah

Sampai dengan dengan 31 Desember 2023, posisi dan komitmen lain (rangkap jabatan) anggota Dewan Pengawas Syariah tidak melebihi batas maksimum yang diperkenankan sesuai ketentuan.

Posisi dan komitmen lain Dewan Pengawas Syariah posisi 31 Desember 2023:

No	Nama Dewan Pengawas Syariah	Masa Periode Jabatan di BTPN Syariah	Posisi dan Komitmen lain
1	H. Ikhwan Abidin, MA	2023-2026	• Ketua DPS – PT Bank Syariah Bukopin • Ketua DPS - PT Bahana Arta Ventura • Ketua DPS – PT Radana Bhaskara Finance • Anggota DPS – PT Asanusa Asset Management • Dosen Pasca Sarjana - Institut Ilmu Al-Quran
2	H. Muhamad Faiz, MA	2023-2026	• Ketua DPS – Unit Usaha Syariah PT Bank Permata Tbk • Ketua DPS – PT Indomobil Finance Indonesia (IMFI) Syariah • Anggota DPS – Unit Usaha Syariah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk • Wakil Pengasuh - PP Darul Rohman • Wakil Sekretaris - Komisi Fatwa MUI • Wakil Ketua - Lembaga Bahtsul Masail PBNU • Anggota Pleno - DSN MUI • Katib Syariah - PBNU • Ketua Umum - MUI DKI Jakarta

Tugas Dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah

Merujuk kepada Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Pengawas Syariah di BTPN Syariah, tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah antara lain:

1. Melaksanakan tugas dan tangggung jawab sesuai dengan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik;
2. Memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah;
3. Menilai dan memastikan pemenuhan Prinsip Syariah atas pedoman operasional dan produk/layanan yang dikeluarkan Bank;
4. Mengawasi proses pengembangan produk baru Bank agar sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) – Majelis Ulama Indonesia (MUI);
5. Meminta fatwa kepada DSN – MUI untuk produk baru Bank yang belum ada fatwanya;
6. Melakukan review secara berkala atas pemenuhan Prinsip Syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank;
7. Memberikan sosialisasi prinsip syariah kepada karyawan untuk meningkatkan pemahaman karyawan terhadap prinsip syariah.
8. Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah melalui Satuan Kerja Kepatuhan dalam rangka pelaksanaan tugasnya;
9. DPS wajib menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan DPS secara semesteran kepada OJK dan DSN-MUI paling lambat 2 (dua) bulan setelah periode semester dimaksud berakhir;
10. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, DPS juga melakukan koordinasi dengan Dewan Komisaris dan Direksi;
11. DPS wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.

Realisasi Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah Tahun 2023

Selama tahun 2023, seluruh anggota DPS di BTPN Syariah telah menjalankan tugas pengawasan dalam memberikan nasihat dan saran kepada Direksi yang dituangkan melalui Opini dan Persetujuan DPS.

Opini dan Persetujuan Dewan Pengawas Syariah tahun 2023

No.	Nomor	Opini & Persetujuan DPS Tahun 2023
1.	154/DPS/ODP/I/2023	Tiering Ujroh Pembiayaan Modal Kerja Mitra Tepat
2	155/DPS/ODP/I/2023	Temuan OJK terkait Prinsip Syariah Pembiayaan
3	156/DPS/ODP/II/2023	Layanan Pembayaran Menggunakan QRIS Pada Mobile Banking

Opini dan Persetujuan Dewan Pengawas Syariah tahun 2023

No.	Nomor	Opini & Persetujuan DPS Tahun 2023
4	157/DPS/ODP/II/2023	Pembiayaan Nasabah Non-Muslim untuk Usaha barang peribadatan.
5	158/DPS/ODP/II/2023	Materi Pelatihan Dasar Perbankan Syariah untuk CO
6	159/DPS/ODP/III/2023	Pembaharuan Pedoman dan Tata Tertib Kerja DPS
7	160/DPS/ODP/III/2023	Pengkinian Kebijakan Tata Kelola Perusahaan Versi 5.1
8	161/DPS/ODP/IV/2023	Sinergi Perbankan PT Bank BTPN Syariah Tbk dengan PT BANK BTPN Tbk
9	162/DPS/ODP/VI/2023	*Product Deposito On Call* (DOC)
10	163/DPS/ODP/VI/2023	Perubahan Akad Produk Tepat Tabungan Rencana
11	164/DPS/ODP/VI/2023	Pengajuan Saldo Dana GL Penutupan Wow Syariah menjadi Dana Sosial/ TBDSP.
12	165/DPS/ODP/VI/2023	Pengkinian Kebijakan Pembiayaan
13	166/DPS/ODP/VI/2023	Rencana Pengembangan Produk *Male Group Financing*
14	167/DPS/ODP/VII/2023	Penentuan Harga Murabahah
15	168/DPS/ODP/X/2023	Sinergi Perbankan BTPNS dgn BTPNS Ventura
16	169/DPS/ODP/XI/2023	PKS Pertukaran Data Terkait Penerapan Kebijakan Anti Fraud, APU PPT dan PPPSPM antara BTPN Syariah dengan BTPN
17	170/DPS/ODP/XI/2023	Pengkinian PP Tepat Pembiayaan MT versi 2.0
18	171/DPS/ODP/XII/2023	Program Pelunasan Pembiayaan Nasabah Meninggal Dunia & Santunan Pasangan Nasabah Meninggal Dunia
19	172/DPS/ODP/XII/2023	Pengkinian PP Tepat Deposito
20	173/DPS/ODP/XII/2023	Update Program Asuransi Untuk Nasabah TTR Akad Mudharabah

Independensi Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen. Seluruh anggota Dewan Pengawas Syariah tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan sesama anggota Dewan Pengawas Syariah lainnya, Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau Pemegang Saham Pengendali. Dewan Pengawas Syariah di BTPN Syariah menyatakan tetap independen.

Proses Nominasi Dewan Pengawas Syariah

Alur proses penunjukan dan pengangkatan anggota dewan Pengawas Syariah sebagaimana diatur dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi di di BTPN Syariah adalah sebagai berikut:



*** Pengajuan FnPT ke OJK untuk Anggota Dewan Pengawas Syariah dapat dilaksanakan setelah RUPS;**
*** Pengajuan FnPT Calon Anggota Dewan Pengawas Syariah adalah setelah mendapatkan rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional (DSN)**



Penilaian Kinerja Dewan Pengawas Syariah

Penilaian Kinerja DPS di BTPN Syariah dilakukan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan tugas dan tanggung jawab sesuai ketentuan yang berlaku, Anggaran Dasar Bank serta kebijakan internal Bank.

Penilaian Kinerja DPS dilakukan dengan Penilaian Sendiri (*self-assessment*) setiap tahun untuk menilai kinerja DPS secara kolegial.

Adapun tujuan dari Penilaian Sendiri atas kinerja anggota DPS memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk mengangkat kembali anggota DPS serta sebagai bahan pertimbangan untuk menyusun struktur remunerasi DPS serta meningkatkan efektivitas kinerja DPS.

Kriteria Penilaian Kinerja Dewan Pengawas Syariah

Kriteria Penilaian terhadap Kinerja individu masing-masing anggota DPS (*individual performance assessment)* di BTPN Syariah adalah mengacu kepada berbagai pertimbangan, antara lain:

1. Pengawasan terhadap Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi agar sesuai dengan Prinsip Syariah dan;
2. *Good Corporate Governance* dalam setiap usaha Bank.

Direksi

Direksi merupakan organ Bank yang diangkat dan disahkan melalui RUPS dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi, dan wajib memenuhi persyaratan lulus Uji Kepatutan dan Kelayakan dari OJK. Masa jabatan Direksi di BTPN Syariah adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali.

Direksi merupakan organ yang berwenang dan bertanggung jawab secara penuh untuk melakukan pengurusan bank untuk kepentingan bank, baik di dalam maupun di luar pengadilan, sesuai dengan maksud dan tujuan bank serta mewakili bank sesuai Ketentuan Anggaran Dasar.

Seluruh Anggota Direksi di BTPN Syariah telah memenuhi jumlah, komposisi, kriteria, dan independensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Komposisi Anggota Direksi [GRI 2-9]

Penetapan Komposisi Direksi dilakukan dengan mempertimbangkan kompleksitas dan kebutuhan bank. Komposisi Direksi di BTPN Syariah didasarkan pada pengetahuan perbankan dan perbankan syariah, keahlian, pengalaman profesional, latar belakang untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas Direksi tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras dan agama.

Berdasarkan keputusan RUPS Tahunan BTPN Syariah yang diselenggarakan pada tahun 2023, telah diangkat kembali 4 (empat) orang Direksi yang telah habis masa jabatannya dengan masa jabatan sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2026, dengan tidak mengurangi perubahan yang dapat terjadi sebelum berakhirnya masa jabatan tersebut.

Dalam RUPS Tahunan yang sama telah diangkat seorang anggota Direksi baru, yang merupakan Direktur perempuan, untuk memperkuat jajaran Direksi dengan masa jabatan sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2026, dengan tidak mengurangi perubahan yang dapat terjadi sebelum berakhirnya masa jabatan tersebut.

Pada tahun 2023, terdapat perubahan Susunan Direksi di BTPN Syariah sehubungan dengan pengunduran diri seorang anggota Direksi yang telah habis masa jabatannya dan pengangkatan seorang anggota Direksi, keduanya efektif tanggal 12 April 2023.



Susunan Anggota Direksi sebelum RUPS Tahunan 2023 adalah sebagai berikut :

Nama Direksi	Jabatan	Jenis Kelamin	Tanggal Persetujuan BI/OJK	Tanggal Pengangkatan	Tanggal Efektif
Hadi Wibowo	Direktur Utama	Pria	3 April 2020 (KEP-4/D.03/2020)	16 April 2020	16 April 2020
Arief Ismail	Direktur Kepatuhan merangkap Sekretaris Perusahaan	Pria	22 Agustus 2017 (KEP-69/D.03/2017)	6 Maret 2017	22 Agustus 2017
M. Gatot Adhi Prasetyo	Direktur	Pria	24 Februari 2014 (KEP-16/D.03/2014	20 Mei 2014	22 Mei 2014
Fachmy Achmad	Direktur	Pria	20 Mei 2020 (KEP-58/D.03/2020)	16 April 2020	27 Mei 2020
Dwiyono Bayu Winantio	Direktur	Pria	26 Februari 2021 (KEP-32/D.03/2021)	16 April 2020 (tanggal pengangkatan kembali tanggal 21 April 2021)	21 April 2021

Susunan Anggota Direksi setelah penutupan RUPS Tahunan 2023 dan posisi 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

Nama Direksi	Jabatan	Jenis Kelamin	Tanggal Persetujuan OJK	Tanggal Pengangkatan	Tanggal Efektif
Hadi Wibowo	Direktur Utama	Pria	3 April 2020 (KEP-4/D.03/2020)	16 April 2020	16 April 2020
Arief Ismail	Direktur Kepatuhan merangkap Sekretaris Perusahaan	Pria	22 Agustus 2017 (KEP-69/D.03/2017)	6 Maret 2017	22 Agustus 2017
Fachmy Achmad	Direktur	Pria	20 Mei 2020 (KEP-58/D.03/2020)	16 April 2020	27 Mei 2020
Dwiyono Bayu Winantio	Direktur	Pria	26 Februari 2021 (KEP-32/D.03/2021)	16 April 2020 (tanggal pengangkatan kembali tanggal 21 April 2021)	21 April 2021
Dewi Nuzulianti	Direktur	Wanita	10 Maret 2023 (KEPR-2/D.03/2023)	12 April 2023	12 April 2023

Direksi di BTPN Syariah berjumlah 5 (lima) orang dimana 1 (satu) orang diantaranya adalah Direktur Perempuan. [GRI 405-1]

Seluruh Anggota Direksi BTPN Syariah telah memenuhi jumlah, komposisi, kriteria, dan independensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

posisi dan komitmen lain anggota Direksi

Nama Direksi	Masa Periode Jabatan di BTPN Syariah	Jabatan Lain Direksi di Luar BTPN Syariah
Hadi Wibowo	2023-2026	Ketua Komite Sosial - ASBISINDO
Fachmy Achmad	2023-2026	• Anggota Dewan Standar Akuntan Syariah Indonesia – Ikatan Akuntan Indonesia • Komisaris Utama PT BTPN Syariah Ventura
Arief Ismail	2023-2026	• Anggota - Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan (FKDKP) • Anggota – *Indonesia Corporate Secretary Association* • Anggota – Asosiasi Emiten Indonesia
Dwiyono Bayu Winantio	2023-2026	Tidak memiliki keanggotaan pada Asosiasi
Dewi Nuzulianti	2023-2026	Tidak memiliki keanggotaan pada Asosiasi

tugas dan tanggung jawab Direksi

[GRI 2-13]

Berdasarkan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi di BTPN Syariah, tugas dan tanggung jawab Direksi antara lain:

1. Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank.

2. Direksi wajib mengelola Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundangan yang berlaku.

3. Direksi wajib melaksanakan prinsip-prinsip Kebijakan Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance*) dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

4. Direksi wajib menindaklanjuti seluruh hasil temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Internal (SKAI), Dewan Pengawas Syariah (DPS), Auditor Eksternal, hasil pengawasan OJK/BI dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya.

5. Dalam rangka melaksanakan prinsip-prinsip Kebijakan Tata Kelola Perusahaan *(Good Corporate Governance)*, Direksi paling kurang wajib membentuk.
   a. Satuan Kerja Audit Intern.
   b. Satuan Kerja Manajemen Risiko.
   c. Komite Manajemen Risiko.
   d. Satuan Kerja Kepatuhan.

6. Direksi wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan dan Anggaran Dasar.

7. Direksi wajib mempertanggungjawabkan pemenuhan terkait kewajibannya kepada Pemegang Saham melalui RUPS.

8. Direksi wajib mengungkapkan kepada pegawai mengenai kebijakan internal Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian;

9. Direksi dilarang menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan sebagai berikut:
   a. Proyek bersifat khusus.
   b. Didasari oleh kontrak yang jelas, yang sekurang-kurangnya mencakup lingkup kerja, tanggung jawab dan jangka waktu pekerjaan serta biaya.
   c. Konsultan adalah pihak independen dan memiliki kualifikasi untuk mengerjakan proyek yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud di atas.
   d. Dilaksanakan oleh pihak yang tidak menduduki jabatan struktural pada Bank, dan
   e. Dilaksanakan oleh pihak yang tidak mempunyai wewenang untuk membuat keputusan operasional Bank

10. Dalam pengelolaan data dan informasi terkait Bank Direksi wajib:
    a. Memiliki dan menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu termasuk kepada Dewan Komisaris dan
    b. Melaksanakan pengelolaan data dan informasi sesuai dengan tata Kelola yang baik pada Bank dan ketentuan peraturan perundangan

11. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi dapat membentuk komite.

    Dalam hal dibentuk komite, Direksi wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku.

12. Dalam pelaksanaan fungsi Audit internal, Direksi bertanggung jawab:
    a. Mengembangkan kerangka pengendalian intern untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan semua risiko yang dihadapi bank.
    b. Memastikan SKAI memperoleh informasi terkait perkembangan yang terjadi, inisiatif projek, produk, dan perubahan operasional serta risiko yang telah diidentifikasi dan diantisipasi.
    c. Memastikan telah dilakukan tindakan perbaikan yang tepat.

13. Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Bank apabila:
    a. Terdapat perkara di pengadilan antara Bank dengan anggota Direksi yang bersangkutan dan
    b. Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan Bank.

14. Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud pada poin (3.13), yang berhak mewakili Bank adalah:
    a. Anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Bank.



b. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Bank atau
c. Pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan dengan kepentingan dengan Bank.

fungsi Direktur Utama

Dengan tidak mengurangi hak Direksi sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan ketentuan lainnya yang berlaku, Direktur Utama berwenang untuk:

1. Mengkoordinasikan kegiatan Direksi dan memastikan pembagian tugas diantara Direksi berjalan secara efektif.
2. Mengatur jadwal rapat dan menentukan agenda yang menjadi tanggung jawab dan prioritas Direksi.
3. Menentukan undangan rapat.
4. Memastikan kecukupan dan ketersediaan informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan.
5. Menentukan keputusan Direksi dalam hal terjadi kebuntuan (*deadlock*)

realisasi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi tahun 2023

1. **Pemenuhan Komitmen atas Penerapan Aksi Keuangan Berkelanjutan**, antara lain
   a. Terdapat perwakilan Direksi yang melaksanakan pengawasan langsung atas penerapan aksi keuangan berkelanjutan di BTPN Syariah;
   b. Direksi telah menyusun, menyetujui dan menyampaikan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan Periode 2020-2024 kepada OJK;
   c. Direksi telah memastikan penerapan inisiatif-inisiatif berkelanjutan dinilai dari aspek lingkungan, sosial, ekonomi dan tata kelola sebagaimana tertuang dalam Laporan Keberlanjutan tahun buku 2022 yang telah disampaikan kepada pemangku kepentingan di tahun 2023;
   d. Direksi telah mengkomunikasikan implementasi inisiatif-inisiatif atas RAKB tahun 2023 kepada Pemegang Saham pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan di tahun 2023;

2. **Keselarasan Misi dan Visi**
   Sejalan dengan Penerapan Prinsip-Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik, Direksi BTPN Syariah telah melakukan penelaahan atas kesesuaian Misi dan Visi dengan rencana bisnis dan inisiatif Bank setiap tahunnya.
   Bahwa keselarasan Misi dan Visi Bank serta Nilai-Nilai Utama dipandang tetap relevan sebagaimana tercantum dalam Rencana Bisnis Bank 2023-2025, 2024-2026 dan RAKB 2020-2024 (Indikator 2024) dan telah mendapat persetujuan pada rapat Direksi bersama Dewan Komisaris pada rapat 22 November 2023.
   - **Misi :** Bersama, kita ciptakan kesempatan tumbuh dan hidup yang lebih berarti.
   - **Visi :** Menjadi Bank Syariah terbaik, untuk keuangan inklusif, mengubah hidup berjuta rakyat Indonesia.
   - **Nilai-Nilai Utama**: PRISMA

3. **Dukungan kepada Pemerintah, antara lain**
   a. Sebagai pemenuhan POJK.17.POJK.03/2021 yang merupakan Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019, dan PeraturanOtoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.03/2020 Tahun 2020 Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019, Direksi mendukung Pemerintah dengan melanjutkan kebijakan penyediaan relaksasi pembiayaan kepada nasabah terdampak melalui partisipasi Bank pada Program Pemilihan Ekonomi Nasional tahun 2023.
   b. Sebagai pemenuhan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 71/PMK.08/2020 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penjaminan Pemerintah Melalui Badan Usaha Penjaminan Yang Ditunjuk Dalam Rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional T.E.U. Indonesia, Kementerian Keuangan dan PMK Nomor 28/ PMK.08/2022 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.08/2020 Tentang Tata Cara Penjaminan Pemerintah Melalui Badan Usaha Penjaminan Yang Ditunjuk Dalam Rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional, Direksi telah memberikan persetujuan partisipasi BTPN Syariah memberikan pembiayaan bagi UMKM selama tahun 2023;
   c. Direksi telah menyetujui untuk melanjutkan pengembangan produk renovasi rumah bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di tahun 2023;

d. Direksi telah menyetujui Daya Digital *Platform*, suatu *platform* untuk meningkatkan *customers engagement* dan melanjutkan kerjasama dengan pihak perguruan tinggi dan Pemerintah dalam Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). Bank membuka kesempatan kepada mahasiswa/mahasiswi untuk turut berperan memberikan pemberdayaaan melalui pendampingan *one-on-one* kepada nasabah pembiayaan. Tujuan pendampingan ini dimaksudkan untuk menumbuhkan kemampuan nasabah dan keluarganya untuk memiliki kehidupan yang lebih baik lagi sehingga tercipta hubungan yang berkelanjutan antara nasabah dengan Bank;
e. Sejalan dengan arahan Pemerintah terkait protokol kesehatan dan keselamatan kerja di masa pandemi pada awal tahun 2023, Direksi telah menyetujui pengawasan yang menyeluruh terhadap seluruh karyawan atas mekanisme kerja yang mengutamakan keselamatan kerja di seluruh jenjang organisasi secara terkoordinasi melalui *Business Continuity Management* dibantu oleh *Safety and Security* Unit, sampai dengan penetapan status endemi dicanangkan di akhir Juni 2023;
f. Kerjasama dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek)
   - Sejalan dengan pemenuhan *POJK No.76/POJK.07/2016 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan* untuk memperluas dan meningkatkan layanan nasabah, khususnya bagi nasabah pembiayaan untuk mendapatkan literasi keuangan. Direksi telah memberikan persetujuan untuk kerjasama dengan Kemendikbudristek dalam penyelenggaraan Program Magang dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB) yang merupakan salah satu program dari kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), dalam hal pendanaan magang kepada 100 mahasiswa *Batch* 3 di semester 2 tahun 2022.
   - Atas dasar hasil evaluasi terkait pelaksanaan program magang *Batch* 3 di tahun 2022 yang berjalan dengan baik, pihak MBKM Kemendikburistek memberikan kepercayaan kembali kepada BTPN Syariah untuk meningkatkan jumlah kuota mahasiswa di Batch 4 pada semester 1 tahun 2023 menjadi 539 orang yang kemudian berhasil dipenuhi sebanyak 524 mahasiswa.
   - Pada *batch* berikutnya di semester 2 tahun 2023, yaitu *Batch* 5, BTPN Syariah berhasil melanjutkan kerjasama dengan MBKM Kemendikbudristek untuk meningkatkan jumlah kuota sebanyak 1.510 mahasiswa yang kemudian terpenuhi sejumlah 1.125 mahasiswa;
   - Di penghujung tahun 2023 pihak MBKM Kemendikbudristek dan BTPN Syariah kembali melakukan kolaborasi dan telah menyepakati Program MSIB Batch 6 dengan kuota yang lebih banyak lagi yaitu sejumlah 2.024 mahasiswa yang akan berjalan di semester tahun 2024;
g. Pengembangan kolaborasi dengan Kemendikbud dengan tema "Optimalisasi dan Inovasi Talenta untuk Masa Depan Perusahaan Melalui Program Magang Kampus Merdeka" pada tanggal 9-10 Oktober 2023. Acara tersebut merupakan *platform* diskusi strategis dan inovatif antara perusahaan dan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi – Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi untuk merumuskan kolaborasi yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan perusahaan serta untuk mengeksplorasi lebih dalam mengenai pengintegrasian Program Magang Kampus Merdeka ke dalam ekosistem perusahaan guna menghasilkan dampak maksimal dan memenuhi kebutuhan akan talenta berkualitas serta inisiasi inovasi;
h. Melakukan eksplorasi kerjasama dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia terkait "Penjajakan Kolaborasi Program Pemberdayaan Kartu Pra-Kerja" di bulan Januari tahun 2023, dilanjutkan dengan diskusi strategis "Diskusi Penjajakan Kolaborasi Kerjasama Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Kewirausahaan" pada tanggal 13 April 2023;
i. Penjajakan kerjasama antara BTPN Syariah dan KNEKS terkait Program Pelatihan Pendamping Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil pada tanggal 13 September 2023 yang bertujuan untuk pelaksanaan pelatihan pendamping sertifikasi halal kepada mahasiswa dan mentor yang terlibat di dalam Program Bestee khususnya di Batch-5, semester 2 tahun 2023l. Kerjasama ini dilakukan untuk meningkatkan pelayanan sekaligus *engagement* kepada nasabah pembiayaan BTPN Syariah, khususnya yang berjenis usaha makanan dan minuman agar produknya mendapatkan sertifikasi halal secara resmi;



j. Melakukan eksplorasi kerjasama antara BTPN Syariah dan Kementerian Sosial dalam topik "Penjajakan Kolaborasi Program Pemberdayaan UMKM" di Bulan Februari tahun 2023.

Secara lengkap, paparan atas program-program serta kebijakan BTPN Syariah terdapat pada paparan Kinerja Keuangan, Tinjauan Bisnis dan Program DAYA pada Laporan Tahunan BTPN Syariah tahun 2023.

4. Pemenuhan Komitmen kepada Pemegang Saham, antara lain

a. Direksi telah menindaklanjuti Keputusan RUPS Luar Biasa tahun 2019 melalui pengalihan saham treasuri yang ketiga kepada *Material Risk Takers* dengan tanggal distribusi 25 Januari 2023;

b. Direksi telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Pemegang Saham pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 12 April 2023;

c. Direksi telah melaksanakan Paparan Publik Tahunan tanggal 26 Oktober 2023;

d. Direksi telah menindaklanjuti Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2023, antara lain:
   - Melaksanakan pembagian dividen berdasarkan kinerja tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 berdasarkan persetujuan RUPS Tahunan 2023 dengan tanggal pembayaran 12 Mei 2023.
     Bahwa pembagian dividen bertujuan menjunjung tinggi hak para pemegang saham dan secara berkelanjutan terus menumbuhkan kepercayaan dari para pemegang saham dan investor atas hasil pembangunan industri perbankan syariah yang sehat di BTPN Syariah.
   - Melaksanakan penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Siddharta Widjaja dan Rekan (*an Indonesian partnership and member firm of KPMG network of independent member affiliated with KPMG International Cooperative* sebagai Auditor Eksternal, dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan persetujuan Dewan Komisaris.
     Bahwa Laporan Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam rangka Audit atas Informasi Keuangan Historis Tahunan pada 31 Desember 2023, telah disampaikan Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan Pengawas Perbankan Syariah dengan tembusan kepada Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan;
   - Menyisihkan laba bersih sebagai cadangan wajib;
   - Melaporkan perubahan komposisi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris di tahun 2023 sesuai ketentuan;

e. Direksi telah menyampaikan Keterbukaan Informasi dan Laporan secara tepat waktu selama tahun 2023;

f. Direksi mengkomunikasikan Laporan Keuangan Konsolidasi, Rencana Bisnis Bank dan Rencana Korporasi kepada Entitas Induk dalam lingkup *Group* Keuangan selama tahun 2023;

5. Penerapan Prinsip-Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik, antara lain

a. Direksi telah memastikan penerapan prinsip-prinsip GCG yang baik diseluruh tingkat organisasi di Bank.

Untuk memperkuat penerapan prinsip-prinsip GCG, Direksi telah menetapkan kebijakan berdasarkan implementasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 17 tahun 2023 tentang Tata Kelola Perusahaan Terbuka, melengkapi penerapan ketentuan regulator terkait penerapan GCG yang baik, antara lain Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah serta POJK No 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.

Seiring jejak langkah penerapan prinsip-prinsip GCG di BTPN Syariah lebih dari 1 dekade, penerapan prinsip-prinsip GCG disertai peningkatan kualitas dengan mengadopsi ASEAN SCORECARDS terkini yang diterbitkan di tahun 2023 dan secara bertahap terus disempurnakan kualitasnya dari waktu ke waktu. Secara khusus faktor-faktor yang mendapat penyempurnaan dalam tiga tahun terakhir adalah semakin membaiknya fokus Bank kepada hak-hak pemegang saham, pengungkapan dan transparansi serta tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris. Selain itu Bank terus berupaya mempertahankan nilai yang baik atas perlakuan setara terhadap pemegang saham dan peran pemangku kepentingan secara optimal.

b. Direksi telah melaksanakan penerapan keuangan berkelanjutan sejalan dengan POJK Nomor 51/POJK.03/2017 serta POJK 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata kelola bagi Bank Umum dalam rangka penerapan aksi keuangan yang berkelanjutan untuk memberikan kontribusi nyata dan positif kepada stabilitas sistem keuangan di Indonesia. Melalui kebijakan Direksi, BTPN Syariah

terus mendukung Pemerintah dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang mampu menjaga stabilitas ekonomi serta bersifat inklusif yang mendepankan keselarasan antara aspek ekonomi, sosial dan lingkungan hidup.

c. Direksi telah memastikan dilakukannya pemenuhan tugas dan tanggung jawab serta kewajiban Bank kepada Regulator, melalui Keterbukaan Informasi atas penyajian Laporan Tahunan, Laporan Keberlanjutan, Laporan Keuangan Interim, Laporan Keuangan Tahunan dan Konsolidasi melalui sistem pelaporan regulator dan publik, serta tersedia dalam Situs Web Bank sebagaimana diwajibkan bagi sebuah perusahaan publik dan bank umum syariah;
d. Direksi didukung Komite setingkat Direksi telah melakukan kajian atas kontrol material perusahaan, yang meliputi area operasional, keuangan, kepatuhan serta sistem manajemen risiko Bank, sistem pengendalian internal, pengembangan sumber daya manusia, pengembangan rencana bisnis, perumusan inisiatif strategis dalam persaingan usaha, kematangan kesiapan teknologi informasi, kebijakan pembiayaan;
e. Direksi telah melakukan kajian dan memberikan persetujuan, antara lain:
    - Laporan Tahunan untuk tahun buku 2022;
    - Laporan Keberlanjutan untuk tahun buku 2022;
    - Rencana Bisnis Bank (RBB) dan Revisi RBB Periode 2024-2026 serta komitmen pemantauan realisasi RBB dalam laporan berkala kepada OJK;
    - Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) 2020-2024 (Indikator 2024) serta komitmen dalam melakukan pemantauan atas realisasi Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan Bank bersama dengan Dewan Komisaris setiap tahunnya;
    - Rencana Korporasi dan Revisi Rencana Korporasi 2022-2031;
    - Pengkinian atas Charter Direksi Tahun 2023;
    - Perubahan Susunan Komite setingkat Direksi Tahun 2023;
    - Pelaksanaan *Self-Assessment* GCG Tahun 2023;
f. Direksi telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas kinerja tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 kepada Pemegang Saham melalui penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 12 April 2023 serta Paparan Publik Tahunan 26 Oktober 2023;
g. Direksi telah melaksanakan penerapan atas POJK 16 tahun 2022 terkait sinergi Perbankan bekerja sama dengan BTPN selaku Entitas Induk yang dituangkan dalam 10 perjanjian kerjasama;
h. Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit internal Bank, auditor eksternal, rekomendasi dari pengawasan Otoritas Jasa Keuangan;
i. Direksi telah memastikan terjaganya tingkat kesehatan Bank dan penerapan budaya Kepatuhan yang tercermin pada pemenuhan terhadap rasio tingkat kehati-hatian (prudential ratio) yang terpelihara dengan baik, tidak terdapat denda signifikan dari regulator serta parameter profil risiko kepatuhan menunjukan nilai positif;
j. Direksi mengedepankan penerapan budaya kepatuhan, termasuk didalamnya penerapan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan teroris melalui (APU/PPT) dan anti-fraud;

6. **Pemenuhan Komitmen atas Pengembangan Bisnis Bank dan kepada Nasabah**, antara lain
    a. Direksi telah mengoptimalkan peluang untuk melakukan berbagai terobosan dengan memanfaatkan teknologi untuk kebaikan dan membangun aspirasi *Sharia Digital Ecosystem for Mass Market* melalui Entitas Anak, PT BTPN Syariah Ventura. Pembangunan aspirasi ini bertujuan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan nasabah yang terus berubah, memastikan terjadinya peningkatan kesejahteraan terhadap nasabah pra/cukup sejahtera, serta memiliki kesempatan untuk melayani lebih banyak lagi nasabah secara berkelanjutan;
    b. Dalam memberikan layanan terbaik bagi nasabah pembiayaan, Direksi menyusun berbagai kebijakan program pengembangan, memastikan tersedianya program pembangunan infrastruktur, pengembangan feature layanan sesuai kebutuhan nasabah dan komunitas sekitarnya, dilengkapi program penerapan program edukasi literasi keuangan, *new footprint*, sampai dengan pendampingan dan pemberdayaan yang secara berlanjut dijalankan Bank untuk menghadirkan masyarakat yang berpikir positif dalam menjalankan keberlangsungan usaha dan kehidupan sosial.
    Paparan lebih lanjut sehubungan program berbagi ke nasabah terdapat pada



Tinjauan Bisnis pada Laporan Tahunan BTPN Syariah tahun 2023;

c. Sejalan dengan *key strategic initiative* untuk memperluas dan meningkatkan layanan nasabah serta meningkatkan *customer engagement*, khususnya bagi nasabah pembiayaan untuk memperoleh serfitikasi halal, pada tahun 2023 Direksi telah memberikan persetujuan atas kerjasama antara BTPN Syariah dengan KNEKS dalam hal pemberian pelatihan pendamping sertifikasi halal bagi sejumlah 29 mahasiswa magang dan 20 mentor yang akan mendampingi nasabah pembiayaan agar dapat memperoleh sertifikasi halal secara *self-declare*;
d. Dalam memberikan layanan terbaik bagi nasabah pendanaan, Direksi telah memberikan persetujuan untuk melakukan penyempurnaan atas kebijakan dan prosedur internal, termasuk didalamnya penyempurnaan pada fitur Layanan Internet Banking dan Mobile Banking yang telah aktif sejak tahun 2022;
e. Dalam memberikan layanan terbaik bagi nasabah korporasi, BTPN Syariah telah memberikan penyaluran pendanaan kepada perusahaan multifinance yang memiliki kesamaan tujuan selaras dengan tujuan keberlanjutan BTPN Syariah;

7. Pemenuhan Komitmen kepada Komunitas, antara lain

a. Direksi menyetujui program pengembangan bagi komunitas yang memiliki potensi untuk dikembangkan lebih jauh baik dalam hal kewirausahaan, kesehatan, maupun lingkungan serta membantu memberikan akses pasar baru baik secara *online* maupun *offline* melalui program pendampingan nasabah melalui pelatihan pemberdayaan tentang literasi pemasaran digital agar produk yang dihasilkan oleh nasabah dapat memiliki daya saing yang tinggi dengan produk-produk lokal lainnya dengan harapan hal ini dapat meningkatkan kapasitas pendapatan mereka;
b. Direksi telah menyetujui penggunaan *Poverty Probability Index* (PPI yang dikeluarkan oleh *Innovation for Poverty Action* yang bersifat spesifik terhadap negara penggunanya) untuk mengukur kinerja sosial terhadap nasabah pembiayaan Bank. Beberapa hal yang diukur antara lain semakin membaiknya pendidikan anak nasabah, semakin membaiknya toilet, pengurangan emisi karbon rumah tangga yang ditandai dengan telah beralihnya penggunaan kahu bakar untuk memasak;
c. Melalui kebijakan Direksi untuk melanjutkan kerjasama dengan pihak perguruan tinggi dan Pemerintah dalam Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), terbuka kesempatan kepada mahasiswa/mahasiswi untuk turut berperan memberikan kegiatan pemberdayaaan dan pendampingan one-on-one kepada nasabah pembiayaan yang tersebar diwilayah-wilayah di Indonesia, yang secara langsung menghadirkan peningkatan skills dan kemampuan berusaha nasabah dan keluarganya;
d. Kehadiran Entitas Anak, BTPN Syariah Ventura yang telah dibentuk dan diharapkan dapat mengakselarasi perwujudan ekosistem digital syariah secara lebih tepat dan efisien melalui kerjasama dengan mitra strategis yang memikiki kompetensi digital yang tepat dan kesamaan visi.

8. Pengawasan atas Entitas Anak, antara lain

a. Direksi melakukan pengawasan terhadap Entitas Anak atas penerapan prinsip-prinsip GCG, Prinsip Syariah dan kepatuhan, penerapan Manajemen Risiko, pemantauan Kinerja Keuangan dan Non Keuangan, layanan syariah yang berkualitas serta pelaporan secara tepat waktu;
b. Mewakili BTPN Syariah sebagai pemegang saham pengendali pada BTPN Syariah Ventura,
   - Direksi telah memberikan persetujuan atas Keputusan yang diambil pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Pemegang Saham Luar Biasa BTPN Syariah Ventura di tahun 2023;
   - Direksi telah memberikan persetujuan dilakukannya penguatan pada komposisi Direksi dan Dewan Komisaris di BTPN Syariah Ventura melalui perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa di tahun 2023;
   - Direksi melakukan pengawasan atas pemenuhan tugas dan tanggung jawab Pejabat Eksekutif Bank yang menerima tugas pengurusan dan pengawasan pada BTPN Syariah Ventura;
   - Direksi telah memastikan kesesuaian Rencana Bisnis Bank dan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan dengan

Rencana Bisnis dan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan dari BTPN Syariah Ventura;

9. **Pemenuhan Komitmen kepada Pemangku Kepentingan**, antara lain
   a. Direksi telah melaksanakan Paparan Publik Tahunan 2023 atas kinerja keuangan perusahaan sebagai upaya meningkatkan kualitas komunikasi dengan pemegang saham dan investor;
   b. Direksi telah melaksanakan keterbukaan informasi dan menyampaikan laporan wajib dan insidentil secara berkala kepada Regulator dan Publik melalui media pelaporan Regulator dan Situs Web Perusahaan di tahun 2023;

10. **Pemenuhan Komitment atas Penguatan Infrastruktur Bank**, antara lain
   a. Direksi telah melakukan kajian terhadap infrastruktur Bank berupa pengkinian dan penyempurnaan kebijakan utama, kebijakan operasional serta prosedur internal Bank dengan memperhatikan kajian manajemen risiko, kepatuhan, hukum dan keamanan informasi dan Ketentuan yang berlaku;
   b. Direksi menyetujui dilaksanakannya optimalisasi Jaringan Kantor selama tahun 2023;
   c. Direksi telah menyetujui penyempurnaan atas *platform* pemberdayaan yang memberikan nasabah akses ke pengetahuan dan akses ke pasar yang lebih besar untuk meningkatkan kualitas pemberdayaan nasabah. *Platform digital* ini juga memberikan kesempatan kepada karyawan dan *stakeholder* lain untuk dapat ikut serta dalam memberikan dukungan nyata dalam berbagai bentuk kepada nasabah pra inklusi keuangan produktif;
   d. Direksi menyetujui untuk melanjutkan pelaksanaan Operational Excellence dengan melakukan digitalisasi dan otomasi atas proses operasional serta fungsi pendukung lainnya, sentralisasi proses, eksplorasi serta evaluasi atas proses kerja operasional Bank sehingga tercipta proses yang semakin efektif dan efisiesien dengan kualitas yang semakin baik. Proses otomasi antara lain melalui RPA untuk kebutuhan rekonsiliasi, penggunaan *chatbot* untuk kebutuhan *response service center* atau unit kerja lain, selain itu proses otomasi dengan H2H juga akan dilakukan untuk proses registrasi maupun klaim asuransi;
   e. Direksi menyetujui penguatan teknologi informasi Bank melalui kebijakan pengembangan dan modernisasi infrastruktur data warehouse dan data analytic *platform* guna mendukung pengambilan keputusan dan pelaporan yang akurat, peningkatan kemampuan DC dan DRC serta kapasitas keamanan sistem informasi.
   f. Direksi menyetujui dilakukannya penyelesian pembangunan treasury system yang bertujuan meningkatkan proses kontrol, mendukung pengelolaan likuiditas

11. **Pemenuhan Komitmen atas Penerapan Sinergi Perbankan**, antara lain
   a. Direksi telah menyetujui pembentukan Satuan Kerja dalam pengawasan Pemantauan Sinergi Perbankan di BTPN Syariah dan Penerapan Tata Kelola dalam grup keuangan berkoordinasi dengan BTPN dan BTPN Syariah Ventura;
   b. Direksi melaksanakan pemantauan atas penerapan Sinergi Perbankan melalui kelanjutan atas Perjanjian Kerjasama dengan BTPN dan BTPN Syariah Ventura selama tahun 2023
   c. Perwakilan Direksi hadir dalam pertemuan koordinasi pemantauan sinergi perbankan dan rapat koordinasi tata kelola dengan Entitas Induk secara berkala di tahun 2023
   d. Direksi telah mengkomunikasikan penerapan sinergi perbankan secara semesteran kepada Dewan Komisaris di tahun 2023;
   e. Direksi telah melaporkan penerapan Sinergi Perbankan selama tahun 2023 kepada Regulator;

12. **Pemenuhan komitmen kepada karyawan**, antara lain
   a. Direksi melanjutkan kebijakan penguatan sumber daya manusia dan organisasi disemua lini selama tahun 2023;
   b. Direksi telah menyetujui kebijakan bagi pengembangan kualitas sumber daya manusia jangka panjang, mengasah talentatalenta internal dan mempersiapkan jalur karir, menyediakan beasiswa dan benefit jangka panjang, asuransi serta fasilitas kesehatan di tahun 2023;
   c. Direksi telah menyetujui dilakukannya peningkatan kompetensi sumber daya manusia dan upaya tindak lanjut untuk pengembangannya, termasuk yang berkaitan dengan kompetensi dibidang

manajemen risiko bagi karyawan sesuai bidang tugasnya sebagaimana diatur dalam ketentuan penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah;

d. Direksi telah menyetujui performance bonus dan penyesuaian gaji Karyawan serta penyediaan program long term compensation program bagi Karyawan Senior di tahun 2023;
e. Direksi menetapkan kebijakan dengan tidak adanya pengurangan Karyawan selama tahun 2023;
f. Direksi telah menetapkan mekanisme kerja sistem kerja hybrid tanpa mengesampingkan pemenuhan key performance initiatives secara tepat waktu di tahun 2023.
g. Direksi telah menetapkan kebijakan dalam penyempurnaan proses rekrutmen untuk pemenuhan karyawan menjadi semakin baik dan cepat, mengembangkan kapabilitas melalaui management talenta dan sistempembelajaran dan penguatan talenta pada bisnis non TUR di tahun 2023

Independensi Direksi [GRI 2-15]

Direksi di BTPN Syariah menyatakan tetap independen. Direktur Utama adalah berasal dari pihak yang independen terhadap Pemegang Saham Pengendali (PSP). Seluruh anggota Direksi di BTPN Syariah tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali, anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi dan hubungan keuangan dan/atau hubungan kepemilikan saham Bank Umum Syariah.

Proses Nominasi Direksi [GRI 2-10]

Alur proses penunjukan dan pengangkatan anggota Direksi adalah sebagai berikut:



*** Pengajuan FnPT ke OJK untuk Anggota Dewan Pengawas Syariah dapat dilaksanakan setelah RUPS;**

Penilaian Kinerja Direksi

Prosedur Pelaksanaan Penilaian Kinerja Direksi

Prosedur pelaksanaan Penilaian Direksi di BTPN Syariah adalah sebagaimana tertuang dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi dengan mempertimbangkan Anggaran Dasar serta kebijakan internal Bank. Penilaian Kinerja dilakukan dengan Penilaian sendiri (*self-assessment)* setiap tahunnya untuk menilai kinerja Direksi secara kolegial.

Adapun tujuan dari Penilaian Sendiri atas kinerja anggota Direksi adalah menjadi salah satu dasar pertimbangan bagi Komite Nominasi dan Remunerasi dalam memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk mengangkat kembali anggota Direksi serta sebagai bahan pertimbangan untuk menyusun struktur remunerasi Direksi serta meningkatkan efektivitas kinerja Direksi;

Kriteria Pelaksanaan Penilaian Kinerja Direksi

Kriteria Penilaian terhadap Kinerja individu masing-masing anggota Direksi (*individual performance assessment*) di BTPN Syariah adalah mengacu kepada berbagai pertimbangan dan paling sedikit memuat:

1. Implementasi terhadap strategi Bank secara keseluruhan.
2. Monitoring terhadap strategi Bank secara keseluruhan.
3. Monitoring terhadap *risk management* di area masing-masing (aktivitas manajemen risiko) dan penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Kriteria Penilaian Kinerja Direksi Dalam Bidang Sosial Dan Lingkungan Terkait Tata Kelola Keberlanjutan [GRI 2-18]

Sejalan dengan regulasi POJK Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik dan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang mampu menjaga stabilitas ekonomi serta bersifat inklusif diperlukan sistem perekonomian nasional, kriteria Penilaian Kinerja Direksi juga meliputi pelaksanaan atas keselarasan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup.

Dalam upaya mendukung Tata Kelola Keberlanjutan, Direksi di BTPN Syariah telah merumuskan kebijakan atas peningkatan kompetensi di semua level terkait Aksi Keuangan Berkelanjutan, melakukan penyesuaian atas Kebijakan Internal bank, termasuk di dalamnya merumuskan kebijakan pengelolaan lingkungan dan kelestarian lingkungan dan bertanggung jawab memastikan dilakukannya realisasi Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan.

Sesuai prinsip Syariah, Direksi telah memastikan dengan tidak menyalurkan pembiayaan kepada nasabah yang memiliki usaha yang merusak lingkungan dan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah sebagaimana tertuang dalam Kebijakan di BTPN Syariah.

Komitmen BTPN Syariah dalam menjaga kinerja bank yang selaras dengan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup tertuang dalam Laporan Keberlanjutan tahun 2022 yang disusun dan dikaji oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris.

Evaluasi Kinerja Direksi

1. Direksi wajib melakukan review atas kinerja pengurusan yang telah dilakukan oleh Direksi selama masa tahun buku dan melaporkannya satu tahun sekali.
2. Sebagai bagian dari evaluasi kinerja, Direksi harus memastikan terpenuhinya komposisi dan kualifikasi dari Direksi.
3. Laporan Evaluasi Kinerja Direksi dilaporkan kepada Pemegang Saham didalam RUPS dan dituangkan dalam Laporan Tahunan.
4. Evaluasi atas kinerja anggota Direksi dilakukan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi berdasarkan masukan Direktur Utama.
5. Hasil evaluasi kinerja anggota Direksi menjadi pedoman dalam penetapan nominasi dan remunerasi anggota Direksi yang bersangkutan.



Pengembangan Kapasitas Organ Bank tahun 2023 [GRI 2-17]

Direksi dan Dewan Komisaris

No	Keterangan	Peserta	Tanggal	Lokasi
1	FGD Finance Direktorat	Direksi	10 Januari 2023	Jakarta
2	Workshop BCM Collaboration "Readiness BCM Team 2023"	Direksi	2 - 4 Februari 2023	Jakarta
3	Training ISO27001 Awareness	Direksi	8 Februari 2023	Jakarta
4	Workshop of Indonesia Corporate Secretary Association (ICSA)	Direksi	14 Maret 2023	Jakarta
5	Leadership for System Change: Delivering Social Impact at Scale (Harvard Kennedy School)	Direktur	18-25 Maret 2023	Jakarta
6	Fintech Policy Forum 2023	Direksi	16 Mei 2023	Jakarta
7	*Refreshment Mandatory* - Pembelajaran mandiri (APU PPT, Compliance/Kepatuhan, Anti Fraud Management, Penanganan Pengaduan Konsumen, Perlindungan Konsumen, Pelatihan Dasar Perbankan Syariah, Information Security Awareness, Entertainment & Gift, Risk Awareness, dan Kode Etik)	Direksi	25 Mei 2023	Jakarta
8	*Economic Outlook Update*	Direksi	6 Juni 2023	Jakarta
9	*Introduction Leaders Program*	Direksi	14 juni 2023	Jakarta
10	Townhall dalam lingkup Group Keuangan SMBC	Direksi	8 Agustus 2023	Jakarta
11	Mengenal Lebih Jauh Pengaturan UU P2SK Dalam Rangka Penguatan Industri Keuangan Non Bank (IKNB)	Direksi	10 Agustus 2023	Jakarta
12	*The Corporate Governance Officer's Role in Driving Digital Resilience*	Direksi	12 Oktober 2023	Jakarta
13	*Refreshment Executive*, Sertifikasi Kompetensi Bidang Treasury Dealer	Direksi	27 November 2023	Jakarta
14	*Townhall* dalam lingkup Group Keuangan SMBC	Direksi	8 Desember 2023	Jakarta
15	Fintech Policy Forum 2023	Dewan Komisaris	16 Mei 2023	Jakarta
16	Economic Outlook Update	Dewan Komisaris	6 Juni 2023	Jakarta
17	Townhall dalam lingkup Group Keuangan SMBC	Dewan Komisaris	8 Agustus 2023	Jakarta
18	Risk Management Refreshment Program for Executives	Dewan Komisaris	12 September 2023	Jakarta
19	Risk Beyond 2023	Dewan Komisaris	7-8 Desember 2023	Denpasar-Bali
20	Townhall dalam lingkup Group Keuangan SMBC	Dewan Komisaris	8 Desember 2023	Jakarta

Pihak Independen

No	Keterangan	Peserta	Tanggal	Lokasi
1	Refreshment Sertifikat Tingkat 4 Manajemen Risiko Perbankan	Pihak Independen	30 Oktober 2023	Jakarta
2	Risk Beyond 2023	Pihak Independen	7-8 Desember 2023	Denpasar, Bali

Dewan Pengawas Syariah

No	Keterangan	Peserta	Tanggal	Lokasi
1	Workshop Pra-Ijtima'Sanawi (Annual Meeting) Dewan Pengawas Syariah bidang Perbankan Syariah	Dewan Pengawas Syariah	4 September 2023	Jakarta
2	Ijtima' Sanawi (Annual Meeting) Dewan Pengawas Syariah	Dewan Pengawas Syariah	13-14 Oktober 2023	Jakarta



Organ Pendukung

Komite-Komite Setingkat Dewan Komisaris

Dalam mewujudkan penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris telah membentuk Komite setingkat Dewan Komisaris yaitu:

1. Komite Audit
2. Komite Pemantau Risiko
3. Komite Nominasi dan Remunerasi

Komite Audit

Pembentukan Komite Audit di BTPN Syariah adalah dengan berpedoman kepada Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 11/33/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum dan Unit Usaha Syariah, POJK Nomor 55/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, POJK Nomor 16/POJK.03/2022 tanggal 30 Agustus 2022 tentang Bank Umum Syariah, POJK Nomor 17 tahun 2023 tanggal 14 September 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, serta ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. [GRI 2-27]

Komposisi Keanggotaan Komite Audit telah disusun dengan memperhatikan kebutuhan dan kompleksitas bank, keberagaman keahlian, pengetahuan, pengalaman profesional, dan latar belakang pendidikan dalam mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris. Penentuan Jumlah Anggota Komite Audit adalah dengan mempertimbangkan dan sesuai kondisi perusahaan.

Sepanjang tahun 2023, terdapat 1 (satu) kali perubahan pada susunan anggota Komite Audit di BTPN Syariah sehubungan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris. Perubahan susunan anggota Komite Audit tahun 2023 telah disetujui oleh Dewan Komisaris pada tanggal 18 Juli 2023 serta telah dilaporkan melalui Keterbukaan Informasi kepada Regulator dan dimuat dalam situs web Bank pada 21 Juli 2023.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Tugas dan Tanggung jawab Komite Audit berdasarkan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit terkini Nomor 02/PedomanKerja/CSGC/XI/2023 tanggal 3 November 2023, antara lain melakukan Pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit internal maupun eksternal serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan dan memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris atas pelaksanaan proses audit dan internal kontrol perusahaan dan hal-hal lain yang disampaikan Direksi kepada Dewan Komisaris, serta mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris.

Ketentuan lebih rinci mengenai tugas dan tanggung jawab Komite Audit BTPN Syariah tertuang dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit yang dimuat dalam Situs Web Bank.

Komite Pemantau Risiko

Pembentukan Komite Pemantau Risiko di BTPN Syariah adalah dengan berpedoman kepada PBI Nomor 11/33/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum dan Unit Usaha Syariah, SEOJK Nomor 10/SEOJK.03/2014 tanggal 11 Juni 2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, POJK Nomor 16/POJK.03/2022 tanggal 30 Agustus 2022 tentang Bank Umum Syariah, POJK Nomor 17 tahun 2023 tanggal 14 September 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, serta ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. [GRI 2-27]

Komposisi Keanggotaan Komite Pemantau Risiko telah disusun dengan memperhatikan kebutuhan dan kompleksitas bank, keberagaman keahlian, pengetahuan, pengalaman profesional, dan latar belakang pendidikan dalam mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris. Penentuan Jumlah Anggota Komite Pemantau Risiko adalah dengan mempertimbangkan dan sesuai kondisi perusahaan.

Sepanjang tahun 2023, terdapat 1 (satu) kali perubahan pada susunan anggota Komite Pemantau Risiko di BTPN Syariah sehubungan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris. Perubahan susunan anggota Komite Pemantau Risiko tahun 2023 telah disetujui oleh Dewan Komisaris pada tanggal 18 Juli 2023 serta telah dimuat dalam situs web Bank pada 21 Juli 2023.



tugas dan tanggung jawab komite pemantau risiko

Tugas dan Tanggung jawab Komite Pemantau Risiko berdasarkan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko terkini Nomor 04/PedomanKerja/RM/XII/2023 tanggal 8 Desember 2023, antara lain memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris terhadap pengelolaan risiko-risiko di Bank dan hal-hal lain yang disampaikan Direksi kepada Dewan Komisaris serta mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian

Dewan Komisaris dan membutuhkan bantuan Komite. Ketentuan lebih rinci mengenai tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko BTPN Syariah tertuang dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko yang dimuat dalam Situs Web Bank.

komite nominasi dan remunerasi

Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi di BTPN Syariah adalah dengan berpedoman kepada PBI Nomor 11/33/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum dan Unit Usaha Syariah, POJK 34/POJK.04/2014 tanggal tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, Nomor 16/POJK.03/2022 tanggal 30 Agustus 2022 tentang Bank Umum Syariah, POJK Nomor 17 tahun 2023 tanggal 14 September 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, serta ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. [GRI 2-27]

Komposisi Keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi telah disusun dengan memperhatikan kebutuhan dan kompleksitas bank, keberagaman keahlian, pengetahuan, pengalaman profesional, dan latar belakang pendidikan dalam mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris. Penentuan Jumlah Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi adalah dengan mempertimbangkan dan sesuai kondisi perusahaan.

Sepanjang tahun 2023, terdapat 1 (satu) kali perubahan pada susunan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi di BTPN Syariah sehubungan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris. Perubahan susunan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi tahun 2023 telah disetujui oleh Dewan Komisaris pada tanggal 18 Juli 2023 serta telah dimuat dalam situs web Bank pada 21 Juli 2023.

tugas dan tanggung jawab komite nominasi dan remunerasi

Tugas dan Tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi berdasarkan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi terkini Nomor 03/PedomanKerja/CSGC/XII/2023 tanggal 28 Desember 2023, antara lain memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris terhadap kebijakan nominasi dan remunerasi yang ditempuh Bank dan hal-hal lain yang disampaikan Direksi kepada Dewan Komisaris serta mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris.

Ketentuan lebih rinci mengenai tugas dan tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunersi BTPN Syariah tertuang dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi yang dimuat dalam Situs Web Bank.

manajemen risiko keuangan berkelanjutan

[OJK E.3, GRI FS2]

Penerapan Manajemen Risiko di BTPN Syariah secara umum berpedoman pada POJK Nomor 65/POJK.03/2016 tanggal 28 Desember 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, yang mencakup empat pilar, yaitu:

1. Pengawasan aktif Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah;
2. Kecukupan kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penetapan limit risiko;
3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko; dan
4. Kecukupan sistem pengendalian internal yang menyeluruh.

Penerapan manajemen risiko BTPN Syariah juga berpedoman pada dokumen-dokumen dari *Basel Committee on Banking Supervision*.

Secara khusus, BTPN Syariah juga meningkatkan Daya Tahan melalui implementasi POJK Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik. Bagian penting dari pengembangan strategi keuangan berkelanjutan dan kerangka pengendalian yang efektif adalah menentukan dan memahami eksposur risiko lingkungan, sosial, dan tata kelola dari portofolio Bank.

struktur manajemen risiko

Struktur pelaksanaan manajemen risiko BTPN Syariah adalah sebagai berikut:



Melalui sistem manajemen risiko tersebut BTPN Syariah melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian terhadap 10 jenis risiko, yaitu: risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko stratejik, risiko reputasi, risiko hukum, risiko kepatuhan, risiko investasi, dan risiko imbal hasil.

Penerapan prinsip pengelolaan risiko sosial dan lingkungan hidup juga menjadi perhatian Bank, diantaranya melalui produk dan aktivitas yang diterbitkan harus memperhatikan isu sosial dan lingkungan hidup sebagaimana tercantum dalam Kebijakan Produk dan Aktivitas Bank. Selain itu, dalam penyaluran pembiayaan, Bank mensyaratkan pertimbangan risiko lingkungan.

Guna memantau dampak perburukan kondisi makro ekonomi terhadap kesehatan portofolio, profitabilitas, likuiditas, dan ketahanan permodalannya, BTPN Syariah melakukan *stress test* terintegrasi.

Sebagai bagian dari pengelolaan risiko terbaik, BTPN Syariah telah memiliki ketentuan terkait *Process, Risk & Control* dan *Risk Grading Matrix* yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengukur potensi risiko operasional pada setiap aktivitas yang terdapat di unit kerja. BTPN Syariah berkomitmen memastikan kelangsungan kegiatan operasional dan bisnis. BTPN Syariah telah memiliki *Business Continuity Management* dan *Contingency Funding Plan* apabila Bank dalam kondisi darurat.

risiko lingkungan dan sosial dalam peluncuran produk baru dan pemberian pembiayaan

[GRI 2-24]

BTPN Syariah berkomitmen menerapkan pendekatan atau prinsip pencegahan, dengan mengedepankan tindakan pencegahan atas setiap potensi terjadinya setiap risiko yang telah diidentifikasi tersebut. Untuk itu, BTPN Syariah melakukan tata kelola dan menganalisis seluruh kejadian risiko *(risk & loss event)* yang sempat terealisir, menggunakan *Operational Risk Management System* (ORMS) sebagai pembelajaran agar kondisi serupa tidak berulang. [GRI 2-25]



Pengelolaan risiko tersebut dilakukan secara menyeluruh, meliputi semua aspek manajemen risiko sebagaimana dipersyaratkan oleh OJK dan Bank Indonesia di bidang perbankan termasuk dan tidak terbatas pada aspek risiko operasional. Dalam kaitan pengelolaan dan pencegahan terjadinya risiko di bidang operasional ini, BTPN Syariah selalu melakukan mitigasi risiko dalam setiap perancangan dan peluncuran produk baru. [OJK F.27]

kebijakan bank dalam mendukung lingkungan, sosial dan tata kelola dalam pembuatan produk bank

Kebijakan Produk dan Aktivitas Bank menyebutkan bahwa dalam pembuatan Produk Bank yang ditawarkan kepada nasabah, agar memperhatikan paling sedikit terkait:

1. Kesesuaian Produk Bank antara kebutuhan dan kemampuan nasabah;
2. Isu sosial dan lingkungan hidup, yaitu turut memperhatikan upaya pelestarian lingkungan hidup, seperti pengelolaan risiko lingkungan atas usaha yang dilakukan oleh nasabah, termasuk di antaranya pembuangan limbah atau kewajiban memperbaiki polusi lainnya yang terkait.

kebijakan bank dalam mendukung lingkungan, sosial, dan tata kelola dalam penyaluran pembiayaan

Dari sisi pembiayaan, BTPN Syariah memastikan bahwa pembiayaan yang diberikan tidak digunakan untuk kegiatan yang memberikan dampak negatif pada lingkungan. Komitmen tersebut dinyatakan dalam kebijakan dan pedoman pembiayaan Bank yang melarang pemberian pembiayaan untuk kegiatan yang berpengaruh negatif kepada lingkungan.

Di dalam pedoman perusahaan Tepat Pembiayaan Syariah juga ditegaskan bahwa dalam setiap penyaluran pembiayaan, Bank selalu mengedepankan dan menyelaraskan kepentingan ekonomi, sosial dan lingkungan hidup. Kebijakan dan prosedur ini memberikan fundamental implementasi Keuangan Berkelanjutan di Bank.

Melalui kebijakan keberlanjutan tersebut di atas dan berpedoman pada prinsip syariah, BTPN Syariah telah menetapkan Daftar Aktivitas Usaha yang Dilarang (*Exclusion List*). Bank dilarang memberikan pembiayaan kepada:

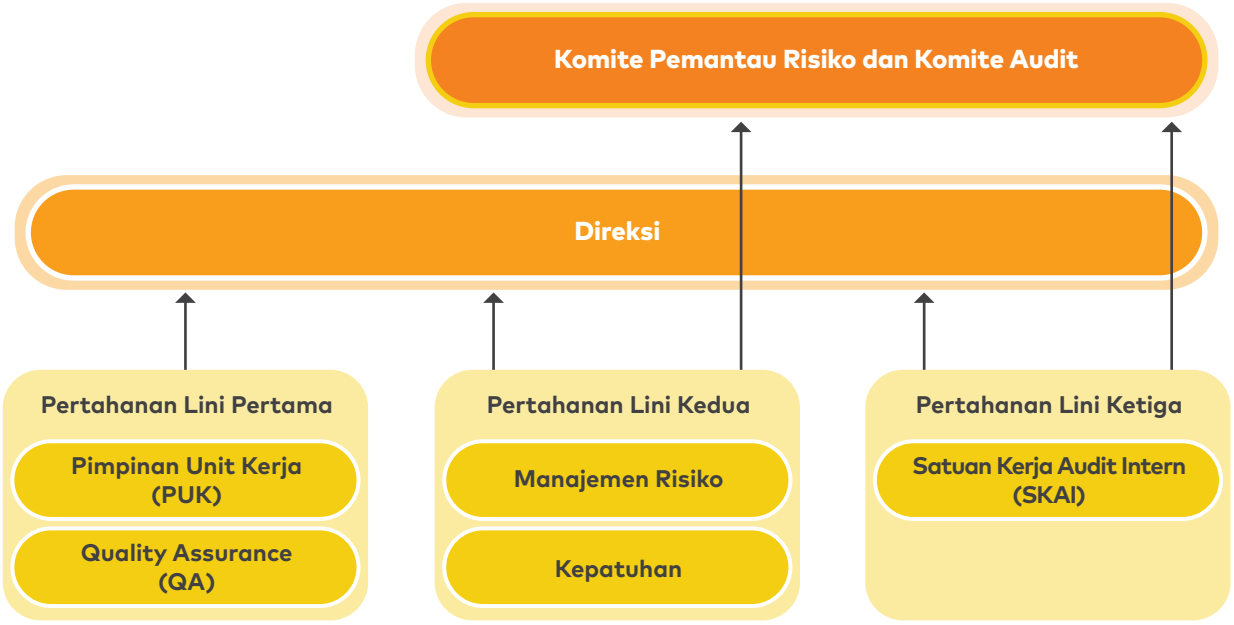
1. Jenis usaha yang tidak sesuai dengan prinsip syariah sebagaimana lampiran SOP Tepat Pembiayaan Syariah Kelompok.
2. Usaha yang bertentangan dengan peraturan perundangan/hukum yang berlaku
3. Calon nasabah yang terdapat pada daftar terduga teroris dan organisasi teroris dan/ atau daftar pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal.

Sementara itu, dalam melakukan mitigasi risiko fokus usahanya dalam melayani nasabah inklusi produktif melalui pembiayaan tanpa adanya jaminan fisik, BTPN Syariah mengedepankan prinsip pencegahan risiko terjadinya pembiayaan bermasalah, dengan pendekatan lain. Pendekatan dimaksud adalah "*knowing your customer*" yang diimplementasikan dengan sebaik-baiknya, di antaranya dengan melakukan pertemuan rutin berkala dalam rangka "pendampingan". Hal ini juga merupakan bentuk upaya BTPN Syariah dalam mengelola dampak produk/jasa yang telah digunakan oleh nasabah. [OJK F.28]

Melalui pendekatan tersebut, BTPN Syariah melalui para *Community Officer* (CO) di lapangan dapat mengenal betul para nasabahnya sehingga kualitas pembiayaan terjaga dengan baik. Lebih dari itu, pengenalan kehidupan para nasabah, turut mendorong terjadinya perubahan hidup yang lebih baik, misalnya nasabah mampu mengelola keuangan keluarga lebih baik, dapat meningkatkan keuntungan usaha, menjadi semakin sadar kesehatan, dan turut serta menjaga lingkungan hidup.

sistem pengendalian internal

BTPN Syariah menerapkan kerangka kerja pengendalian internal dengan pendekatan pertahanan berlapis (*Three Lines of Defense*).



1. **Pertahanan Pertama (*First Line of Defence*)**
   Fungsi pengendalian internal (*Quality Assurance*) membantu unit pemangku risiko (*Risk Taking Unit*) dalam penegakan disiplin praktek pengendalian risiko.

   BTPN Syariah telah memiliki first *line of defence* yang sistematis dan terukur melalui Program CARE (*Champion of Assurance for Risk Enterprise*) dalam rangka membangun kerangka manajemen risiko dan sistem pengendalian internal yang mumpuni. CARE memiliki tanggung jawab melakukan identifikasi untuk mengetahui, memahami dan memonitor *Risk Indicator*, RCSA, LED, *Risk Appetite* dan *Risk Tolerance* pada masing-masing unit kerja di Bank, serta memastikan kecukupan, kesesuaian dan keberadaan kebijakan dan prosedur serta pengawasan limit dan kewenangan unit kerjanya. CARE juga bertugas untuk memastikan tersedianya *Contigency Plan* atas situasi darurat. Dalam hal pengawasan, CARE aktif melakukan diskusi dan sharing dengan *Risk Management* Unit (RMU) dan Internal Risk Forum terhadap *risk exposure* yang terjadi, mekanisme pengendalian, action plan serta berkoordinasi dalam penyelesaian perbaikan indikasi risiko, temuan auditor, dan *Quality Assurance*.

2. **Pertahanan Kedua (*Second Line of Defence*)**
   Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) bersama Satuan Kerja Kepatuhan (SKK) melakukan pendefinisian, penyempurnaan dan pemeliharaan metodologi pengelolaan risiko, memastikan kecukupan mitigasi risiko, kebijakan dan prosedur, penetapan limit risiko serta melakukan koordinasi atau fasilitasi dari pengelolaan risiko secara menyeluruh. SKK memastikan seluruh aktivitas BTPN Syariah telah sesuai dengan ketentuan eksternal dan internal yang berlaku, termasuk kepatuhan terhadap penerapan prinsip syariah.

3. **Pertahanan Ketiga (*Third Line of Defence*)**
   Internal Audit bertugas memastikan secara independen bahwa semua risiko yang melekat (*inherent risk*) telah dikelola dengan baik sehingga risiko residual sesuai dengan toleransi risiko yang telah disepakati dan *risk appetite* yang ditetapkan Bank. Hasil pengawasan ini dilaporkan kepada Direksi dan Dewan Komisaris serta pelaksanaan tindak lanjut atas temuan audit dimonitor sebagai upaya perbaikan kinerja dan mempertahankan peringkat kesehatan BTPN Syariah.



pencegahan fraud [GRI 205-2]

BTPN Syariah tetap berkomitmen penuh untuk melakukan pencegahan terjadinya segala bentuk penyimpangan/pelanggaran/*fraud*, baik yang dilakukan oleh pihak internal maupun eksternal yang dapat berpotensi menimbulkan kerugian finansial atau risiko reputasi.

Bank menerapkan sistem pengendalian *fraud* secara efektif dan berkesinambungan. Sistem pengendalian ini mengarahkan BTPN Syariah dalam menentukan langkah-langkah untuk pencegahan, deteksi, investigasi, pelaporan dan sanksi serta pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut atas kejadian *fraud*. Sebagai bagian dari upaya membangun budaya kesadaran terhadap pencegahan *fraud*, BTPN Syariah secara terus menerus melakukan *awareness* Anti-Fraud dan *Whistleblowing Channel* dengan menyelenggarakan pelatihan kepada seluruh karyawan baik melalui *in-class training* maupun *online training*, sosialisasi melalui *email blast* & *video blast*, pemasangan poster di area kerja Bank, mewajibkan karyawan untuk memahami dan menandatangani Kode Etik Perusahaan, Pakta Integritas dan Deklarasi Anti Fraud serta pendekatan secara moral dengan tausyiah oleh Dewan Pengawas Syariah dan Tokoh Ulama kepada seluruh karyawan. BTPN Syariah juga membangun kesadaran pencegahan *fraud* kepada nasabah dan pihak ketiga (vendor) melalui media edukasi pada saat dilakukan *Know Your Customers* dan persetujuan perjanjian kerja sama. Sampai dengan akhir tahun 2023, seluruh karyawan BTPN Syariah telah mengikuti pelatihan anti-fraud.

BTPN Syariah melakukan berbagai upaya pendekatan dan pengendalian sumber daya manusia dengan mengenali dan memantau karakter dan perilaku karyawan (*Know Your Employee*) termasuk sistem rotasi, mutasi, cuti wajib, serta melakukan *coaching* & *counseling* secara reguler. BTPN Syariah melakukan pemeriksaan secara berkala maupun secara mendadak (*surprise* audit) dan menyediakan sarana pelaporan adanya dugaan tindakan penyimpangan/pelanggaran *fraud*.

BTPN Syariah menerapkan kebijakan tegas untuk memberikan efek jera kepada pelaku kecurangan/*fraud* dan tidak memberikan toleransi atas tindakan dimaksud (*zero tolerance*). Setiap tindakan kecurangan yang terbukti, sekecil apapun, diberikan sanksi yang keras dan tegas, dari sanksi administrasi sampai dengan pemberhentian dari status kekaryawanan Bank dan pelaporan kepada pihak berwajib untuk diproses hukum lebih lanjut.

pengelolaan *whistleblowing system* [GRI 2-26]

Sebagai bagian penerapan kebijakan pencegahan dan penindakan yang tegas terhadap kasus fraud, BTPN Syariah menyediakan media pengaduan *Whistleblowing System*, sebagai sarana bagi karyawan lain yang berkeinginan menyampaikan pelaporan/informasi dugaan adanya *fraud*. BTPN Syariah menyediakan kemudahan akses melalui beberapa media pelaporan dugaan fraud dengan tetap mengutamakan kerahasiaan dan memberikan jaminan perlindungan terhadap pelapor.

Sarana pelaporan yang dapat digunakan adalah *email*, *QR Code* (dapat digunakan oleh pelapor untuk membuat laporan melalui *link QR Code*), surat tertulis, dan telepon. Sarana tersebut dapat diakses dengan mudah oleh seluruh karyawan atau pelapor. Seluruh laporan yang memiliki bukti awal yang valid mengenai terjadinya tindak pelanggaran dimaksud akan segera ditindaklanjuti dengan pelaksanaan investigasi mendalam.

Terdapat penurunan jumlah kasus *fraud**, pada tahun 2021 terdapat 16 kasus, tahun 2022 sebanyak 12 kasus, dan tahun 2023 terdapat 8 kasus yang seluruhnya telah selesai ditindaklanjuti. Kasus tersebut hanya meliputi pelanggaran dari karyawan perusahaan saja, yang seluruhnya diselesaikan secara internal, dimana beberapa karyawan yang terbukti melakukan tindak pelanggaran *fraud* diberi sanksi tegas sesuai ketentuan perusahaan yang berlaku. Tidak ada tuntutan hukum dari pihak ketiga lain berkaitan dengan kasus *fraud* yang terjadi. Juga tidak terdapat pelanggaran insiden *fraud* yang menyangkut mitra bisnis, sehingga tidak ada pemutusan hubungan bisnis akibat *fraud* dengan para mitra bisnis. [GRI 205-3]

*Penyimpangan dengan nilai lebih dari Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah)

kebijakan remunerasi

BTPN Syariah memiliki Kebijakan Remunerasi yang bertujuan untuk memastikan pemberian remunerasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku, kinerja keuangan Bank, prestasi kerja individu, kewajaran dengan peer *group* dalam bank dan di industri perbankan serta kemampuan Bank. Kebijakan remunerasi di Bank dikaji ulang secara berkala, mencakup remunerasi tetap dan variabel. Kaji ulang ini mempertimbangkan terciptanya manajemen risiko yang efektif, stabilitas keuangan Bank, potensi pendapatan Bank di masa yang akan datang, dan kesesuaian dengan prinsip syariah.
Bank menganut prinsip meritocracy (berbasis prestasi/kinerja) dalam memberikan remunerasi kepada Direksi dan Karyawan, baik untuk remunerasi yang bersifat tetap maupun variabel. Dalam manajemen kinerja, setiap anggota Direksi dan Karyawan memiliki target individu sebagai dasar untuk menilai kinerja individu. Besarnya penyesuaian remunerasi berdasarkan penilaian kinerja individu; di mana manajemen memberikan panduan besaran penyesuaian remunerasi tetap maupun variabel sesuai dengan kinerja individunya. [GRI 2-19]

Penetapan remunerasi dan fasilitas lain bagi Organ Bank mengacu pada keputusan pemegang saham sebagaimana ditetapkan dalam RUPS dengan memperhatikan saran yang diberikan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi. Dalam menetapkan remunerasi masing-masing Dewan Komisaris, DPS dan Direksi, BTPN Syariah mempertimbangkan kinerja BTPN Syariah secara umum, evaluasi kinerja, kewajaran dengan peer *group* dalam bank dan di industri perbankan, dan kemampuan Perusahaan. Kinerja perusahaan yang merupakan salah satu faktor dalam penentuan remunerasi anggota Dewan Komisaris, DPS dan Direksi digambarkan sebagai berikut: [GRI 2-20]



BTPN Syariah memastikan dilakukannya penilaian yang wajar atas penetapan kebijakan remunerasi di Bank. Dalam bidang pengawasan, BTPN Syariah telah memiliki Komite Nominasi dan Remunerasi di level Dewan Komisaris yang bertugas memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris terhadap kebijakan nominasi dan remunerasi yang ditempuh Bank dan Komite Human Capital di level Direksi yang bertugas menetapkan kebijakan, strategi serta pelaksaanaan program remunerasi di Bank. Dalam pelaksanaan tugasnya, Komite dapat meminta pendapat profesional dan independen sehubungan *benchmarking* dengan *peer group* dalam pengembangan kebijakan di bidang SDM termasuk kebijakan remunerasi bagi Organ Bank dan Karyawan.

Bank menggunakan jasa konsultan eksternal untuk mendapatkan informasi data remunerasi tetap dan variabel untuk jabatan-jabatan tertentu dari beberapa bank yang setara tipe bisnis dan operasionalnya. Data tersebut didata oleh konsultan melalui survei remunerasi yang diikuti oleh beberapa bank.

Secara konsolidasi, Divisi Human Capital dapat berkoordinasi dengan Entitas Induk dalam menyelaraskan berbagai alternatif program remunerasi sebagai bahan pertimbangan Direksi dan Dewan Komisaris dalam pengambilan keputusan di Bank.



Pemberian Remunerasi Jangka Panjang di BTPN Syariah

BTPN Syariah memiliki program remunerasi untuk menjaga dan memotivasi Pengurus dan Talenta-Talenta terbaiknya sehingga terus berkontribusi secara optimal untuk kemajuan perusahaan. Program remunerasi bagi Dewan Komisaris, DPS, Direksi, dan Pegawai ini disusun dengan tetap mempertimbangkan terciptanya manajemen risiko yang efektif, stabilitas keuangan Bank, kecukupan dan penguatan permodalan Bank, kebutuhan likuiditas jangka pendek dan jangka panjang, potensi pendapatan Bank di masa yang akan datang, dan kesesuaian dengan prinsip Syariah.

BTPN Syariah telah memiliki Kebijakan Remunerasi sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 59/ POJK.03/2017 Tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (POJK 59).

Berpedoman kepada POJK 59 bahwa secara umum komponen remunerasi dibagi menjadi dua yaitu komponen remunerasi yang bersifat tetap dan bersifat variable.

Adapun penetapan komponen remunerasi yang bersifat tetap paling sedikit memperhatikan skala usaha, kompleksitas usaha, peer *group*, tingkat inflasi, kondisi dan kemampuan keuangan, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perbedaan remunerasi antar tingkat jabatan.

Sedangkan untuk komponen remunerasi yang bersifat Variabel, paling sedikit memperhatikan kinerja, skala usaha, kompleksitas usaha, tingkat remunerasi peer *group*, tingkat inflasi, kondisi dan kemampuan keuangan, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan serta mendorong dilakukannya *prudent risk taking*.

Rasio kompensasi total tahunan

BTPN Syariah telah memperhatikan ketentuan yang berlaku sehubungan pemberian remunerasi, baik yang bersifat tetap maupun variabel. Bank juga mengupayakan besaran remunerasi tetap kompetitif dan sesuai dengan strategi remunerasi Bank.

Berikut adalah rasio gaji tertinggi dan terendah di BTPN Syariah selama tahun 2022:

Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah [GRI 2-21]

Deskripsi	Rasio
Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah	88,1 %
Rasio gaji direksi yang tertinggi dan terendah	2,4 %
Rasio gaji komisaris yang tertinggi dan terendah	2,4 %
Rasio gaji direksi tertinggi dan pegawai tertinggi	2,6 %

hubungan dengan pemangku kepentingan [OJK E.4][GRI 2-29]

Keberlangsungan usaha dalam jangka panjang bergantung pada keberhasilan dalam membina hubungan yang harmonis dengan seluruh pemangku kepentingan. Berangkat dari keyakinan ini, BTPN Syariah mengidentifikasi dengan seksama grup pemangku kepentingan yang berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha serta berupaya memenuhi harapan masing-masing pemangku kepentingan sesuai dengan *resources* yang tersedia.

Para pemangku kepentingan tersebut adalah: Pemegang Saham dan Investor, Nasabah Pendanaan, Nasabah Pembiayaan dan /atau Komunitas, Pegawai, Mitra Kerja/Pemasok, Pemerintah/Regulator, DSN-MUI, serta Tokoh Masyarakat/Pejabat Setempat.

Berikut disampaikan tabel ringkasan pengelolaan hubungan dengan para pemangku kepentingan, sesuai hasil pemetaan dampak, pengaruh, dan identifikasi kelompok pemangku kepentingan yang dilakukan oleh BTPN Syariah posisi 31 Desember 2023.



Daftar Pemangku Kepentingan	Basis Penetapan/ Identifikasi	Topik/Masalah Yang Muncul	Metode Pelibatan & Frekuensi	Fungsi Manajemen Tata Kelola Tertinggi
Pemegang Saham dan Investor	Ketergantungan Pengaruh, dan Tanggung Jawab	Tata Kelola Perusahaan Pencapaian kinerja ekonomi	Menyediakan informasi pencapaian BTPN Syariah melalui RUPS, Laporan Keuangan Triwulan, Laporan Tahunan serta Laporan Keberlanjutan Paparan Publik dan Analyst Meeting Sesuai kebutuhan	• Sekretaris Perusahaan • Kepala Divisi Corporate Secretary & General Counsel • Kepala Divisi Financial Control & Analytics • Kepala Divisi Treasury & Financial Institution • Kepala Divisi Corporate & Marketing Communication
Nasabah Pendanaan	Ketergantungan Tanggung Jawab Pengaruh Kedekatan Geografis	Perlindungan nasabah Hubungan berkesinambungan	Penyediaan produk dan jasa sesuai peraturan yang berlaku Pemberian informasi produk dan jasa dengan tepat waktu, memadai, jelas dan akurat Pengembangan layanan berkualitas untuk kepuasan nasabah Iklan dan media promosi	• Sekretaris Perusahaan • Kepada Divisi pada Direktorat Operasional • Kepala Divisi DAYA • Kepala Divisi Corporate & Marketing Communication • Kepala Divisi Pembiayaan • Kepala Divisi Pembiayaan • Kepala Divisi Lini Bisnis
Nasabah Pembiayaan dan/ atau Komunitas	Ketergantungan Tanggung Jawab Pengaruh Kedekatan Geografis	Pendidikan dan budaya Teknologi dan akses infrastruktur Kesejahteraan dan pendapatan	Intensifikasi keterlibatan dalam kegiatan komunitas dengan program yang mencakup bidang: pendidikan, pemberdayaan, budaya dan agama, kemanusiaan serta lingkungan Pemberdayaan Pertemuan Wajib Pertemuan sesuai kebutuhan	• Sekretaris Perusahaan • Kepala Divisi Lini Bisnis • Kepala Divisi Human Capital • Kepala Divisi Teknologi Informasi • Kepala Divisi DAYA • Kepala Divisi Corporate & Marketing Communication



Daftar Pemangku Kepentingan	Basis Penetapan/ Identifikasi	Topik/Masalah Yang Muncul	Metode Pelibatan & Frekuensi	Fungsi Manajemen Tata Kelola Tertinggi
Pegawai	Ketergantungan Tanggung Jawab Perhatian Pengaruh	Hubungan ketenagakerjaan Perlindungan dan kondisi kerja Pengembangan kompetisi Pengembangan Karier dan aktualisasi diri	Pengelolaan secara objektif, transparan, adil dan setara Membangun lingkungan kerja kondusif demi optimalisasi produktivitas Pengembangan karier talent management system dan assessment center Pertemuan sesuai kebutuhan	• Kepala Divisi Human Capital
Mitra Kerja/Pemasok	Ketergantungan Tanggung Jawab Perbedaan Pendapat Pengaruh	Hubungan berkelanjutan Ekonomi Fairness	Syarat kerja sama yang jelas Penilaian kinerja yang transparan Penilaian rutin Pertemuan sesuai kebutuhan	• Kepala Divisi terkait pada Direktorat Operasional
Pemerintah / Regulator	Ketergantungan Tanggung Jawab Perbedaan Pendapat Pengaruh Kedekatan Geografis	Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan Komitmen terhadap regulasi perbankan Komunikasi dan pelaporan yang jelas, akurat, komprehensif dan tepat waktu	Kelengkapan dan Penyempurnaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) Implementasi prinsip GCG di seluruh unit kerja Pertemuan berkala untuk membahas tingkat kesehatan Bank Pelaporan rutin rencana bisnis/ kegiatan dan realisasinya Pertemuan sesuai dengan kebutuhan	• Sekretaris Perusahaan • Kepala Divisi Kepatuhan • Kepala Divisi Financial Control & Analytics • Kepala Divisi Corporate & Marketing Communication • Kepala Divisi Corporate Secretary & General Counsel • Kepala Divisi Manajemen Risiko • Kepala Cabang di Lini Bisnis
Tokoh Masyarakat/ Pejabat Setempat	Ketergantungan Tanggung Jawab Perbedaan Pendapat Pengaruh	Pengembangan usaha Peningkatan kesejahteraan Kesempatan Kerja Kemajuan daerah setempat	Kunjungan langsung Pertemuan Resmi Pertamuan berkala sesuai kebutuhan	• Sekretaris Perusahaan • Kepala Divisi DAYA • Kepala Divisi Corporate & Marketing Communication



Tantangan yang dihadapi, perkembangan dan pengaruh terhadap keuangan berkelanjutan [OJK E.5][GRI 2-22]

Pemulihan ekonomi yang belum merata sepanjang tahun 2023 masih berdampak kepada masyarakat inklusi yang merupakan nasabah BTPN Syariah dimana mereka membutuhkan waktu yang lebih lama untuk kembali pulih dan bangkit. Di saat yang bersamaan, masyarakat inklusi dihadapkan pada tantangan kurangnya akses terhadap layanan keuangan formal yang disebabkan letak geografis mereka yang berada di pedesaan, terpencil, dan tertinggal dengan tingkat literasi teknologi yang rendah.

Dalam kondisi penuh tantangan, BTPN Syariah tetap loyal memberdayakan, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan melalui operasional bisnis yang berjalan memenuhi prinsip-prinsip syariah. Lokasi cabang, sentra-sentra, dan Mitra Tepat Bank yang berada pada daerah pedesaan dan ketersediaan teknologi yang sejalan dengan kearifan masyarakat inklusi merupakan strategi BTPN Syariah dalam menghadapi tantangan, dengan menggabungkan kehadiran fisik dan kemampuan digital sebagaimana yang direncanakan dalam Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan.

Tingkat literasi keuangan dan literasi teknologi yang rendah pada masyarakat inklusi merupakan tantangan sekaligus peluang bagi BTPN Syariah, untuk terus bersemangat dalam loyal memberdayakan. BTPN Syariah menghadirkan Program Bestee yang memberikan akses pengetahuan sekaligus pendampingan bagi nasabah inklusi, kombinasi *offline* dan *online*, berkolaborasi dengan para pemangku kepentingan.

Adapun rencana BTPN Syariah kedepan dalam mengimplementasikan aksi keuangan berkelanjutan jangka panjang adalah berkomitmen menjalankan aktivitas usaha Bank dalam koridor keberlanjutan yang selaras dengan prinsip-prinsip syariah **dengan tetap loyal memberdayakan masyarakat inklusi sebagai suatu ekosistem berkelanjutan.**





II

Tentang Laporan

KEBERLANJUTAN

BTPN Syariah menerbitkan laporan keberlanjutan secara konsisten dan lengkap sebagai bagian dari komitmen akan keterbukaan informasi dan **#niatbaik** BTPN Syariah untuk loyal memberdayakan masyarakat inklusi, menegakkan tata kelola yang baik, dan menciptakan dampak sosial yang membanggakan demi tujuan keberlanjutan

Ruang Lingkup (Boundary) dan Periode Pelaporan

Komitmen BTPN Syrariah untuk menyampaikan informasi dalam bidang ekonomi, lingkungan dan sosial disampaikan melalui laporan keberlanjutan yang diterbitkan setiap tahun. Laporan ini adalah laporan keberlanjutan tahun ke-10 dari BTPN Syariah, yang memuat informasi dari 1 Januari 2023 hingga 31 Desember 2023 dan merupakan lanjutan dari Laporan Keberlanjutan 2022 yang diterbitkan pada bulan Februari 2022. [GRI 2-3]

Tidak terdapat pengungkapan kembali dari laporan sebelumnya. Menambah data dan memperluas area penghitungan Listrik dan Air yang dijelaskan lebih lanjut pada bab Loyalitas Berkelanjutan untuk Lingkungan. [GRI 2-4]

Data dan informasi yang dilaporkan mencakup kegiatan yang dilaksanakan oleh BTPN Syariah. Laporan keberlanjutan ini tidak termasuk anak perusahaan BTPN Syariah Ventura yang dilaporkan dalam laporan terpisah. [GRI 2-2]

Adapun data keuangan yang disajikan adalah mengacu kepada Laporan Keuangan (*Audited*) yang telah disusun berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Indonesia. Data kuantitatif dalam laporan ini, disajikan dengan menggunakan prinsip daya banding (*comparability*) dua hingga tiga tahun terakhir.

Standar Pelaporan dan Assurance

Laporan ini telah disusun sesuai dengan standar Global Reporting Initiative versi 2021 (GRI Standard 2021) dan standar sektor keuangan. Di samping itu sebagai perusahaan publik laporan ini juga mengacu pada kriteria Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 mengenai Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 16/SEOJK.04/2021 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.

Standar-standar tersebut yang diterapkan dalam laporan ini diberi tanda dengan penomoran di dalam kurung berwarna merah. Sedangkan daftar indeks GRI, FS, OJK disampaikan berturut-turut pada bagian Lampiran. [OJK G.4]

Pada penyusunan Laporan Tahun 2023 ini, BTPN Syariah belum memuat verifikasi tertulis dari Pihak Independen (*Assurance*). Di luar proses verifikasi, BTPN Syariah juga telah melakukan validasi terhadap seluruh data dan informasi kinerja keberlanjutan hingga mendapatkan persetujuan dari Direksi dan Dewan Komisaris sebelum dipublikasikan [GRI 2-5, GRI 2-14]

Penetapan Laporan dan Topik Materialitas [GRI 3-1] [GRI 3-2] [GRI 3-3]

BTPN Syariah menyusun laporan ini berpedoman pada prinsip pelaporan keberlanjutan GRI, yaitu:



Selanjutnya, prinsip-prinsip pelaporan keberlanjutan tersebut diimplementasikan ke dalam empat langkah penyusunan laporan keberlanjutan sesuai standar GRI, yaitu:

1. Identifikasi aspek-aspek yang material dan menetapkan boundary. Identifikasi aspek-aspek keberlanjutan (*sustainability context*) dipilih berdasarkan relevansinya dengan karakteristik industri perbankan dan pengaruhnya terhadap pemangku kepentingan.
2. Membuat prioritas atas aspek-aspek yang telah diidentifikasi pada langkah sebelumnya (Langkah Prioritas). Laporan ini menggunakan aspek dan isu yang material pada dua periode laporan berurutan, dengan mempertimbangkan bahwa prioritas aspek dan isu yang material tahun 2020 dan 2021 yang masih relevan dengan kondisi tahun 2022.
3. Validasi atas aspek-aspek material. Untuk memastikan prioritas informasi yang disampaikan dalam laporan ini, seluruh aspek material (*completeness*) mendapat validasi dari Gugus Tugas Berkelanjutan.
4. Melakukan kajian atas Laporan setelah diterbitkan guna meningkatkan kualitas Laporan tahun berikutnya (langkah kajian). Kajian ulang atas laporan ini akan dilakukan dengan memperhatikan masukan dari pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal (*stakeholder inclusiveness*).

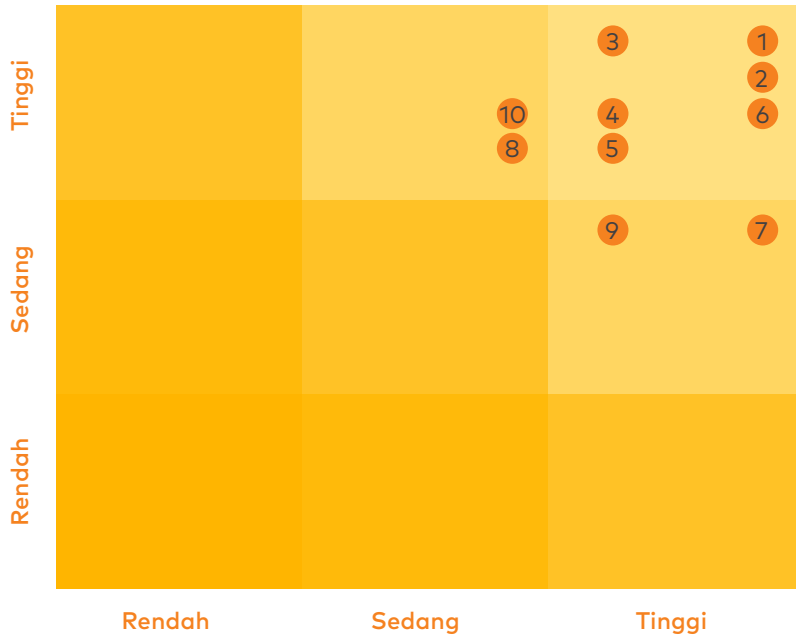


Keterlibatan pemangku kepentingan, baik internal Bank maupun eksternal, memiliki kontribusi sangat penting dalam proses penyusunan sebuah laporan keberlanjutan. Itu sebabnya dalam melakukan validasi dan kajian laporan ini, kami sangat memperhatikan berbagai masukan dari para pemangku kepentingan lainnya, yang disampaikan dalam berbagai aktivitas, khususnya yang melibatkan kelompok spesifik melalui masukan yang diterima dari forum Rapat Umum Pemegang Saham, pertemuan para analis, pertemuan dengan awak media, melalui lembar umpan balik, dan lain sebagainya.

Langkah-langkah ini dilakukan untuk memastikan bahwa isi laporan ini seimbang sesuai dengan prinsip keberimbangan, termasuk informasi atau kinerja yang positif dan negatif, dalam laporan keberlanjutan sesuai standar GRI.

Pada tahun 2021, kami melakukan diskusi secara intensif yang melibatkan ahli guna mempertimbangkan ulang topik-topik material yang kami anggap relevan, sesuai dengan kebutuhan pemangku kepentingan dan kami gunakan kembali pada hingga tahun 2023 ini sehingga kegiatan dapat berkelanjutan dan memiliki dampak yang lebih baik. Secara rutin kami memantau dampak yang timbul dari kegiatan Perusahaan yang berdampak terhadap ekonomi, lingkungan dan sosial.

Daftar topik material berikut indeks *disclosure* yang relevan, lengkap dengan *boundary* pelaporan, disajikan dalam matriks dan tabel materialitas sebagai berikut:



1. Kinerja Ekonomi
2. Kemudahan Akses Perbankan
3. Fasilitas Perbankan bagi Masyarakat
4. Pemberdaya Masyarakat
5. Kejelasan Informasi
6. Pembiayaan sector UKM
7. Pendidikan dan Pelatihan
8. Kepegawaian/ Ketenagakerjaan
9. Keberagaman dan Penghormatan
10. Efisiensi Air

Signifikansi Dampak Ekonomi, Lingkungan Dan Sosial

Terdapat 10 kelompok topik material yang memenuhi kriteria dampak paling material terhadap kinerja keberlanjutan di BTPN Syariah. Bank juga telah melaporkan *disclosure* dari topik material yang dipilih sebagaimana tertuang dalam tabel berikut ini:

Aspek	Topik Material	Alasan Material	Wilayah Terdampak: Internal	Wilayah Terdampak: Eksternal
Ekonomi	Kinerja Keuangan [GRI 201]	Berdampak signifikan pada pemangku kepentingan	x	
	Pembiayaan Sektor UMKM [GRI 201]	Berdampak signifikan pada pemangku kepentingan	x	x
	Fasilitas Perbankan bagi Masyarakat [GRI 203]	Berdampak signifikan pada pemangku kepentingan	x	x
Lingkungan	Efisiensi Air [GRI GRI 303]	Berdampak signifikan pada pemangku Kepentingan	x	x
Sosial	Kejelasan Informasi [GRI 417]	Berdampak signifikan pada pemangku kepentingan	x	
	Kemudahan Akses Perbankan [GRI 413]	Berdampak signifikan pada pemangku kepentingan	x	x
	Pelatihan dan Pendidikan [GRI 404]	Berdampak signifikan pada pemangku kepentingan	x	
	Keberagaman dan Penghormatan [GRI 405]	Berdampak signifikan pada pemangku kepentingan	x	
	Pemberdayaan Masyarakat [GRI 413]	Berdampak signifikan pada pemangku kepentingan	x	x
	Ketenagakerjaan [GRI 401]	Berdampak signifikan pada pemangku kepentingan	x	

Kontak [GRI 2-3]

Untuk informasi lebih lanjut atau apabila terdapat pertanyaan tentang Laporan ini, silakan menghubungi:
Corporate & Marketing Communication Division

PT Bank BTPN Syariah Tbk
Menara BTPN Lantai 12, CBD Mega Kuningan Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung, Kav. 5.5-5.6 Jakarta Selatan-12950 - Indonesia
Tel. : 021 - 300 26 400
Fax. : 021 - 255 67 190 (general)

Situs Web:
www.btpnsyariah.com

Email:
corsec@btpnsyariah.com corporatecommunications@btpnsyariah.com investorrelation@btpnsyariah.com

Instagram:
@btpnsyariah www.instagram.com/btpnsyariah/ @saya.bankirpemberdaya www.instagram.com/saya.bankirpemberdaya/

Facebook:
@btpnsyariah.id www.facebook.com/btpnsyariah.id

YouTube:
@BTPN Syariah www.youtube.com/BTPNSyariah

LinkedIn:
BTPN Syariah www.linkedin.com/company/btpnsyariah

Tiktok:
www.tiktok.com/@btpnsyariah



Indeks POJK NO.51/POJK.03/2017 (OJK G.4)

No.	Nama Indeks	Halaman
A. Strategi Keberlanjutan		
A.1	Penjelasan Strategi Keberlanjutan	35
B. Ikhtisar Kinerja Aspek Keberlanjutan		
B.1	Aspek Ekonomi	12
B.2	Aspek Lingkungan Hidup	12
B.3	Aspek Sosial	13
C. Profil Perusahaan		
C.1	Visi, Misi dan Nilai Keberlanjutan	23, 46
C.2	Alamat Perusahaan	50
C.3	Skala Usaha	
	a. Total aset atau kapitalisasi aset dan total kewajiban	56
	b. Jumlah karyawan menurut jenis kelamin, jabatan, usia, pendidikan, dan status ketenagakerjaan	111, 112
	c. Nama pemegang saham dan persentase kepemilikan saham; dan	50
	d. Wilayah Operasional	50, 56
C.4	Produk, Layanan, dan Kegiatan Usaha yang Dijalankan	50, 54
C.5	Keanggotaan pada Asosiasi	58
C.6	Perubahan Emiten dan Perusahaan Publik yang Bersifat Signifikan	57
D. Penjelasan Direksi		
D.1	Penjelasan Direksi	
	a. Kebijakan untuk merespon tantangan dalam pemenuhan strategi keberlanjutan	23
	b. Penerapan Keuangan Berkelanjutan	24
	c. Strategi pencapaian target	23
E. Tata Kelola Keberlanjutan		
E.1	Penanggung Jawab Penerapan Keuangan Berkelanjutan	140
E.2	Pengembangan Kompetensi Terkait Keuangan Berkelanjutan	114
E.3	Penilaian Risiko Atas Penerapan Keuangan Berkelanjutan	166
E.4	Hubungan Dengan Pemangku Kepentingan	172
E.5	Permasalahan Terhadap Penerapan Keuangan Berkelanjutan	27, 175
F. Kinerja Keberlanjutan		
F.1	Kegiatan Membangun Budaya Keberlanjutan Kinerja Ekonomi	108
F.2	Perbandingan Target dan Kinerja Produksi, Portofolio, Target Pembiayaan, atau Investasi, Pendapatan dan Laba Rugi	88
F.3	Perbandingan Target dan Kinerja Portofolio, Target Pembiayaan, atau Investasi pada Instrumen Keuangan atau Proyek yang Sejalan dengan Keuangan Berkelanjutan	92
	Kinerja Lingkungan Hidup	
	Aspek Umum	
F.4	Biaya Lingkungan Hidup	-
	Aspek Material	

No.	Nama Indeks	Halaman
	F.5 Penggunaan Material yang Ramah Lingkungan	124
	Aspek Energi	
	F.6 Jumlah dan Intensitas Energi yang Digunakan	125
	F.7 Upaya dan Pencapaian Efisiensi Energi dan Penggunaan Energi Terbarukan	124
	Aspek Air	
	F.8 Penggunaan Air	125
	Aspek Keanekaragaman Hayati	
	F.10 Usaha Konservasi Keanekaragaman Hayati	-
	Aspek Emisi	
	F.11 Jumlah dan Intensitas Emisi yang Dihasilkan Berdasarkan Jenisnya	125
	F.12 Upaya dan Pencapaian Pengurangan Emisi yand Dilakukan	124
	Aspek Pengaduan Terkait Lingkungan Hidup	
	F.16 Jumlah dan Materi Pengaduan Lingkungan Hidup yang Diterima dan Diselesaikan	124
	Kinerja Sosial	
	F.17 Komitmen untuk Memberikan Layanan atas Produk dan/atau Jasa yang Setara kepada Konsumen	97
	Aspek Ketenagakerjaan	
	F.18 Kesetaraan Kesempatan Bekerja	109
	F.19 Tenaga Kerja Anak dan Tenaga Kerja Paksa	109, 116
	F.20 Upah minimum Regional	115
	F.21 Lingkungan Bekerja yang Layak dan Aman	109
	F.22 Pelatihan dan Pengembangan Kemampuan Pegawai	112, 114
	Aspek Masyarakat	
	F.23 Dampak Operasi Terhadap Masyarakat Sekitar	63
	F.24 Pengaduan Masyarakat	102
	F.25 Kegiatan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL)	63, 69
	Tanggung Jawab Pengembangan Produk/Jasa Berkelanjutan	
	F.26 Inovasi dan Pengembangan Produk/Jasa Keuangan Berkelanjutan	100
	F.27 Produk/Jasa yang Sudah Dievaluasi Kemanannya bagi Pelanggan	168
	F.28 Dampak Produk/Jasa	103, 168
	F.29 Jumlah Produk yang Ditarik Kembali	102
	F.30 *Survey* Kepuasan Pelanggan Terhadap Produk dan/atau Jasa Keuangan	-
	Berkelanjutan	
G. Lain - lain:		
	G.2 Lembar Umpan Balik	190
	G.4 Daftar Pengungkapan Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/ POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik.	282



Indeks Standar GRI [GRI 102-55]

Standar	GRI	Pengungkapan	Lokasi	Tidak Mencantumkan			No.Ref. Standar Sektor GRI
				Persyaratan Tidak Mencantumkan	Alasan	Penjelasan	
Pengungkapan Umum							
GRI 2: Pengungkapan	2-1	Detail Organisasi	50				
	2-2	Entitas yang termasuk dalam pelaporan keberlanjutan	178				
	2-3	Periode pelaporan, frekuensi, dan titik kontak	50, 178, 181				
	2-4	Penyajian kembali informasi	178				
	2-5	Penjaminan oleh pihak eksternal	178				
	2-6	Aktivitas, rantai nilai, dan hubungan bisnis lainnya	50, 54, 56, 57				
	2-7	Karyawan	56, 111, 112, 118, 119				
	2-8	Pekerja yang bukan karyawan	111				
	2-9	Struktur tata kelola dan komposisi	138, 142, 153				
	2-10	Menominasikan dan memilih badan tata kelola tertinggi	142, 149, 162				
	2-11	Pejabat badan kelola tertinggi	140				
	2-12	Peran badan tata kelola tertinggi dalam mengawasi pengelolaan dampak	135, 141				
	2-13	Pendelegasian tanggung jawab untuk mengelola dampak	140, 155				
	2-14	Peran badan tata kelola tertinggi dalam pelaporan keberlanjutan	32, 178				
	2-15	Konflik kepentingan	143, 162				
	2-16	Mengkomunikasikan hal-hal kritis	141				
	2-17	Pengetahuan kolektif badan tata kelola tertinggi	164				

Standar	GRI	Pengungkapan	Lokasi	Tidak Mencantumkan			No.Ref. Standar Sektor GRI
				Persyaratan Tidak Mencantumkan	Alasan	Penjelasan	
	2-18	Evaluasi kinerja badan tata kelola tertinggi	163				
	2-19	Kebijakan remunerasi	171				
	2-20	Proses untuk menentukan remunerasi	171				
	2-21	Rasio kompensasi total tahunan	172				
	2-22	Pernyataan tentang strategi pembangunan berkelanjutan	36, 46, 87, 88, 175				
	2-23	Komitmen kebijakan	59, 63, 90, 97, 106, 124, 137				
	2-24	Menanamkan komitmen kebijakan	63, 90, 97, 106, 124, 137, 167				
	2-25	Proses untuk memulihkan dampak negatif	63, 90, 97, 101, 106, 124, 167				
	2-26	Mekanisme untuk mendapatkan saran dan meningkatkan isu	50, 170				
	2-27	Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan	59, 110, 143, 165				
	2-28	Keanggotaan asosiasi	58				
	2-29	Pendeketan keterlibatan pemangku kepentingan	172				
	2-30	Perjanjian perundingan kolektif	-				
Topik Material							
GRI 3: Topik Material 2021	3-1	Proses untuk menentukan topik material	178				
	3-2	Daftar topik material	178				
Kinerja Ekonomi							
GRI3: Topik Material 2021	3-3	Pengelolaan terhadap topik material	178				



Standar GRI		Pengungkapan	Lokasi	Tidak Mencantumkan			No.Ref. Standar Sektor GRI
				Persyaratan Tidak Mencantumkan	Alasan	Penjelasan	
GRI 201: Kinerja Ekonomi 2016	201-1	Nilai ekonomi langsung yang dihasilkan dan didistribusikan	92				
Dampak Ekonomi Tidak Langsung							
GRI3: Topik Material 2021	3-3	Pengelolaan terhadap topik material	178				
GRI 203: Dampak Ekonomi Tidak Langsung 2016	203-1	Investasi infrastruktur dan dukungan layanan	71				
	203-2	Dampak ekonomi tidak langsung yang signifikan	74				
Anti Korupsi							
GRI 205: Anti Korupsi 2016	205-2	Komunikasi dan Pelatihan Anti Korupsi	169				
	205-3	Kasus Korupsi dan Penindakan Kasus Korupsi	170				
Energi							
GRI 302: Energi 2016	302-1	Konsumsi Energi Organisasi	124				
Air							
GRI3: Topik Material 2021	3-3	Pengelolaan terhadap topik material	178				
	303-3	Pengambilan Air	125				
GRI 303: Air dan Efluen 2018	303-5	Konsumsi Air	125				
Limbah							
GRI 306: Limbah 2020	306-1	Timbulan limbah dan dampak signifikan terkait limbah	125				
	306-2	Manajemen dampak signifikan terkait limbah	125				
	306-3	Timbulan limbah	126				
Kepatuhan Lingkungan							
GRI 307:Kepatuhan Lingkungan 2016	307-1	Jumlah Insiden Ketidakpatuhan terhadap Peraturan/ Undang-Undang di Bidang Lingkungan	124				
Kepegawaian							
GRI3: Topik Material 2021	3-3	Pengelolaan terhadap topik material	178				

Standar GRI		Pengungkapan	Lokasi	Tidak Mencantumkan			No.Ref. Standar Sektor GRI
				Persyaratan Tidak Mencantumkan	Alasan	Penjelasan	
GRI 401: Kepegawaian 2016	401-1	Perekrutan Karyawan Baru dan Pergantian Karyawan	118, 119				
	401-2	Tunjangan yang diberikan kepada karyawan purnawaktu yang tidak diberikan kepada karyawan paruh waktu	115				
Hubungan Tenaga Kerja							
GRI 402: Hubungan Tenaga Kerja/Manajemen 2016	402-1	Periode pemberitahuan minimum terkait perubahan operasional	118				
Kesehatan dan Keselamatan Kerja							
GRI 403: Kesehatan dan Keselamatan Kerja 2018	403-1	Sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja	109				
	403-5	Pelatihan pekerja mengenai kesehatan dan keselamatan kerja	109				
Pendidikan dan Pelatihan							
GRI3: Topik Material 2021	3-3	Pengelolaan terhadap topik material	178				
GRI 404:Pelatihan dan Pendidikan 2016	404-1	Rata-rata jam pelatihan per tahun per karyawan	113, 114				
	404-2	Program untuk meningkatkan keterampilan karyawan dan program bantuan peralihan	112, 114, 116				
	404-3	Persentase karyawan yang menerima tinjauan rutin terhadap kinerja dan pengembangan karier	115				
Keanekaragaman dan Kesempatan Setara							
GRI3: Topik Material 2021	3-3	Pengelolaan terhadap topik material	178				
GRI 405: Keanekaragaman dan Kesempatan Setara 2016	405-1	Keanekaragaman Badan Tata Kelola dan Karyawan	111, 112, 143, 147				



Standar GRI		Pengungkapan	Lokasi	Tidak Mencantumkan			No.Ref. Standar Sektor GRI
				Persyaratan Tidak Mencantumkan	Alasan	Penjelasan	
Non-Diskriminasi							
GRI 406: Non Diskriminasi 2016	406-1	Insiden diskriminasi dan tindakan perbaikan yang dilakukan	109, 110				
Pekerja Anak							
GRI 408: Pekerja anak 2016	408-1	Operasi dan pemasok yang berisiko signifikan terhadap insiden pekerja anak	109				
Kerja Paksa							
GRI 409: Kerja Paksa dan Wajib Kerja 2016	409-1	Operasi dan pemasok yang berisiko signifikan terhadap insiden kerja paksa atau wajib kerja	116				
Masyarakat Lokal							
GRI3: Topik Material 2021	3-3	Pengelolaan terhadap topik material	178				
GRI 413: Masyarakat Lokal 2016	413-1	Operasi dengan Keterlibatan Masyarakat Lokal, Penilaian Dampak dan Program Pengembangan Komunitas	75, 80, 107, 108, 112, 115				
Pemasaran dan Pelabelan Produk							
GRI3: Topik Material 2021	3-3	Pengelolaan terhadap topik material	178				
GRI 417:Pemasaran dan Pelabelan 2016	417-1	Persyaratan untuk pelabelan dan informasi produk dan jasa	98				
	417-2	Insiden ketidakpatuhan terkait informasi dan pelabelan produk dan jasa	98, 102, 106				
	417-3	Insiden ketidakpatuhan terkait komunikasi pemasaran	97, 102				
Kerahasiaan Nasabah/ Pelanggan							
GRI 418: Privasi Pelanggan 2016	418-1	Pengaduan yang berdasar mengenai pelanggaran terhadap privasi pelanggan dan hilangnya data pelanggan	102				

Standar GRI		Pengungkapan	Lokasi	Tidak Mencantumkan			No.Ref. Standar Sektor GRI
				Persyaratan Tidak Mencantumkan	Alasan	Penjelasan	
Pengungkapan Sektor							
GRI G4 Jasa Keuangan			Portofolio Produk				
	FS1	Kebijakan Khusus Penerapan Aspek Lingkungan dan Sosial dalam Kegiatan Usaha	35				
	FS2	Prosedur Penilaian Risiko Lingkungan dan Sosial dalam Kegiatan Usaha	35, 91, 98, 104, 166				
	FS4	Proses Peningkatan Kompetensi Karyawan untuk Menerapkan Aturan/ Perundangan Terkait Sosial dan Lingkungan yang Berlaku	114				
	FS6	Persentase Portofolio Bisnis Dibagi Menurut Wilayah, Ukuran (Misal: Mikro/ SME/Besar) dan Sektor	90, 92				
	Audit						
	FS9	Cakupan dan Frekuensi Audit untuk Menilai Pelaksanaan Kebijakan Lingkungan dan Sosial serta Prosedur Penilaian Risiko	91				
	Komunitas Lokal						
	FS13	Poin Akses Di Wilayah Rendah-Populasi atau Secara Ekonomi yang tidak Ditanggung Berdasarkan Tipe	61, 66, 100				
	FS14	Akses Jasa Keuangan untuk Golongan Marginal dan Tertinggal	61, 66, 100				
	FS15	Kebijakan dalam Memastikan Adilnya Produk dan Jasa Layanan yang Diluncurkan	97				
	FS16	Inisiatif untuk Mengadakan dan Mendukung Kegiatan Literasi Keuangan atau Pembiayaan Khusus	90				



Lembar UMPAN BALIK [OJK G.2]

Profil Anda

Nama (bila berkenan) :
Nama Lembaga/Perusahaan :

Golongan Pemangku kepentingan:

- ☐ Nasabah dan Klien
- ☐ Pemegang saham Shareholders
- ☐ Pemerintah Regulator
- ☐ Karyawan Employees
- ☐ Mitra kerja Business Partners
- ☐ Media Massa Mass Media
- ☐ Komunitas Masyarakat
- ☐ lain-lain, mohon sebutkan: .....

Mohon pilih jawaban yang paling sesuai:

1. Laporan ini sudah menggambarkan aspek keberlanjutan bagi Perusahaan
   a. Sangat Setuju
   b. Setuju
   c. Netral
   d. Tidak Setuju
   e. Sangat Tidak Setuju

2. Laporan ini sudah menggambarkan informasi positif dan informasi negatif Perusahaan
   f. Sangat Setuju
   g. Setuju
   h. Netral
   i. Tidak Setuju
   j. Sangat Tidak Setuju

3. Laporan ini sudah memenuhi kebutuhan informasi bagi Anda
   k. Sangat Setuju
   l. Setuju
   m. Netral
   n. Tidak Setuju
   o. Sangat Tidak Setuju

4. Laporan ini mudah dimengerti
   p. Sangat Setuju
   q. Setuju
   r. Netral
   s. Tidak Setuju
   t. Sangat Tidak Setuju

5. Laporan ini menarik
   u. Sangat Setuju
   v. Setuju
   w. Netral
   x. Tidak Setuju
   y. Sangat Tidak Setuju

6. Mohon berikan saran/usul/komentar Anda atas laporan ini: .....
   .....
   .....
   .....

7. Mohon berikan saran/usul untuk laporan masa yang akan datang: .....
   .....
   .....
   .....

Terima Kasih. Kami menghargai setiap pendapat dan saran yang telah disampaikan. Umpan balik ini sangat berguna untuk meningkatkan kinerja keberlanjutan dan kualitas pelaporan kami dimasa yang akan datang. Mohon agar formulir ini dikirimkan kembali ke:

Corporate & Marketing Communication Division
PT Bank BTPN Syariah Tbk
Menara BTPN Lantai 12, CBD Mega Kuningan
Jl.Dr.Ide Anak Agung Gde Agung, Kav 5.5-5.6
Jakarta Selatan – 12950 – Indonesia

Telepon : 021 - 300 26 400
Faksimili : 021 - 255 67 190
Website : www.btpnsyariah.com
e-mail :
corsec@btpnsyariah.com
corporatecommunications@btpnsyariah.com
investorrelation@btpnsyariah.com



PT Bank BTPN Syariah Tbk
Menara BTPN, Lt. 12, CBD Mega Kuningan
Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5 - 5.6
Jakarta Selatan 12950

021 - 300 26 400
021 - 255 67 190
www.btpnsyariah.com